



KOTA BONTANG
2021



RPJMD KOTA BONTANG **TAHUN 2021-2026**



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021-
2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Wali Kota.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

BAB IX : Penutup.

(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:

- a. bencana alam;

- b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Oktober 2021
WALI KOTA BONTANG,


BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/63/3/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD dan RKPD.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang pada Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, perubahan RPJMD serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Prinsip RPJMD meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Daerah Tahun 2022-2026;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2022-2026;
- c. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, termasuk dalam menentukan program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan

- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 57

DAFTAR ISI

BAB I_PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	8
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II_GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	14
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi.....	14
2.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah	14
2.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	23
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah	26
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana	28
2.1.5 Aspek Demografi	38
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	43
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	43
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	56
2.3 Aspek Pelayanan Umum	66
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	66
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	83
2.3.3 Fokus Urusan Pilihan	97
2.3.4 Fokus Urusan Penunjang.....	101
2.3.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	113
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	125
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	125
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	127
2.4.3 Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi	134
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	135
2.5 Capaian Kinerja Indikator RPJMD 2016-2021	138
BAB III_GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	143
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	144
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	146
3.1.2 Neraca	161
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	170
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	171
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah	172
3.3 Kerangka Pendanaan.....	177
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	177
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	190
BAB IV_PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	195
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	195
4.1.1 Permasalahan Sumber Daya Manusia	196
4.1.2 Permasalahan Tata Pemerintahan	202
4.1.3 Permasalahan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Prasarana Dasar.....	204
4.1.4 Permasalahan Perekonomian	212
4.2. Isu Strategis Daerah	216
4.2.1 Isu International	216
4.2.2 Isu Nasional	217
4.2.3 Isu Regional	224
4.2.4 Isu Lokal.....	228
4.2.5 Penetapan Isu Strategis Kota Bontang.....	249

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 264

5.1. Visi 265

5.2. Misi..... 268

5.3. Tujuan dan Sasaran..... 272

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 284

6.1 Strategi Pembangunan Daerah 284

6.2 Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah 288

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan 291

6.4. Program Unggulan Kepala Daerah 302

6.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah 307

BAB VII KERANGKA PENDANAAN 324

BAB VIIIKINERJA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH 344

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah 344

8.1.1 Indikator Makro pembangunan 344

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 344

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 345

BAB IX PENUTUP 358

9.1 Pedoman Transisi 358

9.2 Kaidah Pelaksanaan 359

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD 3

Tabel 2. 1 Jumlah RT dan luas kelurahan 15

Tabel 2. 2 Luasan penggunaan lahan tahun 2019 22

Tabel 2. 3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Bontang 23

Tabel 2. 4 Jumlah Kejadian Bencana Kota Bontang Tahun 2017-2020..... 29

Tabel 2. 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 39

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Bontang Menurut Kelompok Umur 41

Tabel 2. 7 Komposisi Penduduk Kota Bontang..... 41

Tabel 2. 8 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2016-2020..... 46

Tabel 2. 9 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)..... 47

Tabel 2. 10 Nilai PDRB per kapita Kota Bontang 2016-2020 49

Tabel 2. 11 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten /Kota Kalimantan Timur 50

Tabel 2. 12 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2016-2020 54

Tabel 2. 13 Perbandingan Persentase penduduk miskin Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota 55

Tabel 2. 14 Indikator Kriminalitas Kota Bontang tahun 2016 – 2020..... 56

Tabel 2. 15 Komponen IPM Kota Bontang tahun 2016 – 2020..... 58

Tabel 2. 16 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Kota Bontang Tahun 2016-2020 65

Tabel 2. 17 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan tahun 2016-2020 66

Tabel 2. 18 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan 68

Tabel 2. 19 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2017-2020 71

Tabel 2. 20 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan 71

Tabel 2. 21 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 75

Tabel 2. 22 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76

Tabel 2. 23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020..... 77

Tabel 2. 24 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 77

Tabel 2. 25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020 78

Tabel 2. 26 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 80

Tabel 2. 27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Tahun 2016-2020 82

Tabel 2. 28 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial 82

Tabel 2. 29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020 84

Tabel 2. 30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 84

Tabel 2. 31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Tahun 2016-2020..... 85

Tabel 2. 32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Tahun 2016-2020 85

Tabel 2. 33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup 87

Tabel 2. 34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 89

Tabel 2. 35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020..... 90

Tabel 2. 36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 91

Tabel 2. 37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020..... 92

Tabel 2. 38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020..... 93

Tabel 2. 39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020..... 93

Tabel 2. 40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2020.....	94
Tabel 2. 41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016-2018.....	94
Tabel 2. 42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Tahun 2016-2020 ...	95
Tabel 2. 43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Persandian Tahun 2016-2020.....	95
Tabel 2. 44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020.....	96
Tabel 2. 45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020.....	96
Tabel 2. 46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Tahun 2016-2020.	97
Tabel 2. 47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020.....	98
Tabel 2. 48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020	98
Tabel 2. 49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2016-2020 .	99
Tabel 2. 50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020.....	100
Tabel 2. 51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020.....	101
Tabel 2. 52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020.....	101
Tabel 2. 53 Nilai SAKIP Kota Bontang 2015-2020	102
Tabel 2. 54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2016-2020	105
Tabel 2. 55 Jumlah PNS di Kota Bontang Tahun 2016-2021	106
Tabel 2. 56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020	106
Tabel 2. 57 Indeks Profesionalitas ASN Kota Bontang Tahun 2020	106
Tabel 2. 58 Rekapitulasi Dimensi Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN.....	106
Tabel 2. 59 Rekapitulasi Pemenuhan Diklat Teknis Bagi PNS Tahun 2020	107
Tabel 2. 60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020	108
Tabel 2. 61 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020.....	110
Tabel 2. 62 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bontang 2017-2020.....	111
Tabel 2. 63 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2018-2019	111
Tabel 2. 64 Aplikasi Daerah di Kota Bontang.....	112
Tabel 2. 65 Tabel Kebutuhan SDM APIP Kota Bontang	113
Tabel 2. 66 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang 2016-2021 serta Relevansinya dengan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	115
Tabel 2. 67 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Sosial, Kota Bontang.....	117
Tabel 2. 68 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Ekonomi, Kota Bontang.....	120
Tabel 2. 69 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Lingkungan, Kota Bontang.....	122
Tabel 2. 70 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Kota Bontang	124
Tabel 2. 71 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Per Kapita	126
Tabel 2. 72 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita.....	126
Tabel 2. 73 Luas banjir/tergenang	128
Tabel 2. 74 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Jaringan Sambungan Rumah Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM	131
Tabel 2. 75 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler (HP)	132

Tabel 2. 76	Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi di Kota Bontang 2020.....	132
Tabel 2. 77	Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	132
Tabel 2. 78	Perkembangan Jumlah Obyek Wisata di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020.....	133
Tabel 2. 79	Perkembangan Jumlah Industri	133
Tabel 2. 80	Perkembangan Jumlah Pasar	134
Tabel 2. 81	Perkembangan Lama Proses Ijin di Kota Bontang Tahun 2016–2020	135
Tabel 2. 82	Perkembangan Pajak dan Retribusi di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020	135
Tabel 2. 83	Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2015-2020.....	136
Tabel 2. 84	Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2015 – 2020	137
Tabel 2. 85	Perkembangan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	138
Tabel 2. 86	Misi I Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	139
Tabel 2. 87	Misi II Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup	140
Tabel 2. 88	Misi III Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritime	141
Tabel 3. 1	Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2020	146
Tabel 3. 2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020.....	147
Tabel 3. 3	Peran PAD dalam Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020.....	148
Tabel 3. 4	Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020	149
Tabel 3. 5	Kontribusi Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah.....	151
Tabel 3. 6	Kontribusi Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah	151
Tabel 3. 7	Kontribusi DID, Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi terhadap Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	152
Tabel 3. 8	Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	153
Tabel 3. 9	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016 - 2020.....	153
Tabel 3. 10	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020	155
Tabel 3. 11	Kinerja Belanja Daerah Kota Bontang selama.....	155
Tabel 3. 12	Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2020	157
Tabel 3. 13	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 s.d 2020	159
Tabel 3. 14	Perkembangan Neraca Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	163
Tabel 3. 15	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Bontang.....	168
Tabel 3. 16	Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020	171
Tabel 3. 17	Realisasi Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020.....	174
Tabel 3. 18	Komponen Realisasi SiLPA Tahun 2016-2020	176
Tabel 3. 19	Perkiraan dan Proyeksi APBN Tahun 2019-2024 (Persen PDB).....	178
Tabel 3. 20	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026	182
Tabel 3. 21	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026.....	185
Tabel 3. 22	Proyeksi Kebutuhan Belanja Wajib Mengikat 2022-2026.....	187
Tabel 3. 23	Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2026	188
Tabel 3. 24	Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2026	189
Tabel 3. 25	Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2026	190
Tabel 3. 26	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.....	191
Tabel 3. 27	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daera .	194
Tabel 4. 1	Rumusan Permasalahan Sumber Daya Manusia	201
Tabel 4. 2	Rumusan Permasalahan Tata Pemerintahan	204

Tabel 4. 3	Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Prasarana Dasar.....	212
Tabel 4. 4	Rumusan Permasalahan Perekonomian.....	215
Tabel 4. 5	Identifikasi Kebijakan Nasional Tahun 2020-2024	222
Tabel 4. 6	Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.....	222
Tabel 4. 7	Identifikasi Dampak Pemindahan IKN.....	224
Tabel 4. 8	Strategi dan Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023	225
Tabel 4. 9	Identifikasi Kebijakan Provinsi Tahun 2019 - 2023	226
Tabel 4. 10	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.....	227
Tabel 4.11	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur	228
Tabel 4.12	Hasil Telaah RPJPD Periode 2020 - 2025.....	229
Tabel 4.13	Telaah Program RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039.....	234
Tabel 4.14	Isu Strategis TPB Kota Bontang.....	239
Tabel 4.15	Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Bontang	240
Tabel 4.16	Kriteria dan Bobot Identifikasi Isu Strategis.....	249
Tabel 4.17	Hasil Identifikasi Isu Strategis.....	250
Tabel 4.18	Hasil Analisis Isu Strategis.....	253
Tabel 5. 1	Keselarasan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).....	279
Tabel 5. 2	Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026	281
Tabel 5. 3	Tujuan dan Sasaran Misi II RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026	282
Tabel 5. 4	Tujuan dan Sasaran Misi III RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026	283
Tabel 6. 1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kota Bontang	284
Tabel 6. 2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2021-2026.....	289
Tabel 6. 3	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Bontang.....	293
Tabel 6. 4	Tabel Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2021-2026	304
Tabel 6. 5	Program Pembangunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di dalam RPJMD Tahun 2021-2026.....	308
Tabel 6. 6	Program Prioritas Pembangunan Daerah	311
Tabel 7. 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	325
Tabel 7. 2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	326
Tabel 8. 1	Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021- 2026.....	344
Tabel 8. 2	Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bontang.....	345
Tabel 8. 3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2022-2026	345

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026	2
Gambar 1. 2 Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	10
Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang	14
Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang.....	16
Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang	17
Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kota Bontang.....	17
Gambar 2. 5 Peta Geologi Kota Bontang	19
Gambar 2. 6 Peta DAS Kota Bontang	21
Gambar 2. 7 Peta Penggunaan lahan tahun 2019.....	23
Gambar 2. 8 Peta Lokasi dan Pengembangan Pariwisata Kota Bontang	27
Gambar 2. 9 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kalimantan Timur.....	28
Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Angin Puting Beliung	30
Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Banjir.....	32
Gambar 2. 12 Peta Resiko Bencana Epidemii Penyakit	33
Gambar 2. 13 Infografis COVID-19 di Kota Bontang	33
Gambar 2. 14 Peta Resiko Bencana Gempa bumi	35
Gambar 2. 15 BMKG ShakeMap 2018	35
Gambar 2. 16 Peta Resiko Bencana Longsor	36
Gambar 2. 17 Zona Konservasi Air Tanah.....	38
Gambar 2. 18 Sebaran Penduduk Kota Bontang.....	39
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	40
Gambar 2. 20 Piramida Penduduk Kota Bontang Tahun 2020.....	42
Gambar 2. 21 Perkembangan Penduduk Kota Bontang Tahun 2020.....	43
Gambar 2. 22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2016-2020.	45
Gambar 2. 23 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2020	45
Gambar 2. 24 Rasio Gini Kota Bontang Tahun 2015 – 2020	51
Gambar 2. 25 Perbandingan Rasio Gini Kota Bontang tahun 2020 dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota	52
Gambar 2. 26 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda	53
Gambar 2. 27 Persentase Pronangkis dalam APBD Kota Bontang Tahun 2015 - 2020.....	55
Gambar 2. 28 Perbandingan IPM Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.....	58
Gambar 2. 29 Jumlah Lowongan Kerja dan Pencari Kerja Tahun 2019 – 2020	62
Gambar 2. 30 Statistik Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2016 – 2020	62
Gambar 2. 31 Perbandingan TPT dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	62
Gambar 2. 32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Kalimantan Timur Tahun 2020.....	63
Gambar 2. 33 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bontang	64
Gambar 2. 34 Kapasitas Sumur Dalam.....	74
Gambar 2. 35 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air.....	74
Gambar 2. 36 Jumlah Kapasitas dan Sambungan Rumah IPAL Terpusat.....	75
Gambar 2. 37 Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Bontang	86
Gambar 2. 38 Grafik kecenderungan dan perbandingan target dan realisasi nilai IKA Kota Bontang Tahun 2016-2020	88
Gambar 2. 39 Grafik kecenderungan dan perbandingan target dan realisasi nilai IKU Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	88
Gambar 2. 40 Jumlah Inovasi Kota Bontang Tahun 2016 - 2020	109
Gambar 2. 41 Capaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2020.....	111
Gambar 2. 42 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Periode 2016-2021 dan Relevansinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	114

Gambar 2. 43	Matriks Ketercapaian TPB dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Sosial, Kota Bontang	117
Gambar 2. 44	Matriks Ketercapaian TPB dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Ekonomi, Kota Bontang	120
Gambar 2. 45	Matriks Ketercapaian TPB dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Lingkungan, Kota Bontang.....	122
Gambar 2. 46	Matriks Ketercapaian TPB dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Kota Bontang	124
Gambar 2. 47	Luas Genangan Banjir Kota Bontang Per Kelurahan Tahun 2020	129
Gambar 2. 48	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bontang	130
Gambar 2. 49	Panjang Penurapan Sungai di Kota Bontang	130
Gambar 2. 50	Panjang Normalisasi Sungai di Kota Bontang	131
Gambar 3. 1	Perkembangan Realisasi Sumber-sumber PAD Tahun 2016-2020	149
Gambar 3. 2	Perkembangan Peran Dana Perimbangan 2016-2020	152
Gambar 3. 3	Perkembangan Realisasi SiLPA Tahun 2016-2020.....	161
Gambar 4. 1	Pohon Permasalahan Bidang Pendidikan.....	198
Gambar 4. 2	Pohon Permasalahan Bidang Kesehatan.....	200
Gambar 4. 3	Pohon Permasalahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	201
Gambar 4. 4	Pohon Permasalahan Tata Pemerintahan	204
Gambar 4. 5	Pohon Permasalahan Sub Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.....	206
Gambar 4. 6	Pohon Permasalahan Sub-Bidang Standar Pelayanan Perkotaan	210
Gambar 4. 7	Pohon Permasalahan Sub-Bidang Penanggulangan Bencana	212
Gambar 4. 8	Pohon Permasalahan Perekonomian.....	215
Gambar 4. 9	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	217
Gambar 4. 10	Jumlah Kasus Positif COVID di Kota Bontang, Periode Maret 2020-Mei 2021	243
Gambar 4. 11	Jumlah Kasus Positif COVID di Kota Bontang per Kelurahan.....	244
Gambar 4. 12	Status Pekerjaan Penduduk Kota Bontang	244
Gambar 4. 13	Dampak Pendapatan Penduduk Kota Bontang	245
Gambar 4. 14	Kenaikan Pendapatan Penduduk Kota Bontang.....	245
Gambar 4. 15	Penurunan Pendapatan Penduduk Kota Bontang.....	245
Gambar 4. 16	Aktivitas Belanja Online Penduduk Kota Bontang	246
Gambar 4. 17	Perubahan Pengeluaran Bahan Makanan Penduduk Kota Bontang	246
Gambar 4. 18	Perubahan Pengeluaran Makanan/Minuman Jadi Penduduk Kota Bontang.....	246
Gambar 4. 19	Perubahan Pengeluaran Kesehatan Penduduk Kota Bontang	247
Gambar 4. 20	Perubahan Pengeluaran Listrik Penduduk Kota Bontang	247
Gambar 4. 21	Perubahan Pengeluaran BBM Penduduk Kota Bontang.....	247
Gambar 4. 22	Perubahan Pengeluaran Telekomunikasi Penduduk Kota Bontang	248
Gambar 4. 23	Perubahan Pengeluaran Transportasi Umum Penduduk Kota Bontang.....	248
Gambar 5. 1	Konstruksi Misi I Kota Bontang yang Harmoni.....	269
Gambar 5. 2	Konstruksi Misi II Kota Bontang Berkelanjutan.....	270
Gambar 5. 3	Konstruksi Misi III Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera	271
Gambar 5. 4	Keterkaitan Visi Misi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dengan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.....	272
Gambar 5. 5	Kerangka Berfikir Pencapaian Tujuan Misi I.....	274
Gambar 5. 6	Kerangka Berfikir Pencapaian Tujuan Misi II.....	277
Gambar 5. 7	Kerangka berfikir pencapaian Tujuan Misi III	278
Gambar 6. 1	Pemetaan Program Prioritas Nasional dalam Program Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026	287

Gambar 6. 2 Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun
2022-2026..... 288

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan berperan strategis dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan yang baik menjadi salah satu penentu tingkat perkembangan, kemajuan dan tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunannya. Perencanaan pembangunan daerah berperan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan memiliki fokus dan target yang jelas melalui perencanaan dan penataan alokasi sumber daya secara tepat, efektif dan efisien. Sebagai instrument pelaksanaan pembangunan yang berorientasi masa depan, Kebijakan Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 86/2017, berdasarkan prosesnya RPJMD Kota Bontang disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Lebih lanjut, sesuai amanah RPJMN 2020-2024, berdasarkan substansinya RPJMD Kota Bontang perlu disusun dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis *money follow* program dan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, sebagai daerah yang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2020, maka sesuai dengan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daeah Serentak Tahun 2020, selanjutnya Kota Bontang melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bapak Basri Rase dan Ibu Najirah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD tersebut berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Permendagri No 86/2017; PP No 17/2017; Perpres No 18/2020 (diolah)
Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

Adapun rangkaian tahapan penyusunan meliputi: (1) Tahap perumusan Rancangan Teknokratik, (2) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, (3) perumusan rancangan awal RPJMD, (4) penyusunan rancangan RPJMD; (5) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (6) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (7) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah kota dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1 hingga Bab 4.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Pararel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>). Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkan pembangunan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat Pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikatif per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi BAB 1 hingga Bab 9. Konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Rancangan Awal perlu di ajukan ke DPRD, paling lambat 40 hari setelah kepala daerah dilantik. Rancangan Awal perlu di ajukan ke Provinsi paling lambat 50 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan pararel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisa permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi. Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD diselenggarakan musrenbang, atau paling lambat musrenbang RPJMD dilaksanakan 75 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Akhir RPJMD	Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD

Sumber: Permendagri No 86/2017; Permendagri No 7/2018 (diolah)

Dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026, tahapan-tahapan penyusunan di atas telah sepenuhnya dilaksanakan sehingga visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah dijabarkan hingga lingkup program dan kerangka pendanaannya. Dengan demikian, Sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, RPJMD 2021-2026 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (4) ditentukan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, penyusunan RPJMD secara komprehensif merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan yang diejawantahkan melalui forum-forum konsultasi publik dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui media penyelenggaraan musrenbang. Dalam rangka mendukung kebijakan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RPJMD juga harus menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah.

Peran strategis RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin sinergi dan konsistensi antara perencanaan, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan secara implementatif akan dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (APBD).

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan masih dalam situasi ketidakpastian terhadap perkembangan penularan Pandemi Covid 19. Dampak Pandemi Covid 19 dan seluruh kebijakan dalam rangka pencegahan penularan yang dimulai pada tahun 2019, pada aspek ekonomi telah menyebabkan kontraksi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dengan migas kembali tumbuh negatif lebih dalam dengan tingkat pertumbuhan mencapai -2,76% dari sebelumnya -2,18%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas kontraksi pertumbuhan ekonominya lebih dalam menjadi 2,38% dari sebelumnya mencapai 6,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi utama masyarakat seperti UMKM, Pariwisata dan sektor jasa-jasa mengalami penurunan

signifikan akibat berbagai kebijakan pembatasan dalam rangka menghambat penularan covid 19 pada tahun 2020.

Pada aspek sosial pandemi covid 19 telah berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2020. Persentase angka pengangguran mengalami peningkatan dari 9,16 persen pada tahun 2019 menjadi 9,46% pada tahun 2020. Sejalan dengan meningkatnya angka pengangguran, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 4,22% tahun 2019 menjadi 4,38% pada tahun 2020. Berdasarkan jumlah jiwa, penduduk miskin Kota Bontang pada tahun 2020 mencapai 7.910 jiwa, mengalami peningkatan dari 7.470 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin, peningkatan ini menggambarkan penambahan baru jumlah penduduk miskin pada tahun 2020. Penduduk yang dikategorikan menjadi miskin ini dapat disimpulkan sebagai mereka yang memang rentan secara ekonomi, sehingga kebijakan pembatasan sehubungan dengan upaya menghambat laju penyebaran Covid 19 langsung berdampak pada penurunan pendapatan kelompok yang kategori rentan tersebut. Gambaran dampak pandemic covid 19 ini menjadi bagian dari isu dan permasalahan pembangunan yang akan menjadi landasan perumusan arah kebijakan pembangunan dalam periode RPJMD tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Bontang 2021-2026 mengacu pada dasar hukum dan peraturan dalam lingkup nasional maupun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan terhadap ketentuan tentang penyusunan, tata cara penyusunan, muatan dan kebijakan-kebijakan yang menjadi rujukan penyusunan. Adapun dasar hukum penyusunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245: Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.42; Tambahan Lembaran Negara No. 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31: Tambahan Lembaran Negara 6633);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 14) Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 - 17) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

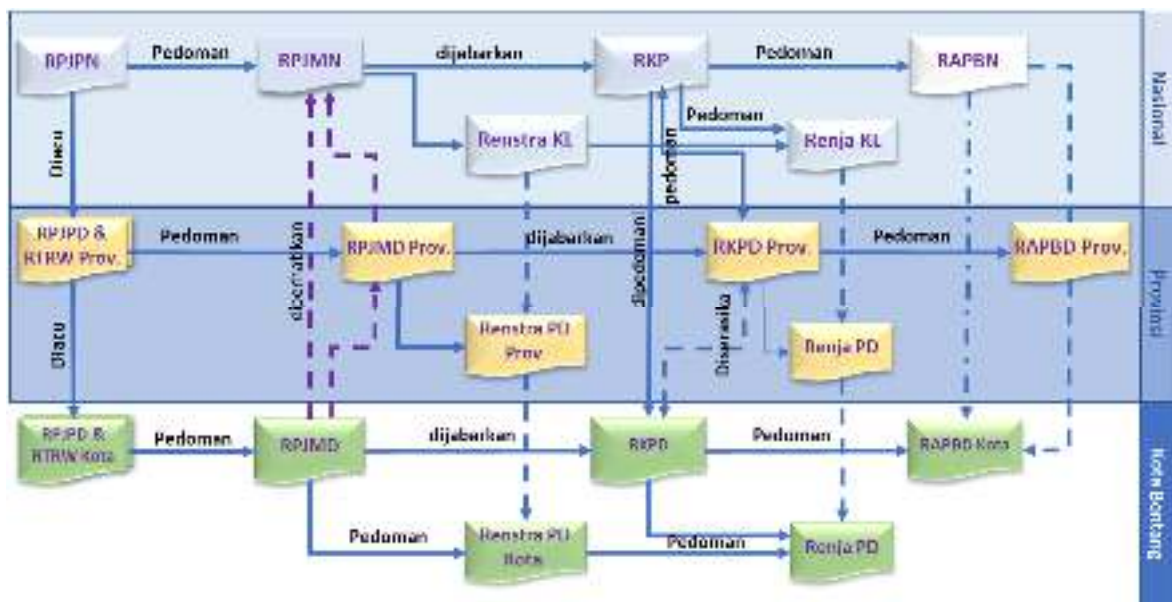
- 21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan);
- 22) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah Kalimantan Timur: (2-98/2019)
- 26) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
- 27) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
- 28) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Salah satu tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, baik keterkaitan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan secara nasional maupun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dalam lingkup pemerintah daerah. Keterkaitan dan konsistensi ini merupakan prasyarat agar perencanaan yang disusun dapat menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan. Harmonisasi hubungan antar dokumen perencanaan, pada aspek lainnya

juga akan menjamin keterpaduan dan sinergi antar para pelaku pembangunan karena peran dan kontribusi masing-masing pihak telah direncanakan secara saling berkesesuaian dan saling mendukung pencapaian kinerja satu dengan yang lainnya.

Sebagai bagian integral Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 secara konsisten memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Dalam lingkup Pemerintah Kota Bontang Penyusunan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 mempedomani arahan kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kota Bontang tahun 2005-2025, khususnya tahap keempat tahun 2020-2024 yakni Tahap Pemantapan dan sekaligus merupakan tahapan lima tahunan terakhir RPJPD 2005-2025. Dalam lingkup perencanaan spasial/keruangan, penyusunan RPJMD juga mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang tahun 2019-2039. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan Penyusunan RKPD sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. Secara skematis hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dalam lingkup lokal, regional provinsi maupun nasional dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sebagai bagian tak terpisahkan dalam rangka mendukung kebijakan nasional tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan program pembangunan daerah telah mengakomodasikan seluruh hasil analisis dan rekomendasi KLHS sehingga secara keseluruhan telah terintegrasi dalam kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bontang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masa bakti 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. menyediakan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2021-2026;
2. menyediakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026;

3. menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
5. Menyediakan instrumen dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pelaksanaan pembangunan Daerah antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri bab-bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rancangan Awal RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4 Maksud dan Tujuan;
- 1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui

berbagai kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2021-2026. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah;
- 2.5 Capaian Kinerja Indikator RPJMD 2016-2021

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
- 3.3 Kerangka Endanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 4.1 Permasalahan Pembangunan;
- 4.2 Isu Strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 5.1 Visi;
- 5.2 Misi;
- 5.3 Tujuan;
- 5.4 Sasaran Daerah;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus

pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan target capaian Indikator Makro pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau indikator kinerja kunci (IKK). Indikator kinerja tersebut menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar setiap kinerja yang ditetapkan dapat ditingkatkan diukur.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2026 dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

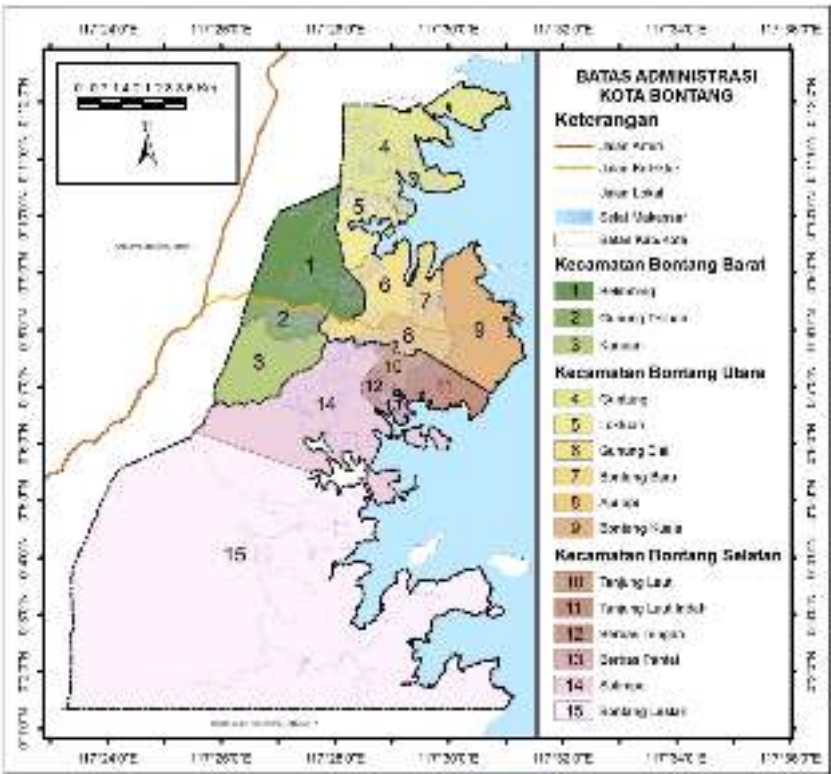
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang

Pada awalnya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan

Kecamatan Bontang Barat, yang meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2. 1 Jumlah RT dan luas kelurahan

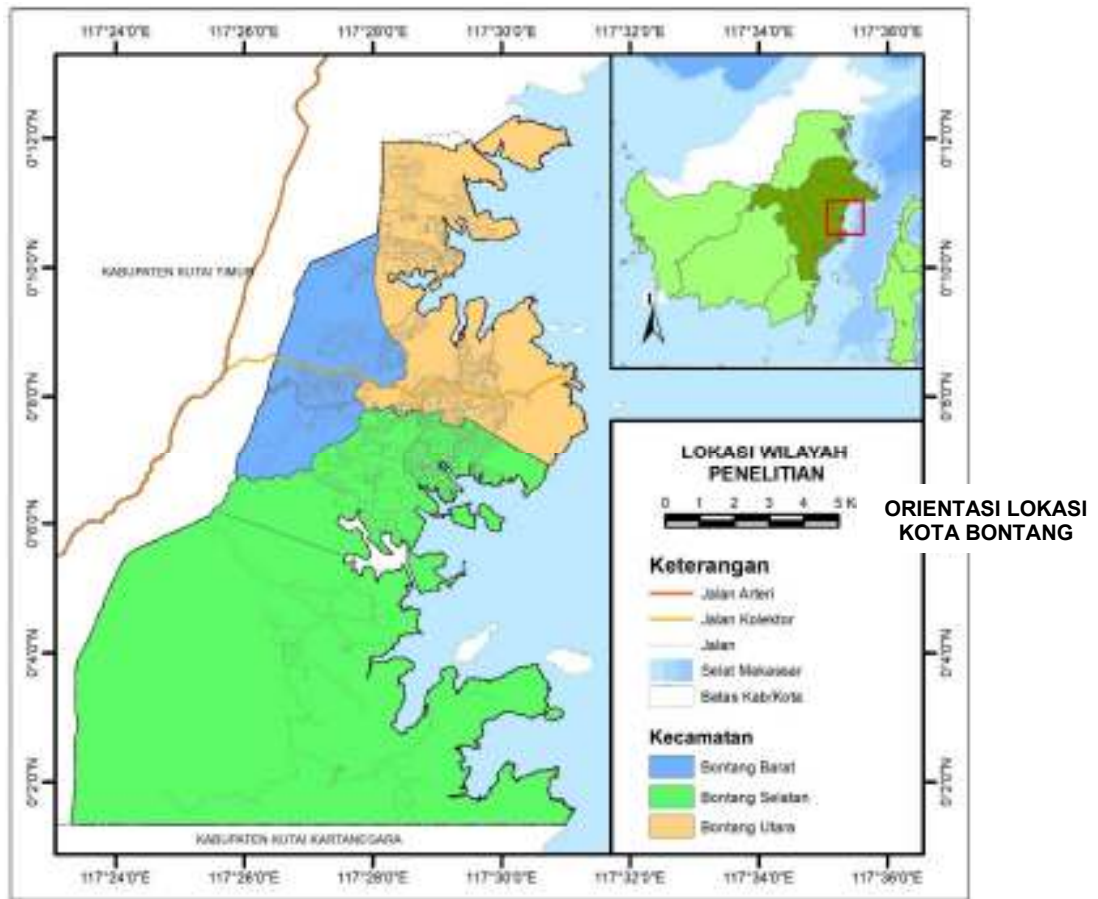
No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Luas (ha)
A	Bontang Selatan	201	11.091
1	Tanjung Laut	38	143
2	Berbas Pantai	24	57
3	Berebas Tengah	62	85
4	Tanjung Laut Indah	33	252
5	Satimpo	25	1.771
6	Bontang Lestari	19	8.782
B	Bontang Utara	205	3.303
1	Guntung	18	1.135
2	Loktuan	52	335
3	Gunung Elai	45	502
4	Bontang Baru	28	222
5	Bontang Kuala	20	894
6	Api-Api	42	215
C	Bontang Barat	93	1.794
1	Belimbing	51	959
2	Gunung Telihan	30	229
3	Kanaan	12	605
TOTAL		499	16.188

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak diantara 0°01’ Lintang Utara - 0°12’ Lintang Utara dan 117°23’ Bujur Timur - 117°38’ Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros trans-kalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor perdorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Gusung yang terdapat permukiman diatasnya, pulau mangrove yang tersebar dari utara hingga selatan, juga terdapat permukiman diatas laut seperti Melahing dan Tihi-Tihi.

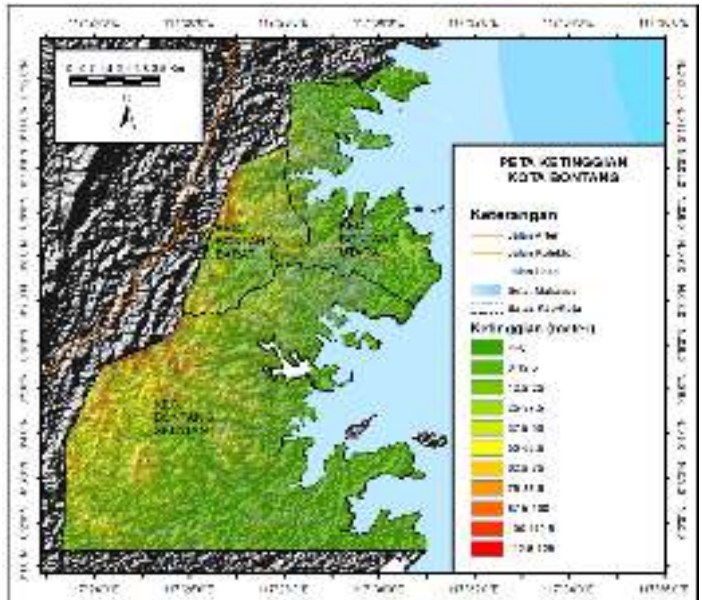


Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
 Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang

2.1.1.3 Topografi

Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m diatas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan kelerengan dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.

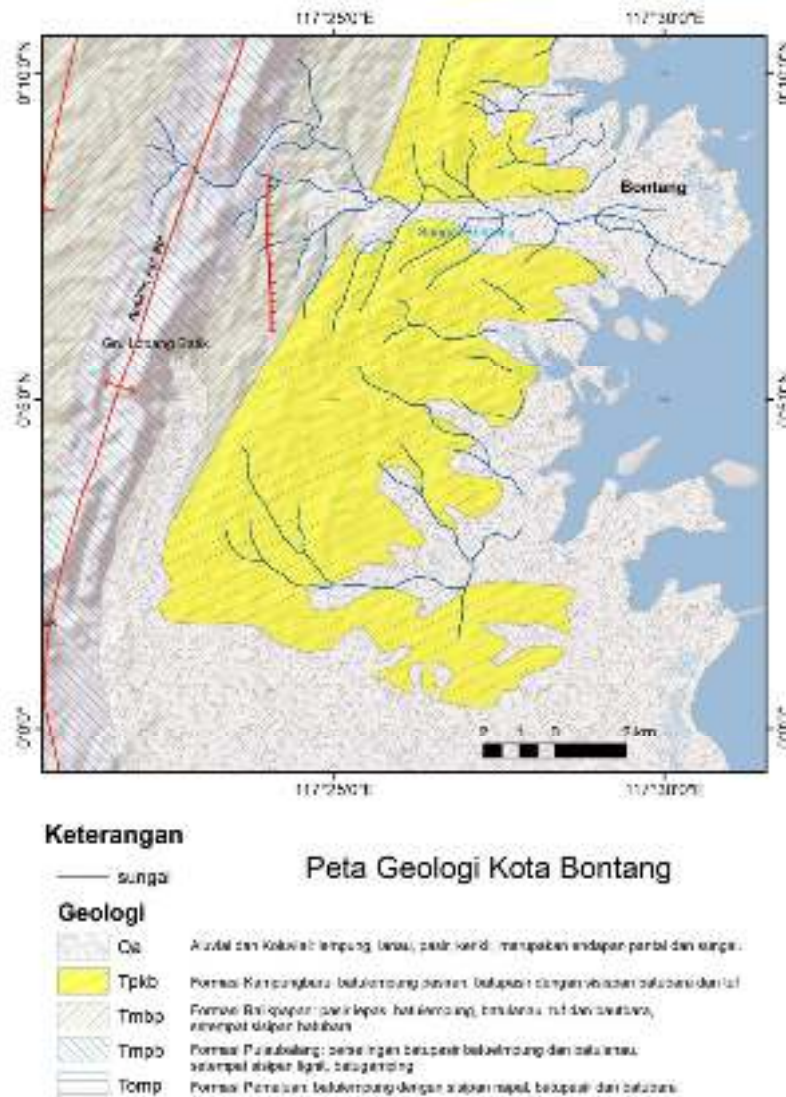
Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai kearah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihijaukan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.



yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.

- 3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
- 4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
- 5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
- 6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.



Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm³ dengan rata-rata 11 hari hujan per bulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

2.1.1.6 Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Guntung

Luas DAS Guntung kurang lebih 1.195,23 ha. Terletak di wilayah utara Kota Bontang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan Guntung, sebagian Kelurahan Loktuan, dan sebagian Kelurahan Belimbing. Terdapat 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Guntung dan Sungai Kanibungan. Sungai Guntung memiliki panjang kurang lebih 4 km, sedangkan Sungai Kanibungan memiliki panjang kurang lebih 2 km. Lebar kedua sungai tersebut antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah $\pm 3,5$ meter.

2. DAS Bontang

Luas DAS Bontang kurang lebih 4.914 ha. Terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, yakni sebagian Kelurahan Belimbing, Sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Api-API, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, sebagian Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan. Terdapat aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang kurang lebih 18 km dan lebar antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

3. DAS Nyerakat

Luas DAS Nyerakat kurang lebih 9.845,98 km². Terletak di wilayah selatan Kota Bontang yang meliputi 2 (dua) kelurahan, yaitu sebagian Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran kurang lebih 17 km dan lebar sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter.

Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
Gambar 2. 6 Peta DAS Kota Bontang

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan G.Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampungbaru yang didominasi oleh pasir, dibagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 400 makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuhan kepada batuan Formasi Kampungbaru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu *unconformity* (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka

sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh formasi batuan Balikpapan.

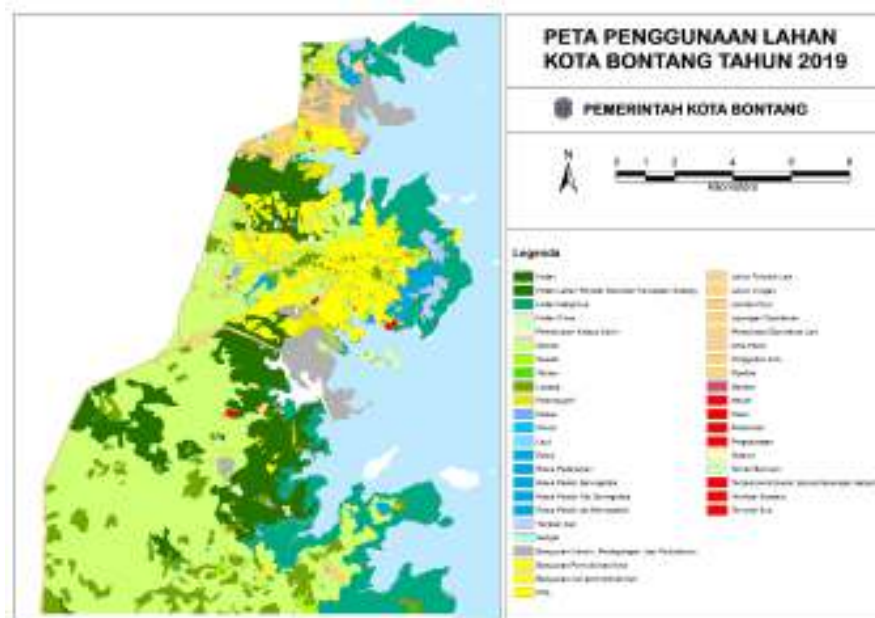
2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan

Tabel 2. 2 Luasan penggunaan lahan tahun 2019

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
1	Area Parkir	1,11	0,01
2	Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	735,24	4,63
3	Bangunan non-permukiman lain	2,98	0,02
4	Bangunan Permukiman Kota	1.787,79	11,27
5	Danau	9,40	0,06
6	Hutan	27,96	0,18
7	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang	2.331,81	14,70
8	Hutan Mangrove	2.622,44	16,53
9	Hutan Pinus	62,81	0,40
10	IPAL	0,03	0,00
11	Kolam	9,41	0,06
12	Ladang	957,31	6,03
13	Lahan Terbuka Lain	112,30	0,71
14	Lahan Urugan	254,46	1,60
15	Landas Pacu	36,50	0,23
16	Lapangan Diperkeras	1,13	0,01
17	Laut	10,25	0,06
18	Makam	6,18	0,04
19	Masjid	3,97	0,03
20	Padang golf	111,55	0,70
21	Pasar	1,26	0,01
22	Pelabuhan	3,76	0,02
23	Penggalian sirtu	26,39	0,17
24	Pergudangan	11,49	0,07
25	Perkebunan Kelapa Sawit	51,07	0,32
26	Permukaan Diperkeras Lain	32,07	0,20
27	Pipeline	167,75	1,06
28	Rawa	54,09	0,34
29	Rawa Pedalaman	4,19	0,03
30	Rawa Pesisir Bervegetasi	50,34	0,32
31	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	120,38	0,76
32	Sawah	40,40	0,25
33	Semak	5.932,92	37,39
34	Stadion	27,68	0,17
35	Sungai	47,62	0,30
36	Taman	2,45	0,02
37	Taman Bermain	6,96	0,04

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
38	Tambak Ikan	184,00	1,16
39	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	13,04	0,08
40	Terminal Bandara	4,42	0,03
41	Terminal Bus	0,80	0,01
	TOTAL	15.867,71	100,00



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

2.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan tercermin dari jasa ekosistem yang diberikan atau disediakan oleh lingkungan, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Bontang

Jasa Ekosistem		Kategori	Luas (Hektar)			
			Kota Bontang	Kec. Bontang Utara	Kec. Bontang Selatan	Kec. Bontang Barat
Jasa Penyediaan (Provision)	Pangan	Sangat Rendah	376	54	231	91
		Rendah	668	261	406	1
		Sedang	8.434	1.323	6.655	456
		Tinggi	3.629	1.319	1.627	683
		Sangat Tinggi	3.048	247	2.242	560
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Air Bersih	Sangat Rendah	644	496	148	0
		Rendah	7.815	967	6.355	492
		Sedang	2.618	1.475	422	720
		Tinggi	1.421	109	1.230	82
		Sangat Tinggi	3.657	156	3.004	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Serat (Fiber)	Sangat Rendah	6.836	456	5.625	755
		Rendah	809	370	396	43
		Sedang	1.264	402	429	433
		Tinggi	5.127	1.802	3.326	0
		Sangat Tinggi	2.118	174	1.384	560
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Bahan Bakar (Fuel)	Sangat Rendah	7.367	898	5.792	677
		Rendah	1.446	330	609	507
		Sedang	2.629	885	1.701	43

Jasa Ekosistem		Kategori	Luas (Hektar)			
			Kota Bontang	Kec. Bontang Utara	Kec. Bontang Selatan	Kec. Bontang Barat
		Tinggi	1.902	174	1.665	63
		Sangat Tinggi	2.811	917	1.393	501
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Sumberdaya Genetik	Sangat Rendah	346	51	222	74
		Rendah	562	113	18	431
		Sedang	9.871	1.584	7.545	742
		Tinggi	3.343	1.300	1.996	47
		Sangat Tinggi	2.033	156	1.379	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
Jasa Pengaturan (Regulating)	Iklim	Sangat Rendah	129	47	82	0
		Rendah	6.446	396	5.958	92
		Sedang	3.981	1.597	1.254	1.130
		Tinggi	3.561	1.007	2.482	72
		Sangat Tinggi	2.038	156	1.384	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Tata Aliran Air dan Banjir	Sangat Rendah	129	47	82	0
		Rendah	6.618	268	5.897	453
		Sedang	3.730	1.707	1.293	730
		Tinggi	3.637	1.026	2.503	108
		Sangat Tinggi	2.041	156	1.384	501
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	Sangat Rendah	170	47	62	60
		Rendah	149	110	33	6
		Sedang	9.405	1.482	6.791	1.132
		Tinggi	1.854	492	1.266	96
		Sangat Tinggi	4.579	1.073	3.009	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Pemurnian Air	Sangat Rendah	21	0	21	0
		Rendah	6.137	54	5.595	488
		Sedang	4.296	1.967	1.635	694
		Tinggi	3.645	1.026	2.522	97
		Sangat Tinggi	2.055	156	1.387	512
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Pengolahan dan Penguraian Limbah	Sangat Rendah	359	51	222	87
		Rendah	0	0	0	0
		Sedang	9.320	1.588	6.634	1.099
		Tinggi	1.902	492	1.301	109
		Sangat Tinggi	4.574	1.073	3.004	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Kualitas Udara	Sangat Rendah	129	47	82	0
		Rendah	7.155	760	6.302	92
		Sedang	3.272	1.233	909	1.130
		Tinggi	3.561	1.007	2.482	72
		Sangat Tinggi	2.038	156	1.384	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Penyerbukan Alami (Pollination)	Sangat Rendah	153	51	101	0
		Rendah	2.213	775	914	524
		Sedang	7.081	812	6.238	30
		Tinggi	4.634	1.409	2.522	703
		Sangat Tinggi	2.075	156	1.384	535
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Pengendalian Hama dan Penyakit	Sangat Rendah	153	51	101	0
		Rendah	2.178	775	892	512
		Sedang	7.115	812	6.261	42
		Tinggi	4.671	1.409	2.522	740
		Sangat Tinggi	2.038	156	1.384	497
Jasa Budaya (Cultural)	Tempat Tinggal dan Raung Hidup (Sense of Place)	Sangat Rendah	175	3	146	26
		Rendah	10.991	1.566	8.847	578
		Sedang	2.201	562	918	721
		Tinggi	677	261	365	52
		Sangat Tinggi	2.071	812	844	414
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Rekreasi dan Ecotourism	Sangat Rendah	1.322	405	148	768
		Rendah	6.519	120	6.355	44

Jasa Ekosistem		Kategori	Luas (Hektar)			
			Kota Bontang	Kec. Bontang Utara	Kec. Bontang Selatan	Kec. Bontang Barat
		Sedang	876	407	401	69
		Tinggi	2.843	1.199	1.230	414
		Sangat Tinggi	4.595	1.073	3.025	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Estetika Alam	Sangat Rendah	1.309	405	148	755
		Rendah	5.555	47	5.495	13
		Sedang	1.141	205	888	48
		Tinggi	2.827	1.091	1.258	478
		Sangat Tinggi	5.323	1.456	3.371	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Pembentukan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	Sangat Rendah	25	4	21	0
		Rendah	7.681	804	6.377	501
		Sedang	2.788	1.233	844	711
		Tinggi	3.583	1.007	2.493	83
		Sangat Tinggi	2.078	156	1.425	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
Jasa Pendukung (Supporting)	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	Sangat Rendah	499	264	161	74
		Rendah	121	47	61	13
		Sedang	10.016	1.400	7.520	1.097
		Tinggi	3.486	1.336	2.039	111
		Sangat Tinggi	2.033	156	1.380	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Produksi Primer	Sangat Rendah	129	47	82	0
		Rendah	2.981	1.099	1.376	506
		Sedang	6.336	511	5.792	33
		Tinggi	4.608	1.391	2.525	693
		Sangat Tinggi	2.101	156	1.384	560
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792
	Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah)	Sangat Rendah	251	3	170	78
		Rendah	1.343	421	494	428
		Sedang	8.962	1.616	6.630	716
		Tinggi	1.025	91	862	72
		Sangat Tinggi	4.574	1.073	3.004	497
		Jumlah	16.155	3.204	11.160	1.792

Sumber: DLH Kota Bontang, 2021 (diolah)

Jasa ekosistem merupakan keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem berupa penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung yang dihitung berdasarkan luas (ha) tutupan lahan menurut kriteria masing-masing ekosistem dan sebarannya di masing-masing wilayah. Untuk kriteria jasa ekosistem dengan kategori sangat rendah, rendah dan sedang, maka harus dikendalikan perkembangannya agar tidak bertambah secara luasan dan tidak bertambah menjadi jasa ekosistem yang lebih rendah. Sedangkan untuk jasa ekosistem dengan kategori tinggi dan sangat tinggi perlu dipertahankan keberadaannya di Kota Bontang guna mempertahankan fungsi lingkungan Kota Bontang. Berdasarkan data di atas, maka jasa ekosistem di Kota Bontang dominan berada pada kategori rendah. Untuk itu, pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar memperhatikan dampak pembangunannya agar tidak menjadi ancaman terhadap lingkungan.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan Kota Bontang jika dilihat dari aspek fisik khususnya kawasan terbangun, relatif lebih berkembang dan terkonsentrasi di wilayah utara, untuk itu salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bontang adalah mengupayakan akselerasi pembangunan di wilayah selatan. Percepatan pembangunan di wilayah selatan juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan, salah satu kebijakannya adalah dengan membangun akses/jaringan yang memadai dan memindahkan pusat pemerintahan ke Kelurahan Bontang Lestari. Selain itu pengembangan kawasan industri baru seluas ± 1.200 hektar diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan di wilayah selatan.

Potensi utama Kota Bontang memang berada disektor industri terutama industri migas dan pengolahan, namun seiring penurunan sektor industri saat ini Pemerintah Kota Bontang berupaya menggali potensi disektor lainnya. Salah satu yang diupayakan saat ini adalah sektor pariwisata.

2.1.3.1 Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Bontang Lestari. Pada kawasan tersebut terdapat kawasan pengembangan industri baru yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota dan berpotensi ekspor dengan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Bontang Lestari diarahkan sesuai dengan kriteria pengembangan kota berbasis industri dan peningkatan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kota Bontang berkedudukan pada lokasi strategis dalam lingkup regional, yaitu antara kota Samarinda/Balikpapan dan kota Sangatta – Bengalon dan memiliki akses langsung ke Selat Makassar. Kondisi strategis ini diperkuat dengan adanya sistem aktivitas industri berat dan manufaktur berskala nasional, bahkan internasional.

2.1.3.2 Kawasan Strategis Pariwisata

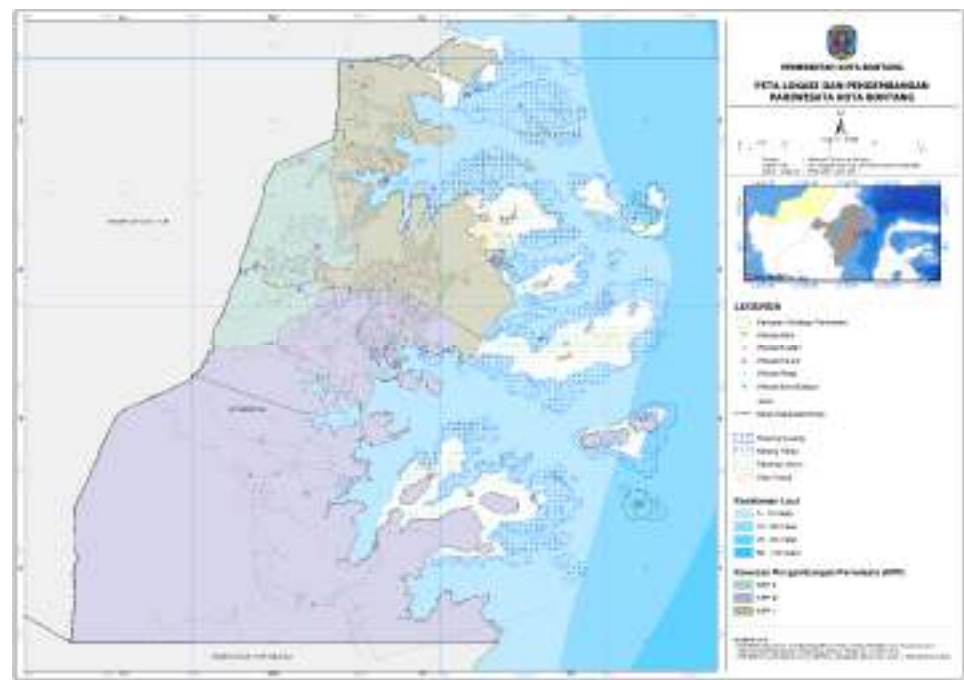
Kota Bontang mempunyai potensi dalam pariwisata, terutama pariwisata bahari, hal tersebut tidak lepas dari lokasi Kota Bontang yang berada di pesisir. Salah satu potensi daya tarik wisata bahari adalah keberadaan Pulau Beras Basah dengan keindahan pantai pasir putih dan keragaman terumbu karangnya, Pulau Kedindingan dengan keindahan hutan

mangrove, serta kawasan hutan mangrove sepanjang pesisir Tanjung Limau – Bontang Kuala – Tanjung Laut Indah sampai ke Berbas Pantai.

Produksi perikanan kelautan Kota Bontang pun cukup menjanjikan seperti tangkapan ikan laut, budidaya karamba, maupun produksi rumput laut serta keberadaan perkampungan nelayan di Bontang Kuala, Selangan, Melahing, Tihi-Tihi, dan lainnya serta dapat menjadi potensi pariwisata bahari yang mengedepankan aspek *marinkultur* dan budaya. Potensi lainnya yang dimiliki Kota Bontang antara lain:

1. Daya tarik wisata alam lainnya, seperti kawasan hutan lindung yang menyambung dengan Taman Nasional Kutai Timur, maupun hutan kota/hutan rakyat di kawasan Bontang Lestari, Sungai Kanibungan serta Danau Kanaan dengan keindahan panorama waduknya;
2. Daya tarik wisata budaya, seperti Erau Guntung, Makam Toraja, dan event Pesta Laut Bontang Kuala. Wisata edukasi budaya, seperti edukasi pembuatan batik dan pembelajaran seni tari khas Bontang bagi wisatawan.

Potensi-potensi pariwisata ini harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah pasca migas atau minyak dan gas bumi yang merupakan SDA tidak terbarukan (*non-renewable natural resource*). Sektor pariwisata pada masa yang akan datang dapat dijadikan andalan dan generator aktivitas pembangunan kota Bontang pasca migas.



Sumber: RIPPARDA Kota Bontang Tahun 2021 - 2025
Gambar 2. 8 Peta Lokasi dan Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana di Kota Bontang menggunakan pendekatan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang telah dilakukan oleh BNPB. IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRBI dikembangkan atas konsep analisis riwayat kebencanaan yang terjadi dan memberikan kerugian signifikan pada suatu wilayah hingga tingkat kota.

Berdasarkan IRBI menunjukkan secara umum Kota Bontang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang. Klasifikasi potensi sedang ini disebabkan karena Kota Bontang memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks. Potensi bencana di Kota Bontang dapat terjadi secara alami maupun akibat adanya pengaruh manusia, selain itu penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh aspek.



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020
Gambar 2. 9 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kalimantan Timur

Hasil analisis kemungkinan dampak bencana berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang menunjukkan setidaknya terdapat 8 resiko bencana yang dapat terjadi di Kota Bontang yaitu:

1. Resiko bencana angin;
2. Resiko bencana banjir;
3. Resiko epidemi penyakit;
4. Resiko bencana gempa bumi;
5. Resiko bencana kebakaran;
6. Resiko bencana longsor;
7. Resiko bencana tsunami;

8. Resiko bencana kegagalan teknologi.

Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang tahun 2017-2020, terlihat kebakaran, kecelakaan laut dan banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi. Bencana kebakaran perlu menjadi perhatian karena dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata 5 kejadian per bulan. Kejadian banjir walaupun hanya terjadi sekali di tahun 2019 namun merupakan salah satu bencana banjir terparah dan berdampak terbesar yang pernah terjadi di Kota Bontang.

Tabel 2. 4 Jumlah Kejadian Bencana Kota Bontang Tahun 2017-2020

No	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020
1	Rumah roboh	-	-	1	-
2	Banjir	7	3	1	-
3	Tanah longsor	-	3	4	-
4	Gempa bumi	-	-	-	-
5	Tsunami	-	-	-	-
6	Angin kencang	1	-	-	-
7	Angin puting beliung	1	-	-	-
8	Kecelakaan laut	4	6	9	3
9	Kebakaran	27	29	77	50
	JUMLAH	40	41	91	53

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

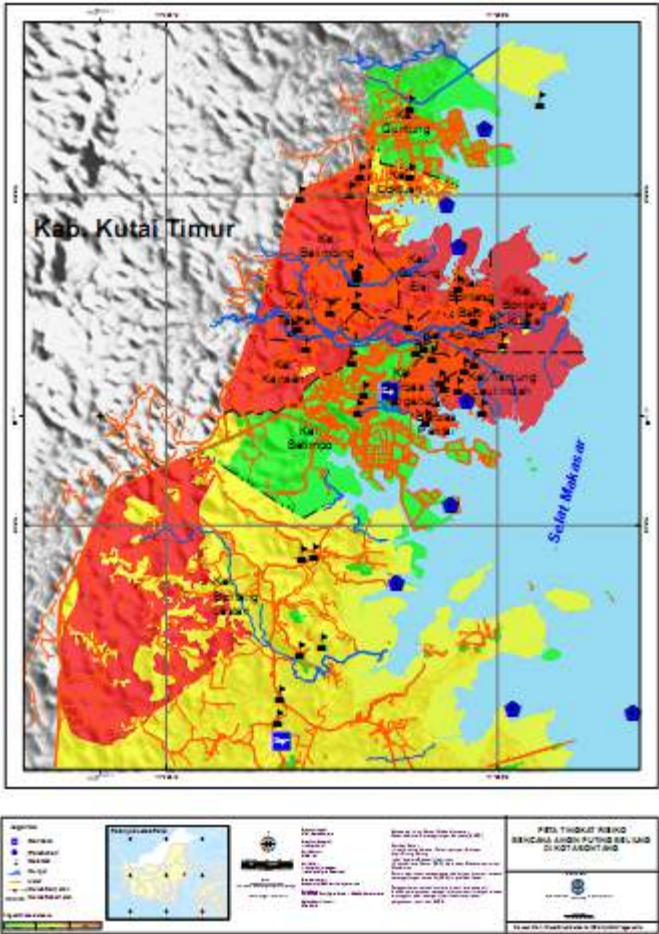
2.1.4.1 Bencana Angin Puting Beliung

Ancaman angin puting beliung dapat terjadi di Kota Bontang. Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang yang disusun pada Tahun 2013, luas daerah yang memiliki potensi ancaman tinggi bencana angin puting beliung adalah 42 persen, sedangkan sisanya merupakan potensi sedang hingga rendah.

Potensi kerentanan dan kapasitas terhadap bencana angin puting beliung relatif tinggi sebesar 15,79 persen, sedangkan potensi kerentanan dan kapasitas sedang dan rendah masing-masing sebesar 31,7 persen dan 52,51 persen. Tingkat kapasitas ini belum secara menyeluruh karena kejadian angin puting beliung berdasarkan catatan bencana relatif rendah. Ketika bencana datangnya tidak sering dan tidak terlalu merugikan, biasanya masyarakat cenderung tidak memperhatikan bencana dan lingkungan sekitar.

Risiko bencana angin tinggi di bagian utara Kota Bontang, yaitu di seluruh Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara bagian timur

(Kelurahan Gunung Elai, Bontang Baru, Api-api, Bontang Kuala, dan sebagian Kelurahan Loktuan), dan sebagian Kecamatan Bontang Selatan (Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, dan bagian barat Kelurahan Bontang Lestari. Sebagian Kelurahan Bontang Lestari dan sebagian Kelurahan Loktuan memiliki risiko bencana angin sedang. Risiko bencana angin rendah ada di bagian utara (Kelurahan Guntung) dan tengah (Kelurahan Satimpo). Persentase risiko tinggi, sedang, rendah secara berurutan adalah 34 persen , 49 persen, dan 17 persen.



Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013
 Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Angin Puting Beliung

2.1.4.2 Bencana Banjir

Secara umum, permasalahan banjir di Kota Bontang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh curah hujan dan topografi. Wilayah Bontang mengalami banjir karena curah hujan tinggi sekitar 2.200-2.700 mm/tahun. Di samping itu, banjir juga disebabkan oleh topografi Kota Bontang yang berbentuk seperti distribusi poisson, yakni tinggi di bagian barat dan selatan, tapi rendah di bagian timur dan utara. Air limpasan dari daerah tinggi di selatan dan barat Kota Bontang potensial

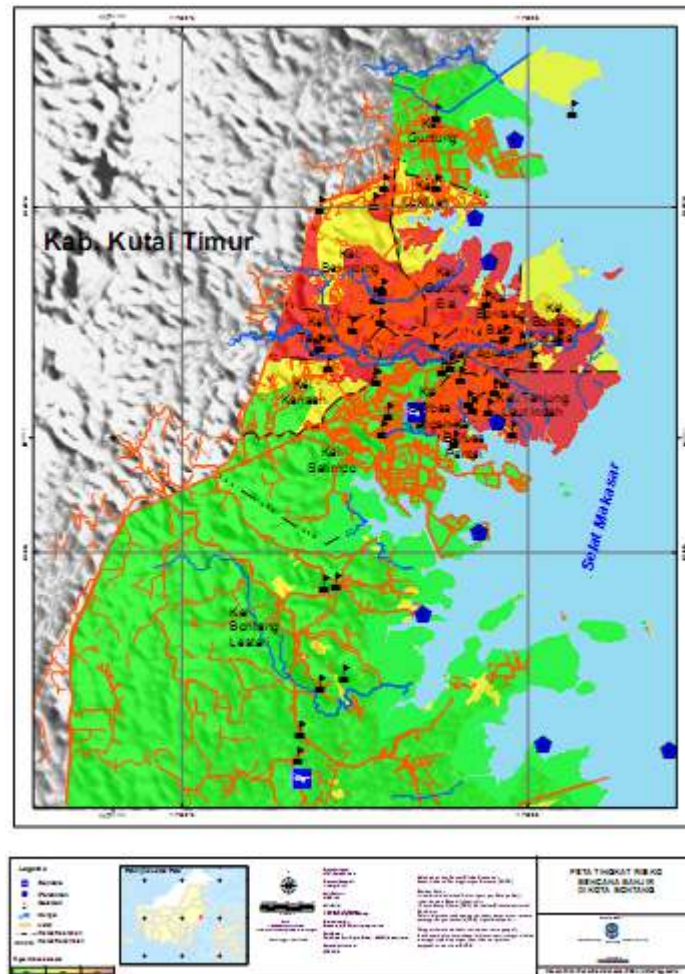
membanjiri kawasan dataran rendah di timur dan utara Kota Bontang. Limpasan ini kurang efektif dilayani oleh Sungai Bontang karena secara morfologis sudah tidak ideal.

Faktor manusia yang menyebabkan banjir antara lain perilaku membuang sampah/limbah padat ke sungai, membangun permukiman di bantaran sungai, dan merusak hutan yang menjadi daerah tangkapan air. Sungai yang terdapat di Kota Bontang kondisi fisiknya termasuk buruk, sebagian besar mengalami pendangkalan ditambah adanya permukiman di Kawasan sempadannya. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir besar dengan skala yang lebih tinggi dibanding banjir tahunan baik dari luas genangan, ketinggian banjir hingga durasinya.

Banjir rob juga terjadi di Kota Bontang. Banjir rob terjadi pada saat air laut sedang pasang dan ketika itu terjadi hujan. *Run off* yang seharusnya menuju ke laut akan terhalang karena adanya kenaikan muka air laut. Terdapat beberapa wilayah di Kota Bontang yang berpotensi rawan banjir rob, seperti Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Guntung, Kelurahan Gunung Elai, dan Kelurahan Loktuan.

Kerentanan dan kapasitas terhadap banjir termasuk rendah karena menganggap kejadian banjir selama ini hanya terjadi relatif kecil dan hanya berlangsung dalam waktu maksimal 1 hari. Ketinggian banjir yang terjadi di Kota Bontang kurang lebih paling tinggi adalah setinggi lutut orang dewasa atau perkiraan kurang dari 50 cm. Keadaan ini yang menyebabkan masyarakat di Kota Bontang hanya sedikit yang meninggikan bangunan rumahnya sehingga air tidak masuk ke dalam rumah.

Kapasitas pemerintah dalam menanggulangi banjir terlihat dari pelaksanaan normalisasi sungai dan penurapan sungai Bontang. Akan tetapi program pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak disertai oleh kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal di sempadan sungai dan tidak membuang sampah di sungai. Dalam menanggulangi banjir, masyarakat Kota Bontang cenderung hanya menggantungkan kebijakan pemerintah dan perusahaan. Kedepannya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya berperan secara aktif dalam penanggulangan banjir di Kota Bontang.



Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013
Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Banjir

2.1.4.3 Bencana Epidemii Penyakit

Ancaman bencana epidemi penyakit dalam hal ini terkait dengan adanya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), demam berdarah yang pada tahun 2020 mengalami lonjakan industri tahun-tahun sebelumnya, malaria dan sejenisnya, serta bencana industri COVID-19 yang juga melanda dunia saat ini.

Adaptasi kebiasaan baru merupakan salah satu upaya untuk mengatasi industri dan sekaligus meningkatkan derajat industri masyarakat. Selain itu perlu penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat dan selalu mengingat industri Kesehatan dalam aktivitasnya.

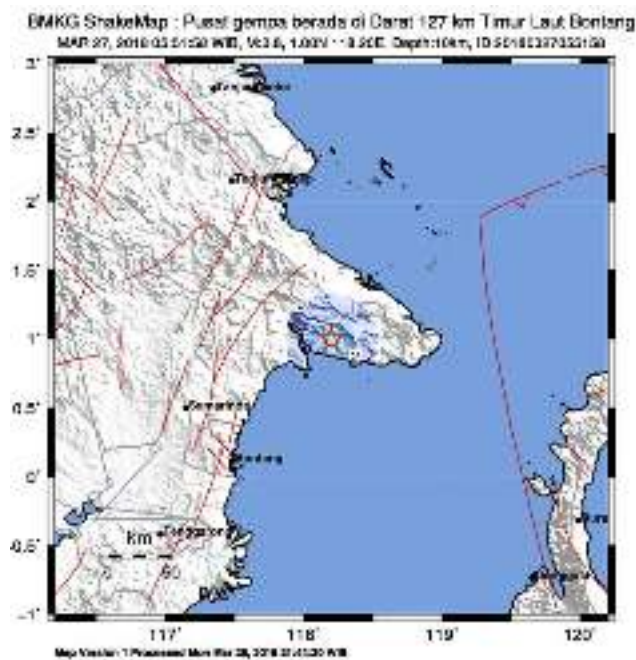
Terkait dengan ancaman bencana epidemi, wilayah Bontang bagian tengah memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana epidemi penyakit. Wilayah ini meliputi Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-api, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Berbas Pantai; dan sebagian kecil wilayah Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang

2.1.4.4 Bencana Gempa Bumi

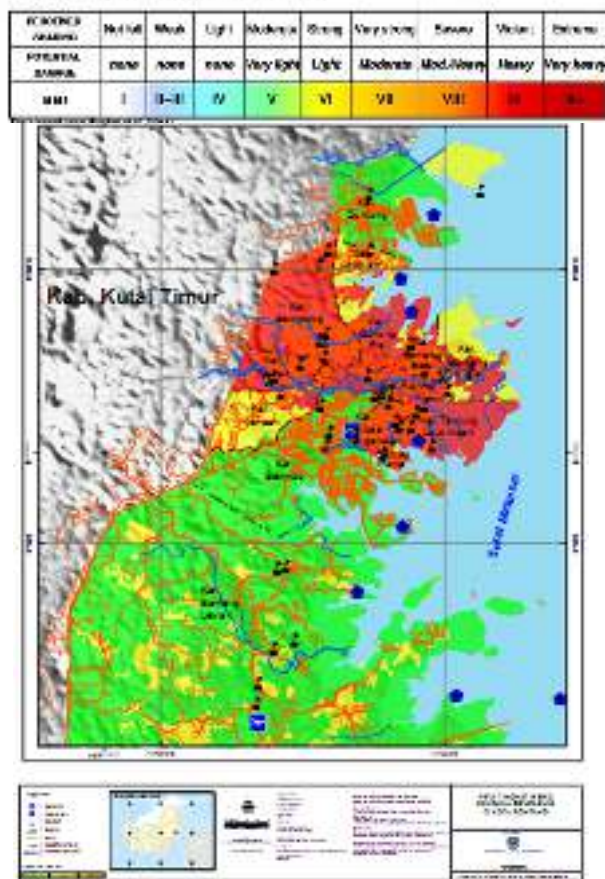
Ancaman gempa bumi ditentukan berdasarkan perhitungan *Peak Ground Acceleration* (PGA) yang biasa disebut percepatan tanah apabila terkena guncangan. Berdasarkan sejarahnya belum pernah terjadi pusat gempa berada di Kota Bontang. Akan tetapi gempa bumi pernah terjadi di wilayah sebelah utara atau timur laut dari Kota Bontang diantaranya pada tahun 1921, 1923, 1926, 1975, 2018 dan 2020. Adanya gempa bumi yang terjadi di daerah utara mungkin dapat berpengaruh pada Kota Bontang walaupun secara kekuatan industri akan berbeda jauh.

Tingkat kesadaran masyarakat Bontang terhadap gempa bumi termasuk rendah. Hal ini disebabkan karena anggapan masyarakat bahwa Kota Bontang bebas dari ancaman gempa bumi. Kelurahan Bontang Lestari merupakan daerah yang potensi bencana gempa buminya termasuk kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh asal sumber bencana gempa bumi yang terletak di daerah utara Kota Bontang. Kelurahan Guntung dan Kelurahan Satimpo berpotensi tinggi karena terdapat sosialisasi dari perusahaan PT. Pupuk Kaltim maupun PT Badak NGL walaupun tidak secara spesifik pada bencana gempa bumi tetapi di dalam kesiapannya meliputi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi.

Risiko gempa bumi sangat berkaitan dengan ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas. Kota Bontang bagian tengah sampai bagian utara, tingkat kapasitasnya tinggi, sedangkan bagian selatan sedang. Bagian tengah merupakan daerah terbangun dan pusat kegiatan sehingga tingkat kerentanannya tinggi. Faktor kerentanan inilah yang menyebabkan wilayah bagian tengah memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi. Wilayah tersebut sebesar 21persen meliputi wilayah Kelurahan Belimbing, Kelurahan Telihan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut Indah; dan industri wilayah Kelurahan Loktuan, Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan Kanaan. Wilayah dengan tingkat risiko sedang sebesar 16persen berada di wilayah Kelurahan Loktuan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan Bontang Lestari. Sedangkan wilayah lainnya memiliki tingkat risiko rendah yaitu Kelurahan Satimpo, Guntung, dan industri besar Kelurahan Bontang Lestari.



Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan
 Bencana Kota Bontang Tahun 2013
 Gambar 2. 14 Peta Resiko Bencana
 Gempa bumi



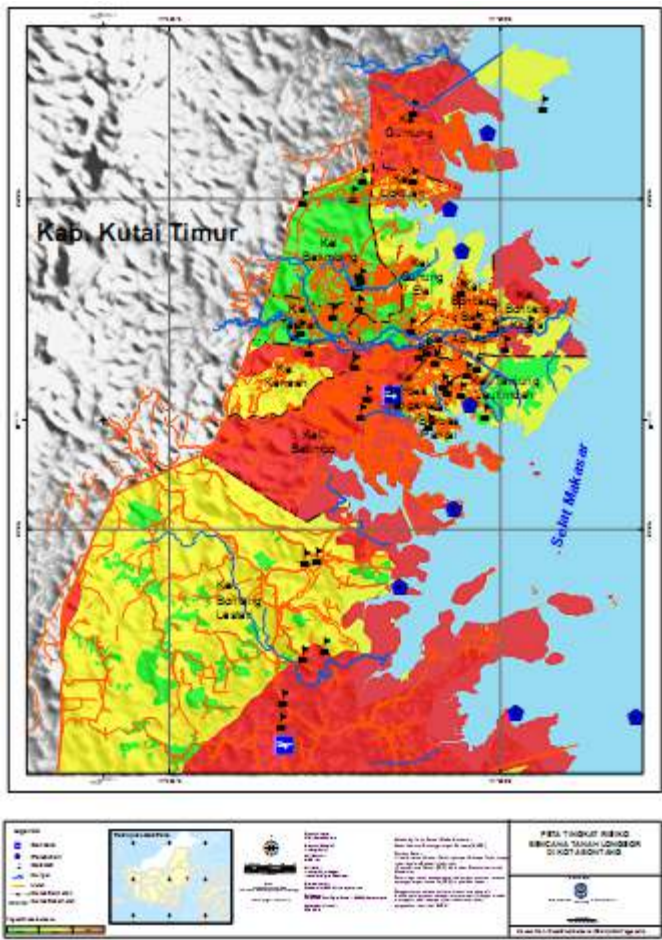
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)
 Gambar 2. 15 BMKG ShakeMap 2018

2.1.4.5 Bencana Longsor

Bencana tanah longsor yang terdapat di Kota Bontang terjadi akibat adanya pembukaan lahan dari hutan menjadi jalan atau penggunaan lainnya. Semakin tingginya potensi longsor dapat ditandai dengan semakin banyaknya erosi yang terjadi. Adanya erosi merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa potensi longsornya juga akan semakin tinggi. Erosi mencerminkan bahwa kekuatan daya antar agregat-agregat tanah sudah mulai berkurang. Ketika kekuatan gaya antar agregat sudah berkurang maka kemungkinan longsor

akan semakin besar. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila tanah sudah mengalami kejenuhan air dan mengalami pembebanan.

Risiko longsor tinggi terdistribusi pada daerah dengan kemiringan lereng terjal dan terdapat permukiman atau bangunan infrastruktur. Risiko tinggi sebesar 38 persen berada di Kelurahan Guntung, Kelurahan Satimpo, dan wilayah Kelurahan Loktuan, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Bontang Lestari. Risiko rendah sebesar 13 persen antara lain di Kelurahan Belimbing, Kelurahan Telihan, dan Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Tanjung Laut Indah. Risiko sedang sebesar 49 persen berada di daerah perbukitan dengan penggunaan lahan utama berupa hutan, dan wilayah kelurahan pada dataran rendah. Risiko sedang ini antara lain adalah wilayah Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-API, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, dan Sebagian besar wilayah Kelurahan Bontang Lestari.



Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013
Gambar 2. 16 Peta Resiko Bencana Longsor

2.1.4.6 Kawasan Kerusakan Air Tanah

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Bontang menyebabkan kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Hingga saat ini kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga dan industri seluruhnya berasal dari sumber air tanah. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan perekonomian di Kota Bontang berdampak pada terjadinya peningkatan secara signifikan kebutuhan air bersih dan lahan untuk perumahan bagi masyarakat.

Pengambilan air tanah secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan pada daerah resapan air (*recharge area*) dapat menyebabkan penurunan kuantitas air tanah yang ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah secara menerus hingga melebihi batas muka air tanah aman. Dampak lanjutan lainnya yang dapat terjadi adalah degradasi kualitas air tanah karena intrusi air laut dan polusi air tanah serta penurunan muka tanah atau amblesan tanah (*land subsidence*).

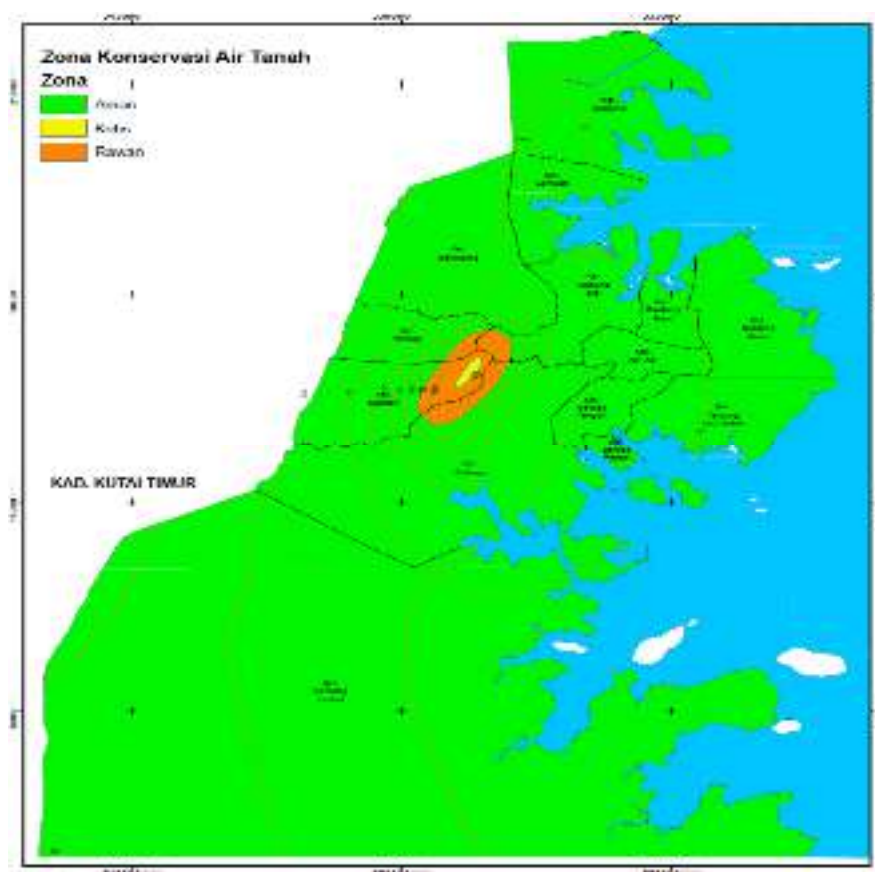
Hutan Lindung Bontang yang berfungsi menjaga ketersediaan air tanah saat ini mengalami kerusakan akibat kebakaran hutan dan alih fungsi akibat perambahan hutan. Apabila tidak segera dilakukan perbaikan lingkungan di hutan lindung tersebut maka hal ini akan dapat menyebabkan berkurangnya air hujan yang meresap ke dalam tanah dan meningkatnya aliran permukaan (*run off*) sehingga mengakibatkan bencana banjir.

Salah satu permasalahan yang terjadi akibat pengambilan air tanah adalah terjadinya penurunan muka air tanah. Hasil pengukuran pada beberapa sumur bor pantau dan produksi menunjukkan penurunan kedudukan muka air tanah di Kota Bontang 27.5 m atau sekitar 1 m/tahun di daerah komplek 37ndustry PT. Badak NGL atau turun 17.5 m atau 0.5 m/tahun di komplek industri PT Pupuk Kaltim.

Berdasarkan perubahan kedudukan MAT, tingkat kerusakan air tanah atau zonasi konservasi air tanah pada system akuifer terkekang di Kota Bontang saat ini dalam kategori rusak, kritis, rawan, dan aman, yaitu sebagai berikut:

- Zona rusak; daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah dihitung sejak kondisi awal lebih dari 80 persen; saat ini tidak dijumpai.
- Zona kritis; pada zona ini terdapat daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah terkekang dihitung sejak kondisi awal antara 60-80 persen, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan antara 35

- m bmt, atau elevasi sekitar -25 m yaitu menempati daerah kompleks sekitar PT.Badak NGL, Kecamatan Bontang Barat;
- Zona rawan, zona ini menempati pula daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah terkekang di hitung sejak kondisi awal antara 40-60 persen, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan sekitar 25 m bmt atau elevasi -15 m yaitu di bagian luar kompleks PT.Badak NGL (Bontang Barat) dan Komplek PT.Pupuk Kaltim (Bontang Utara);
 - Zona aman, zona ini menempati pula daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah terkekang di hitung sejak kondisi awal antara <40%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan sekitar 10 m bmt atau > elevasi 0 m yaitu terutama daerah selatan (Bontang Selatan) dan daerah Barat



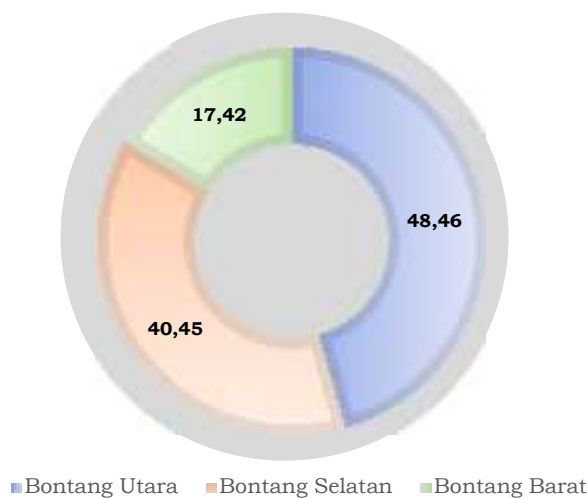
Sumber : Kajian Konservasi Air Tanah Tahun 2013
Gambar 2. 17 Zona Konservasi Air Tanah

2.1.5 Aspek Demografi

2.1.5.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Kota Bontang yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebesar 184.784 jiwa. Penduduk Kota Bontang tersebar di Kecamatan Bontang Utara sebanyak 48,46 persen dengan rincian 25,18 persen penduduk laki-laki dan 23,28 persen penduduk perempuan, di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 40,45 persen dengan

rincian 21,05 persen penduduk laki-laki dan 19,40 persen penduduk perempuan persen serta sebesar 17,42 persen berada di Kecamatan Bontang Barat dengan rincian 9,02 persen penduduk laki-laki dan 8,40 persen penduduk perempuan.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah
Gambar 2. 18 Sebaran Penduduk Kota Bontang

Tabel 2. 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

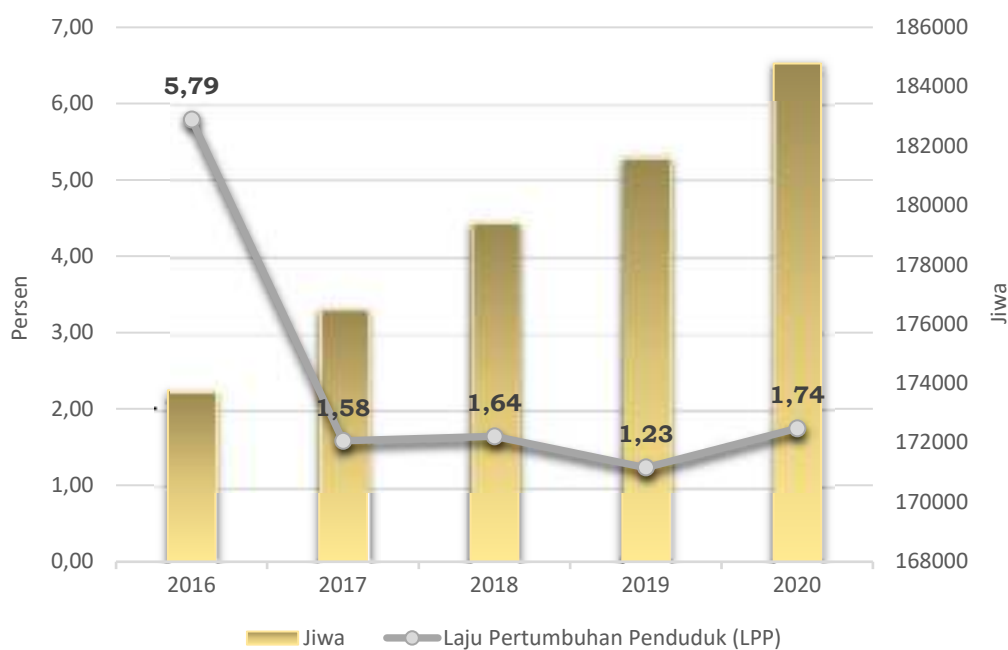
No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
1	Bontang Utara	77.772	44,76	79.064	45,50	81.169	46,71	82.626	47,55	84.210	48,46
	Laki-Laki	40.620	23,38	41.277	23,75	42.192	24,28	42.986	24,74	43.761	25,18
	Perempuan	37.152	21,38	37.787	21,75	38.977	22,43	39.640	22,81	40.449	23,28
2	Bontang Selatan	66.981	38,55	68.033	39,15	68.436	39,38	69.063	39,74	70.297	40,45
	Laki-Laki	34.964	20,12	35.494	20,43	35.612	20,49	36.027	20,73	36.584	21,05
	Perempuan	32.017	18,42	32.539	18,73	32.824	18,89	33.036	19,01	33.713	19,40
3	Bontang Barat	29.017	16,70	29.418	16,93	29.803	17,15	29.929	17,22	30.277	17,42
	Laki-Laki	15.080	8,68	15.295	8,80	15.486	8,91	15.570	8,96	15.678	9,02
	Perempuan	13.937	8,02	14.123	8,13	14.317	8,24	14.359	8,26	14.599	8,40
	Jumlah	173.770	100,00	176.515	100,00	179.408	100,00	181.618	100,00	184.784	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Berdasarkan kepadatannya, Kecamatan Bontang Utara memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kedua kecamatan sisanya yaitu sebesar 2.550 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan Bontang Barat dan Bontang Selatan sebesar 1.689 jiwa/km2 dan 634 jiwa/km2. Kota Bontang juga merupakan Kota dengan banyak pulau kecil yaitu sebanyak 22 pulau, dengan 3 pulau yang berpenghuni seperti Pulau Melahing, Pulau Tihi-Tihi, dan PulauGusung. Penduduk Kota Bontang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2016-2020, tercatat penduduk Kota Bontang Tahun 2016 adalah sebesar 173.770 jiwa. Angka ini

terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 184.784 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 2 persen.

Dilihat dari tren pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan secara konstan melambat mulai tahun 2016 yaitu sebesar 5,79 persen, turun menjadi 1,64 persen pada tahun 2018 selanjutnya meningkat kembali sebesar 1,74 persen di tahun 2020.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang

Struktur penduduk Kota Bontang berdasarkan kelompok umur dapat dibagi menjadi kelompok umur produktif dan tidak produktif. Umur produktif adalah umur pada angkatan kerja yaitu umur 15 – 64 tahun. Penduduk di umur ini diharapkan dan yang berpeluang besar untuk bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi Kota Bontang. Sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 ke atas. Penduduk pada Kelompok umur ini adalah penduduk umur bersekolah dan lansia yang kemungkinan kecil untuk menghasilkan nilai ekonomi. Komposisi penduduk Kota Bontang Tahun 2016 hingga 2020 masih di dominasi oleh penduduk produktif namun setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Tercatat penduduk usia produktif sebesar 70,63 persen di tahun 2016, mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 70,83 persen. Angka ini menurun di tahun 2018 sebesar 70,21 persen, hingga tahun 2020 sebesar 69,81 persen. Sejalan dengan menurunnya penduduk usia produktif, maka semakin meningkat pula penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2016 tercatat penduduk usia 0-

4 tahun sebesar 27,1 persen, angka tersebut meningkat hingga tahun 2019 mencapai 28,23 persen kemudian menurun menjadi 27,95 persen di tahun 2020. Sedangkan penduduk kelompok umur 65 keatas cenderung meningkat dari tahun 2016. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,24 persen penduduk lansia dimana lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh umur harapan hidup penduduk Kota Bontang tahun 2020 yang meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun 2016 dan adaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk penduduk lansia.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Bontang Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4	15.988	15.228	15.984	16.222	16.114
2	5-9	16.497	17.185	17.720	18.192	18.218
3	10-14	15.658	15.995	16.349	16.850	17.319
4	15-19	13.866	15.649	16.142	15.211	15.917
5	20-24	16.785	16.424	16.243	16.459	16.675
6	25-29	17.350	17.109	16.756	16.739	16.691
7	30-34	16.586	16.237	15.954	15.884	15.855
8	35-39	14.491	14.840	14.868	14.853	15.023
9	40-44	12.576	12.416	12.516	13.001	13.308
10	45-49	11.595	11.976	11.831	11.581	11.630
11	50-54	9.924	9.973	10.394	10.759	10.717
12	55-59	6.329	6.899	7.282	7.619	8.111
13	60-64	3.228	3.509	3.976	4.457	5.073
14	65-69	1.466	1.667	1.887	2.178	2.314
15	70-74	761	726	799	880	1.009
16	>75	670	682	707	733	810
Jumlah		173.770	176.515	179.408	181.618	184.784

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

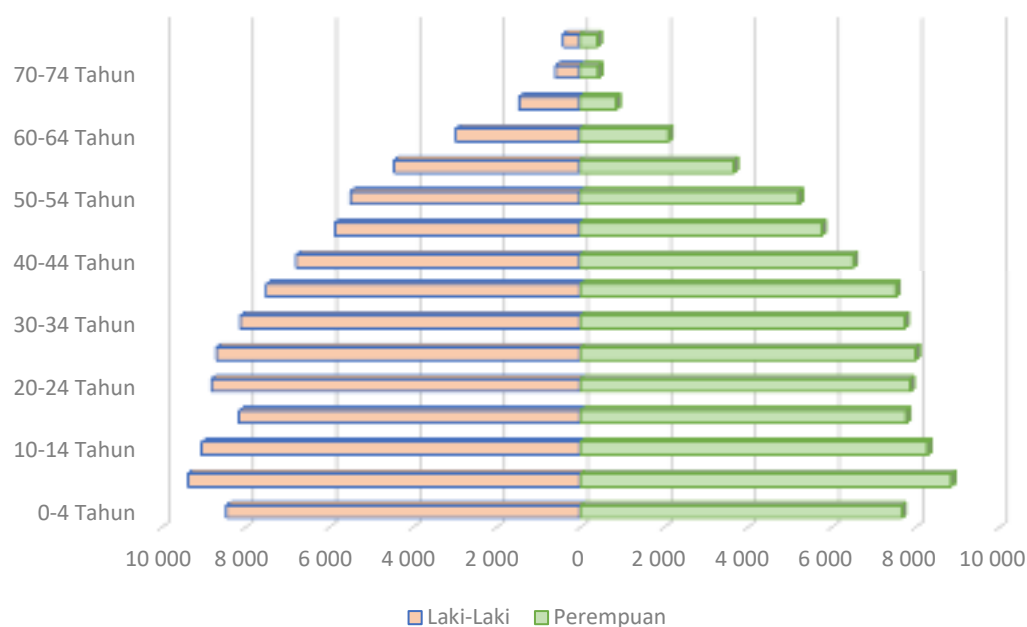
Tabel 2. 7 Komposisi Penduduk Kota Bontang

No.	Kelompok Usia(Tahun)	% Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4	27,21	27,42	27,90	28,23	27,95
2	15-64	70,63	70,83	70,21	69,69	69,81
3	>65	1,67	1,74	1,89	2,09	2,24

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Bentuk piramida penduduk Kota Bontang berbentuk *expansive*, sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Lebih tingginya persentase penduduk produktif dibandingkan dengan penduduk non produktif, identik dengan kondisi bonus demografi. Fenomena bonus demografi jika tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi ancaman bagi

pembangunan. Jika kualitas sumber daya manusianya tidak berkualitas dan berdaya saing, maka jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka Kota Bontang yang merupakan tertinggi se-Kalimantan Timur, yaitu 9,46 persen. Kedepannya perlu kebijakan yang lebih tepat untuk memastikan keberhasilan bonus demografi antara lain peningkatan kualitas dan daya saing penduduk yang secara langsung berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan Kota Bontang.

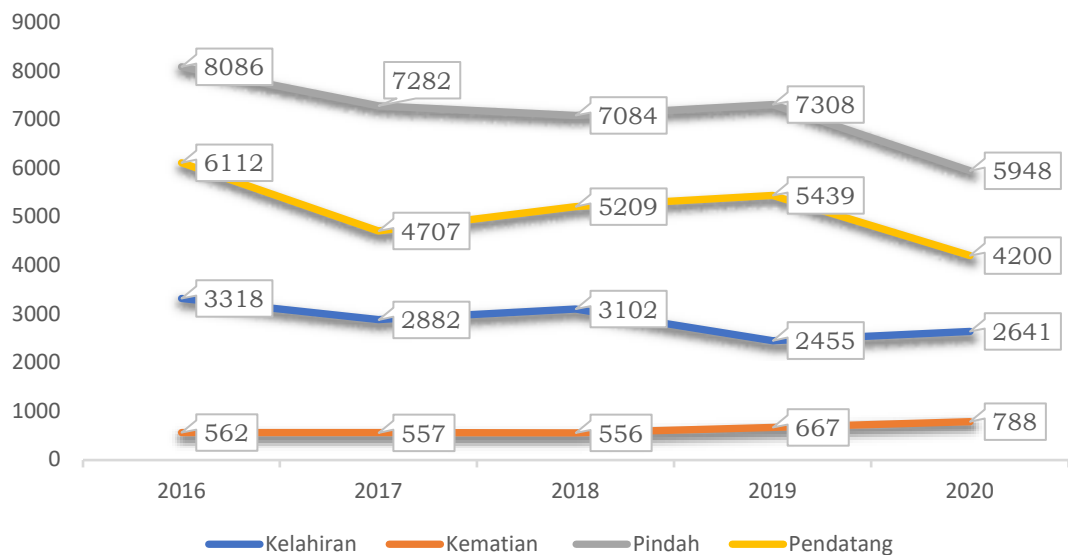


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

Gambar 2. 20 Piramida Penduduk Kota Bontang Tahun 2020

2.1.5.2 Komposisi Penduduk (Migrasi, kelahiran dan kematian)

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bontang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kelahiran, kematian dan migrasi. Kota Bontang tahun 2020 memiliki kelahiran sebanyak 2.642 jiwa dan kematian sebanyak 788 jiwa. Sedangkan migrasi masuk sebanyak 4.200 jiwa dan migrasi keluar sebanyak 5.948 jiwa.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, diolah

Gambar 2. 21 Perkembangan Penduduk Kota Bontang Tahun 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi

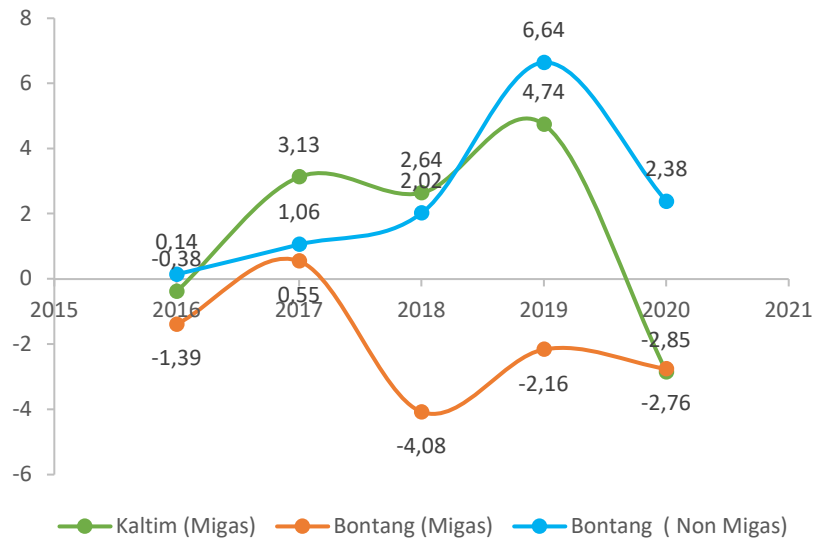
Dinamika ekonomi makro di tingkat global, nasional maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Timur sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di Kota Bontang. Kondisi perekonomian ini setiap tahun ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Bontang (dengan migas) mengalami perlambatan sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun 2019, yaitu mencapai -2,76 persen. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan besar di sektor industri pengolahan yang menopang perekonomian Kota Bontang seperti gas alam cair (Badak LNG) mengalami penurunan aktivitas produksi. Badak LNG dalam aktivitas ekonominya berorientasi pada kegiatan ekspor, sehingga dampak dari penurunan produksi yaitu semakin turunnya ekspor netto yang berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan Ekonomi di Bontang. Ekspor netto merupakan penyangga utama perekonomian Kota Bontang diikuti PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.

Kinerja sektor industri pengolahan migas yang terus turun tersebut menjadi faktor dominan melemahnya ekonomi Kota Bontang. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar PDRB Kota Bontang, yang pada tahun 2020 mencapai 79,60 persen. Jika dilihat tren kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2016–2020, terjadi penurunan secara konsisten terutama di tahun 2018 yakni sebesar 5,73 persen. Namun penurunan ini

tidak serta merta menyebabkan penurunan kinerja ekonomi sebab beberapa sektor masih mampu tumbuh positif dan turut mempengaruhi pergerakan perekonomian walaupun masih cukup kecil. Namun, karena penurunan sektor industri pengolahan yang cukup dalam membuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga tertekan cukup dalam. Tantangan terbesar Kota Bontang adalah bagaimana menggerakkan sektor berbasis non sumber daya alam seperti akomodasi, konstruksi, perdagangan, dan seterusnya, yang memang kontribusinya terus membaik. Kebijakan yang tepat dalam menstimulasi sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mendorong roda perekonomian terus berjalan positif. Secara makro, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan produksi seluruh barang dan jasa pada suatu wilayah dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan produksi seluruh barang dan jasa pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan produksi barang dan jasa. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kota Bontang atas dasar Harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang secara total mengalami laju pertumbuhan negatif (menurun) hampir setiap tahunnya selama periode 2016-2020. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2015-2017.

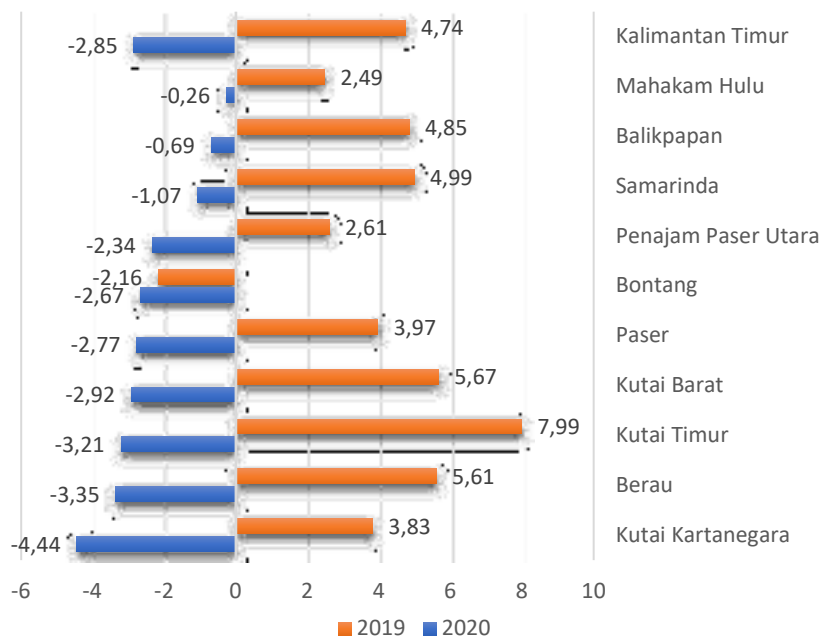
Sementara itu jika kita melihat pertumbuhan ekonomi tanpa migas, justru terjadi sebaliknya. Ekonomi Kota Bontang tanpa migas masih mampu tumbuh secara konsisten mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 2,47 persen, meskipun pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 4,26 persen menjadi 2,38 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-9 yang memukul perekonomian dunia, tidak terkecuali Kota Bontang. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang masih bernilai positif akibat dukungan aktivitas ekonomi industri pengolahan non migas. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan pada Gambar 2.22 berikut ini.



Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Gambar 2. 22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2016-2020.

Meski mengalami penurunan di tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan migas lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar -2,85 persen. Dalam lingkum regional Kaltim, seluruh Kabupaten/Kota mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Gambar 2. 23 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2020

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku tahun 2020 tercatat sebesar 56,56 triliun rupiah atau menurun sekitar 1,78 triliun rupiah apabila dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tercipta sepanjang tahun 2019. Apabila dilihat menurut masing-masing komponen pengeluarannya, penurunan tersebut tidak terjadi pada semua komponen. Pada tahun 2020, salah satu dari enam komponen pengeluaran yaitu Net Ekspor mengalami penurunan yaitu sekitar -2,03 triliun rupiah atau sekitar -4,65 persen dibanding tahun 2019. Aktivitas ekspor impor Kota Bontang berkaitan erat dengan aktivitas lapangan usaha Industri Pengolahan yang merupakan motor utama penggerak perekonomian Kota Bontang, dimana komoditas utama industri pengolahan seperti LNG, pupuk, amoniak, metanol, dan beberapa komoditas hasil industri kecil seperti amplang dan pempek merupakan komoditas ekspor baik ke luar negeri maupun ke provinsi/kabupaten/kota lainnya. Begitu pula sebagian komoditas pertanian, seperti ikan dan rumput laut. Penurunan volume produksi komoditas-komoditas tersebut secara langsung mempengaruhi nilai ekspor yang tercipta di samping adanya pengaruh perubahan harga. Komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar di tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 3,09 persen diikuti dengan komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,99 persen. Meningkatnya konsumsi rumah tangga sebesar 3,09 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai 5,26 persen. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya wabah virus COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Bontang berdasarkan PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2016-2020

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (juta rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.525.726,38	3.601.872,39	3.671.935,61	3.744.118,98	3.743.104,06
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	156.715,27	171.406,93	187.110,31	198.402,83	196.332,29
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	598.506,61	502.867,67	543.114,36	591.851,29	590.300,40
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.380.787,85	4.573.613,48	4.737.000,07	4.928.998,22	4.935.922,52
5 Perubahan Inventori	39.458,19	33.458,19	31.442,41	19.225,42	20.798,82

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (juta rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
6 Ekspor Barang dan Jasa Netto	34.134.314,81	34.189.837,78	32.145.614,10	30.940.798,36	29.822.750,41
7 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	42.835.509,11	43.073.056,45	41.316.216,87	40.423.395,11	39.309.208,50

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2021

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, yang dimotori oleh dua perusahaan besar di kota ini, yaitu PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim. Selain dua perusahaan BUMN tersebut, terdapat pula perusahaan swasta lainnya seperti PT. Kaltim Nitrate Indonesia sebagai penghasil Ammonium Nitrat, PT. Kaltim Parna Industri sebagai produsen Amoniak, dan PT. Black Bear Resources sebagai penghasil *Ammonium Nitrate Emulsion*. Sampai saat ini, kegiatan industri pengolahan mempengaruhi perekonomian Kota Bontang sekitar 80 persen setiap tahunnya. Kehadiran beberapa perusahaan yang utamanya bergerak di bidang industri kimia tersebut menjadi pemicu bagi pergerakan ekonomi di lapangan usaha lainnya. Salah satu lapangan usaha yang turut mengalami kemajuan dengan kehadiran kegiatan industri pengolahan adalah lapangan usaha konstruksi. Lapangan usaha tersebut sangat dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti pembangunan pabrik, jalan, gedung perkantoran, dan rumah tempat tinggal yang meningkat permintaannya seiring dengan cukup tingginya migrasi penduduk pendatang ke Kota Bontang, Dengan peranan sebesar 4-6 persen setiap tahunnya, Lapangan Usaha Konstruksi menempati urutan kedua di dalam struktur perekonomian Kota Bontang. Tabel 2.9 di bawah ini menunjukkan peranan masing-masing lapangan usaha dalam membentuk laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam selang waktu 2016-2020.

Tabel 2. 9 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Jenis Pengeluaran		Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.87	0.93	1.06	1.17	1.27
B	Pertambangan dan Penggalian	0.62	0.82	0.75	0.60	0.47
C	Industri Pengolahan	84.42	83.93	82.26	80.73	79.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04

Jenis Pengeluaran		Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
F	Konstruksi	4.69	4.90	5.62	6.34	6.59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.54	2.52	2.77	3.04	3.31
H	Transportasi dan Pergudangan	1.18	1.19	1.32	1.39	1.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.41	0.44	0.50	0.57	0.58
J	Informasi dan Komunikasi	0.71	0.68	0.73	0.77	0.84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.72	0.69	0.73	0.76	0.82
L	Real Estat	0.40	0.40	0.42	0.45	0.50
M,N	Jasa Perusahaan	0.39	0.39	0.42	0.46	0.49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.29	1.26	1.35	1.45	1.49
P	Jasa Pendidikan	0.85	0.88	1.00	1.07	1.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.58	0.60	0.68	0.74	0.90
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.28	0.31	0.35	0.39	0.41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Bontang Tahun 2021

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah itu. Angka PDRB per kapita biasanya diturunkan dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga nilainya menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk selama periode tersebut. Nilai PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara/wilayah. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak karena di dalam nilai PDRB per kapita masih terkandung nilai penyusutan dan pajak, serta nilai keuntungan usaha yang belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk negara/wilayah bersangkutan. Hal itu dapat terjadi apabila barang modal yang terlibat di dalam proses produksi bukanlah milik penduduk setempat. Dengan kata lain, pemilik modal adalah penduduk dari luar

negeri/luar wilayah, sehingga keuntungan usaha pun akan mengalir ke luar negeri/luar wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk sekitar 184 ribu jiwa, PDRB per kapita Kota Bontang mencapai nilai 312,15 juta rupiah. Dengan kata lain, rata-rata setiap satu orang penduduk Kota Bontang pada tahun 2020 mampu menghasilkan produk domestik sebesar 312,15 juta per tahun atau sekitar 26,01 juta per bulan. Nilai PDRB per kapita Kota Bontang selama periode 2016-2020 ditunjukkan oleh Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2. 10 Nilai PDRB per kapita Kota Bontang 2016-2020

Jenis Pengeluaran		PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rp), 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.863,93	3.217,26	3.566,58	3.840,02	3.953,42
B	Pertambangan dan Penggalian	2.036,73	2.832,97	2.516,98	1.960,67	1.479,21
C	Industri Pengolahan	279.469,25	289 687,63	277.573,62	264.989,46	248.479,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82,90	95,65	101,33	107,49	118,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60,44	69,91	77,72	80,17	82,80
F	Konstruksi	15.524,18	16.919,80	18.968,84	20.821,85	20.555,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.423,81	8.714,82	9.364,14	9.991,87	10.322,50
H	Transportasi dan Pergudangan	3.913,80	4.108,72	4.468,77	4.572,84	4.655,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.367,29	1.510,18	1.699,94	1.858,61	1.804,14
J	Informasi dan Komunikasi	2.347,49	2.351,64	2.449,09	2.537,46	2.634,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.382,64	2.364,80	2.461,23	2.497,35	2.545,44
L	Real Estat	1.323,67	1.373,61	1.414,73	1.482,59	1.545,60
M,N	Jasa Perusahaan	1.280,73	1.355,13	1.420,61	1.508,28	1.523,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.286,44	4.355,77	4.539,48	4.755,85	4.637,41
P	Jasa Pendidikan	2.802,88	3.046,56	3.366,18	3.508,46	3.715,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.931,33	2.082,82	2.287,57	2.433,50	2.816,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	938,44	1.058,55	1.173,61	1.294,72	1.275,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		331.035,96	345.145,85	337.450,41	328.241,18	312.145,42

Sumber : BPS Kota Bontang tahun 2021

Fluktuasi nilai PDRB pada tahun 2016 - 2020 lebih banyak disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas. Apabila lapangan usaha yang

bergerak di bidang migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka dapat diperoleh nilai PDRB tanpa migas per kapita. Nilai PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Memasuki tahun 2016, nilai PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang naik sebesar 1,10 persen atau meningkat sebesar 1,61 juta rupiah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas penduduk Kota Bontang mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Pertumbuhan PDRB per kapita naik cukup signifikan hingga 9,30 persen di tahun 2019, jauh lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,94 juta. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB tanpa migas tetap mengalami kenaikan walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,43 persen atau meningkat sebesar 4,22 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, secara rata-rata dapat dikatakan bahwa setiap penduduk Kota Bontang di 2020 mampu menghasilkan produk domestik dari aktivitas ekonomi selain migas sekitar 178,18 juta rupiah per tahun atau sebesar 14,85 juta rupiah per bulan.

Secara regional PDRB per kapita Kota Bontang tahun 2020 masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dan 2018. Demikian pula PDRB per kapita di daerah lainnya yang juga mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh dari pandemi Covid-19.

Tabel 2. 11 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten /Kota Kalimantan Timur

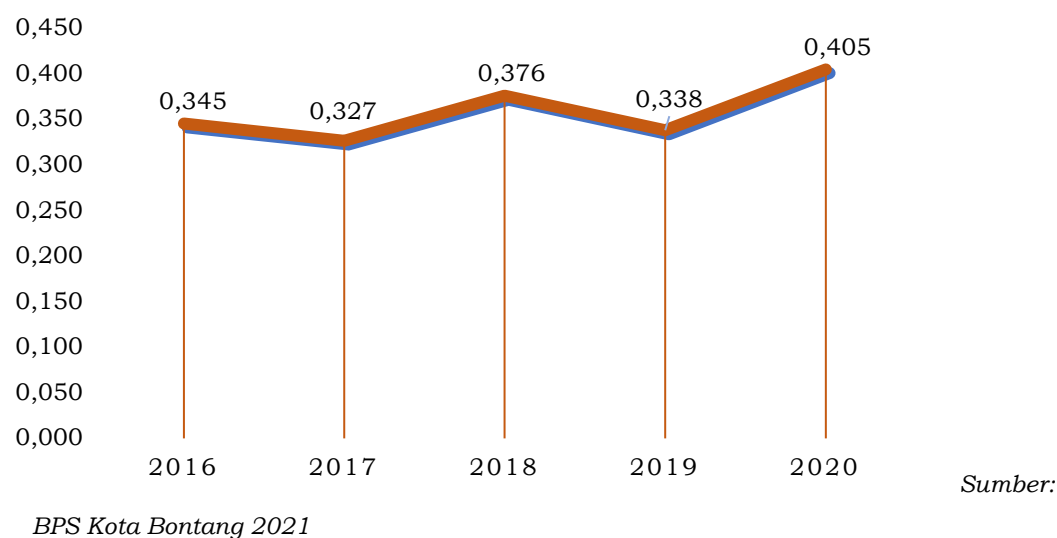
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Paser	171.64	167.96	148.63
Kutai Barat	192.10	197.14	183.84
Kutai Kartanegara	210.47	206.10	185.65
Kutai Timur	353.74	355.99	296.16
Berau	166.27	168.34	148.90
Penajam Paser Utara	55.70	56.81	55.70
Mahakam Ulu	95.32	103.04	104.60
Balikpapan	151.30	159.91	155.98
Samarinda	74.08	77.57	75.04
Bontang	337.45	328.24	312.15
Kalimantan Timur	174.16	175.25	160.11

Sumber : BPS Kaltim (2021)

2.2.1.3 Rasio Gini (Gini Ratio)

Koefisien gini (rasio gini) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

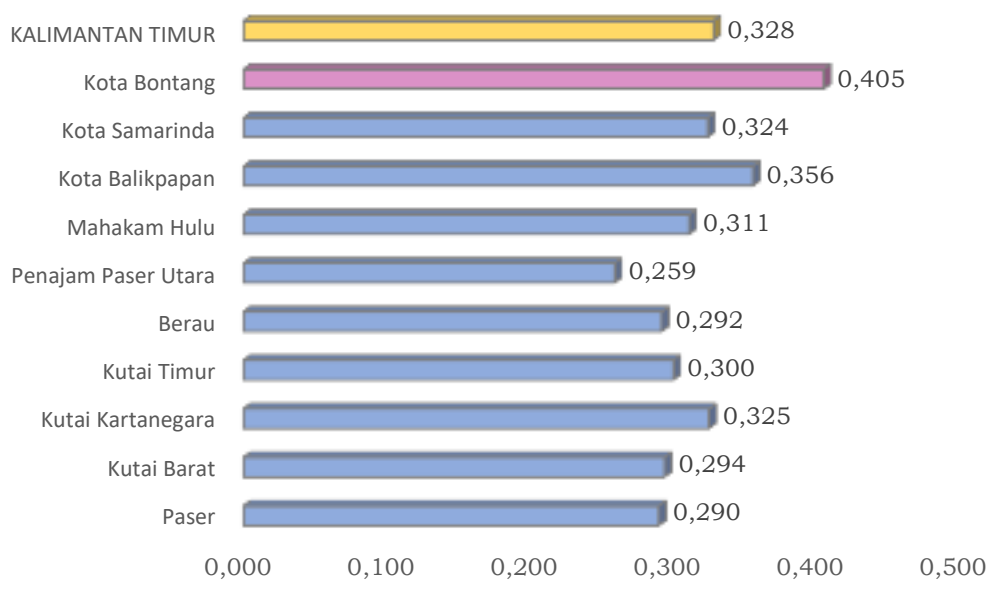
Peningkatan pengeluaran per kapita atau semakin sejahtera masyarakat, belum tentu terdapat pemerataan pendapatan di dalam suatu wilayah. Semakin besar angka rasio gini maka semakin tidak ratanya distribusi pendapatan. Rasio gini Kota Bontang pada tahun 2017 tercatat sebesar 0.327 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.345. Jika dilihat pada tahun 2018, terjadi peningkatan menjadi 0,376, namun terjadi penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 0,338. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Kota Bontang. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja indikator perekonomian daerah antara lain peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan dilihat dari perkembangan rasio gini Kota Bontang tahun 2016-2020, tekanan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,405 yang dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (*moderat*). Fluktuasi rasio gini Kota Bontang dapat dilihat pada gambar 2.24 sebagai berikut:



Gambar 2. 24 Rasio Gini Kota Bontang Tahun 2015 – 2020

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, ketimpangan pendapatan Kota Bontang merupakan yang paling tinggi. Sebagaimana tergambar pada gambar 2.22 dibawah ini, rasio gini

tahun 2020 tertinggi dialami oleh Kota Bontang sebesar 0,405, disusul oleh Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,338 dan Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,325. Meski pandemi COVID-19 cukup berdampak pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, namun rasio gini Provinsi Kalimantan Timur menurun menjadi 0,328 di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,330. Perbandingan Rasio Gini Kota Bontang tahun 2020 dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota lain dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



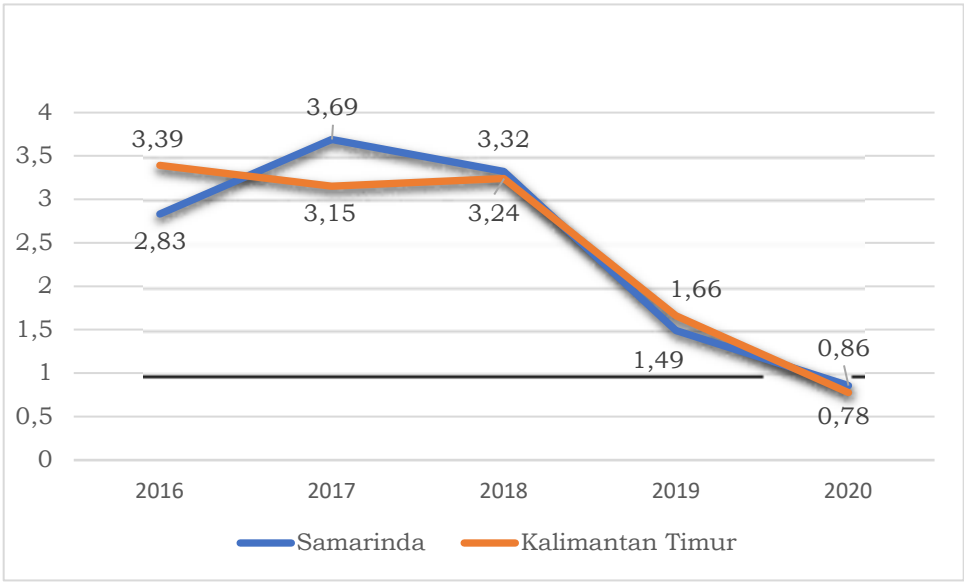
Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Gambar 2. 25 Perbandingan Rasio Gini Kota Bontang tahun 2020 dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota

2.2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Karena tidak dilakukan perhitungan tingkat inflasi secara khusus untuk wilayah Kota Bontang, maka tingkat inflasi merujuk pada hasil perhitungan nilai inflasi Kota Samarinda, sebagai daerah yang memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi terdekat. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Bontang selama periode 2016-2020 berfluktuasi dengan inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,49 persen dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan inflasi sebesar 3,69 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2019 yakni sebesar 0,86 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi yang diacu Kota Bontang masih dalam kategori terkendali dengan tingkat inflasi dibawah 5 persen. Sedangkan Provinsi Kalimantan

Timur mengalami inflasi tahun kalender sebesar 1,66 persen pada tahun 2019. Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Gambar 2. 26 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda

2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskinan yang akurat di setiap wilayah merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik menghitung kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan. Dengan garis kemiskinan 636.491 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2020, maka sekitar 4,38 persen penduduk Bontang terkategorisasi miskin. Angka tersebut relatif rendah, bahkan dalam peta regional (provinsi), tingkat kemiskinan di Bontang merupakan yang terendah kedua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penanganan kemiskinan di Kota Bontang cukup berhasil. Selain ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang rendah, juga ditunjukkan oleh kecenderungan tren yang terus menurun dalam empat tahun terakhir (2016-2019), meskipun terjadi kenaikan sebesar 0,16 persen

menjadi 4,38 persen di tahun 2020. Kenaikan ini dipicu oleh perlambatan perekonomian di Kota Bontang salah satunya akibat pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

Tabel 2. 12 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2016-2020

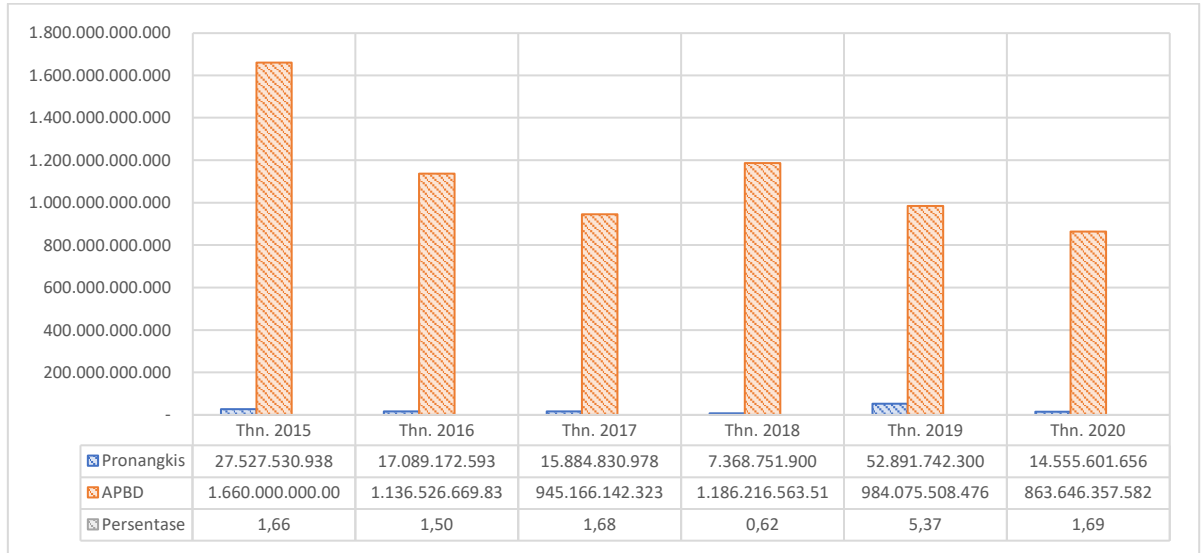
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	513.205	542.985	549.830	582.188	636.491
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	8,60	8,75	8,1	7,47	7,91
Penduduk Miskin (%)	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,842	0,92	0,93	0,42	0,54
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,204	0,25	0,26	0,08	0,09

Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Tingkat kemiskinan yang rendah mengindikasikan pentingnya untuk melihat lebih detail persoalan kemiskinan, seperti ketimpangan yang terjadi di dalamnya. Hal ini penting karena seringkali tingkat kemiskinan dapat ditekan, namun ketimpangannya masih tinggi yang menandakan bahwa ada penguasaan sumber daya pada golongan dan kelompok tertentu yang ikut menyumbang pada tingginya pendapatan per kapita. Lebih dari itu, ketimpangan juga terjadi antara individu atau rumah tangga dalam cakupan wilayah tertentu. Ukuran inilah yang disebut sebagai tingkat keparahan kemiskinan yang angkanya relatif masih tinggi. Dalam Tabel 2.11 dapat diamati bahwa tingkat keparahan kemiskinan di tahun 2016 adalah 0,24 persen dan bertahan hingga tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 menurun sebesar 0,08 dan 0,09. Dari angka ini terlihat ketimpangan yang pendapatan yang cukup rendah. Demikian juga dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang mencapai 0,8 persen di 2016, berkisar sebesar 0,9 persen di tahun 2019 dan 2018 kemudian menurun menjadi 0,42 persen di tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan meningkat kembali, yakni 0,54 persen. Hal ini menandakan walau berfluktuasi selama periode lima tahun terakhir, jarak antara pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan semakin dekat dengan garis kemiskinan di Kota Bontang. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang belum mamopu memberikan efek yang diharapkan. Sejumlah program yang dialokasikan di APBD untuk program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) sebagaimana gambar 2. 27 memperlihatkan bahwa

pengelolaan program pengkulangan kemiskinan belum dikelola dengan baik karena hasil dari intervensi pemerintah belum signifikan.

Penguatan intervensi dan pengelolaan program pronangkis melalui kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal kerja, bantuan sosial, beasiswa pendidikan gratis, dan bantuan kesehatan gratis serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan padat karya sebagai strategi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perlu diprioritaskan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat miskin. Pendataan penduduk miskin yang akurat dan akuntabel juga merupakan kunci penting agar intervensi pemerintah dalam penanggulungan kemiskinan tepat sasaran.



(Sumber: Bapelitbang Bontang, 2021)

Gambar 2. 27 Persentase Pronangkis dalam APBD Kota Bontang Tahun 2015 - 2020

Tabel 2. 13 Perbandingan Persentase penduduk miskin Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	8.68	9.28	9.03	8.95	9.23
Kutai Barat	8.65	8.72	9.15	9.09	9.29
Kutai Kartanegara	7.63	7.57	7.41	7.20	7.31
Kutai Timur	9.16	9.29	9.22	9.48	9.55
Berau	5.37	5.41	5.04	5.04	5.19
Penajam Paser Utara	7.49	7.63	7.40	7.18	7.36
Mahakam Ulu	10.65	11.29	11.62	11.25	11.44
Balikpapan	2.81	2.82	2.64	2.42	2.57
Samarinda	4.72	4.77	4.59	4.59	4.76
Bontang	5.18	5.16	4.67	4.22	4.38
Kalimantan Timur	6.11	6.19	6.03	5.94	6.10

Sumber: BPS Kota Bontang 2021

2.2.1.6 Angka Kriminalitas

Kondusivitas suatu wilayah dapat dilihat dari angka kriminalitas (*crime rate*). Angka Kriminalitas atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun berkenaan dikalikan 100.000 jumlah penduduk. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas Kota Bontang cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 137,54 sampai dengan tahun 2019 sebesar 73,23. Angka ini meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 119,6 yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 120 orang dari 100 ribu penduduk. Indikator kriminalitas di Kota Bontang dapat dilihat pada tabel 2.13 Sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kriminalitas Kota Bontang tahun 2016 – 2020

Uraian	Kriminalitas				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tindak pidana	239	138	112	133	221
Angka kriminalitas	137,54	78,18	62,43	73,23	119,6
Persentase penyelesaian tindak pidana	81,45	76,o3	98,33	86	99,33
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	40	82	86	63	68

Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Secara umum, persentase penyelesaian tindak pidana di Kota Bontang tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 99,33 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 86 persen. Kasus kejahatan atau tindak pidana di Kota Bontang relatif rendah namun cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun terjadi kenaikan jumlah tindak pidana yang cukup signifikan sebesar 39,8 persen yang kemungkinan dipicu oleh tingginya penurunan pendapatan dan pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sedangkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Bontang mengalami fluktuasi, tahun 2016 terjadi 40 kasus, kemudian meningkat menjadi 86 kasus di tahun 2018. Selanjutnya menurun menjadi 68 kasus di tahun 2020. Dari informasi data diatas dapat dikatakan bahwa kondisi Kota Bontang belum cukup aman dan kondusif.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan pada setiap daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan suatu perubahan. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,

meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Potret kondisi dan potensi pembangunan sebuah daerah dapat dilihat dari pendekatan pembangunan manusia. Sejak tahun 1990 United Nations (PBB) telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai alat untuk mengukur/mengontrol pembangunan manusia melalui suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia.

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan manusia di Kota Bontang, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

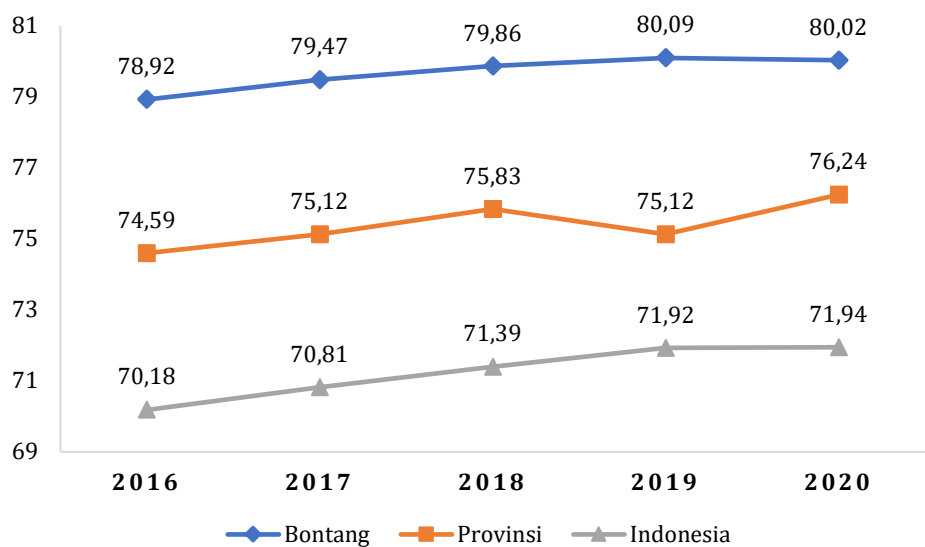
Sejak tahun 2010, pembangunan manusia di Kota Bontang memperlihatkan perkembangan yang positif. Tercatat bahwa IPM Kota Bontang tahun 2010 adalah 76,97. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 80,09 dimana setiap tahunnya, IPM Kota Bontang meningkat rata-rata 0,35 poin per tahun. Selama tahun 2010-2019, telah terjadi kenaikan IPM hingga 3,12 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Bontang. Namun adanya pandemi COVID-19 berkontribusi pada penurunan IPM Kota Bontang pada tahun 2020 menjadi 80,02. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pengendalian virus COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Penurunan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tahun 2020 adalah sebesar 16.278 ribu/kapita/tahun.

Pencapaian IPM Kota Bontang tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 76,24 dan IPM Indonesia sebesar 71,94. Dan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang berada pada peringkat ketiga teratas dan termasuk pada kategori IPM sangat tinggi.

Kondisi ini memperlihatkan keberhasilan Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Namun dalam periode lima tahun kedepan serta menghadapi revolusi industri 4.0

dan perkembangan Kota Bontang sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara, diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dibawah ini dapat dilihat perkembangan IPM Kota Bontang dan perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2016-2021.



Sumber: BPS Kota Bontang 2021
Gambar 2. 28 Perbandingan IPM Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.

Indikator pembentuk IPM Kota Bontang yang meliputi usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, cenderung meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Rincian nilai pembentuk IPM dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2. 15 Komponen IPM Kota Bontang tahun 2016 – 2020

Tahun	IPM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rup./Kapita/Thn)
2016	78.92	10.39	12.79	74.71	16.157.00
2017	79.47	10.70	12.88	73.72	16.271.00
2018	79.86	10.72	12.89	73.94	16.698.00
2019	80.09	10.73	12.90	74.18	16.843.00
2020	80.02	10.79	13.03	74.28	16.278.00

Sumber: BPS Kota Bontang 2021

A. Pendidikan

Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting, yang

memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Pada tahun 2020, AHLS Kota Bontang mencapai 13,03 atau naik sebesar 0,13 dibandingkan tahun 2019 (12,9). Pada tabel 2.13 diatas terlihat bahwa AHLS Kota Bontang terus naik dari 12,77 di tahun 2016 menjadi 13,03 di tahun 2019. Kenaikan cukup besar terjadi di tahun 2020, dibandingkan sebelumnya melandai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Peningkatan AHLS yang belum terlalu signifikan di beberapa tahun terakhir, memerlukan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Bontang di bidang pendidikan. Salah satu upaya peningkatan SDM tersebut adalah dengan dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004, beasiswa bagi pelajar, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Kota Bontang serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang.

Komponen pembentuk IPM lainnya di bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kota Bontang mengalami kenaikan secara landai pada periode 2016 hingga 2017 yakni sebesar 0,01, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi kenaikan cukup berarti yakni 0,31 tahun dan pada periode 2017-2020 kenaikan terjadi 0,02 tahun, 0,01 tahun dan 0,06 tahun. Secara keseluruhan telah terjadi kenaikan RLS 0,41 tahun sepanjang periode 2016 hingga 2020. RLS Kota Bontang di tahun 2020 mencapai angka 10,79 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah Menengah Umum (SMU). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata menempuh pendidikan hingga jenjang SMU selama lebih dari 1 tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan

oleh Pemerintah Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

B. Kesehatan

Indikator pembentuk IPM bidang kesehatan adalah usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai usia harapan hidup (UHH) yang lebih tinggi. Besarnya nilai UHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai UHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan UHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.

Perkembangan usia harapan hidup Kota Bontang sejak tahun 2016 terus menunjukkan peningkatan dari 73,71 menjadi 74,28 pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan 0,57. Pada tahun 2020, UHH di Kota Bontang adalah sebesar 74,28 tahun yang artinya harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun tersebut untuk bertahan hidup adalah sebesar 74,28 tahun.

Keberhasilan pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan melalui indikator yang diukur dengan usia harapan hidup terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian BPJS PIB serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk belanja modal pengadaan gedung dan bangunan Rumah Sakit BLUD di RSUD Taman Husada, rehab/sedang/berat pembangunan Rumah Sakit Tipe D, dll

2.2.2.2 Kesempatan Kerja

Penduduk usia produktif erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan

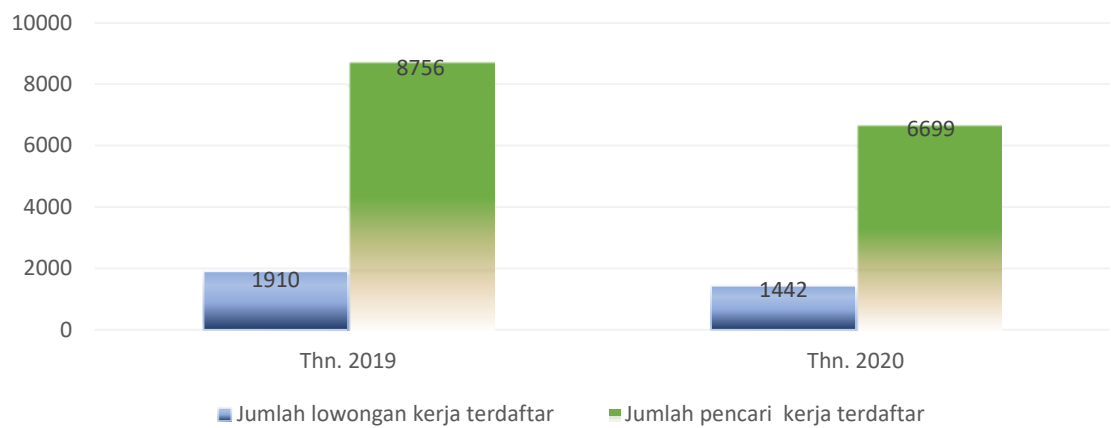
manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam rangka terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu.

Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.

Indikator untuk melihat angka pengangguran adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu proporsi penduduk yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020 angka TPT di Kota Bontang adalah sebesar 9.46 persen. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Tingginya tingkat pengangguran tidak terlepas pula dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja, tercatat TKK di Kota Bontang adalah sebesar 90,98 persen, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 90,59 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota lain, TPT Kota Bontang merupakan yang paling tertinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Bontang sebagai Kota Industri.

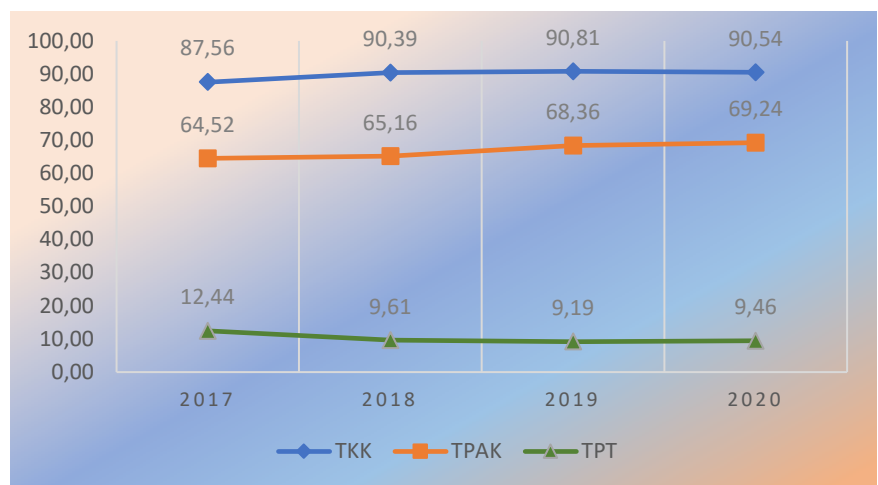
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang, menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja yang belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja sangat mempengaruhi tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2019, jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebanyak 1.910 sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar

8.756. Pada tahun 2020 jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebanyak 1.442 sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar 6.699.



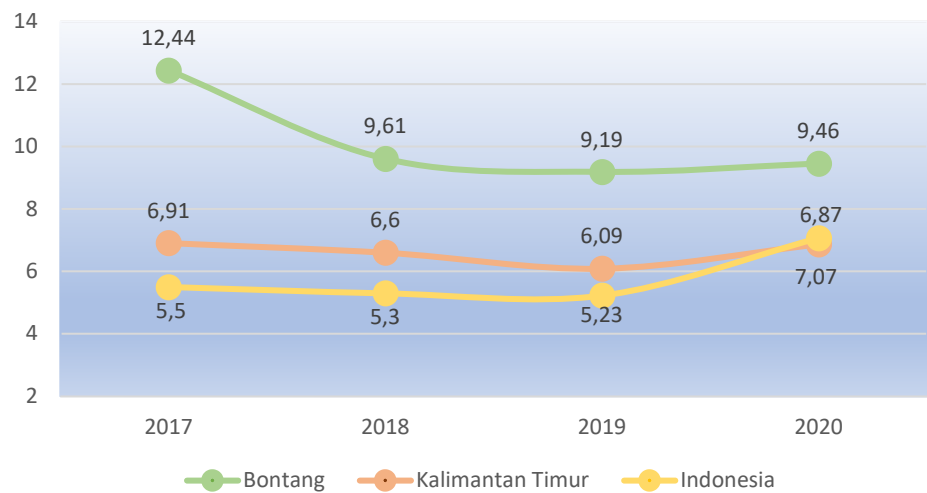
(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Bontang, 2021)

Gambar 2. 29 Jumlah Lowongan Kerja dan Pencari Kerja Tahun 2019 – 2020



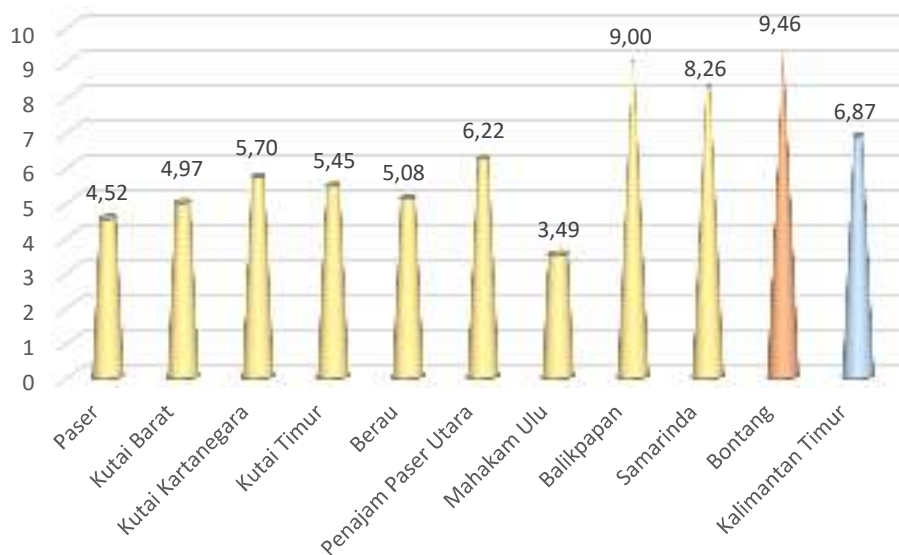
Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Gambar 2. 30 Statistik Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kota Bontang 2021

Gambar 2. 31 Perbandingan TPT dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2020



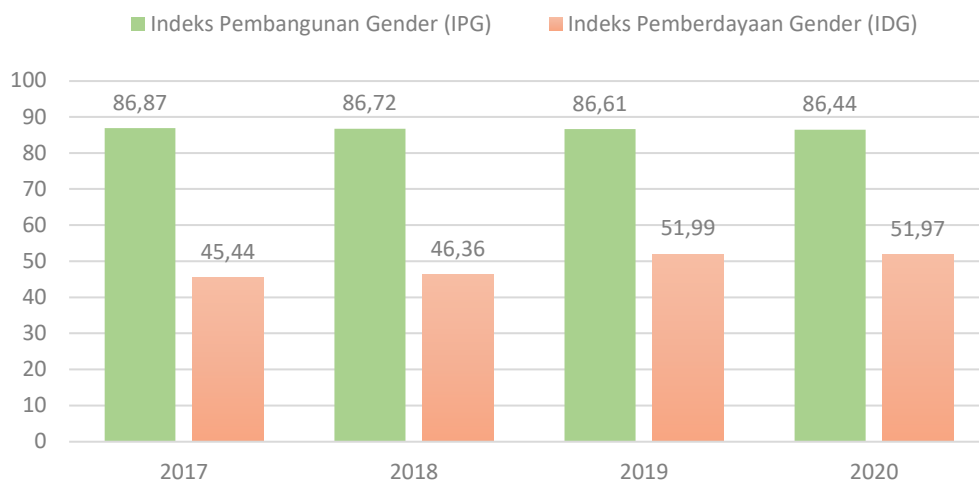
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Gambar 2. 32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Kalimantan Timur Tahun 2020

2.2.2.3 Pembangunan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yaitu ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Nilai IPG yang ideal jika mendekati 100. Apabila IPG berada jauh di bawah 100, artinya capaian pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di wilayah tersebut lebih tinggi daripada perempuan, begitu pula jika sebaliknya.

Hingga tahun 2020, pembangunan manusia yang dicapai oleh laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini tercermin pada angka IPG Kota Bontang yang mengalami kenaikan secara kontinyu mulai dari tahun 2017 sebesar 86,44 menjadi 86,87 pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.33 Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki masih relatif lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, tren kenaikan IPG yang semakin mendekati 100 setiap tahunnya tentu merupakan hal yang sangat baik. Jika tren positif ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti disparitas gender di Kota Bontang akan semakin mengecil.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021

Gambar 2. 33 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bontang

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), terdapat ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2017, IDG Kota Bontang sebesar 45,44, dan dalam kurun waktu 2 tahun terus meningkat menjadi 51,99 di tahun 2019. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,02 menjadi 51,7. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya, meski dilihat dari sisi angka, capaian perempuan dibandingkan laki-laki di Kota Bontang masih relatif rendah, diduga disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penduduk tanpa terkecuali, namun kesempatan ini belum dapat digunakan secara optimal oleh kelompok lain (dalam hal ini perempuan).

2.2.2.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan pada fokus seni, budaya dan olahraga meliputi indikator jumlah grup kesenian, gedung kesenian, benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, organisasi olahraga dan gedung olahraga. Jumlah grup kesenian di Kota

Bontang pada tahun 2020 sebanyak 37 grup, mengalami penurunan sebanyak 17 grup jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kurangnya jumlah grup kesenian ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi COVID-19. Sampai dengan tahun 2020, jumlah gedung kesenian Kota Bontang sebanyak 5 gedung. Jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk maka nilai rasionya cenderung menurun. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah sedangkan jumlah gedung tidak bertambah. Di Kota Bontang terdapat 103 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Cagar Budaya yang dilestarikan terletak di Kelurahan Bontang Kuala, yaitu mesjid tua Al Wahab, bekas kantor desa Bontang Kuala dan bekas penjara.

Perkembangan bidang olah raga selama periode 2016-2021 dapat dilihat dari perkembangan jumlah klub dan gedung olahraga. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa jumlah klub olahraga di Kota Bontang menurun menjadi 214 pada tahun 2020 dibandingkan dengan 250 klub di tahun 2016. Sedangkan jumlah gedung olahraga meningkat sebanyak 1 unit di tahun 2017 menjadi 5 unit dan hingga 2020 belum ada penambahan gedung olahraga. Jika dilihat dari proporsinya, maka dapat disimpulkan bahwa 1 gedung olahraga dimanfaatkan oleh 50.000 penduduk. Kondisi ini sangat kurang mengingat capaian prestasi olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarna yang memadai.

Tabel 2. 16 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Kota Bontang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Group Kesenian	49	50	51	54	37
Jumlah Gedung Kesenian	5	5	5	5	5
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	103	103	103	103	103
Jumlah Klub Olah Raga	250	250	246	267	214
Jumlah Gedung Olah Raga	4	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Untuk mewujudkan Kota Bontang yang berdaya saing melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-rata lama sekolah, APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

Tabel 2. 17 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,77	12,79	12,88	12,9	13.03
Angka rata-rata Lama Sekolah	10,39	10,7	10,72	10,73	10.79
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- SD/MI/Paket A (%)	105.5	106,07	101,07	94,88	103.41
- SMP/MTS/Paket B (%)	107,3	106,99	108,26	97,05	102.26
Angka Pendidikan yang ditamatkan					
- SD/MI/Paket A (%)	1,98	2,02	1,95	1.80	1.72
- SMP/MTS/Paket B (%)	1,86	1,88	1,77	1.79	1.67
Angka Partisipasi Murni (APM)					
- SD/MI/Paket A (%)	96,5	97,09	92,5	91.04	93.02
- SMP/MTS/Paket B (%)	83,62	74,17	81,36	75.68	80.27
Pendidikan Sekolah Dasar					
- Angka Partisipasi Sekolah	896,64	970,89	925,01	910.38	977.21
- Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	33,06	31,08	30,44	30.78	28.2
- Rasio Guru/Murid	524,69	507,92	535,15	505.45	522
- Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	52,47	50,79	53,52	50.54	49.2
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
- Angka Partisipasi Sekolah	711,33	740,58	813,57	756.76	826.63
- Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	29,53	37,25	38,36	38,49	34.35
- Rasio Guru/Murid	730,14	647,4	638,79	630.74	680.66
- Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	73,01	64,74	73,88	63.07	64.44
Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	99,78	99,41	99,77	99.36	99.36
Fasilitas Pendidikan					

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
- Sekolah / Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95	95	95,08	91.80	91.80
- Sekolah / Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	91,67	91,18	91,43	82.35	84,85
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,89	99,68	96,4	78.65	49.69
Angka Putus Sekolah					
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,015	0	0	0	0
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	0,032	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kota Bontang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 APK tingkat SD mencapai 103,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Kota Bontang diluar umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD. Sedangkan APK untuk tingkat SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 102,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Kota Bontang diluar umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah

dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APM Kota Bontang untuk tingkat SD dan SMP pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Nilai APM dan APK sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan yang menyebabkan fluktuasi angka. Angka Partisipasi Murni jenjang SD tahun 2020 mengalami peningkatan 1,98 persen dibandingkan dengan tahun 2019 namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 98,82 persen. Untuk Jenjang SMP tahun 2020 juga mengalami peningkatan 4,59 persen namun dibawah target sebesar 1,87 persen.

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya dan dibawah target yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia >15 tahun di Kota Bontang. Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang pada tahun 2020, sebanyak 843 penduduk berusia >15 tahun masih buta aksara. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target 100 persen.

SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pendidikan Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	10.690	10.605	99,20%	9.186	9.186	100,00%
Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/Mts)	30.119	30.134	100,05%	28.107	28.107	100,00%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-8 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	24.923	24.923	100,00%	37.250	37.250	100,00%

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Bontang Tahun 2019-2020, Bag. Pemerintahan Setda Kota Bontang

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari target menjadi 1,03 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 4 kasus kematian ibu dari jumlah 3.886 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 4 kasus kematian ibu dari jumlah 3.886 kelahiran hidup. Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak langsung (penyakit tidak menular sebanyak 3 kasus kematian) dan penyebab langsung (*hemoraghic postpartum* sebanyak 1 kasus kematian). Kondisi saat ini hanya terdapat 2 rumah sakit dari total 5 rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Selain itu, perlu penggerakan peningkatan kelas ibu hamil di kelurahan/ Puskesmas serta melakukan edukasi suami siaga.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 53 kasus kematian bayi yang dilaporkan, terdiri dari kematian neonatal (berumur 0-28 hari) sebanyak 44 kasus dan kematian *postnatal* (berumur 29 hari – 11 bulan) sebanyak 9 kasus dari jumlah 3.886 kelahiran hidup yang disebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, penyakit bawaan (kelainan kongenital), pneumonia, kelainan saluran cerna dan lain-lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi serta pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal yang sampai saat ini hanya terdapat di RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang memiliki ruang perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 10,56% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 774 balita gizi kurang dari total 7.328 balita seluruhnya yang ditimbang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kemiskinan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, praktik pengasuhan anak yang kurang tepat dan/atau konsumsi makanan bergizi yang rendah. Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat zat besi (FE) selama kehamilan, peningkatan pelayanan ANC pada fasilitas kesehatan sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, memaksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin serta edukasi tentang pola asuh dan pola makan yang sesuai dengan usia balita.

Capaian indikator Insiden Rate (IR) DBD mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu 78,46 dan terealisasi sebesar 148,46 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2020 terdapat 269 kasus DBD dari total penduduk sebanyak 184.784 jiwa. Kota Bontang merupakan salah satu daerah endemis demam berdarah, dimana angka IR DBD cenderung meningkat yang diakibatkan oleh faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan mobilitas penduduk yang diiringi oleh peningkatan sarana transportasi yang menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.

Dalam kasus stunting, meski telah mengalami penurunan, tapi angka stunting di tahun 2020 masih relatif tinggi, yaitu 20,37 persen. Terlebih saat ini, komitmen global dan nasional sangat kuat dalam upaya mengatasi persoalan stunting, sehingga mau tidak mau juga perlu diikuti komitmen pemerintah daerah, termasuk Kota Bontang dengan terus menekan secara konsisten angka stunting. Dinas Kesehatan selama ini telah melibatkan pihak swasta untuk turut serta memperbaiki gizi masyarakat. Sesuai dengan program pusat, Dinas Kesehatan juga secara intensif telah melakukan pencatatan status gizi kelompok sasaran melalui aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e PPGBM). Disarankan agar berbagai program untuk penanganan gizi buruk secara umum perlu mulai menyasar remaja putri calon ibu sebagai salah satu sasaran program perbaikan gizi. Di samping itu, kampanye program cegah stunting perlu dilakukan secara lebih

masif dan intens kepada masyarakat. Kelas gizi di puskesmas yang selama ini telah dilakukan perlu lebih diintensifkan.

Tabel 2. 19 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per-1000 kelahiran hidup	-	1,32	5,1	0,79	1,03
Angka Kematian Ibu per-100000 kelahiran hidup	-	131,61	512,4	78,80	102,93
Angka Kematian Bayi	-	8	1,3	11,3	13,6
Prevalensi balita gizi kurang	-	-	1,3	7,4	10,6
Insiden Rate DBD	-	8	1,3	11,3	13,6
Presentase Rumah tangga ber-PHBS	-	64,00	-	-	-
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	-	-	-	21,36	20,37

Sumber : Dinas Kesehatan, BPS Kota Bontang Tahun 2021

Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar bidang Kesehatan mencapai 64,66 persen di tahun 2020, menurun jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2019 sebesar 89,55 persen.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 20 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.965	3.965	100,00%	4.058	4.005	98,69%
Ibu bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	3.791	3.777	99,63%	3.874	3.864	99,74%
Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.807	2.904	76,28%	3.504	3.066	87,50%
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan	17.592	12.490	71,00%	17.645	9.417	53,37%

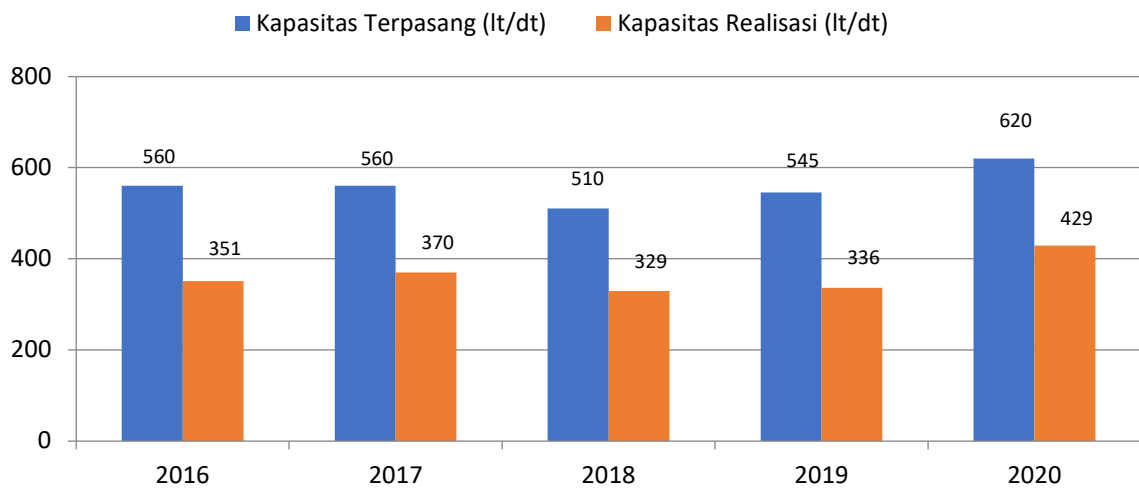
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	pelayanan kesehatan						
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.771	6.592	97,36%	29.898	11.049	36,96%
Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah orang berusia 15 -59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	123.116	46.604	37,85%	123.071	29.559	24,02%
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	4.543	4.543	100,00%	6.593	4.255	64,54%
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.816	3.816	100,00%	11.967	3.455	28,87%
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	1.904	1.904	100,00%	4.201	2.255	53,68%
Pelayanan Kesehatan orang yang dengan gangguan jiwa (ODG) berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	195	195	100,00%	199	160	80,40%
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.431	3.174	92,51%	1.914	1.878	98,12%
Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	Jumlah orang - orang terduga beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	9.054	9.054	100,00%	13.924	6.969	50,05%

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat erat kaitannya dengan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tahun 2020, panjang jalan di Kota Bontang mencapai 195.337 meter. Jika dipotret berdasarkan kondisi, maka proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Bontang tahun 2020 adalah sebesar 89,99 persen. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 91,15 persen. Penurunan ini dipicu oleh frekuensi lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas badan jalan meningkat seiring tumbuhnya industri di Bontang, terutama di Kelurahan Bontang Lestari.

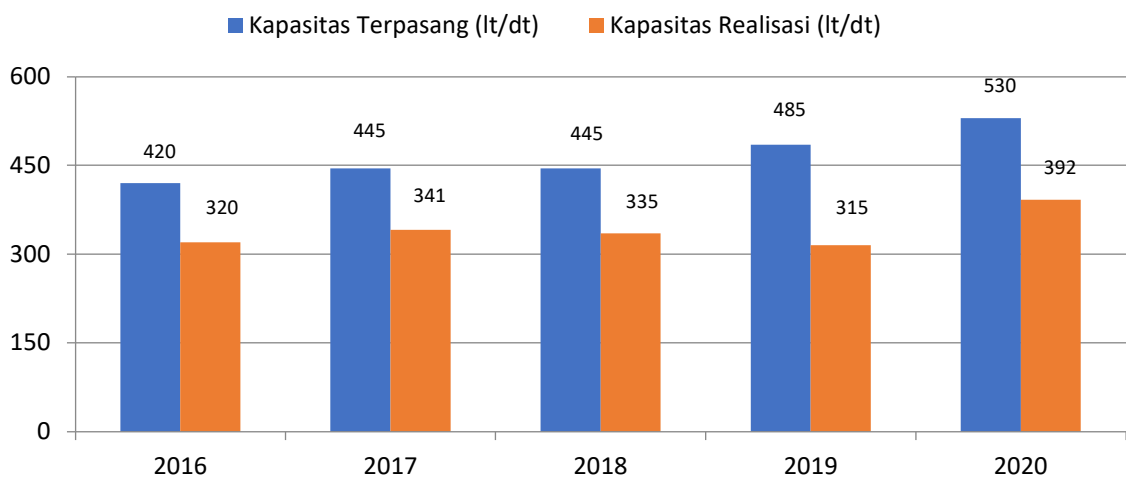
Selain jalan, air bersih merupakan layanan penting yang wajib difasilitasi pemenuhannya. Selama periode 2016 – 2020 terjadi peningkatan secara konsisten terhadap indikator ini. Saat ini Kota Bontang masih sangat mengandalkan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk dikarenakan tidak memiliki sumber air permukaan yang mencukupi yang dapat dipakai untuk sumber air baku. Pengambilan air tanah melalui sumur-sumur dalam yang dilakukan secara terus menerus telah menyebabkan turunnya muka air tanah yang pada akhirnya mengakibatkan semakin menurunnya jumlah air tanah yang dapat diambil pada sumur-sumur tersebut. Kota Bontang memiliki 24 unit sumur dalam yang dikelola oleh PDAM dengan kapasitas 620 liter/detik namun hanya dapat dimanfaatkan 429 liter/detik. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA), terdapat 13 unit IPA dengan total kapasitas 530 liter/detik dan hanya dapat mendistribusikan air sebesar 392 liter/detik, masih dibawah kapasitas yang dibutuhkan sebesar 471 liter/detik atau mengalami defisit sebesar 79 liter/detik.

Belum semua penduduk Kota Bontang memiliki akses air minum yang layak dan aman yang disebabkan karena keterbatasan sumber air baku untuk air minum, kapasitas produksi dan distribusi air minum tidak maksimal, pelayanan air minum belum optimal, dan masih terkendalanya penyediaan air minum untuk penduduk di pesisir dan pulau-pulau. Persentase penduduk yang telah mendapatkan akses air minum layak dan aman sebesar 81,69% dari total jumlah penduduk.



Sumber: PDAM Bontang, 2021

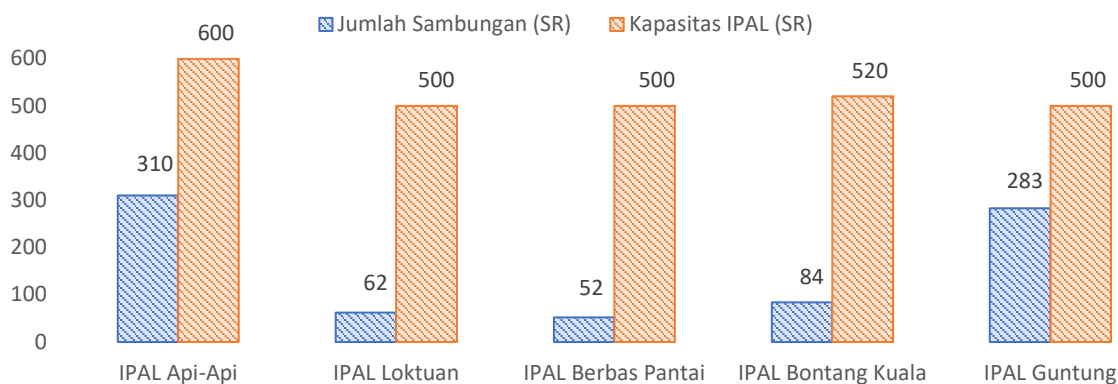
Gambar 2. 34 Kapasitas Sumur Dalam



Sumber: PDAM Bontang, 2021

Gambar 2. 35 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air

Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari rumah tangga, buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, rumah susun dan asrama/mess dan bukan limbah bahan berbahaya dan beracun. Air limbah domestik perlu dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air agar tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Kota Bontang saat ini memiliki 1 unit IPLT dan 5 unit IPAL skala kawasan dengan total sambungan sebanyak 791 SR.



Sumber: Dinas PUPR Bontang, 2021
 Gambar 2. 36 Jumlah Kapasitas dan Sambungan Rumah IPAL Terpusat

Di Kota Bontang belum semua penduduk mempunyai akses terhadap air limbah domestik. Penduduk yang telah memiliki akses layak untuk air limbah domestik sebesar 94,45 persen, atau masih ada sebesar 5,55 persen masih melakukan BABS akibat kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan akibat rusaknya sebagian jaringan IPAL yang ada. Terdapat juga masyarakat yang telah memiliki akses untuk pengelolaan air limbah domestik tetapi secara kualitas tidak memenuhi persyaratan teknis misalnya bocornya tangki septik yang dimilikinya. Pengelolaan air limbah domestik di pulau-pulau juga belum dapat tertangani dengan baik. IPAL komunal dan jaringannya sudah mengalami kerusakan, begitupun dengan MCK Komunal yang ada dimana pengolah air limbahnya beberapa juga sudah mengalami kerusakan.

Sementara itu, penataan ruang di Kota Bontang sudah cukup baik, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (RTRW) tahun 2016 sebesar 86 persen. Kedepan perlu dilakukan pengukuran kesesuaian pemanfaatan ruang kembali dan upaya pengendalian yang lebih komprehensif dari Pemerintah Kota Bontang agar pemanfaatan ruang mengacu pada dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 21 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	94,62	94,72	89,13	91,15	89,99
Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	96.1	98.74	99.52	97.64	81,69

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah tangga ber Sanitasi (%)	96,00	99,51	99,51	98,69	97,15
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	86	-	65	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2021

Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 95,87 persen di tahun 2020, menurun jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2019 sebesar 99,66 persen.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	181.618	181.296	99,82%	184.784	179.781	97,29%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	181.618	180.710	99,50%	184.784	174.533	94,45%

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Bontang Tahun 2019-2020, Bag. Pemerintahan Setda Kota Bontang

2.3.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari potret kawasan kumuh dan kondisi rumah layak huni. Luas kawasan kumuh di Kota Bontang mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020. Tercatat di Kota Bontang terdapat 88,20 hektar kawasan kumuh pada tahun 2016, menurun hingga mencapai 16,33 hektar pada tahun 2019. Adanya perubahan parameter dan delineasi pemetaan kawasan kumuh pada tahun 2020 mempengaruhi identifikasi luas kawasan kumuh menjadi 68,19 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat penambahan kawasan

kumuh baru di Kota Bontang. Perlu strategi yang terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat agar luasan kawan kumuh berkurang sesuai target.

Persentase rumah layak huni di Kota Bontang cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Terlihat pada tabel 2.22 dibawah ini bahwa pada tahun 2020 terdapat 96,64 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 97,67 persen. Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh mengindikasikan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Kedepannya perlu peningkatan upaya penanganan seperti bantuan pemugaran rumah layak huni dan pencegahan agar tidak terdapat kawasan kumuh baru.

Tabel 2. 23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas kawasan kumuh (ha)	88,20	73,56	26,13	16,33	68,19
Persentase rumah layak huni	-	97,35	97,35	97,67	96,64
Jumlah rumah tidak layak huni	-	1.360	1.360	1.196	1.726

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021

Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 tidak dilaksanakan, karena jenis/status/kategori bencana yang terjadi belum ditetapkan melalui keputusan Walikota dan belum ada surat penetapan melalui Keputusan Walikota terkait kawasan yang tidak layak untuk perumahan sebagai dasar melakukan relokasi.

Tabel 2. 24 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0	0	0

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Bontang Tahun 2019-2020, Bag. Pemerintahan Setda Kota Bontang

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Adapun urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dicerminkan dalam indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,94	7,05	5,4	5,45	5,56
Persentase Penegakan PERDA	66	85	100	100	100
Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	62,21
Persentase pembinaan forum kerukunan masyarakat	N/A	N/A	N/A	0,15	1,14
Jumlah konflik yang belum diselesaikan	12	12	11	10	8
Jumlah penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	45	181	46	14	-

Sumber : Satpol PP Kota Bontang Tahun 2020
BPS Bontang, 2021
Bakesbangpol, 2021

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dengan mengukur sisi kuantitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan; dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah. Rasio Satpol PP pada tahun 2016-2020 di Kota Bontang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mencapai 5,56. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5 hingga 6 anggota Satpol PP yang bertugas menjamin ketentraman dan ketertiban setiap 10.000 penduduk Kota Bontang.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dengan mengukur sisi kuantitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan; dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah. Rasio Satpol PP pada tahun 2016-2020 di Kota Bontang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mencapai 5,56. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5 hingga 6 anggota Satpol PP yang bertugas menjamin ketentraman dan ketertiban setiap 10.000 penduduk Kota Bontang.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara. Indikator persentase penegakan Perda sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sedangkan penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Salah satu upaya menjaga kondusivitas wilayah adalah menyelesaikan konflik yang terjadi di Kota Bontang. Adapun data penyelesaian konflik selama tahun 2016 hingga 2020 tergambar pada tabel 2. 24 .

Pada tahun 2016 hingga 2021 tercatat terjadi konflik sebanyak 13 kasus. Tetapi, hingga pada tahun 2021 masih tersisa 8 kasus yang belum diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan penyelesaian masalah tergantung dari pihak yang berkonflik. Pemerintah Kota Bontang telah menindaklanjuti laporan dan melakukan mediasi antar pihak yang

bersengketa. Pemerintah Kota Bontang bertindak sebagai mediator bukan sebagai eksekutor.

Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencapai 76,78 persen di tahun 2020, meningkat jika dibandingkan dengan rata – rata capaian pada tahun 2019 sebesar 63,22% persen

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan ketentraman dan ketertibang umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	20.000	12.983	64,92%	20.000	12.000	60,00%
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	13.260	11.785	88,88%	27835	26662	95,79%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.550	3.494	137,02%	2195	617	28,11%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54.015	150	0,28%	69	69	100,00%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	181.618	45.404	25,00%	69	69	100,00%

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Bontang Tahun 2019-2020, Bag. Pemerintahan Setda Kota Bontang

2.3.1.6 Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah.

Adanya gelandangan, pengemis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Pengelompokan daerah berdasar PMKS sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran masalah PMKS dengan tujuan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial tidak dapat diatasi seluruhnya namun dapat ditekan rendah dan ditangani secara serius dalam pembangunan secara merata ke lapisan masyarakat.

Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2020, jumlah PMKS sebanyak 10.338 jiwa yang terbagi dalam 26 jenis/kategori. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Cakupan PMKS yang ditangani, PMKS yg memperoleh bantuan social dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi akhir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penanganan PMKS mencapai 100%. Bantuan terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), dan bantuan pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitas (ADK).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani dan menyalurkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual. Pendekatan biopsikososial melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga penanganannya dapat paripurna.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Di Kota Bontang jumlah rumah tangga miskin dalam data DTKS cenderung meningkat dari 6.077 rumah tangga di tahun 2016 menjadi 8.510 rumah tangga pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Bontang belum maksimal.

Tabel 2. 27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	45.264	52.138	30.705	37.763	10.338
Jumlah penduduk miskin (indikator daerah)	38703	38703	37232	33938	34098
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-	70,64	90,16	95,48	100
Cakupan PMKS yang ditangani (%)	-	76,1	93,57	99,08	100
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	-	70,64	90,16	95,48	100
Jumlah RT Miskin dalam Data DTKS	6.077	5.725	5.098	8.202	8.510

Sumber Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021

Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial mencapai 93,56 persen di tahun 2020, menurun jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2019 sebesar 100 persen. Realisasi pencapaian spm pelayanan dasar bidang sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	418	418	100,00%	593	402	67,79%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	26	26	100,00%	979	979	100,00%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	3.223	3.223	100,00%	2.850	2.850	100,00%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	7	7	100,00%	6	6	100,00%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	18.513	18.513	100,00%	963	963	100,00%

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Bontang Tahun 2019 -2020, Bag. Pemerintahan Setda Kota Bontang

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Di Kota Bontang angka sengketa pengusaha-pekerja menurun dari tahun 2019 yaitu sebesar 10,53, dimana jumlah sengketa perusaha pekerja sebanyak 8 sengketa dari 760 perusahaan ditahun 2020.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat serta jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya. Sejak tahun 2016 hingga 2020 indikator ini mengalami cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2017, pencari kerja yang ditempatkan semakin meningkat. Pada tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 18,68 yang mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan sosialisasi kepada pencari dan pemberi kerja serta pencarian informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Tabel 2. 29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	38,16	36,84	40,79	36,84	10,53
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	21.75	15.60	15.31	16,16	18,58

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama 5 tahun terakhir di Kota Bontang Rasio KDRT pada tahun 2018 merupakan capaian terendah yaitu sebesar 0,005 dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 0,02 dan 0,04. Rasio KDRT meningkat bisa jadi karena keberanian korban untuk melaporkan.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Pelayanan pengaduan merupakan pintu awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialami. Dari data pada tabel 2.27 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari pengaduan yang ada dapat diselesaikan secara keseluruhan.

Tabel 2. 30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio KDRT (%)	0,021	0,015	0,005	0,02	0,04
Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

2.3.2.3 Urusan Pangan

Berdasarkan data pola pangan harapan Kota Bontang, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bontang yang ditunjukkan oleh skor pola pangan harapan, dari tahun ke tahun cenderung menurun menjadi 86,40 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan di Kota Bontang belum sepenuhnya seimbang yang disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relatif masih kurang dan rendahnya daya beli masyarakat.

Tabel 2. 31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pola Pangan Harapan (PPH)	90,84	90,84	86,80	89,40	86,40

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota BontangTahun 2020

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Jika dibandingkan dengan luas lahan di Kota Bontang yang seharusnya bersertifikat, kepengurusan sertifikat tanah cenderung menurun mulai tahun 2017 – 2020. Kepengurusan sertifikat tanah di tahun 2017 adalah seluas 291,75 hektar, sedangkan ditahun 2020 hanya terdapat penambahan 19,03 hektar lahan yang bersertifkat.

Kota Bontang juga mengalami permasalahan menyangkut tanah negara. Jumlah kasus tanah negara pada periode 2016 – 2020 termasuk rendah ditandai dengan tidak adanya kasus di tahun 2016, 2017, dan 2019. Tahun 2020 terdapat 4 kasus tanah negara yang terdaftar dan dapat diselesaikan sebanyak 2 kasus atau sebesar 50 persen.

Tabel 2. 32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	37,09	291,75	200,61	173,07	19,03
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0	0	50	0	50

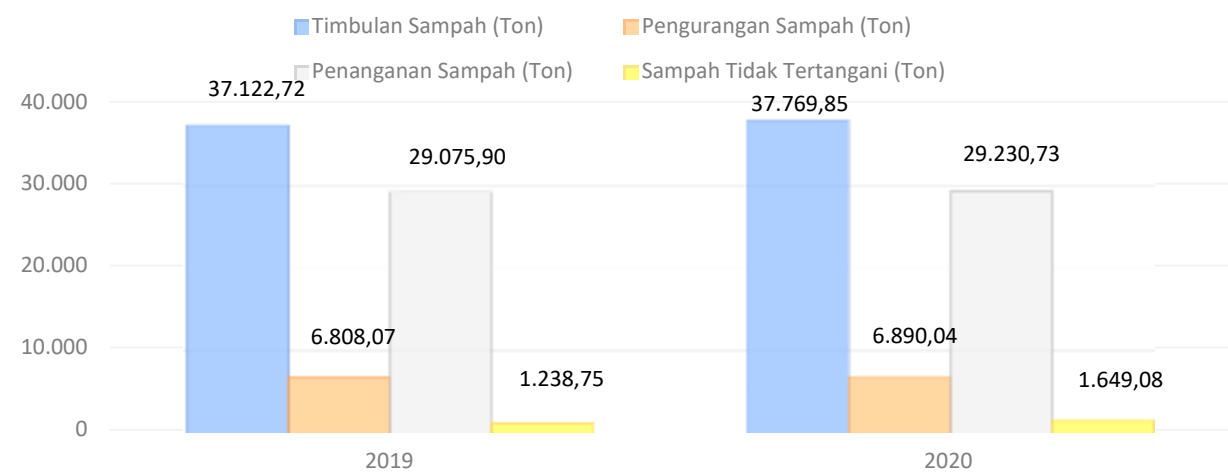
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Persentase pelayanan persampahan menunjukkan bahwa sampah di Kota Bontang sudah dilayani dan ditangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelayanan persampahan yang selalu meningkat dan

mencapai 96,62 persen pada tahun 2020. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penanganan sampah diantaranya adalah peremajaan armada pengangkut sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat karena masih ditemukan banyak sampah domestik di daerah pesisir dan sepanjang sungai.

Sampai dengan tahun 2020, cakupan pengelolaan sampah di Kota Bontang sebesar 95,63 persen yang artinya masih ada 4,37 persen sampah yang tidak tertangani. Dari target pengurangan sampah sebesar 22 persen baru dapat tercapai 18,24 persen, dan untuk penanganan sampah dari target 75 persen tercapai 77,39 persen. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih minim. TPS 3R yang merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan jumlahnya masih sangat sedikit. Baru ada 2 (dua) TPS 3R yang di kelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang saat ini masih berjalan, yaitu TPS 3R di Kelurahan Kanaan yang dikelola oleh KSM Kanaan Bersinar dan TPS 3R di Kelurahan Satimpo yang dikelola oleh KSM Satimpo Berhias. Sedangkan untuk bank sampah, baru 7 unit bank sampah aktif yang ada di Kota Bontang, yang terdiri dari 2 unit bank sampah induk dan 5 unit bank sampah.



Sumber: Dinas LH Bontang, 2021
 Gambar 2. 37Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Bontang

Indikator lingkungan hidup lainnya yang sangat penting adalah indeks pencemaran air dan udara. Indeks pencemaran udara Kota Bontang tahun 2020 mencapai 86,30 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 75,64. Nilai ini termasuk dalam kategori sedang (50-100), artinya tingkat kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan mempunyai nilai estetik. Nilai sedang untuk kota industri seperti Bontang relatif cukup baik

dan menunjukkan bahwa upaya penanganan polusi udara akibat kegiatan industri dapat ditangani dan dikelola dengan baik oleh pihak industri.

Tabel 2. 33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pencemaran Air	70	70	84,44	80	53,33
Indeks Pencemaran Udara	75,64	79,11	85,32	87,62	86,30
Prosentase pelayanan persampahan	94,85	94,89	94,49	96,66	95,63

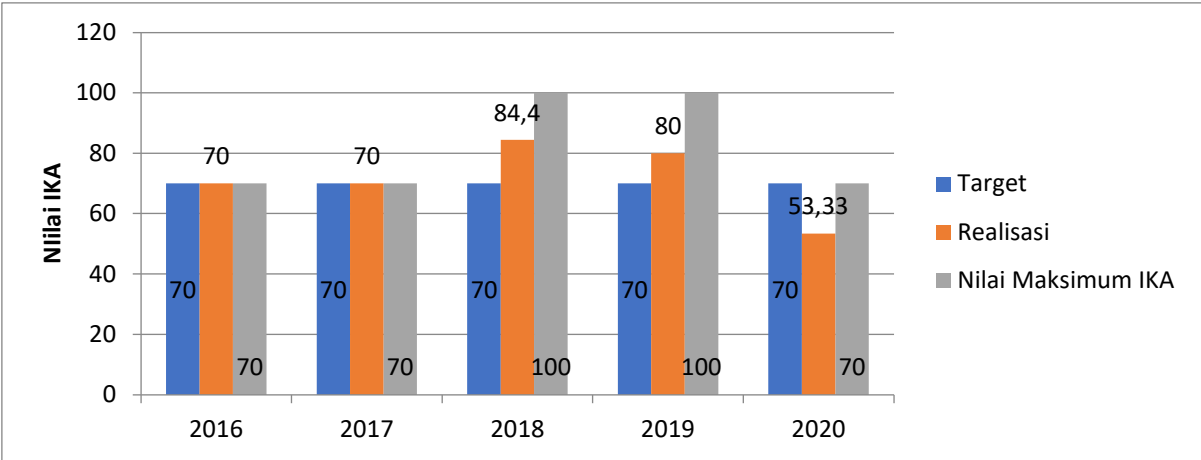
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2021

Perhitungan IKA dengan dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai. Dalam perhitungan IKA dilakukan pemantauan parameter-parameter yang ditetapkan dalam perhitungan IKA yang kemudian diklasifikasi baku mutu airnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kaltim No. 2 Tahun 2011.

Pemantauan IKA di Kota Bontang dilakukan dengan pemantauan kualitas air sungai pada 3 (tiga) sungai di Bontang, yaitu Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat. Hasil realisasi IKA pada tahun 2016-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.30 dan Gambar 2.38.

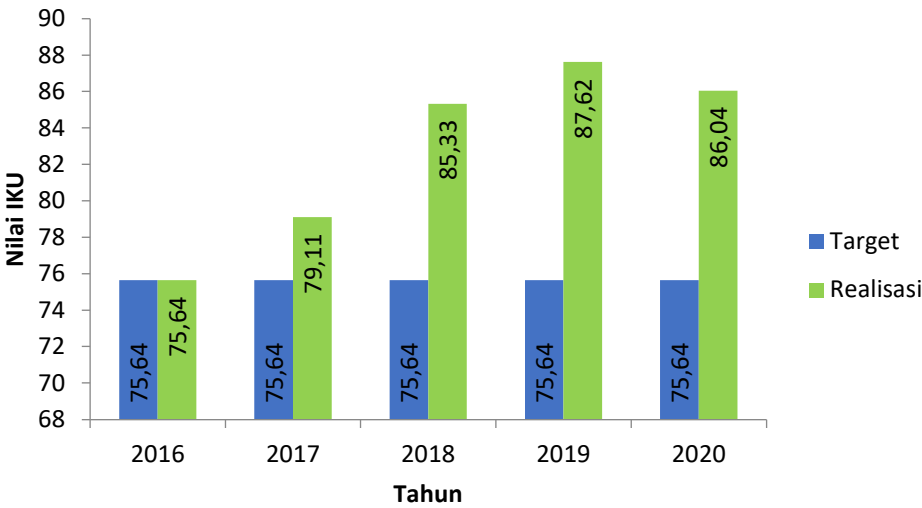
Kota Bontang memiliki target IKA yang tetap setiap tahun, yaitu 70. Dapat terlihat pada Gambar 1 bahwa nilai IKA mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan tahun 2017 Kota Bontang memiliki IKA sebesar 70, sedangkan terjadi perubahan nilai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 berturut-turut sebesar 84,4, 80 dan 53,33. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2018, namun tidak berarti status tingkat pencemaran mengalami peningkatan.

Sungai di Kota Bontang merupakan sungai yang melewati pemukiman serta usaha mikro, kecil dan menengah sehingga bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai sebagian besar dimungkinkan merupakan limbah domestik. Limbah domestik yang berasal dari rumah tangga maupun usaha mikro, kecil dan menengah mengandung pathogen, padatan tersuspensi, nutrien dan bahan organik. Parameter inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi pencemar dalam sungai di Kota Bontang.



Gambar 2. 38 Grafik kecenderungan dan perbandingan target dan realisasi nilai IKA Kota Bontang Tahun 2016-2020

Perhitungan IKU di Kota Bontang didapatkan dari hasil uji kualitas udara ambien dengan parameter SO₂ dan NO₂. Jumlah titik sampling yang digunakan untuk pengukuran adalah 1 (satu) titik pada tahun 2016 dan 2017, 4 (empat) titik pada tahun 2018 dan 2019, serta 8 (delapan) titik pada tahun 2020. Hasil realisasi IKU pada tahun 2016-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.30 dan Gambar 2.39.



Gambar 2. 39 Grafik kecenderungan dan perbandingan target dan realisasi nilai IKU Kota Bontang Tahun 2016-2020

Data yang terlihat pada Tabel 2.30 dan Gambar 2.39 menunjukkan bahwa IKU Kota Bontang melebihi target yang telah ditetapkan dan masuk klasifikasi “baik”. Target yang ditetapkan tidak berubah selama 5 tahun, yaitu 75,64. Terjadi peningkatan nilai IKU yang cukup besar pada 3 tahun terakhir, yaitu berturut-turut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 85,33, 87,62 dan 86,04, dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu 75,64 pada tahun 2016 dan 79,11 pada tahun 2017.

Upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian pencemaran udara meliputi penghijauan dan penanaman pohon, mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah. Penanaman pohon sendiri telah dituangkan dalam Instruksi Walikota Bontang Nomor 188.55/2/ORG/2019 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Instruksi Walikota Bontang Nomor 188.55/3/ORG/2019 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu juga terdapat himbauan untuk menggunakan kendaraan bersama serta sepeda sebagai alat transportasi ke kantor.

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,99 artinya bahwa di tahun 2020 menunjukkan hampir seluruh penduduk di Kota Bontang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el).

Kepemilikan KTP (Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk KTP) mengalami fluktuasi tetapi perbedaannya tidak besar antar tahun. Pada tahun 2018 hingga 2020 cakupan penerbitan KTP adalah sebesar 99%. Untuk capaian cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020 masyarakat Kota Bontang sudah 100% ber KTP.

Tabel 2. 34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,958	0,929	0,988	0,965	0,999
Kepemilikan KTP (Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk KTP)	0,97	96	99	99	100
Rasio Bayi Berakta Kelahiran	0,72	0,7	0,69	0,69	0.95
Rasio pasangan berakta nikah	0,475	0,495	0,561	0,598	0,631
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Cakupan penerbitan akta kelahiran)	56,70	59,11	62,71	65,42	66,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio pasangan yang berakte nikah mengalami peningkatan sebesar 0,156. Pasangan berakte nikah yang

dimaksud di sini adalah pasangan baru yang mendapat akte nikah. Capaian ini dapat dikatakan belum maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang menikah secara agama dan tidak mendaftarkan pernikahannya secara legal. Hal ini menyebabkan susah nya pasangan tersebut mengurus akta kelahiran anak.

Indikator Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (cakupan penerbitan akta kelahiran) di Kota Bontang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 semakin meningkat. Capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 66,81% meningkat sebesar 1,39% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan data pasangan yang mendapatkan akta nikah yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang dalam mengawal Penduduk Kota Bontang tertib administrasi.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian indikator LPM aktif, PKK aktif dan Posyandu aktif tidak mengalami penurunan dari yang berarti bahwa tingginya komitmen dari pengurus LPM, PKK dan Posyandu untuk mempertahankan kinerja. Serta dukungan penuh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menggandeng masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan. Sedangkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat melampaui target yang telah ditentukan. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat secara persentase pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,92 persen.

Tabel 2. 35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0	0	120,53	163,21	163,21
Jumlah LPM	0	1	1	1	1
LPM Berprestasi (%)	0	0	0	0	0
PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	5,15	1,28	2,2
LPM aktif (%)		100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Di Kota Bontang angka TFR pada tahun 2020 mencapai 2,3 yang menunjukkan 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya. Angka tidak tepat 2,0 karena memperhitungkan faktor mortalitas dari bayi yang dilahirkan.

Program keluarga berencana tidak selalu mengalami keberhasilan. Salah satu indikator kurang berhasilnya program keluarga berencana ialah masih terdapatnya kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi atau yang disebut *unmet need KB*. Di Kota Bontang angka *Unmet need KB* mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang dilayani semakin meningkat yang berarti pasangan usia subur ditahun 2020 banyak yang mau berKB.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan peran pemerintah yang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk penggunaan KB.

Tabel 2. 36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)		2,7	0	14,8	2,3
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	19,49	17,4	17,97	18,17	15,61
Ratio Akseptor KB	75,97	76,35	76,73	77,11	77,49

Sumber: Dinas Pembedayaan Perempuan dan KB Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Seiring bertambahnya penduduk Kota Bontang permintaan kendaraan bermotor pun semakin meningkat, sehingga pemerintah perlu menyediakan

infrastruktur jalan untuk mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat Bontang.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun setiap tahunnya pada periode 2016 – 2020 yakni 0,00327 di tahun 2016 menjadi 0,00228 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan tiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan.

Tabel 2. 37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00327	0,00295	0,00265	0,00242	0,00228

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah; mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah; serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK. Kegiatan PeGI hanya dilaksanakan hingga tahun 2017 dimana Kota Bontang mendapatkan nilai 3,29. Untuk tahun 2018 kegiatan ini berganti penilaian menjadi Indeks Penguatan Manajemen Pengelolaan TIK (PemanTIK) dimana Kota Bontang mendapatkan nilai 3,68 dan nilai 3,30 pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Juga pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePAN-RB) melakukan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Bontang mendapatkan predikat baik dengan nilai 2,64 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 3,28 pada tahun 2020.

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh

informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Kota Bontang mendapatkan nilai 88,4 dan meningkat sebesar 1,3 poin menjadi 89,7 di tahun 2020.

Kinerja pelayanan umum urusan komunikasi dan informatika Kota Bontang tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Pemeringkatan eGovernment Indonesia(PeGi)	2,60	3,29	-	-	-
Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik	0	85,80	87,10	88,40	89,70
Indeks Pemantik	-	-	3,68	3,30	-
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	2,64	3,28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 94,87 persen yang dipicu oleh pandemi COVID-19.

Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentuk produk domestik bruto (PDB), serta sumber ekspor nonmigas. Persentase Usaha Mikro dan Kecil tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 99,94 persen.

Tabel 2. 39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	35,50	34,29	36,73	42,52	46,68
Persentase Koperasi Aktif	83,76	83.54	62,39	63.37	94.87
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99.74	99.74	96.48	99.62	99.94

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan urusan penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor dan jumlah nilai investasi PMDN/PMA. Jumlah investor PMDN/PMA tahun 2020 yakni 97 investor menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 180 investor. Penurunan jumlah investor ini selaras dengan penurunan nilai investasi PMDN/PMA di tahun yang sama, yaitu 4,876 Triliun tahun 2019 dan 4,149 Triliun di tahun 2020. Dengan demikian penurunan realisasi PMDN/PMA adalah sebesar 726,863 Milyar.

Tabel 2. 40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	9	6	10	172	90
Jumlah investor berskala nasional (PMA)	14	18	14	8	7

Tahun	Jumlah Nilai berskala nasional (PMDN)	Jumlah Nilai berskala nasional (PMA)	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (milyar rupiah)
2016	17.210 .901,80	\$ 152,38	4,112,008
2017	449.648,50	\$ 5.273,39	700,113
2018	7.984.643,63	\$ 266.768,51	4,747,346
2019	667.213,578	\$ 280.629	3,308,155
2020	1.740.462,41	\$ 104.816	726,863

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.13 Urusan Pemuda dan Olah Raga

Kinerja urusan pemuda dan olahraga tergambar dari indikator jumlah pemuda berprestasi dan jumlah atlit berprestasi. Capaian ini sangat tergantung kepada pekan olahraga dan event kepemudaan yang diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun capaian indikator urusan pemuda dan olahraga disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016-2018

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemuda berprestasi	-	22	28	155	11
Jumlah atlit berprestasi	-	53	1135	547	99

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.14 Urusan Statistik

Urusan statistik diarahkan pada pada peningkatan ketersediaan data statistik daerah. Pelaksanaan urusan wajib statistik dilakukan dengan memperhatikan pada indikator kinerja program pengembangan data/informasi/statistik daerah yaitu ketersediaan data statistik pembangunan daerah. Hingga tahun 2020, Kota Bontang masih belum memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Sehingga diperlukan sistem data yang telah terintegrasi. Tetapi Kota Bontang telah memiliki sistem Informasi yang dapat menginput data sektoral di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bernama SIMPATIKU sejak tahun 2019 tetapi belum terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pengembangan sistem agar SIMPATIKU dapat menjadi bank data Kota Bontang yang terintegrasi.

Tabel 2. 42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020

2.3.2.15 Urusan Persandian

Salah satu yang dapat dihitung dari penggunaan persandian utk pengamanan informasi adalah pemasangan SSL (*Secure Socket Layer*), dimana SSL merupakan pengamanan terhadap website/aplikasi yang sudah online. Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah disebabkan masih minimnya SDM teknis yang menangani urusan tersebut dibandingkan dengan sistem dan aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Tabel 2. 43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Persandian Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	5	5	6	6	6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Bontang pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1 event dibandingkan 17 event yang

diselenggarakan pada tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah melakukan pembatasan aktifitas masyarakat terutama kegiatan yang mengundang kerumuman/ massa.

Tabel 2. 44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	19	17	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2021

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan umum juga dapat dijadikan sebagai tempat pelestarian kekayaan budaya bangsa yang fungsinya dapat melestarikan dan menyebar luaskan hasil budaya masyarakat. Adapun kegiatan utama di perpustakaan umum adalah melayani masyarakat sebagai pemustaka.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Bontang mengalami penurunan yang signifikan dari menjadi 58.115 pengunjung di tahun 2019 menjadi 28.940 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan aktivitas dari rumah.

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah tidak mengalami penambahan koleksi selama 2 tahun terakhir. Namun demikian perpustakaan daerah mengembangkan perpustakaan digital yang memiliki 1.413 judul buku.

Tabel 2. 45Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun	N/A	N/A	N/A	58.115	28.940
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	N/A	N/A	N/A	149653	149653

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2020

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Selama periode 2016 -2020, pengelolaan arsip secara baku menurun dari 82,14 pada tahun 2016 menjadi 19,36 di tahun 2020.

Tabel 2. 46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengelolaan arsip secara baku	82,14	79,31	79,31	22,58	48,38

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2021

Indikator pengelolaan arsip secara baku mengalami penurunan nilai pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2016 hingga tahun 2018 kriteria penilaian pengelolaan arsip masih dilakukan secara internal saja dimana perangkat daerah yang tercatat mengelola arsip secara baku adalah sebesar 23 perangkat daerah dari 29 perangkat daerah di Kota Bontang sehingga didapatkan angka sebesar 79,31 persen. Sedangkan pada tahun 2019 penilaian pengelolaan arsip menggunakan instrument dari Arsip Nasional RI sehingga yang tercatat sebagai perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hanya sebanyak 6 perangkat daerah dari 31 PD sehingga didapatkan angka sebesar 19,35 persen. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 48,38 persen yakni sebanyak 15 dari 31 Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku.

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kota Bontang yang merupakan Kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan dan konsumsi ikan selama tahun 2016 - 2020 cukup tinggi dan terus meningkat.

Jumlah produksi perikanan tangkap selama 4 tahun terus meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan tangkap yaitu sebesar 801,5 Ton, hal ini dikarenakan salah satu dampak dari wabah Pandemi COVID-19.

Jumlah produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 2971,5 Ton, namun mengalami penurunan sebesar 2.200 ton menjadi 4.189 ton pada tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja produksi perikanan

budidaya antara lain meningkatnya harga pakan tidak diimbangi oleh peningkatan daya beli konsumsi ikan hasil budidaya.

Konsumsi ikan di Kota Bontang selama 3 tahun terakhir ini cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 20,19 kg.

Tabel 2. 47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi ikan (kg)	-	37,4	34,3	34,3	54,49
Tahun	Produksi perikanan Tangkap (ton)		Produksi perikanan Budidaya (ton)		
2016	20.150,80		3.417,80		
2017	20.773,60		6.389,30		
2018	20.925,40		5.396,50		
2019	21.137,50		5.629,90		
2020	20.336,00		4.189,30		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2021

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2016 - 2020 dapat dilihat melalui indikator jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata yang dikelola.

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bontang cenderung meningkat dari Tahun 2016 – 2019, namun upaya pemerintah dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan menutup objek wisata mempengaruhi sektor pariwisata dan sektor turunan lainnya yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun dari 472.205 orang pada tahun 2019 menjadi 215.029 orang pada tahun 2020. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan wisata terlihat dari peningkatan jumlah destinasi pariwisata dalam 5 tahun terakhir menjadi 10 destinasi pariwisata di tahun 2020. Untuk meningkatkan kunjungan dan geliat pariwisata Kota Bontang perlu di tingkatkan promosi wisata dan event-event yang mengadopsi adaptasi kebiasaan baru.

Tabel 2. 48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	103.712	383.868	409.319	472.205	215.029
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata	1	1	1	4	10

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2021

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Kota Bontang meliputi produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultur dan Intensifikasi budidaya peternakan dan produksi peternakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per (ton)	83	258	200	161	161
Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	-	274	205,41	200*	200
Intensifikasi budidaya peternakan, Produksi peternakan	-	1.132	1.213	1.332*	1.450

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2021

Untuk produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan budidaya tanaman pangan dan hortikultur di Kota Bontang, pada dasarnya hanya usaha pertanian bersifat musiman dan umumnya dilakukan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang belum terbangun dikawasan perumahan. Usaha tersebut berpindah-pindah karena hanya merupakan pemanfaatan lahan tidur yang belum dipergunakan oleh pemiliknya. Usaha pertanian juga sebagian besar dilakukan warga Kota Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Kondisi ini terlihat dari jumlah produksi padi atau bahan utama lokal lainnya pada periode 2016 – 2020 berkisar antar 80 – 260 ton.

Sedangkan untuk Intensifikasi budidaya peternakan dan Produksi peternakan meningkat selama 4 tahun terakhir hingga mencapai 1.450 ton pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi hasil peternakan, seperti telur, ayam potong, daging sapi dan lain-lain.

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama tahun 2016-2021 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 sektor ini kontribusinya mencapai 2,54% dari total PDRB, dan pada tahun 2020 kontribusinya meningkat menjadi 3,31%, atau mengalami kenaikan sebesar 0,77%. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi arus perdagangan di Kota Bontang. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan sector perdagangan, pemerintah

secara rutin melakukan pembinaan kapasitas bagi kelompok pedagang melalui penyelenggaraan pelatihan dan manajemen usaha. Selama tahun 2016-2020, rata-rata cakupan pembinaan kelompok pedagang sebesar 646 pertahun.

Pada sektor perdagangan ekspor dan impor, capaian kinerja Ekspor Bersih Perdagangan dan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Non Migas, selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan meskipun tidak signifikan, yaitu -0,0535 dan - 0,035%. Hal ini disebabkan menurunnya permintaan SKA terbesar yakni dari PT. Badak LNG pada tahun 2020 dibandingkn dengan tahun 2019. Penurunan ini tidak terlepas dari kontrak pembelian gas cair dari negara Jepang dan Korea banyak yang sudah berakhir.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama periode 2016-2021 dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor Bersih Perdagangan	2.786	2,770	2,994	2,257	2,098
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	616	661	616	670	670
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2,54	2,52	2,77	3,04	3,31

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2021

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Perkembangan layanan pada kawasan industri terlihat dari pekembangan jumlah industri yang ada di Kota Bontang.

Pertumbuhan IKM di Kota Bontang selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan IKM sampai dengan tahun 2018 masih menunjukkan peningkatan relatif tinggi dari 5,54 persen tahun 2016 menjadi 12,8 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan ini kemudian menurun secara signifikan menjadi 1,83 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan jumlah IKM. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya industri pengolahan terutama industri kayu dan batako, dimana pasokan bahan baku kayu dan tanah liat sulit untuk didapatkan dan tidak berkelanjutan.

Tabel 2. 51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pertumbuhan IKM	5,54	8,42	12,8	1.83	0

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2021

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang

2.3.4.1. Urusan Perencanaan

Kinerja urusan perencanaan diukur dengan indikator sebagai mana disajikan pada tabel 2.51.

Kesesuaian penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, dan penjabaran kegiatan RKPD kedalam APBD merupakan tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan yang baik. Kondisi capaian indikator kinerja tersebut untuk Kota Bontang sudah sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bontang telah sinergi antara RPJMD, RKPD dan APBD.

Tabel 2. 52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penjabaran program RPJMD kedalam program RKPD	79,9	65,84	75,47	73,37	100,00
Persentase penjabaran kegiatan RKPD kedalam APBD	-	-	95,84	95,89	98,71
Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	100	15,50	23,75	24,50	48,00

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2020

Indikator tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD masih terbilang rendah dikarenakan adanya pembagian porsi anggaran untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembangunan yang terbatas. Pembahasan terkait anggaran dapat merujuk ke BAB 3.

Selain dari indikator pada tabel 2. 48 diatas, sistem perencanaan di Pemerintah Kota Bontang juga tergambar dari nilai SAKIP. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Implementasi SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh

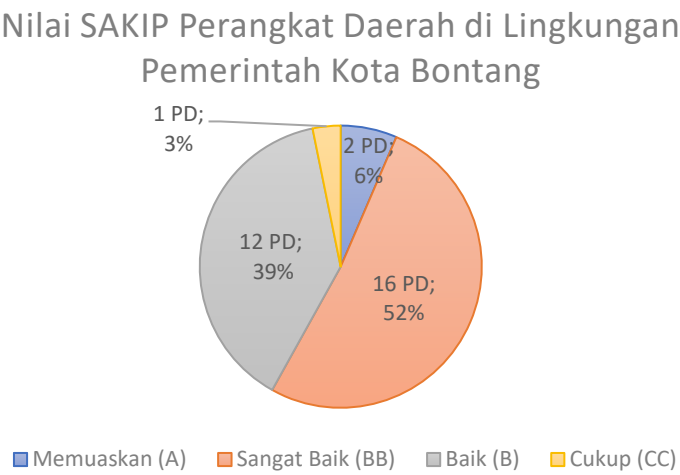
masing-masing Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi terkait pelaksanaan SAKIP di Kota Bontang didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 53 Nilai SAKIP Kota Bontang 2015-2020

No.	Komponen yang dinilai	Bobot nilai	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	22,73	n/a	20,46	21,07	21,16	21,33
2	Pengukuran Kinerja	25	13,75	n/a	17,32	17,67	17,77	17,93
3	Pelaporan Kinerja	15	9,94	n/a	9,19	9,23	9,85	9,41
4	Evaluasi Internal Kinerja	10	5,10	n/a	6,18	6,29	6,67	6,82
5	Capaian Kinerja	20	12,65	n/a	11,94	11,53	12,21	12,35
Nilai hasil evaluasi		100	64,16	64,67	65,10	65,79	67,66	67,84
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B

Dari data di atas sejak tahun 2015 hingga 2020 hasil evaluasi SAKIP di Kota Bontang menunjukkan predikat stagnan di Baik (B). Hasil evaluasi SAKIP baik untuk tingkat Kota dan Perangkat Daerah belum mengalami peningkatan dan nilai GAP yang cukup tinggi terletak pada komponen perencanaan kinerja, sehingga perlu dilakukan peningkatan perencanaan kinerja untuk meningkatkan nilai SAKIP di Kota Bontang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sebagai indikator adanya birokrasi yang bersih dan berkualitas. Meningkatkan implementasi SAKIP diawali dengan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

Adapun penjabaran nilai SAKIP untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :



Dari diagram di atas tampak bahwa hanya 1 Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai cukup. Sebanyak 52 persen Perangkat Daerah telah mendapatkan nilai sangat baik sedangkan hanya 6 persen yang mendapatkan nilai sangat memuaskan.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP sejak tahun 2016 hingga 2020, penentuan tujuan dan sasaran dari dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bontang belum berorientasi pada hasil atau outcome tetapi masih berorientasi keluaran atau output. Tujuan dan sasaran akan menjadi gambaran yang akan dicapai. Hal ini dapat menyebabkan penentuan Indikator Kinerja Utama belum optimal. Penentuan IKU yang belum optimal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pegawai Pemerintah Kota Bontang akan pentingnya dari indikator kinerja.

Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Bontang juga perlu ditingkatkan tercermin dari hasil evaluasi RPJMD 2016-2021 yang akan dibahas lebih jauh di subbab 2.5 dimana hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 47,5 persen, atau dari sejumlah 40 indikator kinerja sesuai kewenangan daerah terdapat 19 indikator sasaran tercapai. Sedangkan capaian program RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 52,08 persen atau dari 240 Indikator kinerja program, terdapat 125 indikator tercapai, 35 indikator tidak tercapai dan terdapat 80 indikator program yang tidak diukur pencapaiannya. Sehingga dapat dikatakan perlunya perencanaan dan penentuan indikator kinerja di Pemerintah Kota Bontang harus ditingkatkan.

Dalam merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bontang, sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki kepentingan yang besar terhadap program CSR perusahaan. Bagi pemerintah Kota Bontang, program CSR menjadi alternatif solusi dalam mengakselerasi program-program pemerintah yang tertuang dalam visi misi maupun terimplementasi dalam RPJMD, Renstra dan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya. Banyaknya perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan sumberdaya alam dan lainnya, menjadikan program CSR sebagai potensi besar bagi keberlanjutan program yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Bontang. Namun, demikian diperlukan adanya sinergi dan integrasi antara program CSR perusahaan dengan program-program Pemkot Bontang. Sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat tercapai dengan baik.

Merujuk pada hasil “Kajian Optimalisasi Dampak Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Kota Bontang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang yang bekerjasama dengan IPB didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang diperkirakan mencapai lima puluh perusahaan, baik perusahaan usaha menengah maupun usaha besar. Meskipun demikian hanya terdapat 17 perusahaan yang melaporkan dan mengkoordinasikan pengelolaan CSR-nya kepada Pemerintah Kota Bontang melalui Forum CSR Kota Bontang. Dari 17 perusahaan yang mengkoordinasikan dan melaporkan pengelolaan CSR tersebut, terdapat sebelas perusahaan yang mempertanggungjawabkan alokasi pembiayaannya. Adapun jumlah alokasi pembiayaan CSR oleh perusahaan-perusahaan tersebut mencapai RP. 136,477,004,048.
2. Di Bontang sendiri, implementasi peraturan tentang CSR, khususnya yang berkenaan dengan penerapan sanksi terhadap absennya perusahaan belum berjalan. Sehingga tingkat partisipasi seluruh perusahaan dalam melaksanakan program CSR belum berjalan optimal.
3. Selama ini pelaksanaan CSR di Kota Bontang masih terlihat berjalan secara parsial. Meskipun keberadaan Forum CSR sudah sangat membantu dalam membangun sinergi antara perusahaan dan Pemkot dalam pelaksanaannya. Namun, masih terlihat banyak perusahaan yang belum melaksanakan CSR di Kota Bontang. Hal ini bisa jadi karena kebijakan terkait dengan pelaksanaan CSR masih terbatas ruang lingkup pengaturannya dan belum optimal dalam mengikat perusahaan untuk mengalokasikan CSR. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan tata kelola dan kebijakan khusus dalam pengaturan CSR dengan menyempurnakan peraturan yang sudah ada.
4. Belum adanya master plan atau road map khusus yang merupakan turunan dari visi misi pemerintah Kota. Road map/master plan ini dibuat secara khusus dan spesifik dalam mengelola pelaksanaan program CSR.

2.3.4.2 Urusan Keuangan

Kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, khususnya terhadap penyajian laporan keuangan, dalam lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2020, Kota Bontang telah mendapatkan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Kota Bontang dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Dalam hal pengelolaan dan penatausahaan asset, secara keseluruhan menunjukkan bahwa Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan. Hal ini mencerminkan bahwa BPKAD selaku Perangkat Daerah penanggungjawab pengelolaan asset telah konsisten dalam memenuhi kebutuhan asset seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip pengelolaan asset yang baik.

Pada aspek Pendapatan Daerah, indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 – 2019 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan kenaikan rata rata 13,82 persen. Dikecualikan pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan 12,40% dari tahun 2019 yang merupakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan penerimaan pendapatan dari sumber pajak dan retribusi daerah. Hal ini tidak dapat dihindari seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan keuangan selama periode 2016-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan	70	75	80	88	100
Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
2016	150.349.246.779				
2017	155.101.868.653				
2018	199.690.865.584				
2019	218.743.530.945				
2020	191.609.479.655				

Sumber : Badan Pendapatan Kota Bontang Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2021

2.3.4.3 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah pegawai ASN Kota Bontang cenderung menurun selama periode 2016 – 2020. Tercatat jumlah pegawai Bontang tahun 2020 sebanyak 2.924 orang, berkurang sebanyak 370 orang jika dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Bontang disebabkan oleh adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menyebabkan beberapa pegawai beralih status kepegawaiannya.

Tabel 2. 55 Jumlah PNS di Kota Bontang Tahun 2016-2021

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2016	1498	1796	3294
2017	1305	1564	2869
2018	1272	1547	2819
2019	1284	1640	2924
2020	1284	1640	2924
2021	1223	1576	2799

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang Tahun 2021

Capaian kinerja “Meningkatnya profesionalitas ASN” pada tahun 2020 mengalami kenaikan drastis yaitu 33,02 persen dari 39,48 persen pada tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan capaian indikator profesionalitas ASN (dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin).

Tabel 2. 56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	39,48	72,5
Jumlah pegawai tetap	3.294	3.869	2.831	2.924	2.825

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang Tahun 2021

Berdasarkan hasil Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020, terdapat 4 hal yang dinilai. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Indeks Profesionalitas ASN Kota Bontang Tahun 2020

Penilaian	Nilai Rata-rata
Kualifikasi	12
Kompetensi	32,6
Kinerja	23
Disiplin	5
Total	72,584

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang Tahun 2021

Dari 2.799 ASN di Pemerintah Kota Bontang masih terdapat 1.402 ASN yang belum mengikuti diklat, sehingga kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang belum maksimal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 58 Rekapitulasi Dimensi Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN

Nomor	Jabatan	Jumlah	Status Diklat	
			Sudah Diklat	Belum Diklat
1.	Fungsional Tertentu	1319	38	1281
2.	Fungsional Umum	979	979	0
3.	Struktural	501	377	124
Jumlah		2799	1294	1405

Jumlah pegawai struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sejumlah 124 orang dari 501 pejabat struktural dan sebagian besar pegawai jabatan pelaksana yang belum pernah mengikuti diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya. Jumlah pegawai fungsional tertentu (JFT) yang belum mengikuti diklat fungsional sebanyak 1.281 orang dari 1.319 pegawai JFT. Untuk jabatan pelaksana yang sudah mengikuti diklat dasar sebanyak 1.091 orang dan yang belum mengikuti sebanyak nihil. Sedangkan pemenuhan diklat teknis bagi ASN yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 59 Rekapitulasi Pemenuhan Diklat Teknis Bagi PNS Tahun 2020

Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah
	Sudah Mengikuti	Belum Mengikuti	
PNS	736	2063	2799

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, hanya 26,29 persen dari total jumlah PNS yang sdh mengikuti diklat teknis. Sedangkan 73,71 persen belum mengikuti diklat teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN tergolong rendah. Mengacu pada pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun, maka pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi PNS masih jauh dari apa yang diharapkan.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu ada pengembangan kompetensi guna memenuhi kompetensi SDM aparatur sesuai kebutuhan guna meningkatkan kinerja akuntabilitas kinerja aparatur dalam upaya menuju pelayanan publik yang prima dan upaya regenerasi kepemimpinan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hasil survey internal terhadap 108 responden pegawai Pemerintah Kota Bontang atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 84 orang pegawai (77,78%) responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Pada LHE RB tahun 2020, dari 100 responden pegawai Pemerintah Kota Bontang secara keseluruhan hanya 25% yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja dan kontribusi terhadap kinerja organisasi sedangkan sebanyak 75% responden belum sepenuhnya memahami kinerja, ukuran kinerja atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa dengan rendahnya pemahaman terkait tugas dan fungsi akan rendah pula kualitas dari Indikator Utama (IKU) yang mengakibatkan penentuan perencanaan kinerja juga tidak optimal.

2.3.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis dan memfasilitasi inovasi untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh daerah terlebih dahulu didukung oleh kelitbangat. Persentase keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan diukur dengan capaian persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen dan persentase penerapan inovasi daerah sebesar 93,54 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

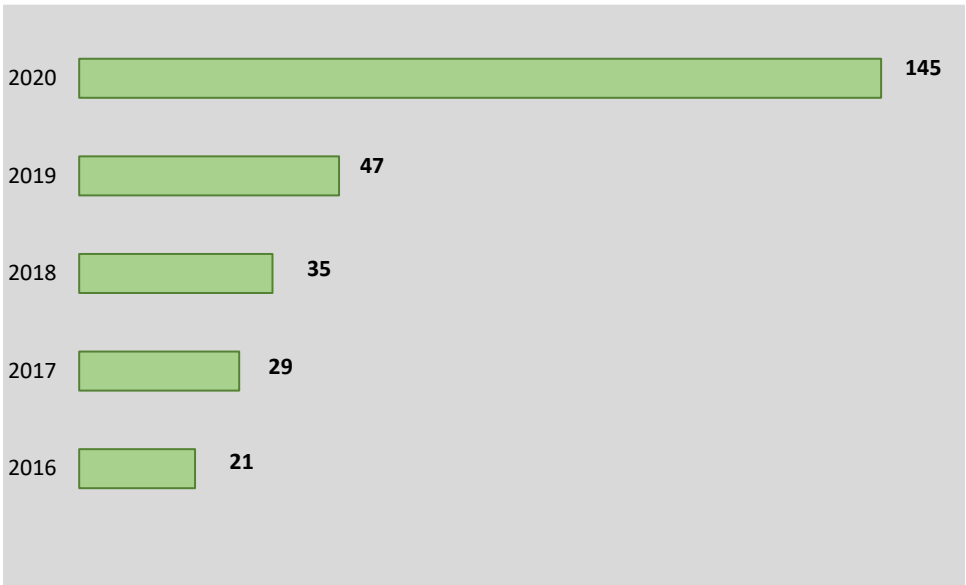
Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut hasil kelitbangat.	64,29	68,42	80,00	62,50	75,00
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	19,35	35,48	51,61	54,83	93,54

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2021

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mengamanahkan pemerintah untuk melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan inovasi daerah di Kota Bontang sudah cukup baik, hal ini terlihat dari penghargaan yang telah dicapai oleh Kota Bontang selama ini. Meski demikian esensi inovasi utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan

pemerintahan agar fungsi-fungsi perangkat daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan pelayanan publik yang prima.

Tren jumlah inovasi daerah meningkat cukup tajam dari tahun 2016 sebanyak 21 inovasi menjadi 145 inovasi di tahun 2020. Peningkatan ini dipicu oleh komitmen kepala daerah dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan inovasi sebagai instrumen yang membantu percepatan pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Meski demikian, masih terdapat persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi, antara lain; ketergantungan anggaran dalam pelaksanaan inovasi, persoalan SDM yang melaksanakan, *awareness* terhadap inovasi yang masih belum terlihat pada beberapa perangkat daerah, dan sebagian perangkat daerah masih memiliki stigma bahwa inovasi merupakan beban tambahan pekerjaan. Kedepannya perlu disusun strategi dan upaya yang lebih konkrit untuk membudayakan inovasi dalam setiap aspek kinerja seluruh perangkat daerah.



Sumber: Bapelitbang kota Bontang, 2021

Gambar 2. 40 Jumlah Inovasi Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

2.3.4.5 Urusan Pengawasan

Capaian indikator tingkat maturitas SPIP Kota Bontang mengalami penurunan secara nilai dari tahun sebelumnya tetapi masih konsisten berada pada level 3, dikarenakan adanya perbedaan metode penilaian baru dari BPKP dimana pada tahun sebelumnya hanya pemenuhan data sedangkan pada tahun 2020 BPKP menetapkan penilaian SPIP lebih merinci ke implementasi SPIP. nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang yang secara umum meningkat tapi masih fluktuatif dari 62,27 di tahun 2016 menjadi 67,84 di tahun 2020. Begitu pula dengan Indeks Persepsi

Korupsi di Kota Bontang sempat mengkhawatirkan dengan adanya kenaikan nilai dari 3,38 di tahun 2018 menjadi 3,82 di tahun 2019, kemudian turun sedikit menjadi 3,75 di tahun 2020. Sebaliknya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki kecenderungan meningkat meskipun data 2 tahun terakhir menunjukkan kenaikannya tidak cukup signifikan. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Bontang belum secara konsisten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kinerja pembangunan pelayanan urusan pengawasan selama periode 2016-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 61 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-	2 (C)	3 (B)	3 (B)	3 (B)
Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti		86,27	87	87,5	93,29
Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti		40	40	45	71
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2,5 (CC)	2,5 (CC)	3 (B)	3 (B)	3 (B)
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang	B (62,27)	B (62,14)	B (65,81)	B (67,66)	B (67,84)
Indeks Persepsi Korupsi	-	-	3,38	3,82	3,75
Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80,23	81,48	84,05	84,59
Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	2,88	3,71	3,71	3,07	3
Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	2	3	2	3	3

Sumber: Inspektorat Kota Bontang Tahun 2020
 Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Tahun 2020

Pelayanan publik di Kota Bontang belum maksimal karena pelayanan publik Pemerintah Kota Bontang masih dilakukan secara parsial/sektoral belum terpadu. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai IKM dari 80,23 di tahun 2017 menjadi 84,59 di tahun 2020, dan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Bontang mencapai 96,7 dari skala 100 berdasarkan data Ombudsman RI pada tahun 2020. Meskipun demikian pelayanan publik di Kota Bontang masih dapat dimaksimalkan salah satunya dengan

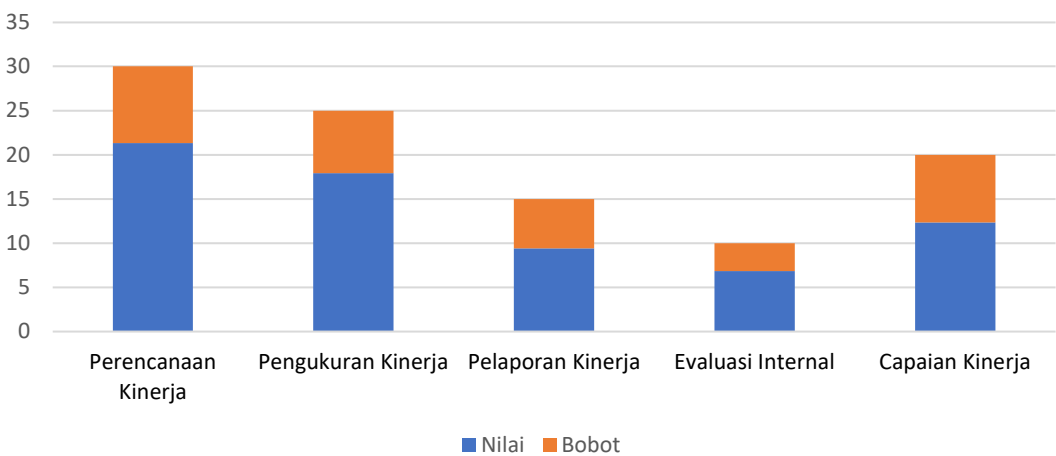
penyediaan mall pelayanan publik terpadu yang sampai saat ini belum tersedia di Kota Bontang.

Adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 62 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Bontang 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Nilai SKM Kota Bontang	B (80,23)	B(79,79)	B (84,08)	B (84, 59)

Selain pelayanan publik, hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.



Sumber: KemenPANRB, 2021
Gambar 2. 41 Capaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2020

Hingga tahun 2020, nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih menunjukkan predikat B. Adapun rincian nilai dari nilai Indeks Reformasi Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 63 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019
A. Komponen Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,64	2,67
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,40	2,40
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,43	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,58	2,61

No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,12	11,13
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,43	3,47
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,38	5,41
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,67	3,70
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	34,65	34,86
B. Komponen Hasil				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,11	9,21
2	Nilai Kapasitas Organisasi	6,00	3,71	3,85
3	Nilai Persepsi Korupsi	7,00	5,92	6,69
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,33	8,80
Total Komponen Hasil (B)		40,00	30,07	31,55
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	64,72	66,41

Dari tabel Indeks RB di atas tampak bahwa masing-masing indikiatornya masih jauh dibandingkan dengan nilai maksimalnya. Hasil penilaian dari Kementerian PANRB terdapat beberapa hasil evaluasi yang perlu menjadi perbaikan dari Kota Bontang. Hasil LHE IRB, menyatakan bahwa belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kontak antara petugas dan pengguna layanan.

Dari tabel Indeks RB di atas tampak bahwa masing-masing indikiatornya masih jauh dibandingkan dengan nilai maksimalnya. Hasil penilaian dari Kementerian PANRB terdapat beberapa hasil evaluasi yang perlu menjadi perbaikan dari Kota Bontang. Hasil LHE IRB, menyatakan bahwa belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kontak antara petugas dan pengguna layanan.

Hingga tahun 2021, terdapat 66 aplikasi yang telah dikembangkan di Kota Bontang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 64 Aplikasi Daerah di Kota Bontang

Aplikasi	Jumlah
Aktif	58
Tidak Aktif	8
Publik	28
Integrasi	8

Sumber : Diskominfo Bontang, 2021

Dari 66 aplikasi yang terbangun hanya 8 aplikasi yang telah terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat integrasi di Kota Bontang hanya 12 persen yang mengakibatkan belum maksimalnya teknologi informasi layanan dari unit pelayanan publik yang ada di Kota Bontang.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Nilai Kapabilitas APIP di Kota Bontang pada tahun 2020 (tabel 2.55) menunjukkan di level 3. Pada level 3 ini keterlibatan peran APIP sudah sampai di level pengambilan keputusan. Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 3 hal ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Untuk menuju level selanjutnya, Kapasitas APIP di Kota Bontang harus mampu mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 2. 65 Tabel Kebutuhan SDM APIP Kota Bontang

Uraian	Eksisting	ABK	Selisih
Keseluruhan	35	99	64
Jabatan Fungsional Tertentu			
Auditor	13	58	45
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	6	6	0

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2021

Dari tabel kebutuhan SDM APIP di Kota Bontang dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini masih jauh dari kondisi SDM APIP yang ideal. Selisih pegawai eksisting dan yang dibutuhkan sangat jauh. Saat ini SDM APIP di Kota Bontang ada sebanyak 54 orang dimana 13 APIP yang telah mengikuti diklat. Sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi/kualitas dan kuantitas SDM APIP untuk peningkatan kapabilitas APIP di Kota Bontang.

2.3.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2.3.5.1 Keterkaitan Indikator TPB dengan RPJMD Kota Bontang 2016–2021

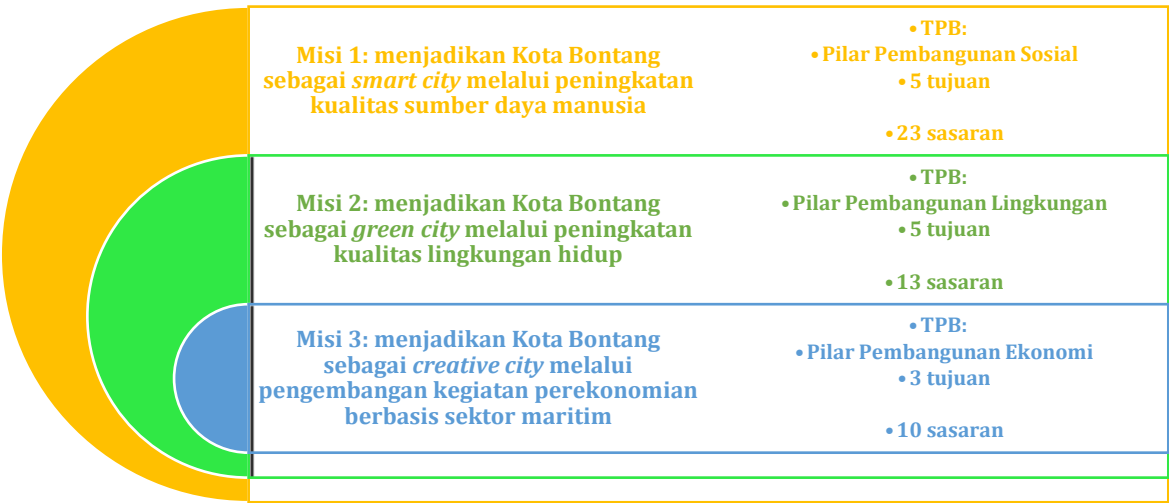
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai sebuah kesepakatan internasional yang berisikan 17 tujuan dan 169 target menyedot perhatian banyak pihak. Pemerintah, pengambil kebijakan, dan akademisi mulai

mendiskusikan banyaknya target yang hendak dicapai hingga 2030, kesiapan dukungan data untuk masing-masing indikator serta kemungkinan untuk menggunakan ukuran proxy. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diintegrasikan kedalam RPJMD melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD untuk memastikan Perencanaan Pembangunan didasarkan pada kondisi lingkungan hidup daerah. Rencana pembangunan Kota Bontang pada periode 2016-2021 menyebutkan bahwa visi pembangunan Kota Bontang dalam periode 2016-2021 adalah “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam tiga misi, yaitu:

- a. menjadikan Kota Bontang sebagai smart city melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. menjadikan Kota Bontang sebagai green city melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- c. menjadikan Kota Bontang sebagai creative city melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Sebagaimana visi dan misi pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga ini juga sejalan dengan TPB. Misi pertama selaras dengan pilar sosial, misi kedua selaras dengan pilar lingkungan, misi ketiga selaras dengan pilar ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam visinya, istilah “menguatkan Kota Bontang” menunjuk pada penguatan secara kelembagaan yang selaras dengan pilar tata kelola.

Gambar 2. 42 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Periode 2016-2021 dan Relevansinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : RPJMD Kota Bontang 2016-2021, Bappenas 2018

Ketiga misi pembangunan tersebut selanjutnya dapat diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana disajikan pada tabel 2.60 dan dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan periode tersebut relevan dengan pilar TPB.

Tabel 2. 66 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang 2016-2021 serta Relevansinya dengan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Pilar TPB
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai <i>Smart City</i> melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia		
1. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat	Sosial
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional	Sosial
	Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat	Sosial
	Terjamin dan terpeliharanya anak terlantar/jalanan, anak-anak penyandang cacat, baik dalam hal mengakses pendidikan maupun kesehatan	Sosial dan Ekonomi
	Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olah raga	Sosial
	Meningkatnya sarana prasarana penunjang pendidikan	Sosial
2. Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan	Sosial
	Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan	Sosial
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Sosial
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Sosial
	Menurunnya penyebaran penyakit menular dan penderita penyakit tidak menular	Sosial
3. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan kehidupan beragama	Terfasilitasinya aktivitas keagamaan masyarakat	Sosial
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka agama	Sosial
	Meningkatnya kerukunan antara umat beragama	Sosial
4. Meningkatkan pembangunan perkotaan dan permukiman	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau	Lingkungan
	Tersedianya transportasi publik yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat	Lingkungan
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Menguatnya kelembagaan perangkat daerah	Tata kelola dan hukum
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Sosial
	Terciptanya supremasi penengakan hukum	Tata kelola dan hukum
	Meningkatnya akses pelayanan perizinan	Tata kelola dan hukum
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Tata kelola dan hukum
	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas/pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi.	Tata kelola dan hukum

Tujuan	Sasaran	Pilar TPB
	Terwujudnya pemerintahahn yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tata kelola dan hukum
Misi 2: Menjadikan Kota Bontang sebagai <i>Green City</i> melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup		
1. Mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang bersih dari limbah dan sampah " <i>Green Waste</i> "	Meningkatnya penanganan dan pengelolaan sampah	Lingkungan
	Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik (sanitasi)	Lingkungan
	Meningkatnya pengelolaan limbah usaha dan kegiatan	Lingkungan
2. Menjaga mutu dan kualitas air bersih ' <i>Green Water</i> '	Konservasi sumber air tanah dan permukaan	Lingkungan
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan	Lingkungan
2. Mewujudkan Kota Bontang sebagai ' <i>Green Open Space</i> '	Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Lingkungan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan hijau perkotaan dan kawasan hutan	Lingkungan
3. Mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang tanggap mitigasi dan adaptasi bencana (<i>resilience</i>)	Meningkatnya penegakan dan pengawasan terhadap penataan ruang dan penggunaan lahan	Lingkungan
	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana	Lingkungan
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir	Lingkungan
4. Mewujudkan sarana publik dan fasilitas hijau perkotaan	Meningkatnya penerapan <i>Green Energy City</i>	Lingkungan
	Meningkatnya penerapan <i>Green Building</i>	Lingkungan
	Meningkatnya penerapan <i>Green Transportation</i>	Lingkungan
Misi 3: Menjadikan Kota Bontang Sebagai <i>Creative City</i> Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim		
1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Berkembangnya ruang berusaha dan aktifitas ekonomi masyarakat	Ekonomi
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Ekonomi
	Stabilnya perekonomian Kota Bontang	Ekonomi
2. Peningkatan perekonomian berbasis sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan	Sosial, Ekonomi, Lingkungan
	Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari	Ekonomi
	Tersedianya sarana prasarana penunjang wisata	Ekonomi
3. Peningkatan perdagangan daerah	Terealisasinya proses perizinan usaha perdagangan yang cepat	Ekonomi
	Meningkatnya kegiatan industri rumah tangga	Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Pilar TPB
	Meningkatnya fungsi pasar di Kota Bontang	Ekonomi
	Meningkatnya sistem pendukung Koperasi dan UMKM	Ekonomi

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2022, diolah

2.3.5.2 Capaian Indikator dan Keterkaitannya dengan Pembangunan Kota Bontang.

2.3.5.2.1 Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial terdiri dari 5 tujuan dengan 31 target yang mencakup 96 indikator. Dari 96 indikator, sebanyak 55 indikator (57,29 persen) yang mencapai target Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan 26 indikator (27,08 persen) yang belum berhasil mencapai target dan 15 indikator (15,63 persen) belum didukung data yang memadai. Apabila dilihat dengan kesesuaian program, dapat diketahui bahwa terdapat 56 indikator (58,33 persen) yang sudah didukung dengan kebijakan atau program Pemerintah Kota Bontang, tapi masih ada 40 indikator (41,67 persen) yang belum relevan dengan program daerah selama ini.

Tabel 2. 67 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Sosial, Kota Bontang

Keterangan	T1	T2	T3	T4	T5	Total
Ketercapaian						
▪ Tercapai	14	9	17	8	7	55 (57,29%)
▪ Tidak tercapai	7	1	8	4	6	26 (27,08%)
▪ Tidak ada data	3	1	9	1	1	15 (15,63%)
▪ Total	24	11	34	13	14	96
Kesesuaian/Relevansi dengan Program Daerah						
▪ Relevan	17	10	14	9	6	56 (58,33%)
▪ Tidak relevan	7	1	20	4	8	40 (41,67%)
▪ Total	24	11	34	13	14	96

Sumber: Analisis SDGs Kota Bontang, 2020

Gambar 2. 43 Matriks Ketercapaian TPB dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Sosial, Kota Bontang.



Sumber: Analisis SDGs Kota Bontang, 2020

Gambar 2.43 memperlihatkan bahwa dari 55 indikator yang berhasil mencapai target nasional di pilar pembangunan sosial, sebanyak 34

indikator didukung atau relevan dengan program pembangunan daerah dan 21 indikator belum memiliki relevansi dengan program daerah. Sementara, 27 indikator yang tidak tercapai, sebanyak 18 indikator yang relevan dengan program daerah dan 8 indikator yang belum sesuai atau relevan dengan program daerah Kota Bontang.

Catatan penting pencapaian indikator TPB pada pilar pembangunan sosial adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

1. Upaya pengentasan kemiskinan menjadi komitmen pemerintah daerah Kota Bontang yang tercermin dalam dokumen RPJMD Kota Bontang 2016-2021 yang diterjemahkan dalam beberapa program dan dilaksanakan secara lintas sektoral. Alokasi anggaran juga menunjukkan peningkatan, baik untuk pemberantasan kemiskinan maupun penyediaan pelayanan dasar.
2. Beberapa indikator menunjukkan keberhasilannya dalam mencapai target nasional dan sekaligus juga target daerah, yaitu indikator yang terkait dengan akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan KB, serta cakupan jaminan kesehatan.
3. Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sanitasi dan air minum yang layak masih kurang.

Tujuan 2

1. Pemerintah Kota Bontang telah memiliki komitmen untuk menghilangkan kelaparan, menciptakan ketahanan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat. Namun masih ada beberapa catatan.
2. Tren data pada beberapa indikator masih cukup fluktuatif.
3. Meskipun belum pernah mengalami kerawanan pangan, tapi tidak tercapainya indikator PPH menunjukkan masih ada persoalan dalam ketersediaan pangan di Kota Bontang. Kota Bontang bukan penghasil bahan pangan pokok.
4. Sebagai kota maritim dengan ikan sebagai salah satu potensi sumber daya alam, maka menarik melihat bahwa tingkat konsumsi ikan di Kota Bontang masih sangat rendah.

5. Penanganan *stunting* selama ini menjadi satu dalam program gizi. Upaya yang pernah dilakukan Pemerintah Kota Bontang diantaranya adalah melibatkan pihak swasta. pencacatan kasus gizi melalui e PPGBM, kelas gizi di puskesmas, kegiatan germas. Meskipun tren menurun, tapi angka *stunting* masih cukup tinggi, di atas 20 persen.

Tujuan 3

1. Kota Bontang telah berhasil di sejumlah indikator terkait dengan kesehatan bayi, seperti cakupan imunisasi, penyediaan vaksin dan tingkat kematian bayi; namun belum cukup berhasil dalam menekan angka kematian balita.
2. Pada aspek kesehatan ibu, Kota Bontang telah berhasil meningkatkan cakupan persalinan secara medis, mendorong pemakaian kontrasepsi modern dan semua cara/metode kontrasepsi pada pasangan usia subur, serta angka kematian ibu; namun belum cukup berhasil dalam menekan angka kematian neonatal.
3. Dalam hal kesehatan masyarakat dan lingkungan, Kota Bontang masih menghadapi persoalan, seperti penanganan penderita TBC, dan kusta.
4. Perlunya pendataan yang lebih baik pada kasus-kasus merokok pada penduduk usia kurang dari 18 tahun, penyalahgunaan narkoba, kasus hipertensi, kasus obesitas pada remaja dan usia lebih dari 18 tahun
5. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan juga masih menjadi persoalan dalam penyediaan layanan kesehatan.

Tujuan 4

1. Kota Bontang telah berhasil menyelenggarakan layanan yang sesuai standar; yang ditandai dengan tersedianya sekolah SD dan SMP yang berakreditasi B serta sekolah dengan akses fasilitas yang layak.
2. *Output* yang telah berhasil dicapai Kota Bontang adalah angka partisipasi PAUD. Capaian ini tidak terlepas dari prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan PAUD yang berkualitas dan mendorong tingkat partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk wajib PAUD. Di samping itu, pelibatan berbagai *stakeholder* juga menjadi kunci keberhasilan indikator ini.

Tujuan 5

1. Tahun 2012 Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

2. Program terkait dengan perlindungan perempuan: sosialisasi, program pendampingan bagi korban kekerasan perempuan, *hotline* aduan kasus kekerasan, program inovasi “Pepes Ikan Belanak”
3. Pemerintah Kota Bontang telah merumuskan kebijakan daerah tentang pembentukan UPTD PPPA.
4. Meski indikator terkait penanganan korban kekerasan terhadap perempuan cukup berhasil, tapi masih menemui kendala.
5. Masih tingginya kasus perkawinan dini
6. Keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di eksekutif dan legislatif sangat minim.
7. ASFR telah mencapai target.
8. Adanya peningkatan signifikan pengguna telepon genggam

2.3.5.2.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup 4 tujuan, 22 target, dan 51 indikator. Jumlah target dan indikator tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat tercapai. Sejauh ini, hanya 13 indikator TPB (25,49 persen) yang relevan atau didukung oleh program daerah. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar semakin banyak indikator TPB yang didukung oleh program daerah, mengingat Sebagian besar (38 indikator atau 74,51 persen) belum relevan dengan program Pemerintah Kota Bontang selama ini. Dari sisi ketercapaian, teridentifikasi 19 indikator telah mencapai target nasional, 13 belum mencapai target nasional, dan 19 indikator tidak tersedia datanya.



Sumber : Analisis SDGs Kota Bontang, 2020

Tabel 2. 68 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Ekonomi, Kota Bontang

Keterangan	T8	T9	T10	T17	Total
Ketercapaian					
▪ Tercapai	5	3	2	9	19 (37,25%)
▪ Tidak tercapai	7	2	1	3	13 (25,49%)
▪ Tidak ada data	7	6	3	3	19 (37,25%)
▪ Total	19	11	6	15	51
Kesesuaian/Relevansi dengan Program Daerah					
▪ Relevan	7	3	3	0	13 (25,49%)
▪ Tidak relevan	12	8	3	15	38 (74,51%)
▪ Total	19	11	6	15	51

Gambar 2.44 memperlihatkan bahwa dari 19 indikator yang berhasil mencapai target nasional, hanya 5 indikator yang didukung atau relevan dengan program pembangunan Kota Bontang selama ini dan 14 indikator belum memiliki relevansi dengan program daerah. Dari 13 indikator TPB yang tidak tercapai, sebanyak 8 indikator yang relevan dengan program daerah dan 5 indikator yang belum sesuai atau relevan dengan program daerah Kota Bontang.

Catatan penting pencapaian indikator TPB pada pilar pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tujuan 8

1. Menurunnya laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita.
2. PDB per tenaga kerja menurun.
3. Masih terdapat persoalan pengangguran.
4. Kontribusi riil pariwisata masih sangat minim, yang ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan dan devisa naik tapi tidak diikuti peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB.
5. Indikator yang sudah tercapai diantaranya adalah kenaikan upah tenaga kerja, jumlah wisatawan yang terus meningkat yang diikuti dengan meningkatnya devisa sektor wisata, serta akses UMKM terhadap permodalan dan layanan keuangan.

Tujuan 9

1. Pengembangan infrastruktur, yaitu pembangunan dermaga penyeberangan dan Pelabuhan strategis.
2. Terjadi penurunan pada nilai sektor industri manufaktur.
3. Adanya peningkatan pengguna internet.

Tujuan 10

1. Tingkat kemiskinan cenderung fluktuatif.
2. Guna peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah menysasar tiga kelompok sasaran, yaitu penerima upah, informal, dan jasa konstruksi. Secara regulasi, juga sudah diatur tentang pemberian sanksi terkait dengan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan menunjukkan tren menurun.

3. Sebagian besar indikator tidak tersedia datanya.

Tujuan 17

- 1. Semua indikator dalam Tujuan 17 belum menjadi komitmen Pemerintah Kota Bontang; namun 9 indikator di antaranya sudah mencapai target nasional.
- 2. Dalam hal ketersediaan data yang berkualitas dan terpercaya masih ada beberapa catatan, yaitu (a) belum tersedianya buku panduan untuk mengukur indikator TPB di level kabupaten/kota; (b) beberapa indikator hanya pada level nasional sehingga hampir tidak dapat diaplikasikan di daerah.

2.3.5.2.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan terdiri dari 5 tujuan, 20 target, 39 indikator. Tabel 2.61 memperlihatkan capaian indikator TPB pilar pembangunan lingkungan. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa indikator yang masih belum tercapai ada 16 (41,03 persen), sedangkan yang sudah berhasil mencapai target nasional sebanyak 14 indikator (35,90 persen). Sisi lain masih ditemukan 9 indikator (23,08 persen) yang tidak tersedia datanya.

Dalam konteks relevansi indikator TPB dengan program daerah, terlihat bahwa mayoritas indikator pilar pembangunan lingkungan belum relevan dengan program Pemerintah Kota Bontang selama ini, yaitu 32 indikator (82,05 persen). Hanya terdapat 7 indikator (17,95 persen) yang relevan dengan program daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perhatian dan fokus Pemerintah Kota Bontang yang relevan dengan pilar pembangunan lingkungan TPB masih kurang.

Tabel 2. 69 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Lingkungan, Kota Bontang

Keterangan	T 6	T1 1	T1 2	T1 3	T1 5	Total
Ketercapaian						
▪ Tercapai	6	5	2	0	1	14 -35,90%
▪ Tidak tercapai	10	2	0	2	2	16 -41,03%
▪ Tidak ada data	2	5	1	0	1	9 -23,08%
▪ Total	18	12	3	2	4	39

Gambar 2. 45 Matriks Ketercapaian TPB dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Lingkungan, Kota Bontang



Kesesuaian/Relevansi dengan Program Daerah						
▪ Relevan	3	3	1	0	0	7 -17,95%
▪ Tidak relevan	15	9	2	2	4	32 -82,05%
▪ Total	18	12	3	2	4	39

Sumber: Analisis SDGs Kota Bontang, 2020

Gambar 2.45 memperlihatkan bahwa dari 14 indikator yang berhasil mencapai target nasional, hanya 3 indikator yang memiliki relevansi dengan program pembangunan Kota Bontang selama ini dan 11 indikator belum memiliki relevansi dengan program daerah. Dari 16 indikator TPB pilar pembangunan lingkungan yang tidak tercapai, terdapat 3 indikator yang relevan dengan program daerah dan 13 indikator yang belum sesuai atau relevan dengan program daerah Kota Bontang.

Catatan penting pencapaian indikator TPB pada pilar pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tujuan 6

1. Sebagian indikator bukan merupakan program daerah tapi mampu mencapai target. Ketercapaian ini didukung oleh perilaku masyarakat yang sudah cukup baik, yaitu memiliki fasilitas cuci tangan, sanitasi dan tempat buang air besar memadai, serta sumur dengan air yang memenuhi standar baku.
2. Sebagian indikator merupakan program daerah.

Tujuan 11

1. Kota Bontang telah memiliki rencana pembangunan wilayah yang jelas, yakni sebagai pusat layanan kota yang didukung oleh sarana prasarana, infrastruktur, dan sistem jaringan transportasi.
2. Ketercapaian indikator TPB yang relevan dengan program: akses hunian layak dan terjangkau, penanganan sampah (telah dikembangkan program penanganan sampah dan penyediaan fasilitas), program RTH
Sistem peringatan dini dan indeks risiko bencana belum menjadi fokus program daerah; kedua indikator belum tercapai

Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 15

1. Di Kota Bontang telah dikembangkan pengelolaan sampah secara terpadu melalui 3R (*reduse, reuse, recycle*); berhasil mengurangi timbunan sampah.
2. Sertifikasi SNI ISO14001 belum menjadi fokus program daerah, tapi berhasil mencapai target nasional.

2.3.5.2.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola hanya terdiri dari 1 tujuan dengan 8 target dan 21 indikator. Dari total 21 indikator diketahui 11 diantaranya (52,38 persen) telah mencapai target nasional, 5 indikator (23,81 persen) belum mencapai target nasional, dan 5 indikator (23,81 persen) tidak tersedia datanya. Apabila dilihat dari kesesuaian dengan program daerah, sebanyak 15 indikator (71,43 persen) relevan dengan program Pemerintah Kota Bontang selama ini dan hanya 6 (28,57 persen) yang kurang relevan dengan program daerah.

Tabel 2. 70 Jumlah Indikator TPB berdasarkan Tingkat Ketercapaian dan Kesesuaian Program Daerah: Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Kota Bontang

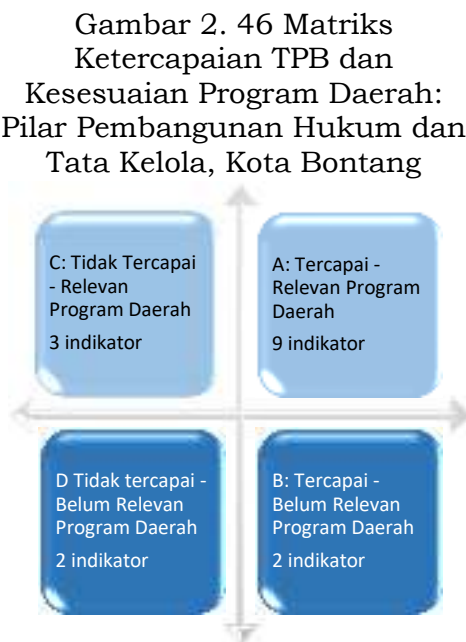
Keterangan	T16	Total
Ketercapaian		
□ Tercapai	11	11
		-52,38%
□ Tidak tercapai	5	5
		-23,81%
□ Tidak ada data	5	5
		-23,81%
□ Total	21	21

Kesesuaian/Relevansi dengan Program Daerah

□ Relevan	15	15
		-71,43%
□ Tidak relevan	6	6
		-28,57%
□ Total	21	21

Sumber: Analisis SDGs Kota Bontang, 2020

Gambar 2.46 memperlihatkan pemetaan terhadap pilar pembangunan hukum dan tata Kelola. Dari 11 indikator yang berhasil mencapai target nasional, sebanyak 9 indikator didukung atau relevan dengan program pembangunan Kota Bontang selama ini dan 2 indikator belum memiliki relevansi dengan program daerah. Dari 5 indikator TPB yang tidak tercapai, ternyata terdapat 3 indikator yang relevan dengan program daerah dan 2 indikator yang belum sesuai atau relevan dengan program daerah Kota Bontang.



Sumber: Analisis SDGs Kota Bontang, 2020

Tujuan 16

1. Kasus kekerasan terhadap anak: Meskipun sudah ada Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, tapi sejauh ini, Pemerintah Kota Bontang belum berfokus pada penanganan kasus kekerasan pada anak, baik laki-laki maupun perempuan; tidak tersedia data yang memadai.
2. Pemerintah Kota Bontang telah berhasil mencapai indikator yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (WTP, SAKIP, IRB, kepatuhan UU Pelayanan Publik).
3. Program pemberdayaan perempuan yang ada selama ini belum berfokus pada keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif sangat minim.
4. Pelayanan pencatatan penduduk dan peningkatan cakupan kepemilikan akta merupakan prioritas program Disdukcapil. Namun masih ada persoalan dalam cakupan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan rendah.
5. Beberapa indikator yang terkait dengan pelaksanaan *e-government* tidak didukung data yang memadai; padahal ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bontang.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, Daya saing Kota Bontang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah yaitu kemampuan daerah untuk bersaing menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah.

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut umumnya memang semakin meningkat. Kebutuhan makanan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan

dialihkan ke kebutuhan lain, oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok. Jika dilihat dari distribusi pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk konsumsi protein relatif lebih tinggi dibanding dengan untuk konsumsi karbohidrat, hal ini menunjukkan asupan gizi masyarakat Bontang sudah tergolong sangat baik.

Tabel 2. 71 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Per Kapita

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	658.447	760.989	789.837	803.871	899.901
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)					
1	Padi-padian	9,74	8,39	3,43	3,60	2,47
2	Umbi-umbian	0,74	0,69	0,24	0,26	0,23
3	Ikan / udang / cumi / kerang	10,51	10,81	4,43	4,44	3,52
4	Daging	5,09	5,51	2,01	2,11	1,55
5	Telur dan Susu	7,55	6,96	2,71	2,92	2,32
6	Sayur-sayuran	6,55	7,27	2,5	2,60	2,31
7	Kacang-kacangan	1,82	1,64	0,65	0,75	0,61
8	Buah-buahan	5,16	5,27	2,48	3,11	2,43
9	Minyak dan Lemak	2,06	2,03	0,73	0,77	0,57
10	Bahan Minuman	2,68	2,68	0,95	0,94	0,72
11	Bumbu-bumbuan	2,06	1,97	0,76	0,85	0,66
12	Konsumsi Lainnya	2,00	1,74	0,68	0,73	0,59
13	Makanan dan Minuman Jadi	34,42	37,9	16,01	16,51	16,24
14	Tembakau dan sirih	9,62	7,14	2,54	3,29	2,29
	Jumlah	100,00	100,00	40,10	42,87	36,51

Sumber BPS Kota Bontang Tahun 2021

Tabel 2. 72 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	900.960	877.313	1.179.682	1.071.079	1.564.991
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)					
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga	51,85	56,81	27,87	27,16	24,38
2	Aneka Barang dan Jasa	32,6	26,67	15,12	14,96	20
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	4,48	2,59	3,17	2,76	3,63
4	Barang Tahan Lama	4,89	5,15	6,22	6,08	7,57
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	4,37	8,36	3,81	3,86	5,38

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	1,81	0,42	3,72	2,30	2,14
	Jumlah	100	100	59,9	57,13	63,49

Sumber BPS Kota Bontang Tahun 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah.

1) Aksesibilitas Daerah

Meski sumber daya alam di Kota Bontang terbatas, namun sektor industri, jasa dan pariwisata sektor utama yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bontang. Kota Bontang juga merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan sarana yang memadai sangat diperlukan untuk memudahkan aksesibilitas di Kota Bontang, antara lain:

a. Sarana Jalan.

Akses dari dan ke Kota Bontang disisi darat adalah melalui jalan Trans Kalimantan yang saat ini kondisinya relatif kurang baik, namun sebaliknya kondisi jalan di wilayah administrasi Kota Bontang secara umum berada pada kondisi baik. Pada tahun 2020, dari 195,33 km panjang jalan, hanya terdapat sekitar 5,31 km atau 2,72 persen jalan dalam kondisi rusak dan 11,97 km atau 6,13 persen dalam kondisi rusak berat. Kondisi jalan yang rusak sebagian besar berada di Kelurahan Bontang Lestari merupakan fokus aktivitas industri baru sehingga sering dilewati oleh kendaraan besar.

Tabel 2. 73 Profil Kondisi Jalan di Kota Bontang Tahun 2020

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Total Panjang Jalan (m)
		Baik (m)	Sedang (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	
1	Kecamatan Bontang Barat	33.457,60	640,50	246,90	800,00	35.145,00

2	Kecamatan Bontang Selatan	86.825,69	1.412,78	4.022,70	10.372,83	102.634,00
3	Kecamatan Bontang Utara	55.477,10	236,00	1.044,90	800,00	57.558,00
Total Panjang		(m) 175.760,39	2.289,28	5.314,5	11.972,83	195.337,00
		(km) 175,76	2,29	5,31	11,97	195,33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2021

- b. Pelabuhan Kota Bontang.
Pelabuhan Loktuan merupakan pelabuhan yang melayani penumpang kapal antar provinsi. Selama tahun 2020, kapal dalam negeri yang bersandar di Pelabuhan Loktuan Kota Bontang sebanyak 2.915 unit, sedangkan kapal luar negeri yang bersandar di Pelabuhan Kota Bontang sebanyak 509 unit, serta kapal rakyat sebanyak 222 unit.
- c. Bandara PT. Badak NHL.
Bandara PT. Badak NGL merupakan bandara perintis yang melayani penumpang yang utamanya pegawai perusahaan serta masyarakat umum. Penerbangan dari Bandara PT. Badak NGL Kota Bontang tahun 2020 sebanyak 110 kedatangan dan 110 keberangkatan, dengan 2.520 orang penumpang berangkat dan 2.802 orang penumpang datang.
- d. Terminal Bus.
Terimal Buk di Kota Bontang merupakan terminal dengan kategori tipe pelayanan tipe C yang melayani arus penumpang dan barang ke Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.

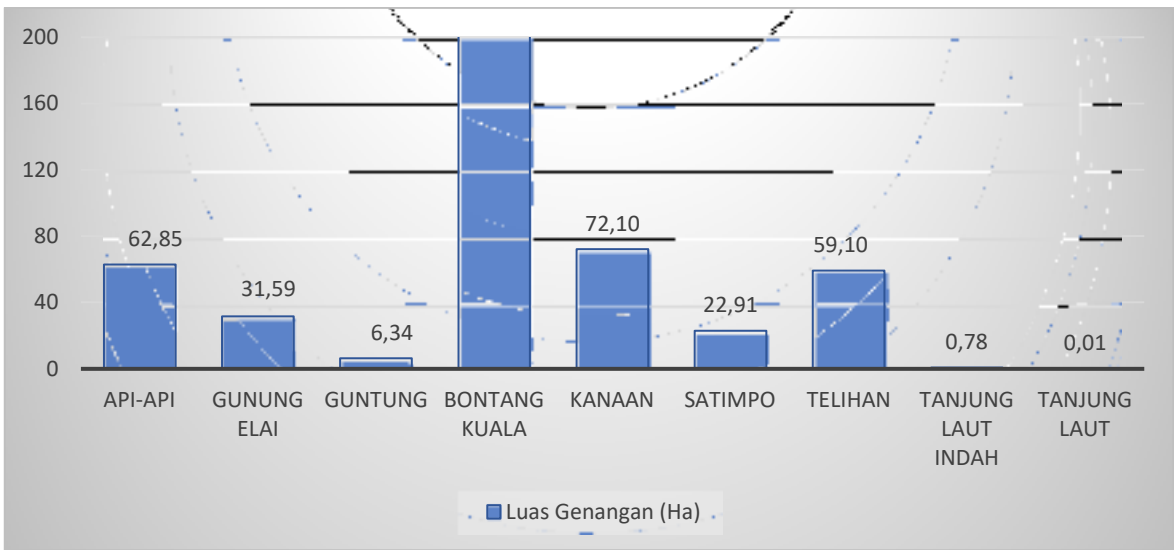
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2021

Banjir masih merupakan salah satu isu utama di Kota Bontang, setiap tahun masih selalu terjadi bencana banjir bahkan pada tahun 2019 merupakan salah satu bencana banjir terparah di Kota Bontang. Bencana banjir terjadi khususnya pada wilayah dataran rendah dan berada di kawasan sepanjang Sungai Bontang dan Sungai Guntung.

Tabel 2. 73 Luas kebanjiran/tergenang

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas wilayah tergenang (ha)	-	-	-	1287,63	924,15

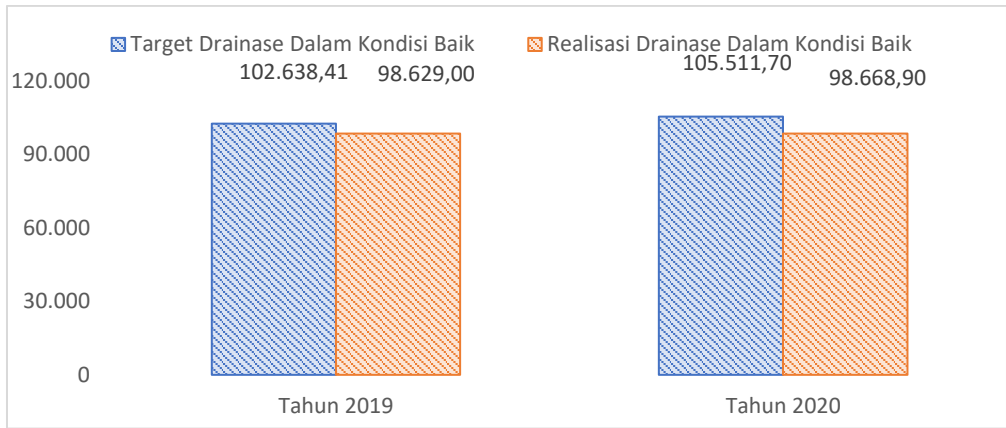
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2021



Gambar 2. 47 Luas Genangan Banjir Kota Bontang Per Kelurahan Tahun 2020

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.47, Kelurahan Bontang Kuala merupakan daerah genangan terluas sebesar 668,27 hektar. Banjir ini secara umum disebabkan oleh pasangnyanya air laut (rob) dan posisi kelurahan Bontang Kuala yang berada di hilir sehingga berfungsi sebagai outlet aliran. Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Telihan merupakan daerah terdampak banjir selanjutnya yang dengan luas genangan 72,1 hektar dan 59,10 hektar. Kapasitas tampungan waduk Kanaan dan sistem drainase perkotaan yang belum memadai menyebabkan Kelurahan Kanaan dan Telihan sebagai kawasan terdampak banjir karena posisinya yang berada di hulu aliran. Selain itu Hulu DAS Bontang dan DAS Guntung yang berada di Kabupaten Kutai Timur menyulitkan intervensi Pemerintah Kota Bontang dalam hal penanggulangan banjir dari daerah hulu. Salah satu upaya penanggulangan banjir di Kota Bontang terutama dalam menampung aliran air di daerah hulu adalah rencana pembangunan Bendungan Sukarahmat yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur. Rencana pembangunan bendungan yang difasilitasi oleh Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang dalam proses izin pinjam pakai kawasan hutan.

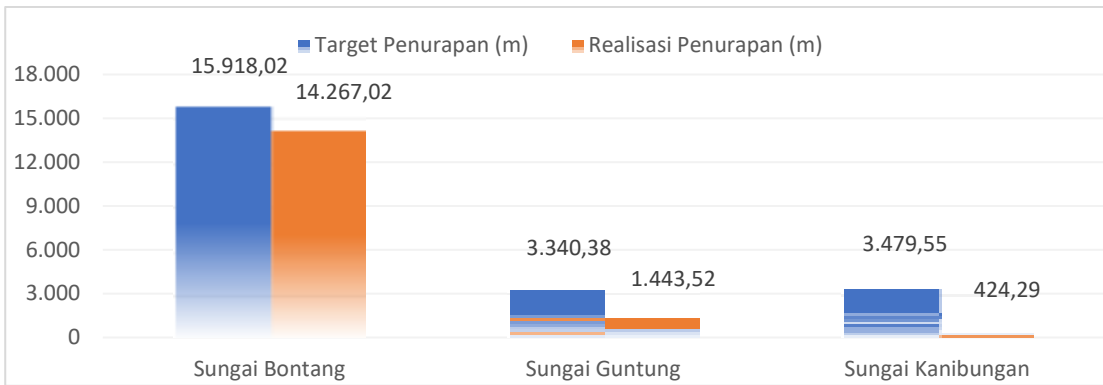
Penanganan banjir di Kota Bontang salah satunya melalui pengelolaan drainase perkotaan dan penurapan sungai Bontang.



Sumber: Dinas PUPR Bontang, 2021

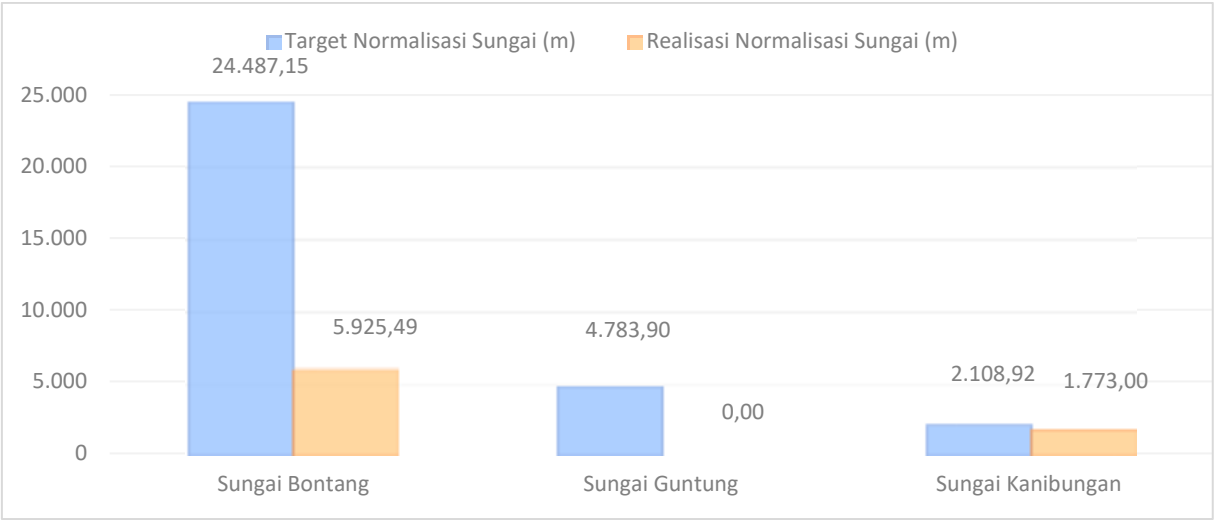
Gambar 2. 48 Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bontang

Capaian kondisi drainase dalam kondisi baik dari target sebesar 105.511,7meter terealisasi sebesar 98.668,90 meter. Untuk penataan sungai dan bantaran sungai, penurapan Sungai Bontang, Sungai Guntung, dan Sungai Kanibungan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan banjir baru dapat dilakukan sepanjang 16.134,83meter dari target penurapan sepanjang 22.737,95 meter, dan masih terdapat 98 bangunan rumah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Bontang dan Sungai Guntung yang belum dapat direlokasi. Kawasan resapan air yang dapat berfungsi sebagai tempat menampung air dan meresapkannya ke dalam tanah semakin hari semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk kebutuhan permukiman. Kawasan pesisir yang merupakan daerah rawa telah banyak yang ditimbun untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat.



Sumber: Dinas PUPR Bontang, 2021

Gambar 2. 49 Panjang Penurapan Sungai di Kota Bontang



Gambar 2. 50 Panjang Normalisasi Sungai di Kota Bontang

e. Ketersediaan Air Minum

Pelayanan umum terhadap pemenuhan fasilitas air minum di Kota Bontang dapat dikatakan mengalami peningkatan. Terlihat dari jumlah pelanggan, pemakaian dan penjualan air yang terus meningkat tiap tahunnya, demi memenuhi kebutuhan seluruh warga. Pekerjaan rumah utama terkait pelayanan air bersih terdapat disisi hulu yaitu penyediaan air baku permukaan yang saat ini masih terus diupayakan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Gambaran pelayanan air minum di Kota Bontang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 74 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Jaringan Sambungan Rumah Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan	23.411	24.740	26.535	28.061	29.239
Jaringan SR PDAM	-	-	-	22.953	24.221
Pemakaian Air (Liter/detik))	319,87	341,08	335,27	368,08	387,43
Penjualan Air (M3)	8.425.010	8.399.420	8.400.240	8.911.938	9.847.100
Cakupan pelayanan air minum (%)	-	-	-	77,42	79,57
Panjang jaringan perpipaan (meter)	-	-	492.859	508.162	516.746

Sumber : PDAM Kota Bontang 2021

2) Komunikasi dan Informatika

Perkembangan jaringan telekomunikasi juga menunjukkan arah yang positif, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup)

mengalami kecenderungan menurun, tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Seluruh wilayah Kota Bontang saat ini sudah terjangkau oleh jaringan 4G walaupun masih terdapat beberapa *blank spot area* dan belum semua operator selular beroperasi di Kota Bontang. Saat ini Indonesia sudah memulai era 5G yang menawarkan kecepatan akses internet yang hingga 100 kali lipat dari 4G dan Pemerintah Kota Bontang harus mempersiapkan kebijakan untuk mengakselerasi penetrasi 5G.

Tabel 2. 75 Persentase Rumah Tangga Menurut KepemilikanTelepon Seluler (HP)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	74,43	74,47	93,73	92,82	92,91
Proporsi individu yang mengakses internet	75,87	74,68	76,14	75,56	77,00

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2021

3) Perdagangan Barang dan Jasa

Jumlah hotel dan perkembangannya di Kota Bontang relatif stagnan dan tidak berkembang. Hanya terdapat 3 hotel berbintang dan 2 hotel diantaranya merupakan hotel yang dibangun sebagai pelayanan dari sektor industri. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata maupun sektor perdagangan dan jasa belum memberikan sumbangsih yang cukup berarti dan belum digarap dengan optimal.

Tabel 2. 76 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi di Kota Bontang 2020

Kecamatan	Hotel Berbintang					Hotel Non bintang & Akomodasi lainnya	Total
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5		
Bontang Selatan						9	9
Bontang Utara		1	1			12	14
Bontang Barat			1			6	7
Bontang		1	2			27	30

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2021

Tabel 2. 77 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Bontang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah makan / Restoran	173	291	274	292	288

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2021

Perkembangan restoran dan rumah makan di Kota Bontang terbilang meningkat dan cukup baik meski terjadi penurunan di tahun 2020. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan kesiapan daerah terhadap potensi investasi dan sebagai potret tumbuhnya sektor pariwisata di Kota Bontang. Jumlah rumah makan di Kota Bontang tahun 2016 sebanyak 173 unit, tahun 2017 sebanyak 291 unit, tahun 2018 sebanyak 274 unit, tahun 2019 meningkat menjadi 292 unit dan tahun 2020 berkurang menjadi 288 unit.

Tabel 2. 78 Perkembangan Jumlah Obyek Wisata di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Obyek Wisata					
- Obyek Wisata Alam	-	8	12	7	15
- Obyek Wisata Budaya	-	3	3	3	17
- Obyek Wisata Buatan	-	12	10	10	14

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2021

Meski pariwisata alam terbatas, Kota Bontang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan objek wisata alam yang ada terutama wisata maritim yang merupakan kearifan lokal Kota Bontang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan objek wisata alam menjadi 15 objek wisata sejak tahun 2017. Wisata budaya juga meningkat secara signifikan, dari 3 objek di tahun 2017 menjadi 17 objek wisata di tahun 2020. Sedangkan objek wisata buatan meningkat menjadi 14 objek wisata pada tahun 2020.

Perkembangan jumlah industri di Kota Bontang mengalami fluktuasi nilai setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 secara jumlah mengalami penurunan. Penurunan jumlah industri yang signifikan pada tahun 2020 terdapat pada industri makanan dan minuman yang menurun sebanyak 96 industri. Sedangkan industri minuman menurun sebanyak 14 buah. Untuk industri kimia, hasil hutan dan perkebunan serta industri lainnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.

Tabel 2. 79 Perkembangan Jumlah Industri

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri					
- Makanan dan Minuman	382	454	525	525	429
- Industri Minuman	189	235	283	283	269
- Industri Kimia	40	39	42	42	45

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
- Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	19	14	17	17	19
- Lainnya	33	33	43	43	48

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2021

Perkembangan jumlah pasar tradisional baik milik pemerintah dan milik swasta dan juga pasar swalayan di Kota Bontang sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 stagnan dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Untuk jumlah minimarket dari tahun 2016 bertambah sebanyak 17 minimarket hingga tahun 2020, sedangkan untuk pertokoan/warung/kios bertambah sebanyak 13 toko sampai tahun 2020. Perkembangan kota yang semakin pesat mendorong toko-toko untuk berinvestasi di Kota Taman.

Tabel 2. 80 Perkembangan Jumlah Pasar

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pasar Tradisional milik Pemerintah	3	3	3	3	3
Pasar Tradisional milik Swasta	2	2	2	2	2
Pasar Swalayan / Supermarket / Toserba	2	2	2	2	2
Mini Market	206	212	218	222	223
Pertokoan/Warung/Kios	208	214	220	221	221

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020

2.4.3 Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi

Sebagai kota industri, Kota Bontang memiliki peluang investasi yang luas di berbagai sektor. Ketersediaan sarana, prasarana dan kondusifitas wilayah merupakan faktor kunci bagi investor untuk mempertimbangkan berinvestasi di suatu daerah. Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat diatasi oleh aparat pemerintah dan masyarakat dengan baik. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Pemerintah mendorong tumbuh pesatnya investasi di Kota Bontang dengan kebijakan-kebijakan ramah investasi. Birokrasi pelayanan perijinan yang sederhana dan berbasis online sangat memudahkan dan mempercepat pengurusan perijinan bagi investor. Selain itu, Pemerintah Kota Bontang mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi untuk mendukung

percepatan perijinan dan investasi antara lain perijinan berbasis online, perijinan jemput bola, integrasi sistem perijinan dengan Perangkat Daerah dengan fungsi terkait, serta regulasi yang menetapkan lama proses ijin.

Tabel 2. 81 Perkembangan Lama Proses Ijin di Kota Bontang Tahun 2016–2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Proses Ijin (hari)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang Tahun 2021

Perkembangan Pajak dan Retribusi di Kota Bontang tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun karena pendapatan 9 obyek pajak di Kota Bontang yang juga fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi beberapa obyek pajak dan hasil retribusi daerah.

Tabel 2. 82 Perkembangan Pajak dan Retribusi di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pajak	Retribusi Daerah
2016	71.426.252.746	6.528.480.654
2017	82.122.896.197	4.596.396.524
2018	119.410.487.414	3.980.779.128
2019	116.864.297.801	6.317.525.028
2020	100.014.196.975	4.648.143.497

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang unggul merupakan aset daerah yang merupakan kunci terciptanya daya saing suatu daerah. Oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap SDM harus diprioritaskan secara terus menerus. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami banyak perubahan. Penambahan jumlah fasilitas pendidikan terdapat pada Jumlah PAUD (SPS) swasta yang bertambah sebanyak 3 sekolah dan Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) bertambah sebanyak 5 sekolah. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tahun 2018 mengalami penurunan dan kembali bertambah sebanyak 3 PKBM pada tahun 2019. Sedangkan untuk fasilitas sekolah jenjang lainnya tidak mengalami perubahan jumlah.

Tabel 2. 83 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAUD (SPS)	37	37	37	33	36
Negeri					
Swasta	37	37	37	33	36
Jumlah Taman Kanak-kanak (TK)	55	55	57	50	55
Negeri	3	3	3	3	3
Swasta	52	52	54	47	52
Jumlah RA/BA	11	11	11	11	11
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	56	56	56	56	56
Negeri	30	30	30	30	30
Swasta	26	26	26	26	26
Jumlah MI	4	5	5	5	5
Negeri					
Swasta	4	5	5	5	5
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27	27	27	27	27
Negeri	9	9	9	9	9
Swasta	18	18	18	18	18
Jumlah MTs	6	6	6	6	6
Negeri					
swasta	6	6	6	6	6
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	11	11	11	11	11
Negeri	3	3	3	3	3
Swasta	8	8	8	8	8
Jumlah MA	2	2	2	2	2
Negeri	1	1	1	1	1
Swasta	1	1	1	1	1
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	13	13	14	14	14
Negeri	3	3	4	4	4
Swasta	10	10	10	10	10
Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
Negeri	1	1	1	1	1
Swasta					
Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)					
Negeri					
Swasta	26	26	15	18	18

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2020

Tabel 2. 84 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2015 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Umum :					
Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Umum Pusat	0	0	0	0	0
Rumah Sakit TNI / POLRI	0	0	0	0	0
Rumah Sakit Khusus, terdiri dari :					
Rumah Bersalin (RB) / BKIA	0	0	0	0	0
Puskesmas, terdiri dari :					
Puskesmas Perawatan	0	0	0	0	0
Puskesmas Non Perawatan	6	6	6	6	6
Puskesmas Pembantu	2	2	2	2	2
Posyandu yang ada	115	121	119	119	-
Dokter gigi swasta	2	2	2	2	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2020

Perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Bontang tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami penambahan baik untuk rumah sakit swasta yang berjumlah 4 RS dan rumah sakit umum daerah yang berjumlah 1. Baik untuk Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Pembantu juga tidak mengalami penambahan.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) di Kota Bontang setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak signifikan. Pada tahun 2019 nilai rasio ketergantungan adalah sebesar 43,50 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 43,24 persen Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang di Kota Bontang yang berusia 15-64 tahun (angkatan kerja) yang dianggap produktif memiliki tanggungan sebanyak 43 hingga 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka ini mengindikasikan makin kecil angka rasio ini, maka beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang harus diberikan penduduk usia produktif kepada penduduk usia non produktif menjadi lebih ringan.

Tabel 2. 85 Perkembangan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia < 15th (ribu jiwa)	48.143	48.408	50.053	51.264	51.651
Penduduk Usia > 15th & < 65 th (ribu jiwa)	122.730	125.032	125.962	126.563	129.000
Penduduk Usia > 65th (ribu jiwa)	2.897	3.075	3.393	3.791	4.133
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	17.3770	176.515	179.408	181.618	184.784
Rasio Ketergantungan (%)	41,59	41,18	42,43	43,50	43,24
Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,0547	0,0556	0,0573	0,0584	0,0599

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2020

2.5 Capaian Kinerja Indikator RPJMD 2016-2021

Kota Bontang sebagai kota maritim tumbuh cukup pesat dalam kurun lima tahun terakhir. Geliat aktivitas ekonomi terutama di sektor non migas tumbuh positif secara signifikan hingga tahun 2019 meski kemudian mengalami perlambatan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Peningkatan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan perekonomian berbasis maritim diupayakan melalui berbagai kebijakan dan program-program prioritas.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2016-2021 diukur dari indikator kinerja dari sasaran dan program yang diperjanjikan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021.

Adapun hasil capaian indikator RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

MISI I

Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Pada Misi 1 RPJMD Kota Bontang 2016-2021 memiliki dua tujuan yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi. Adapun capaiannya dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 86 Misi I Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2016-2021			
			Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir	Kondisi Akhir (2020)	Ketercapaian
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	IPM	78,92	78,6	80,02	Tercapai
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	10,39	10,43	10,79	Tercapai
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79	12,95	13,03	Tercapai
		Nilai rata-rata ujian akhir SD	68,6	220,86	tdk ada ujian	tidak tercapai
		Nilai rata-rata ujian akhir SLTP	60,51	269,04	tdk ada ujian	tidak tercapai
	2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua	Angka harapan hidup	73,71	73,96	74,28	Tercapai
		Angka Kematian Bayi	11,6	7,8	13	Tidak tercapai
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	110,9	86	103	Tidak tercapai
		Prevalensi Balita Gizi kurang	0,39	<5 %	10,56	Tidak tercapai
2. Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3 Meningkatnya kesejahteraan Kehidupan Sosial dan Kehidupan Beragama	Tingkat Kemiskinan (%)	5,09	4,21	4,38	Tidak tercapai
		Tingkat Pengangguran (%)	9,38	9,22	9,46	Tidak tercapai
		Indeks Gini	0,345	0,32	0,405	Tidak tercapai
		Jumlah Konflik terkait SARA	0	0	0	Tercapai
	4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Tercapai
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	NA	BB	B	Tidak tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,43	83,97	84,59	Tercapai
		Indeks Persepsi Korupsi	NA	5,77	5,4	Tercapai
		Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan pembangunan	90%	98%	100	Tercapai
		Jumlah layanan publik berbasis teknologi informasi	NA	18	78	Tercapai
		Indeks Kota Cerdas Indonesia	NA	55,11	NA	Tidak diukur

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, 2020

MISI II :
Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pada Misi 2 RPJMD Kota Bontang 2016-2021 memiliki tiga tujuan yaitu Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan, Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum serta Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan. Adapun capaiannya dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 87 Misi II Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun			
			Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir (2020)	Kondisi Akhir (2020)	Ketercapaian
1. Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1 Meningkatkan cakupan pengelolaan sanitasi	Cakupan pelayanan air limbah domestik	96,54	98,78	100	tercapai
		Cakupan Penanganan sampah	94,85	82,82	96,62	tercapai
	2 Meningkatkan Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan	Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan	100	100	100	tercapai
	3 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau	NA	3.105	3.084,83	Tidak tercapai
	4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	kawasan perumahan dan Permukiman kumuh	NA	4,8	15	Tidak tercapai
	5 Menurunnya laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca	mempertahankan laju pertumbuhan emisi	NA	2.458,3	3.672	tidak tercapai
2.Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6 Meningkatkan akses pelayanan air minum	cakupan pelayanan air minum	98,32	99,35	81,69	Tidak tercapai
	7 Terlaksananya Konservasi sumber daya air	Kedudukan permukaan air tanah di 2 (dua) sumur pantau	NA	-41,1	-21,2	tercapai
			NA	-55,9	-34,03	tercapai
3. Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8 Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	NA	86,56	48	tidak tercapai
		Rehabilitasi ekosistem pesisir	NA	283,08	NA	Tidak diukur
		Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	252,63	283,08	255,13	Tidak tercapai
	9 Terselesaikannya permasalahan banjir	Luas wilayah tergenang	NA	18,88	924,15	tidak tercapai

MISI III :
Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

Pada Misi 3 RPJMD Kota Bontang 2016-2021 memiliki dua tujuan yaitu Meningkatkan peran sektor Non Migas dalam struktur ekonomi daerah dan Peningkatan Daya Saing ekonomi Kota Bontang. Dari ke dua tujuan tersebut, adapun capaiannya dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 88 Misi III Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritime

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun			
			Kondisi Awal	Target Kondisi Akhir (2020)	Kondisi Akhir (2020)	Ketercapaian
1. Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi non migas	Pertumbuhan PDRB Non Migas	0,14	8,20 – 9,12	6,68	tidak tercapai
	2 Meningkatkan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	Kontribusi sektor ekonomi maritim terhadap PDRB non migas	NA	8,46 – 12,6	NA	tidak diukur karena perubahan kewenangan
	3 Meningkatkan Perdagangan dan industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	70,43	86,05	68,29	tidak tercapai
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB non migas	4,09	8,31	5,9	Tidak tercapai
2. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4 Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	Jumlah sarana perdagangan/pasar	3	3	3	tercapai
		Sarana dan Prasarana Pelabuhan	NA	5	0	tidak diukur karena perubahan kewenangan
		Pembangunan Bandara	0	1	0	tidak diukur karena perubahan kewenangan
		Jaringan Gas Rumah Tangga	3	14	14	tercapai
		Pengelolaan Kawasan Industri baru	0	0	0	tercapai
	5 Meningkatkan usaha mikro kecil	Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif	200	556	8760	tercapai

Secara umum capaian kinerja Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 47,5 persen, atau dari sejumlah 40 indikator kinerja sesuai kewenangan daerah terdapat 19 indikator sasaran tercapai, 19 indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai dan 2 indikator kinerja yang tidak diukur. Diantara indikator sasaran yang tidak tercapai antara lain; Angka harapan hidup, Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran, Prevalensi Balita Gizi kurang, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini, Luas Ruang Terbuka Hijau, Luas wilayah tergenang, Pertumbuhan PDRB Non Migas, dan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas.

Sedangkan capaian program RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 52,08 persen atau dari 240 indikator kinerja program, terdapat 125 indikator tercapai, 35 indikator tidak tercapai dan terdapat 80 indikator program yang tidak diukur

pencapaiannya. Dilihat dari capaian indikator program, capaian RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2020 tergolong rendah. Namun demikian berbagai pembangunan dan pelaksanaan program-program prioritas yang diperjanjikan oleh Walikota dan Wakil Wali Kota Bontang telah dilaksanakan dengan baik dan diapresiasi dengan berbagai penghargaan oleh Pemerintah Pusat. Capaian pelaksanaan program prioritas antara lain:

1. Penyelesaian Pembangunan Pasar Taman Rawa Indah.
2. Pembangunan Tahap 1-3 Mesjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan.
3. Penurapan dan normalisasi sungai Bontang untuk penanggulangan banjir.
4. Peningkatan Jalan dan jembatan Kota Bontang.
5. Pembangunan Rumah Sakit Tipe D.
6. Pembangunan Kantor Kelurahan (4 unit kantor).
7. Pembangunan Masjid Ad- Dakwah Kelurahan Belimbing.
8. Pembangunan jaringan gas rumah tangga dengan cakupan 14 kelurahan. Kota Bontang merupakan kota pertama di Kalimantan Timur yang memiliki layanan jaringan gas rumah tangga dengan cakupan layanan sebesar 93%.
9. Program fasilitasi partisipasi masyarakat melalui program dua ratus juta per RT (PRODUTA).
10. Pemberian seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SD, SMP dan SMA.
11. Pemberian beasiswa bagi pelajar.
12. Penataan Kampung Terapung Selambai dan Bontang Kuala.

Selain pembangunan program prioritas, Kota Bontang berhasil mendapatkan berbagai apresiasi melalui penghargaan tingkat nasional, antara lain penghargaan Adipura, Innovative Government Award (IGA) peringkat 2 Kota Terinovatif, Bhumandala Rajata Peringkat 3 Tingkat Nasional, Kota Layak Anak Madya, Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website, Kaltim Award bidnag Administrasi Kependudukan, Adiyawita Mandiri Tingkat Provinsi, panji-panji Pembangunan Kalimantan Timur Bidang Kesehatan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran memerlukan dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar kapasitas keuangan daerah, maka sesungguhnya akan semakin banyak pilihan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang diemban. Namun demikian, perencanaan pembangunan daerah pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan keuangan daerah yang dapat dihimpun. Oleh sebab itulah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan agar kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis terhadap kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, penyusunan kebijakan dan program pembangunan diharapkan akan semakin realistis dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Instrumen analisis yang dapat dilakukan adalah dengan mencermati kinerja keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan masa lalu serta berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaannya. ‘

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bontang dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan Kota Bontang Periode 2016-2020 akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan Kota Bontang periode 2021-2026. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu ini mencakup ruang lingkup penelaahan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan daerah juga dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang yang ditinjau melalui aspek pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang telah meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, strategi Pemerintah Kota Bontang untuk semakin memandirikan pendanaan pembangunan ditempuh dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut menjadi upaya yang terus dilakukan mengingat masih sangat besarnya ketergantungan fiskal daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Optimalisasi PAD dilakukan utamanya dengan meningkatkan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan dan retribusi daerah. Disamping itu, pembaruan sejumlah kebijakan perpajakan dan retribusi daerah juga terus diupayakan agar potensi sumber-sumber PAD semakin optimal dalam menopang peningkatan pendapatan daerah. Rata-rata kontribusi PAD selama lima tahun terakhir mencapai 14,77% dengan tren meningkat. Meskipun tren PAD menunjukkan peningkatan, proporsi belanja pembangunan masih sangat besar bersumber dari pendapatan transfer.

Belanja daerah sebagai instrumen APBD dalam menentukan kebijakan pembangunan dilaksanakan berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah memperhatikan tidak hanya aspek efisiensi, tapi juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan keefektifan (*effectiveness*), sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD Kota Bontang selama tahun 2016-2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam III-2 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Bontang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi APBD. Perbandingan tersebut juga dapat menjadi gambaran proyeksi kapasitas APBD pada tahun perencanaan. Secara rata-rata realisasi APBD Kota Bontang selama tahun 2016-2020 tercapai kurang dari 90%. Dengan tingkat realisasi yang kurang dari 90% ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan belanja pembangunan yang dapat ditempuh dengan memperbaiki penyusunan perencanaan dan memperbaiki tatakelola pelaksanaan belanja daerah.

Realisasi Pelaksanaan APBD Kota Bontang selama tahun 2016-2020 secara rata-rata sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2016	1.347.204.417.761	1.155.009.964.123	85,73
2	2017	1.096.221.065.820	945.168.192.323	86,22
3	2018	1.380.195.674.446	1.186.037.441.115	85,93
4	2019	1.685.828.021.759	1.557.699.083.829	92,40
5	2020	1.556.121.460.870	1.444.663.527.549	92,84

Sumber: data LRA 2016-2020

3.1.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendanaan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum realisasi pendapatan Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 6.9%, meskipun tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 mencapai negatif 11,9%.

Dengan membandingkan antara target pendapatan dan realisasinya, secara rata-rata realisasi pendapatan daerah selama tahun 2016-2021 mencapai lebih dari 100 persen, artinya realisasi pendapatan secara umum melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+ / (-)
1	2	3	4	5	6
1	2016	1.321.182.240.977,01	1.203.633.625.194,19	91,10%	117.548.615.782,82
2	2017	1.021.575.672.557,82	1.060.400.315.664,76	103,80%	38.824.643.106,94
3	2018	1.190.844.294.643,06	1.254.426.657.885,75	105,34%	63.582.363.242,69
4	2019	1.428.087.425.185,31	1.481.549.014.093,76	103,74%	53.461.588.908,45
5	2020	1.374.543.490.116,38	1.530.119.291.669,68	111,32%	155.575.801.553,30

Sumber: data LRA 2016-2020

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

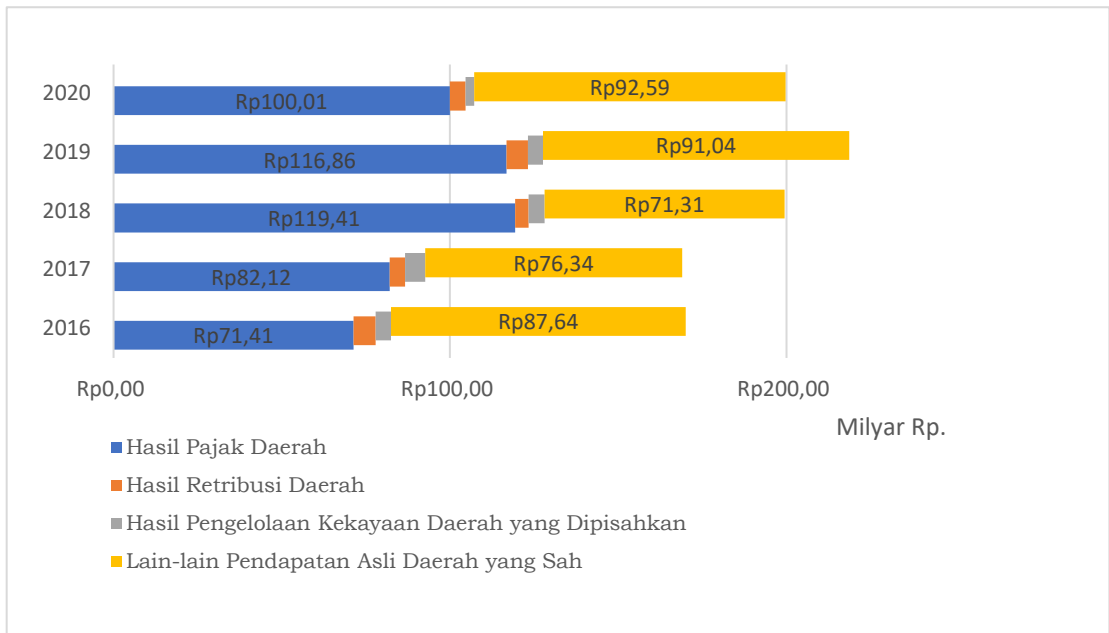
Salah satu indikator penting dalam analisis pendapatan daerah adalah perkembangan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menopang kemandirian pembiayaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Hasil Retribusi Daerah, (c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan tren realisasi pendapatan daerah selama tahun 2016-2020, peran atau kontribusi PAD sebagai indikator tingkat kemandirian fiskal masih relatif rendah dengan rata-rata baru mencapai 14,77%. Perkembangan kontribusi PAD tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Peran PAD dalam Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	(%)
2016	1.203.633.625.194,19	170.123.811.101,19	14,13
2017	1.060.400.315.664,76	169.077.548.653,40	15,94
2018	1.254.426.657.885,75	199.483.395.952,57	15,90
2019	1.481.549.014.093,76	218.743.530.945,38	14,76
2020	1.530.119.291.669,68	199.787.613.287,27	13,06

Sumber: data LRA 2016-2020

Memperhatikan perkembangan kontribusi PAD selama tahun 2016-2020 terlihat bahwa proporsi PAD dalam keseluruhan Pendapatan Daerah menunjukkan penurunan. Kontribusi PAD hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017, namun demikian peningkatan tersebut lebih disebabkan karena pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sebagai akibat kebijakan pengurangan yang cukup signifikan pendapatan transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan realisasi PAD selama tahun 2016-2020, tingkat pertumbuhannya masih belum stabil atau masih fluktuatif. Meskipun demikian secara rata-rata tahunan masih menunjukkan pertumbuhan mencapai 4,59%. Khusus untuk tahun 2020, penurunan PAD sangat terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan sektor utama penyumbang PAD, seperti Pajak Daerah, mengalami penurunan penerimaan. Realisasi PAD selama tahun 2016-2020 terutama bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan kontribusi rata-rata pertahun mencapai 50,78% dan 44,07%.



Sumber : LRA 2016-2020 (diolah)

Gambar 3. 1 Perkembangan Realisasi Sumber-sumber PAD Tahun 2016-2020

Penerimaan pendapatan dari sumber Pajak Daerah, meskipun terlihat fluktuatif, secara rata-rata masih menunjukkan kenaikan realisasi dari Rp.71,41 Milyar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.100,01 Milyar pada tahun 2020 atau secara rata-rata mengalami peningkatan 10,96%. Peningkatan realisasi pendapatan Pajak Daerah menjadi yang paling signifikan dalam mendorong peningkatan PAD. Sumber utama penerimaan Pajak Daerah ini adalah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan dengan kontribusi masing-masing 37,5% dan 37,9% atau secara keseluruhan kedua sumber tersebut berkontribusi rata-rata 75,5% dari keseluruhan pendapatan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah merupakan potensi PAD yang masih memiliki ruang untuk dioptimalkan dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah. Hal ini juga tercermin dari sejumlah sektor penerimaan Pajak Daerah yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata realisasi cukup signifikan selama tahun 2016-2020.

Tabel 3. 4 Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pajak	Realisasi Tahun (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Hotel	530,85	1.133,93	1.026,04	1.439,40	961,03	27,79
2	Restoran	5.823,99	7.136,34	9.064,81	10.995,14	7.918,65	10,72
3	Hiburan	487,44	541,81	686,76	764,64	399,75	0,38
4	Reklame	480,07	563,50	527,22	656,87	697,73	10,44
5	Penerangan Jalan	21.785,81	25.723,11	61.227,04	43.992,75	36.930,05	27,97

No.	Jenis Pajak	Realisasi Tahun (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	Parkir	62,68	96,63	118,99	112,08	69,89	8,46
7	Air Tanah	5.770,12	5.812,30	5.507,92	8.388,10	7.605,12	9,61
8	Sarang Burung Walet	-	-	6,57	-	1,16	-
9	Mineral Bukan Logam dan Batuan	49,95	-	-	77,86	82,50	-
10	PBB P3	33.520,50	35.293,20	34.193,26	37.983,73	38.544,95	3,68
11	BPHTB	2.900,49	5.822,06	7.051,87	12.453,73	6.803,36	38,27
	Jumlah	71.411,91	82.122,90	19.410,49	116.864,30	100.014,20	10,96

Sumber: Bapenda Tahun 2021

Realisasi penerimaan dari sumber-sumber pajak pada tabel 3.4, khususnya pada tahun 2020, menggambarkan bahwa sebagian besar sumber penerimaan pajak daerah mengalami penurunan, kecuali PBB P3 dan Reklame. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya sektor-sektor ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi tumpuan utama para wajib pajak sebagai dampak dari kebijakan pembatasan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, secara keseluruhan selama tahun 2016-2020 penerimaan Pajak Daerah masih tumbuh rata-rata pertahunnya sebesar 10,96%. Hampir seluruh sumber penerimaan pajak secara rata-rata tumbuh signifikan, bahkan beberapa penerimaan pajak memiliki pertumbuhan rata-rata di atas 10%.

Sebagai sumber penerimaan PAD yang sangat strategis, Pajak Daerah diharapkan akan mampu meningkatkan perannya dalam menopang peningkatan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu kebijakan pembangunan untuk mendukung stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan kebijakan yang tepat pada sektor perpajakan daerah seperti modernisasi sistem perpajakan, pembaruan regulasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan kualitas pelayanan publik menjadi prasyarat utama yang harus dapat segera direalisasikan.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer dari Pemerintah Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus (jika ada) dan Dana Penyesuaian. Transfer dari Pemerintah Provinsi biasanya berupa Bagi Hasil

Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemprov (jika ada). Berikut adalah kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Kota Bontang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3. 5 Kontribusi Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	(%)
2016	1.203.633.625.194,19	1.008.093.250.699,00	83,75
2017	1.060.400.315.664,76	853.074.667.954,00	80,45
2018	1.254.426.657.885,75	1.034.520.689.154,00	82,47
2019	1.481.549.014.093,76	1.214.450.114.789,00	81,97
2020	1.530.125.571.369,68	1.239.620.186.468,00	81,01
Kontribusi Rata-Rata			81,93

Sumber: data LRA 2016-2020

Secara keseluruhan, pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 masih berperan paling besar dalam rangka menopang Pendapatan Daerah dengan kontribusi rata-rata mencapai 69,38% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4,72%. Dengan proporsi Dana Perimbangan yang sangat besar dalam struktur pendapatan daerah menyebabkan tingkat pertumbuhannya sangat menentukan stabilitas kapasitas keuangan daerah. Hal ini tentu berdampak pada rentannya terjadi perubahan-perubahan pada sisi Belanja Daerah, khususnya dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan jangka menengah.

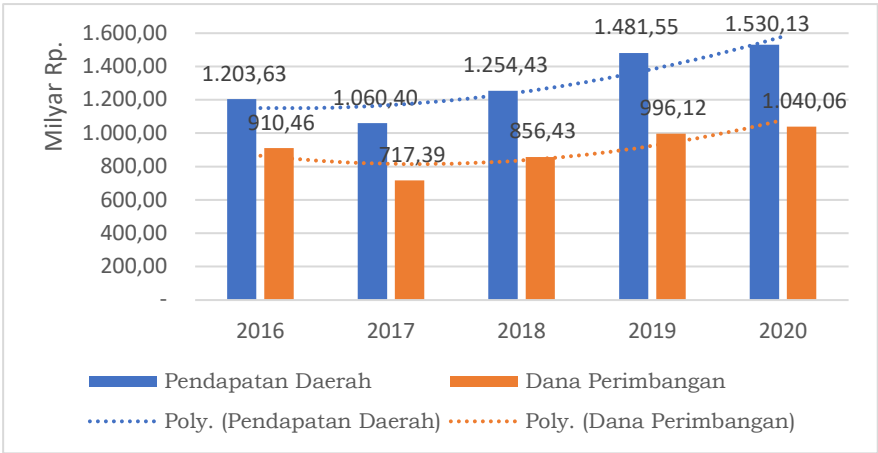
Tabel 3. 6 Kontribusi Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	(%)
2016	1.203.633.625.194,19	910.458.458.699,00	75,64
2017	1.060.400.315.664,76	717.385.768.954,00	67,65
2018	1.254.426.657.885,75	856.430.574.154,00	68,27
2019	1.481.549.014.093,76	996.123.411.211,00	67,24
2020	1.530.125.571.369,68	1.040.061.885.220,00	67,97
Kontribusi Rata-Rata			69,35

Sumber: data LRA 2016-2020

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari penerimaan Dana Perimbangan selama tahun 2016-2020 pada Tabel 3.4, terlihat bahwa peran dana perimbangan belum mengalami perubahan signifikan, khususnya selama tahun 2017-2020. Namun demikian perannya akan terlihat menurun dengan membandingkan persentase kontribusi tahun 2016 dengan tahun 2020. Bila dilihat dari sisi nilai rupiah, penerimaan Dana Perimbangan menunjukkan peningkatan yang juga relatif berbanding lurus dengan tren peningkatan pendapatan daerah. Hal ini sekaligus

mencerminkan signifikannya peran Dana Perimbangan dalam menentukan besaran Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Adapun pendorong utama peningkatan Dana Perimbangan adalah penerimaan dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang secara rata-rata dapat tumbuh 10,52% selama tahun 2016-2020.



Sumber: LRA Tahun 2016-2020 (diolah)

Gambar 3. 2 Perkembangan Peran Dana Perimbangan 2016-2020

Penerimaan Dana Perimbangan dari sumber Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak selama tahun 2016-2020 menjadi penopang terbesar dengan rata-rata kontribusi mencapai 65,3%. Selanjutnya diikuti oleh penerimaan dari Dana Alokasi Umum yang berkontribusi rata-rata 24,3% dan Dana Alokasi Khusus dengan kontribusi rata-rata 10,4%.

Kemudian untuk kinerja pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kontribusi dari 0,42% pada tahun 2016 menjadi 5,6% pada tahun 2020. Sedangkan untuk 2 komponen dari pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi, yaitu Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi memiliki rata-rata kontribusi masing-masing relatif fluktuatif dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,41% dan 2,49%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel, berikut:

Tabel 3. 7 Kontribusi DID, Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi terhadap Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Insentif Daerah		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
	Realisasi (RP)	(%)	Realisasi (RP)	(%)	Realisasi (RP)	(%)
2016	5.000.000.000,00	0,42	92.634.792.000,00	7,70	25.305.995.000,00	2,10
2017	7.500.000.000,00	0,71	128.188.899.000,00	12,09	33.990.463.000,00	3,21
2018	4.750.000.000,00	1,97	153.340.115.000,00	12,22	5.750.000.000,00	0,46

Tahun	Dana Insentif Daerah		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
	Realisasi (RP)	(%)	Realisasi (RP)	(%)	Realisasi (RP)	(%)
2019	1.973.282.000,00	2,16	186.353.421.578,00	12,58	30.750.000.000,00	2,08
2020	85.731.300.000,00	5,60	113.827.001.248,00	7,44	70.200.000.000,00	4,59

Sumber: data LRA 2016-2020 (diolah)

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari beberapa komponen, yaitu Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah dalam struktur pendapatan selama tahun 2016-2020 secara rata-rata mencapai 2,36% dengan tren yang meningkat.

Tabel 3. 8 Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	Lain-Lain Pendapatan	(%)
2016	1.203.633.625.194,19	25.416.563.394,00	2,11
2017	1.060.400.315.664,76	38.248.099.057,36	3,61
2018	1.254.426.657.885,75	20.422.572.779,18	1,63
2019	1.481.549.014.093,76	48.355.368.359,38	3,26
2020	1.530.125.571.369,68	90.711.491.914,41	5,93
Kontribusi Rata-Rata			3,31

Sumber: data LRA 2016-2020

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Bontang untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 9 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	9
	PENDAPATAN						
1	Pendapatan Asli Daerah	170.123.811.101	169.077.548.653	199.483.395.953	218.743.530.945	199.787.613.287	4,59%
	Pajak Daerah	71.411.907.746	82.122.896.197	119.410.487.414	116.864.297.801	100.014.196.976	10,96%
	Retribusi Daerah	6.528.480.654	4.596.396.524	3.980.779.128	6.331.946.328	4.490.742.059	-3,25%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.547.569.478	6.014.543.695	4.779.545.628	4.504.282.490	2.561.257.069	-9,29%
	Lain - Lain PAD yang Sah	87.635.853.223	76.343.712.237	71.312.583.783	91.043.004.326	92.721.417.184	2,51%
2	Pendapatan Transfer	1.008.093.250.699	853.074.667.954	1.034.520.689.154	1.214.450.114.789	1.239.620.186.468	6,34%
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	910.458.458.699	717.385.768.954	856.430.574.154	996.123.411.211	1.040.061.885.220	4,72%
	Dana Bagi Hasil Pajak	106.307.773.009	163.374.108.391	88.073.151.363	122.313.478.064	147.435.529.217	16,75%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	451.231.313.891	248.187.665.311	476.458.032.797	575.889.245.287	602.408.449.607	18,11%
	Dana Alokasi Umum	202.805.729.000	203.310.751.000	215.830.009.000	233.360.408.000	229.778.988.000	3,25%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata- Rata Pertumb- uhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	9
	Dana Alokasi Khusus	150.113.642.799	102.513.244.252	76.069.380.994	64.560.279.860	60.438.918.396	-19,75%
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.000.000.000	7.500.000.000	24.750.000.000	31.973.282.000	85.731.300.000	119,33 %
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
	Dana Penyesuaian	5.000.000.000	7.500.000.000	24.750.000.000	31.973.282.000	85.731.300.000	119,33%
	Transfer Pemerintah Provinsi	92.634.792.000	128.188.899.000	153.340.115.000	186.353.421.578	113.827.001.248	10,15%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	92.634.792.000	128.188.899.000	153.340.115.000	186.353.421.578	113.827.001.248	10,15%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00%
3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	25.416.563.394,00	38.248.099.057,36	20.422.572.779,18	48.355.368.359,38	90.711.491.914,41	57,06%
	Pendapatan Hibah	25.305.995.000	34.005.944.604	19.623.459.394	45.345.353.748	86.139.653.875	53,28%
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Lainnya	110.568.394	4.242.154.453	799.113.385	3.010.014.611	4.571.838.040	996,02%
	JUMLAH	1.203.633.625.194	1.060.400.315.665	1.254.426.657.886	1.481.549.014.094	1.530.119.291.670	6,95%

Sumber: data LRA 2016-2020

Berdasarkan data selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bontang dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bontang selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan secara keseluruhan pada komponen pendapatan daerah, meski masih ada yang bertumbuh negatif. Untuk itu, yang mengalami pertumbuhan negatif memerlukan pertimbangan tersendiri agar ke depan dapat mengalami pertumbuhan yang positif.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, kinerja palaksanaan

belanja daerah diukur dengan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	1.347.204.417.761,00	1.155.009.964.123,00	85,7
2017	1.096.221.065.820,00	945.168.192.323,00	86,2
2018	1.380.195.674.446,00	1.186.037.441.115,00	85,9
2019	1.685.828.021.759,00	1.557.699.083.828,83	92,4
2020	1.556.121.460.870,00	1.449.070.612.511,84	93,1
Rata-Rata	1.413.114.128.131,20	1.258.597.058.780,33	88,7

Sumber: data LRA 2016-2020

Belanja Daerah selama tahun 2016-2020, dari rata-rata target sebesar Rp.1.413.114.128.131,20 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.258.597.058.780,33 atau terrealisasi 88,7%. Dengan tingkat realisasi Belanja Daerah secara rata-rata selama tahun 2016-2020 masih dibawah 90 persen, menggambarkan bahwa masih terdapat ruang untuk lebih mengoptimalkan serapan belanja pembangunan melalui perbaikan perencanaan dan optimalisasi pengelolaan belanja daerah. Dilihat dari perkembangan realisasi Belanja Daerah selama tahun 2016-2020, secara rata-rata terjadi peningkatan sebesar 7,9% setiap tahunnya.

Rata-rata pertumbuhan tersebut ditopang dari rata-rata pertumbuhan belanja modal yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar, yaitu mencapai 21,65%, dan belanja operasional sebesar 12,33%. Hal ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian dan investasi daerah oleh Pemerintah Kota Bontang. Semakin besarnya alokasi anggaran untuk belanja modal memberikan bukti bahwa Pemerintah Kota Bontang sangat serius dalam meningkatkan infrastruktur wilayah agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat dan daerah, sebagai daerah investasi dan industri. Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel 3.10 dan 3.11 di bawah.

Tabel 3. 11 Kinerja Belanja Daerah Kota Bontang selama Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	91,78%	87,46%	86,32%	94,41%	93,36%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Pegawai	94,89%	87,27%	84,35%	95,77%	93,91%
	Belanja Barang dan Jasa	88,04%	88,33%	88,16%	93,43%	93,24%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	98,31%	66,04%	91,69%	92,07%	91,43%
	Belanja Bantuan Sosial	7,89%	89,76%	77,43%	47,14%	14,91%
	Belanja Bantuan Keuangan	99,98%	100,00%	99,33%	95,19%	76,25%
2	Belanja Modal	68,80%	82,13%	85,24%	88,51%	93,14%
	Belanja Tanah	82,36%	2,75%	35,08%	2,66%	13,36%
	Belanja Peralatan dan Mesin	85,94%	80,32%	93,34%	96,29%	93,33%
	Belanja Gedung dan Bangunan	74,55%	80,35%	88,59%	94,82%	96,74%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61,65%	95,08%	82,42%	91,03%	94,64%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	198,44%	9,41%	95,79%	92,37%	94,47%
	Belanja Aset Lainnya	41,92%	93,47%	81,00%	90,47%	77,45%
3	Belanja Tidak Terduga	97,48%	94,97%	48,56%	8,72%	88,71%
	Belanja Tidak Terduga	97,48%	94,97%	48,56%	8,72%	88,71%
4	Transfer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	85,73%	86,22%	85,93%	92,40%	93,12%

sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2020

Tabel 3.11 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Bontang cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90%. Kinerja penyerapan belanja operasional didukung oleh kinerja belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa yang mencapai lebih dari 93%. Sedangkan, belanja modal didukung penyerapannya oleh Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; serta Belanja Gedung dan Bangunan yang mencapai lebih dari 94%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja realisasi belanja modalnya, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah agar berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Bontang dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 3. 12 Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	76,72%	71,73%	68,93%	72,92%	72,92%
	Belanja Pegawai	41,18%	35,86%	31,49%	34,58%	34,58%
	Belanja Barang dan Jasa	33,73%	34,11%	35,88%	35,23%	35,23%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	1,76%	1,15%	1,16%	3,05%	3,05%
	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,08%	0,04%	0,02%	0,02%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,04%	0,54%	0,37%	0,05%	0,05%
2	Belanja Modal	21,45%	28,14%	31,06%	23,21%	23,21%
	Belanja Tanah	2,11%	0,36%	0,05%	0,06%	0,06%
	Belanja Peralatan dan Mesin	3,74%	6,19%	6,40%	5,33%	5,33%
	Belanja Gedung dan Bangunan	4,06%	9,92%	13,34%	8,57%	8,57%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,30%	10,96%	10,69%	8,53%	8,53%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,05%	0,12%	0,06%	0,09%	0,09%
	Belanja Aset Lainnya	0,20%	0,58%	0,51%	0,64%	0,64%
3	Belanja Tidak Terduga	1,84%	0,13%	0,01%	3,87%	3,87%
	Belanja Tidak Terduga	1,84%	0,13%	0,01%	3,87%	3,87%
4	Transfer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Bontang 2016-2021

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang jika ditambahkan akan lebih besar dibanding jenis belanja lainnya, yaitu sebesar 58,36% di tahun 2020. Proporsi kedua belanja relatif sama atau Pemerintah Kota Bontang memiliki komitmen untuk dapat mempertahankan alokasi anggaran kedua belanja tersebut. Hal ini terlihat jelas pada persentase proporsi realisasi kedua belanja tersebut selama 5 tahun terakhir dimana belanja barang dan jasa berada pada kisaran 33%-36%, sedangkan belanja modal stabil berada di kisaran 21%-31%. Sedangkan, untuk belanja pegawai relatif cukup besar proporsinya yang masih dikisaran 31-36% selama 5 tahun terakhir. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 tahun terakhir, sesuai yang diminta dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata

pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Bontang untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3. 13 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH						
1	Belanja Operasi	886.073.222.723,00	714.033.656.799,00	850.803.447.061,00	1.073.751.081.610,83	1.056.646.869.126,84	6,09
	Belanja Pegawai	475.661.913.918,00	355.713.344.261,00	425.259.675.899,00	490.537.293.794,95	501.023.768.383,00	2,96
	Belanja Barang dan Jasa	389.600.554.283,00	344.175.320.611,00	404.589.807.665,00	558.867.142.672,88	510.489.477.225,84	8,84
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00
	Belanja Hibah	20.296.422.600,00	9.540.913.309,00	13.663.947.008,00	17.999.916.155,00	44.227.697.894,00	41,92
	Belanja Bantuan Sosial	39.429.050,00	897.579.508,00	901.717.379,00	619.935.699,00	234.946.274,00	520,89
	Belanja Bantuan Keuangan	474.902.872,00	3.706.499.110,00	6.388.299.110,00	5.726.793.289,00	670.979.350,00	163,55
2	Belanja Modal	247.728.703.313,00	221.490.254.924,00	333.742.250.054,00	483.778.011.568,00	336.342.840.626,00	13,64
	Belanja Tanah	24.316.316.700,00	587.944.205,00	4.328.875.907,00	829.268.705,00	812.584.064,00	113,96
	Belanja Peralatan dan Mesin	43.231.034.336,00	31.965.520.585,00	73.459.920.209,00	99.696.797.431,00	77.169.317.494,00	29,22
	Belanja Gedung dan Bangunan	46.868.464.840,00	41.526.468.141,00	117.665.442.740,00	207.795.104.593,00	124.190.028.995,00	52,08
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.495.423.039,00	139.566.787.077,00	129.956.467.778,00	166.454.620.927,00	123.632.835.995,00	0,61
	Belanja Aset Tetap Lainnya	551.671.398,00	170.351.820,00	1.473.652.970,00	997.477.565,00	1.237.668.150,00	171,93
	Belanja Aset Lainnya	2.265.793.000,00	7.673.183.096,00	6.857.890.450,00	8.004.742.347,00	9.300.405.928,00	65,23
3	Belanja Tidak Terduga	21.208.038.087,00	9.644.280.600,00	1.491.744.000,00	169.990.650,00	56.080.902.759,00	8165,73
	Belanja Tidak Terduga	21.208.038.087,00	9.644.280.600,00	1.491.744.000,00	169.990.650,00	56.080.902.759,00	8165,73
4	Transfer	0	0	0	0	0	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
	Bantuan Keuangan ke Desa	0	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH	1.155.009.964.123,00	945.168.192.323,00	1.186.037.441.115,00	1.557.699.083.828,83	1.449.070.612.511,84	7,92

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Bontang

Berdasarkan tabel 3.13 dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 7,92%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan komponen belanja tersebut, menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota Bontang untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja baik dalam belanja operasional maupun belanja modal, nilai rata-rata pertumbuhannya relatif terlalu tinggi, terutama untuk belanja hibah dan beberapa belanja yang pertumbuhannya negatif dan cukup besar seperti belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Disisi lain, jika dilihat per tahunnya pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah.

Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Bontang, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran Pemerintah Daerah agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik. Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja perlu mempertimbangkan dan memperhatikan realisasi belanja yang tertuang dalam LKPD Tahun 2020. Adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan masih relatif tingginya ketidak pastian dalam penanggulangan Pandemi Covid 19, maka faktor pengaruh ini menjadi salah satu dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan periode 2022-2026.

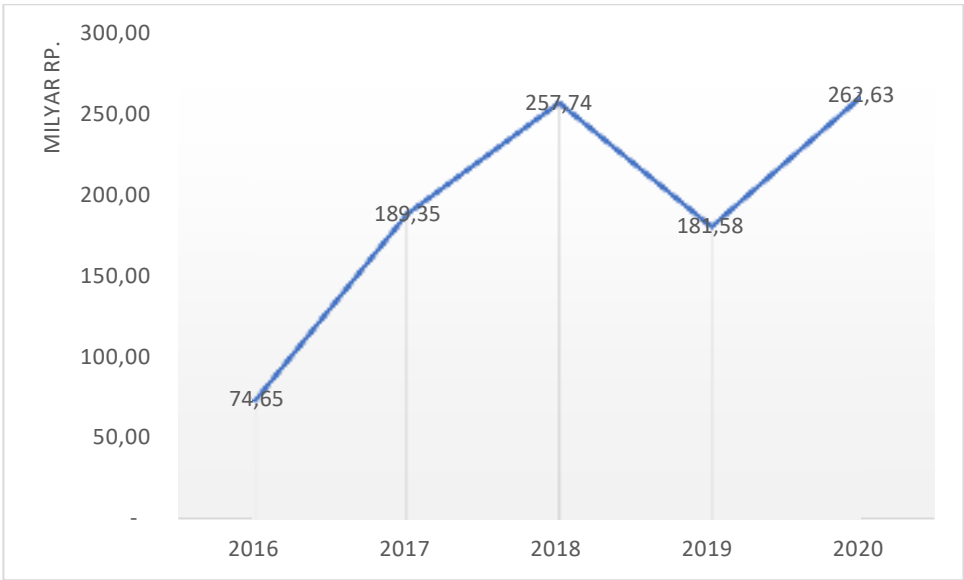
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah (a) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya, (b) Pencairan dana cadangan, (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah (a) Pembentukan dana cadangan, (b) Penyertaan modal (investasi) daerah, (c) Pembayaran pokok utang, (d) Pembayaran kegiatan lanjutan, dan (e) Pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Penerimaan Pembiayaan selama tahun 2016-2020 seluruhnya bersumber dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Secara keseluruhan SiLPA tersebut merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan Daerah ditambah Realisasi Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan. Selama tahun 2016-2020, Pemerintah Kota Bontang tidak merencanakan dan mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan. Sehingga seluruh SiLPA dipergunakan untuk menutup defisit anggaran Belanja Daerah tahun berikutnya.

Berdasarkan tingkat realisasinya, selama tahun 2016-2020, secara rata-rata realisasi SiLPA mencapai 13,8% dari total APBD setiap tahunnya, dengan kecenderungan meningkat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Jika dirata-ratakan realisasi SiLPA meningkat 51,2% setiap tahunnya. Peningkatan realisasi SiLPA yang cukup signifikan selama tahun 2016-2010 perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait dengan perlunya optimalisasi perencanaan dan pengelolaan belanja daerah.



Gambar 3. 3 Perkembangan Realisasi SiLPA Tahun 2016-2020

3.1.2 Neraca

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada

manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Perkembangan Neraca Daerah Kota Bontang selama tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 14 Perkembangan Neraca Kota Bontang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	48.585.324.070,18	170.347.969.233,53	232.327.324.429,14	142.357.681.250,84	220.188.511.378,89	75,74
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	390.098.627,00	120.000.000,00	0	0	0	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	4,00	4,00	0	0	0	0,00
6	Kas di BLUD	18.252.736.215,00	1.637.989.877,00	1.500.434.911,18	1.632.970.817,40	2.257.044.182,35	-13,09
7	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	6.111.619.315,00	6.851.331.186,00	9.124.206.549,00	8.382.794.761,00	1.185.710.143,50	-12,18
8	Kas di Bendahara BOS	1.305.615.035	10.394.089.506,41	14.788.630.684,37	29.204.523.924,38	39.001.675.946,72	217,35
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	Piutang Pajak	45.204.952.232,70	56.885.414.231,00	32.103.992.137,00	44.808.856.038,00	54.332.091.696,35	10,78
	Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih						0,00
11	Piutang Retribusi	438.544.069,75	196.657.941,00	167.288.561,00	173.017.906,00	191.387.831,00	-14,01
	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Povinsi					0,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih					0,00	-
	Piutang Dana Perimbangan					0,00	-
12	Penyisihan Piutang	(21.761.543.852,13)	(26.362.818.236,10)	(15.092.041.478,70)	(17.550.370.364,10)	(17.628.464.318,57)	-1,22
13	Belanja di Bayar di muka	1.348.405.549,99	1.009.441.666,67	1.405.624.133,10	1.472.945.833,32	596.037.166,66	-10,16
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0	0	0	-
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0	0	0	-
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0	0	0	-
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0	0	0	-
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0	0	0	-
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0	0	0	-

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
20	Piutang DBH Provinsi	14.000.000.000,00	0,00	0	0	0	-
21	Piutang Lainnya	14.691.026.549,00	14.156.587.679,00	50.869.504.481,24	18.122.371.377,00	12.563.892.533,00	40,16
22	Penyisihan piutang lainnya	(3.058.425.897,00)	(3.065.760.219,00)	(5.271.667.441,00)	(7.548.375.717,50)	(6.865.791.058,00)	26,58
23	Persediaan	55.598.884.809,10	46.924.540.798,40	46.410.397.614,00	48.203.229.303,00	70.118.176.880,12	8,16
24	Total Aset Lancar	181.107.236.727,59	279.095.443.667,91	368.333.694.580,33	251.709.274.765,24	375.940.272.382,02	25,94
25	INVESTASI JANGKA PANJANG			0	0	0	-
26	Investasi Nonpermanen			0	0	0	-
27	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0	0	0	-
28	Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0	0	0	-
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0	0	0	-
30	Investasi Nonpermanen Lainnya	5.000.224.939,91	5.061.277.536,94	5.170.934.449,94	5.142.340.796,19	5.257.744.468,86	1,27
31	Total Investasi Nonpermanen	5.000.224.939,91	5.061.277.536,94	5.170.934.449,94	5.142.340.796,19	5.257.744.468,86	1,27
32	Investasi Permanen			0	0	0	0,00
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	198.028.912.031,63	189.834.705.476,37	187.165.629.794,90	185.613.976.952,31	189.116.167.196,16	-1,12
34	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0	0	0	0,00
35	Total Investasi Permanen	198.028.912.031,63	189.834.705.476,37	187.165.629.794,90	185.613.976.952,31	189.116.167.196,16	-1,12
36	Total Investasi Jangka Panjang	203.029.136.971,54	194.895.983.013,31	192.336.564.244,84	190.756.317.748,50	194.373.911.665,02	-1,06
37	ASET TETAP			0	0	0	0,00
38	Tanah	659.961.273.527	913.361.981.877,00	906.871.425.544,00	893.060.407.249,00	894.402.560.695,00	9,08
39	Peralatan dan Mesin	581.496.313.019	574.625.649.241,00	644.457.304.545,00	750.844.419.668,60	846.067.929.628,00	10,04
40	Gedung dan Bangunan	1.598.274.098.130	1.567.102.134.579,00	1.793.375.038.632,00	1.926.473.046.539,64	2.024.245.912.267,64	6,25
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.348.303.614.576	2.405.548.170.056,00	2.352.885.414.206,00	2.470.572.173.371,00	2.642.809.241.184,37	3,06
42	Aset Tetap Lainnya	30.724.973.220	30.121.023.472,00	57.783.604.482,00	58.198.444.368,00	69.540.283.733,00	27,52
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	188.197.000.949	144.603.022.294,00	184.578.231.749,00	169.422.183.248,58	140.118.429.426,57	-5,26
44	Akumulasi Penyusutan	(1.623.780.073.501,00)	(1.831.911.364.439,67)	(1.964.826.997.414,20)	(2.172.421.519.832,20)	(2.570.141.690.800,16)	12,24

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
45	Total Aset Tetap	3.783.177.199.920,00	3.803.450.617.079,33	3.975.124.021.743,80	4.096.149.154.612,62	4.047.042.666.134,42	1,72
46	DANA CADANGAN						-
47	Dana Cadangan	0	0,00	0	0	0	-
48	Total Dana Cadangan	0	0,00	0	0	0	-
49	ASET LAINNYA			0	0	0	-
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0,00	0	0	0	-
51	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0,00	0	0	0	-
52	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	154.524.637.000,00	154.524.637.000,00	137.859.852.267,00	246.121.650.427,00	246.121.650.427,00	16,94
53	Aset Tak Berwujud	83.775.800.971,00	86.908.930.580,00	93.279.742.069,00	102.163.879.894,00	106.801.631.876,60	6,28
54	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(54.812.394.732,00)	(68.190.707.503,00)	(75.624.526.934,00)	(83.363.547.290,00)	(93.573.439.409,00)	14,45
55	Aset Lain-lain	30.558.012.560,00	155.589.447.991,00	6.126.915.675,00	16.625.251.082,00	21.306.388.263,00	128,15
56	Total Aset Lainnya	214.046.055.799,00	328.832.308.068,00	161.641.983.077,00	281.547.234.113,00	280.656.231.157,60	19,16
57	TOTAL SELURUH ASET	4.381.359.629.418,13	4.606.274.351.828,55	4.697.436.263.645,97	4.837.712.351.603,46	4.898.013.081.339,06	2,84
58	KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	-
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0	0	0	-
	Utang dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0	0	0	-
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0	0	0	-
61	Utang Bunga	0,00	0,00	0	0	0	-
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0	0	0	-
63	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0	0	0	-
64	Utang Belanja	134.297.820.840,00	2.620.585.501,00	21.270.265.737,50	22.319.939.835,50	40.342.470.885,13	174,82
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.885.044.901,00	3.377.403.619,00	2.515.538.657,00	7.894.453.425,00	4.313.838.731,00	23,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	141.182.865.741,00	5.997.989.120,00	23.785.804.394,50	30.214.393.260,50	44.656.309.616,13	68,91

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						-
68	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0	0,00	0	0	0	-
69	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	0,00	0	0	0	-
70	Premium (Diskonto) Obligasi	0	0,00	0	0	0	-
71	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0,00	0	0	0	-
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0,00	0	0	0	-
73	JUMLAH KEWAJIBAN	141.182.865.741,00	5.997.989.120,00	23.785.804.394,50	30.214.393.260,50	44.656.309.616,13	68,91
74	EKUITAS						-
75	Ekuitas	4.240.176.763.677,13	4.600.276.362.708,54	4.673.650.459.251,47	4.807.497.958.342,96	4.853.356.771.722,93	3,48
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.381.359.629.418,13	4.606.274.351.828,54	4.697.436.263.645,97	4.837.712.351.603,46	4.898.013.081.339,06	2,84

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dimasa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) asset lainnya. Hingga tahun 2020, Kota Bontang memiliki aset senilai Rp. 4,9 Trilyun, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2.84% per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2020 mencapai Rp. 4.05 Trilyun dan rata-rata tumbuh 1.72% per tahun. Aset tetap ini meliputi 82.63% dari seluruh asset Pemerintah Kota Bontang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada Tahun 2020, jumlah kewajiban Pemerintah Kota Bontang adalah sebesar Rp.44,67 Milyar. Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kewajiban secara keseluruhan mengalami penurunan cukup signifikan, khususnya dengan membandingkan realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp.141,18 Milyar dengan realisasi tahun 2020 sebedar Rp.44,66 Milyar. Bila dilihat dari tren perkembangannya, nilai kewajiban Pemerintah Kota Bontang mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2018-2020, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 68,9%. Timbulnya kewajiban yang trennya meningkat ini umumnya terkait dengan keterlambatan administratif dalam proses pengajuan pencairan anggaran hingga melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas dana Kota Bontang Tahun 2020 mencapai Rp. 4.85 Trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2016-2020 dengan rata-rata 3.48 persen.

Tabel 3. 15 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Rasio Likuiditas					
	Aset Lancar	181.107.236.727,59	279.095.443.667,91	368.333.694.580,33	269.259.645.129,34	375.940.272.382,02
	Persediaan	55.598.884.809,10	46.924.540.798,40	46.410.397.614,00	48.203.229.303,00	70.118.176.880,12
	Kewajiban Jangka Pendek	141.182.865.741,00	5.997.989.120,00	23.785.804.394,50	30.214.393.260,50	44.656.309.616,13
1	Rasio Lancar	1,28	46,53	15,49	8,91	8,42
2	Rasio Quick	0,89	38,71	13,53	7,32	6,85
B	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	4.381.359.629.418,13	4.606.274.351.828,55	4.697.436.263.645,97	4.837.712.351.603,46	4.898.013.081.339,06
	Total Hutang	141.182.865.741,00	5.997.989.120,00	23.785.804.394,50	30.214.393.260,50	44.656.309.616,13
	Total Ekuitas	4.240.176.763.677,13	4.600.276.362.708,54	4.673.650.459.251,47	4.807.497.958.342,96	4.853.356.771.722,93
1	DAR	0,0322	0,0013	0,0051	0,0062	0,0091
2	DER	0,0333	0,0013	0,0051	0,0063	0,0092
C	Rasio Aktivitas					
	Pendapatan Daerah	1.203.633.625.194,19	1.060.400.315.664,76	1.254.426.657.885,75	1.481.549.014.093,76	1.527.526.903.269,68
	Saldo Awal Piutang	48.762.287.446,27	50.862.958.652,31	42.819.523.062,57	64.182.700.392,64	39.478.445.072,72
	Saldo Akhir Piutang	50.862.958.652,31	42.819.523.062,57	64.182.700.392,64	39.478.445.072,72	43.189.153.850,44
1	Rata-rata Umur Piutang	15,1056	16,1232	15,5672	12,7692	9,8766
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	56.633.211.796,00	67.846.753.444,00	105.481.166.899,40	88.867.668.660,00	111.439.428.822,38
	Saldo Awal Persediaan	47.604.632.408,00	55.598.884.809,10	46.924.540.798,40	46.410.397.614,00	48.203.229.303,00
	Saldo Akhir Persediaan	55.598.884.809,10	46.924.540.798,40	46.410.397.614,00	8.203.229.303,00	70.118.176.880,12
2	Rata-rata Umur Persediaan	332,57	275,78	161,49	194,30	193,7703

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah dan CaLK Pemerintah Kota Bontang

Berdasarkan neraca daerah, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang.

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Bontang positif dan cenderung membaik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, meski nilai rasio menunjukkan nilai yang riil setelah tahun 2017 karena pada tahun sebelumnya masih adanya penyesuaian dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh. Kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan masih cukup baik dan aman kondisi keuangan dan anggarannya, namun demikian adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bontang karena adanya tren penurunan yang cukup signifikan dari kedua rasio likuiditas tersebut. Rasio lancar mengalami penurunan yang cukup drastis dari 46,53 di tahun 2017 menjadi hanya 8,42 di tahun 2020. Demikian pula dengan rasio cepat dari sebesar 38,71 di tahun 2017 turun drastis menjadi hanya 6,85. Jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Bontang mengalami peningkatan tiap tahunnya meski tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bontang, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, masih cukup sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan, hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah (antara 16-9 hari). Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 161-194 hari) selama 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien.

Hasil analisis diatas menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bontang memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar, quick ratio dan rasio total hutang terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Bontang cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa mendatang. Beberapa hal yang perlu dipahami dari analisis ini mencakup proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka menilai kapasitas riil keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan, adalah dengan melakukan analisis pemenuhan kebutuhan aparatur dan analisis kebutuhan belanja wajib mengikat dan prioritas utama. Analisis tersebut mencakup penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja aparatur yang meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH), ditambah Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Tabel 3. 16 Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	475.661.913.918,00	1.155.009.964.123,00	41,18
2	Tahun anggaran 2017	355.713.344.261,00	945.168.192.323,00	35,86
3	Tahun anggaran 2018	425.259.675.899,00	1.186.037.441.115,00	35,86
4	Tahun anggaran 2019	490.537.293.794,95	1.557.699.083.828,83	31,49
5	Tahun anggaran 2020	501.023.768.383,00	1.449.070.612.511,84	34,58

Sumber: data diolah, BPKAD Tahun 2021

Secara proporsi, realisasi pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total realisasi Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan selama tahun 2018-2020 cukup fluktuatif dengan rata-rata proporsi 35,54%. Proporsi ini masih relatif baik dan menunjukkan bahwa lebih dari 60% realisasi belanja masih diserap untuk belanja pemenuhan kebutuhan perbaikan pelayanan pembangunan bagi masyarakat.

Jika dianalisis berdasarkan nilai nominal realisasi pemenuhan kebutuhan aparatur, secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat, meskipun sempat terjadi penurunan signifikan pada tahun 2017. Tren peningkatan tersebut utamanya bersumber dari adanya peningkatan alokasi belanja gaji dan tambahan penghasilan PNS sejalan dengan adanya kebijakan penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan besaran Tambahan Penghasilan PNS yang diberikan. Secara rata-rata peningkatan belanja untuk kebutuhan aparatur meningkat 6,7% persen setiap tahunnya.

Selama situasi kapasitas fiskal yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tentu tidak akan meningkatkan proporsi belanja tersebut. Namun yang perlu diantisipasi adalah bahwa kapasitas keuangan Kota

Bontang masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Oleh karena itu akan sangat rentan terhadap fluktuasi situasi keuangan secara nasional.

Dalam rangka mengurangi laju peningkatan belanja kebutuhan aparatur, perlu diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menekan belanja aparatur dengan melakukan efisiensi pada pos-pos belanja penunjang serta perlu dilakukan assesmen yang tepat untuk menghitung kebutuhan ril PNS daerah sesuai dengan target-target standar pelayanan minimal pelayanan kepada masyarakat yang harus dicapai.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Secara umum analisis penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada setiap tahunnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran.

Berdasarkan realisasi APBD selama tahun 2016-2020, khususnya dengan membandingkan realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja, dapat dijelaskan bahwa kecuali tahun 2019, APBD selalu mengalami Surplus atau realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Sedangkan pada tahun 2019 defisit riil mencapai lebih dari Rp. 76 Milyar. Realisasi surplus/defisit riil ditambah dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan. Realisasi SiLPA ini menjadi sumber pokok penerimaan pembiayaan dan mengingat selama tahun 2016-2020 tidak ada transaksi pengeluaran pembiayaan, maka seluruh realisasi SiLPA dipergunakan sebagai penutup defisit riil dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Secara rata-rata realisasi SiLPA tahun berkenaan dibandingkan dengan total APBD tahun berkenaan mencapai 15,6%.

Adapun gambaran surplus/defisit anggaran dan gambaran realisasi SiLPA dalam APBD Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 17 Realisasi Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (RP)	2017 (RP)	2018 (RP)	2019 (RP)	2020 (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.203.633.625.194,19	1.060.400.315.664,76	1.254.426.657.885,75	1.481.549.014.093,76	1.530.119.291.669,68
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.155.009.964.123,00	945.168.192.323,00	1.186.037.441.115,00	1.557.699.083.828,83	1.449.070.612.511,84
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
A	Surplus (Defisit) Riil	48.623.661.071,19	115.232.123.341,76	68.389.216.770,75	(76.150.069.735,07)	81.048.679.157,84
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	- Penggunaan SILPA	26.021.732.190,99	74.119.256.461,18	189.351.379.802,94	257.728.040.488,69	181.578.280.052,80
	- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	- Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-	-
	- Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	26.021.732.190,99	74.119.256.461,18	189.351.379.802,94	257.728.040.488,69	181.578.280.052,80
A+B	SILPA	74.645.393.262,18	189.351.379.802,94	257.740.596.573,69	181.577.970.753,62	262.626.959.210,64

Realisasi SiLPA selama tahun 201-2020 memberikan gambaran tentang kinerja pelaksanaan APBD, dalam hal ini terkait dengan tingkat keterukuran dan aspek rasionalitas dalam proses-proses perencanaan anggaran. Analisis terhadap sumber-sumber pembentuk SiLPA akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berkontribusi besar terhadap realisasinya. Informasi ini selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan APBD dan menyusun proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan perencanaan pengeluaran pembiayaan, khususnya penyertaan Modal Pemerintah.

Berdasarkan realisasi SiLPA tahun 2016-2020, komponen utama yang berkontribusi terbesar terhadap pembentukan SiLPA adalah sisa penghematan belanja. Secara rata-rata komponen ini berkontribusi 68,3% selama tahun 2018-2020. Pada urutan kedua realisasi pelampauan Dana Perimbangan dengan kontribusi rata-rata 25,34% dan berikutnya pelampauan realisasi PAD dengan kontribusi rata-rata 8,36%.

Tingginya realisasi SiLPA dari komponen penghematan belanja, tidak dapat serta-merta menggambarkan kinerja yang baik dalam merealisasikan anggaran karena terjadi efisiensi. Sebaliknya perlu dianalisis lebih rinci sumber-sumber terjadinya selisih yang besar antara target dan realisasi belanja. Dengan deviasi rata-rata yang mencapai lebih dari 15% target anggaran belanja yang tidak dapat direalisasikan, dapat diindikasikan bahwa masih belum optimalnya proses-proses perencanaan anggaran yang dilaksanakan hingga penetapan APBD, khususnya dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiatan pembangunan. Pada aspek lainnya dapat pula diidentifikasi terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan. Hal ini juga menunjukkan belum efektifnya proses-proses perencanaan APBD dalam menyusun program/kegiatan pembangunan yang rasional dan terukur dengan baik.

Gambaran realisasi komponen pembentuk SiLPA tahun 2018-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 18 Komponen Realisasi SiLPA Tahun 2016-2020

Uraian	2016	% SiLPA	2017	% SiLPA	2018	% SiLPA	2019	% SiLPA	2020	% SiLPA
Jumlah SiLPA	74.645.837.855,18	100,00	189.877.516.603,94	100,00	257.740.596.573,69	100,00	181.590.526.838,62	100,00	262.632.929.611,46	100,00
Pelampauan Penerimaan PAD	18.014.042.139,86	24,13	8.737.696.533,48	4,60	14.846.685.352,57	5,76	38.228.583.324,38	21,05	12.087.362.656,17	4,60
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-135.623.226.316,68	- 181,69	31.227.700.751,33	16,45	48.470.973.154,00	18,81	32.017.095.210,69	17,63	144.488.956.211,00	55,02
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60.568.394,00	0,08	- 1.140.754.177,87	- 0,60	264.704.736,12	0,10	- 6.784.089.626,62	-9,24	- 994.237.613,87	- 0,38
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	192.194.453.638,00	257,48	151.052.873.497,00	79,55	194.158.233.331,00	75,33	128.128.937.930,17	70,56	107.050.848.358,16	40,76
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: data diolah, BPKAD Tahun 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026). Dengan memperhatikan kebutuhan belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama masa lalu dan proyeksi pendapatan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2021- 2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Bontang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Realisasi data masa lalu merupakan dasar untuk melakukan proyeksi lima tahun kedepan dengan acuan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Berdasarkan faktor-faktor terkait, analisis dibangun untuk menetapkan proyeksi situasi lima tahun mendatang termasuk dengan membangun asumsi-asumsi yang dianggap dapat memperkuat keyakinan terhadap proyeksi yang dirumuskan. Proyeksi yang perlu secara cermat dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang mencakup proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 akan sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Kota Bontang dan perekonomian nasional baik saat ini maupun di masa lima tahun mendatang. Dalam kondisi kemandirian fiskal yang masih relatif rendah yang ditunjukkan dengan komposisi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang masih dominan, maka faktor-faktor eksternal seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan global masih sangat berpengaruh terhadap perubahan-preubahan dan fluktuasi penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Adapun dalam lingkup lokal, maka kebijakan prioritas yang harus diupayakan adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan asesmen potensi-potensi pendapatan daerah yang memang masih dapat dioptimalkan dan secara bersamaan memastikan bahwa program-

program pembangunan yang dilaksanakan mampu secara efektif menstimulasi perkembangan perekonomian daerah dan masyarakat.

Dalam rangka mendasari proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2026, salah satu analisis yang perlu dilakukan adalah terkait dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2019-2024. Sasaran Makro pembangunan tahun 2019-2024 menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan rata-rata antara 5,7-6,0 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

Sejalan dengan perkiraan perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut pada sisi Kebijakan Fiskal APBN, Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi 12,9-14,6 persen PDB pada tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7-12,3 persen pada tahun 2024. Selanjutnya total belanja negara diperkirakan meningkat menjadi 14,4 - 16,3 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masing-masing meningkat menjadi 9,5-11,2 dan 4,9 - 5,1 persen PDB pada tahun 2024. Proyeksi APBN dalam RPJMN 2019-2024 ini menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah mengingat masih tingginya peran dana transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah Kota Bontang.

Tabel 3. 19 Perkiraan dan Proyeksi APBN Tahun 2019-2024 (Persen PDB)

Indikator	Perkiraan 2019*	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah o/w	12,2	11,9 –13,1	12,5 – 13,4	12,6 –13,8	12,8 –14,1	12,9 –14,6
Penerimaan Perpajakan	9,6	9,7 – 10,5	10,1 – 10,07	10,3 –11,2	10,5 –11,7	10,7 –12,3
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,5	2,2 – 2,5	2,3 – 2,6	2,3 – 2,5	2,2 – 2,3	2,1 – 2,2
Hibah	0,0	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1
Belanja Negara	14,4	13,7 –15,1	14,2 –15,1	14,2 –15,5	14,3 –15,8	14,4 –16,3
Belanja Pemerintah Pusat	9,3	8,9 – 10,0	9,2 – 10,0	9,3 – 10,4	9,4 – 10,7	9,5 – 11,2
- Belanja K/L	5,5	4,4 – 5,5	4,9 – 5,2	4,8 – 5,4	4,6 – 5,4	4,8 – 5,6
- Belanja Non K/L	3,9	4,5 – 4,5	4,3 – 4,8	4,5 – 5,1	4,8 – 5,3	4,7 – 5,6
Transfer ke Daerah	5,0	4,8 – 5,1	5,0- 5,2	4,9 – 5,1	4,9 – 5,1	4,9 – 5,1
- Transfer ke Daerah	4,6	4,4 - 4,7	4,6 – 4,8	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7
- Dana Desa	0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4

*) Berdasarkan Realisasi APBN 2019 Sementara s.d. 31 Desember 2019
 Sumber: RPJMN Tahun 2019-2024

Berdasarkan proyeksi jangka menengah APBN dalam RPJMN tahun 2019-2024, dapat dilihat bahwa belanja Transfer ke Daerah pada tahun

2022-2024 diproyeksikan akan mencapai antara 4,5-4,7 persen PDB yang diperkirakan akan tumbuh antara 5,7-6,0% per tahun. Dengan demikian, maka besaran alokasi transfer ke daerah akan juga mengalami peningkatan antara 5,7-6,0% per tahun.

Dalam lingkup daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu asumsi dasar yang dapat menjadi rujukan untuk menyusun proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan hal tersebut dalam RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2018-2023, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2023 ditargetkan dapat tumbuh 3,4%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat tetap stabil dan tumbuh antara 3,4-4,5 persen hingga tahun 2026.

Dengan mengacu pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah tersebut, beberapa hal yang mendasari proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022-2026, adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Dalam memproyeksi pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan trend realisasi penerimaan selama periode 2016-2020, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah selama periode 2022-2026 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan asumsi bahwa:

- Secara bertahap merealisasikan kebijakan modernisasi sistem layanan perpajakan daerah;
- Melaksanakan pembaruan kebijakan/regulasi perpajakan dan retribusi daerah;
- Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perpajakan dan retribusi daerah;
- Mengembangkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
- Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.

Kesungguhan merealisasikan kebijakan dan langkah-langkah strategis tersebut akan menjadi dasar keyakinan bahwa proyeksi PAD dapat tumbuh antara 3,5 s.d. 4,0% per tahun dalam periode 2022-2026. Proyeksi

peningkatan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PAD pada periode 2016-2020 yang mencapai 4,59%. Sumber-sumber utama penerimaan PAD masih pada penerimaan Pajak Daerah yang diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 4,05% selama tahun 2022-2026, diikuti oleh penerimaan Lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan tumbuh rata-rata 3,0%.

Dengan karakteristik ekonomi industri, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang masih akan sangat terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi nasional dan Global yang diperkirakan tetap mengalami peningkatan meskipun relatif lambat sehubungan dengan ketidakpastian dampak Pandemi Covid 19.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam struktur Pendapatan Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dalam rangka penyusunan proyeksi pendapatan tahun 2022-2026, pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat memperhatikan perkiraan pertumbuhan PDB yang menjadi dasar perkiraan APBN tahun 2019-2024 dalam RPJMN tahun 2019-2024. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pertumbuhan PDB tahun 2019-2024 mencapai 5,7-6,0% dan Belanja Negara untuk komponen Transfer ke Daerah ditetapkan 4,5-4,7% (Tabel 3.16) dari PDB. Selanjutnya proyeksi juga memperhatikan realisasi rata-rata penerimaan dana Perimbangan, khususnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum selama tahun 2016-2020.

Proyeksi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat ini tidak memasukkan proyeksi Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. Penerimaan transfer pemerintah pusat diproyeksikan dapat meningkat setiap tahunnya dengan perkiraan pertumbuhan rata-rata 6,78%. Tingkat pertumbuhan ini relatif sama dengan rata-rata peningkatan Dana Perimbangan tanpa memasukkan alokasi DAK selama tahun 2016-2020 yang mencapai 6,8% setiap tahunnya. Proyeksi ini tentu berdasarkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perbaikan seiring dengan pulihnya perekonomian global pasca tekanan Pandemi Covid 19, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai antara 5,7-6,5% hingga tahun 2022-2026.

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang seluruhnya bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan dapat meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 5,17% yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Proyeksi ini relatif lebih rendah dari rata-rata realisasi pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2016-2020 yang mencapai 10,15%. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah ini tidak memasukkan proyeksi alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari pos lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah selama periode 2022–2026 diperkirakan hanya akan bersumber dari Penerimaan Lain-Lain yang sah dengan perkiraan penerimaan tetap setiap tahunnya

Tabel 3. 20 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026

Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2021)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
			2022 (Rp)**	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9
PENDAPATAN							
Pendapatan Asli Daerah	207.889.217.673,00		201.375.311.000,00	208.004.226.000,00	214.844.927.950,00	222.424.863.000,00	231.239.680.800,00
Pajak Daerah	109.243.242.125,00	4,05%	104.780.133.000,00	110.523.746.000,00	113.840.458.000,00	117.767.455.000,00	122.795.593.000,00
Retribusi Daerah	2.712.863.920,00	3,42%	4.323.926.000,00	4.267.081.000,00	4.480.435.050,00	4.704.457.000,00	4.939.680.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.747.614.686,00	2,59%	3.367.571.000,00	3.211.098.000,00	3.371.652.900,00	3.540.236.000,00	3.717.247.800,00
Lain - Lain PAD yang Sah	93.185.496.942,00	2,93%	88.903.681.000,00	90.002.301.000,00	93.152.382.000,00	96.412.715.000,00	99.787.160.000,00
Pendapatan Transfer	1.052.004.276.462,00		1.051.151.978.366,00	1.088.443.508.000,00	1.127.283.044.500,00	1.178.438.776.000,00	1.255.260.736.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	852.717.570.462,00	2,36%	852.018.006.366,00	869.200.477.000,00	897.417.767.500,00	937.412.013.000,00	1.002.505.873.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	488.236.726.527,00	8,85%	625.781.220.066,00	638.100.249.000,00	652.401.374.500,00	688.415.845.000,00	749.465.286.000,00
Dana Alokasi Umum	255.977.741.000,00	1,62%	226.236.786.300,00	231.100.228.000,00	245.016.393.000,00	248.996.168.000,00	253.040.587.000,00
Dana Alokasi Khusus	94.388.668.935,00	0,00%	0	0	0	0	0
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	44.114.434.000,00		0	0	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	-	0,00%	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	44.114.434.000,00	0,00%	0	0	0	0	0
Transfer Pemerintah Provinsi	199.286.706.000,00		199.133.972.000,00	219.243.031.000,00	229.865.277.000,00	241.026.763.000	252.754.863.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	150.648.706.000,00	5,17%	199.133.972.000,00	219.243.031.000,00	229.865.277.000,00	241.026.763.000,00	252.754.863.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	0,00%	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	48.638.000.000,00	0,00%	-	-	-	-	-
Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	26.944.879.793,00		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2021)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
			2022 (Rp)**	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9
Pendapatan Hibah	7.260.938.590,00	5,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.683.941.203,00	0,00%	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.286.838.373.928,00		1.255.027.289.366,00	1.298.947.734.000,00	1.344.127.972.450,00	1.402.863.639.000,00	1.488.500.416.800,00

Sumber: Proyeksi Bapelitbang 2021

B. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Bontang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja program untuk RPJMD yang secara keseluruhan merupakan bagian dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026.

Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016-2021, prioritas pembangunan serta proporsi belanja wajib mengikat dan prioritas utama.

Berikut kebijakan terkait dengan Belanja daerah Kota Bontang:

1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026 rata-rata akan meningkat sebesar 4,81% per tahun, dengan perincian Belanja Operasi rata-rata sebesar 2,93% per tahun dan Belanja Modal rata-rata sebesar 15,24% per tahun, Belanja Tidak Terduga 0,83% dan Belanja Transfer tidak direncanakan ada alokasi belanja transfer.
2. Prosentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah rata-rata mencapai 81,06%, sedangkan belanja modal rata-rata 18,54%.
3. Proyeksi belanja Tahun 2022-2026 telah memperhitungkan alokasi belanja daerah untuk memenuhi mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan sejumlah 20% dari jumlah belanja daerah, fungsi kesehatan sejumlah 10% dari jumlah belanja daerah, fungsi pengawasan sejumlah paling sedikit 0,75% dari jumlah belanja daerah, pengembangan kompetensi ASN sejumlah 0,16% dari jumlah belanja daerah.
4. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim tidak diproyeksikan, namun akan diupayakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan alokasi yang semakin meningkat guna menunjang program pembangunan prioritas RPJMD tahun 2022-2026.
5. Dana BOS akan dicatatkan dalam pelaksanaan APBD setiap tahunnya dalam kerangka belanja langsung, walaupun berupa anggaran *in & out*.

Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah tahun 2022-2026 sebagaimana Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026

Uraian	Target	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA DAERAH							
Belanja Operasi	1.246.201.978.224,00	1.098.090.952.000,00	1.118.500.000.000,00	1.177.127.972.450,00	1.181.903.639.000,00	1.228.977.916.800,00	2,87
Belanja Pegawai	554.347.074.388,00	531.355.434.304,00	542.000.000.000,00	563.000.000.000,00	584.590.000.000,00	602.127.700.000,00	3,18
Belanja Barang dan Jasa	628.334.060.757,00	551.485.517.696,00	560.000.000.000,00	573.127.972.450,00	577.813.639.000,00	606.850.216.800,00	2,43
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	63.520.843.079,00	15.000.000.000,00	16.000.000.000,00	40.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.500.000.000,00	26,11
Belanja Bantuan Sosial	-	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	62,50
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-				
Belanja Modal	282.619.332.806,00	250.936.337.366,00	254.447.734.000,00	262.000.000.000,00	325.960.000.000,00	398.522.500.000,00	19,59
Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	82.225.642.365,00	-	-	-	-	-	
Belanja Gedung dan Bangunan	54.440.033.479,00	-	-	-	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.943.809.263,00	-	-	-	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.841.067.699,00	-	-	-	-	-	
Belanja Aset Lainnya	7.168.780.000,00	-	-	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	20.644.022.108,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,83
Belanja Tidak Terduga	20.644.022.108,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,83
Transfer	-	-	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	1.549.465.333.138,00	1.355.027.289.366,00	1.378.947.734.000,00	1.444.127.972.450,00	1.512.863.639.000,00	1.633.500.416.800,00	4,81

Sumber: Proyeksi Bapelitbang 2021

Sejalan dengan kebijakan proyeksi Belanja Daerah tersebut, perlu juga dilakukan analisis kapasitas riil keuangan daerah selama 5 tahun kedepan (2022-2026). Analisis tersebut dilakukan dengan melakukan proyeksi belanja-belanja pengeluaran periodik, wajib mengikat serta prioritas utama. Mengacu pada tren realisasi pertumbuhan belanja tersebut pada periode sebelumnya, diproyeksikan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bontang secara keseluruhan akan meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2 – 4% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan belanja tersebut selama tahun 2016-2020 yang mencapai 2,96%. Adapun proporsi dari keseluruhan Belanja Daerah rata-rata 38,6% setiap tahunnya.

Kebijakan menetapkan tingkat pertumbuhan belanja wajib dan prioritas utama dimaksudkan untuk memastikan bahwa alokasi terbesar dari keseluruhan Belanja Daerah adalah untuk program-program prioritas daerah dan belanja pembangunan lainnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Penetapan proporsi belanja wajib mengikat juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menekan peningkatan proporsi alokasi belanja, baik belanja aparatur maupun belanja operasional yang bersifat rutin perkantoran. Dari keseluruhan belanja pengeluaran periodik, wajib mengikat serta prioritas utama tersebut, alokasi terbesar bersumber dari belanja gaji dan tunjangan. Oleh karena itu toleransi proyeksi peningkatan belanja operasional adalah perkiraan tingkat inflasi Provinsi Kaltim yang diproyeksikan antara 3-4% selama tahun 2022-2026.

Tabel 3. 22 Proyeksi Kebutuhan Belanja Wajib Mengikat 2022-2026

Uraian	Tahun Dasar (APBD TA 2021)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
			2022 (Rp)**	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Wajib dan Mengikat	554.347.074.388,00	3,18%	531.355.434.304,00	542.000.000.000,00	563.000.000.000,00	584.590.000.000,00	602.127.700.000,00
Belanja Pegawai	554.347.074.388,00	3,18%	531.355.434.304,00	542.000.000.000,00	563.000.000.000,00	584.590.000.000,00	602.127.700.000,00
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bunga	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	554.347.074.388,00	3,23%	531.355.434.304,00	542.000.000.000,00	563.000.000.000,00	584.590.000.000,00	602.127.700.000,00

Sumber: Proyeksi Bapelitbang 2021

A. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam rangka perencanaan tahun 2022-2026, kebijakan Penerimaan Pembiayaan utamanya bersumber pada perkiraan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Secara rata-rata proyeksi proporsi SiLPA terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja 10,22% dengan tren yang meningkat. Proyeksi proporsi SiLPA ini lebih rendah dari realisasi SiLPA periode 2016-2020 yang mencapai 15,6%.

Komponen Pengeluaran Pembiayaan direncanakan dialokasikan sebesar Rp.85.000.000.000,00 dengan alokasi untuk penambahan penyertaan modal kepada Bank Kaltimtra sebesar Rp.75.000.000.000,00 dan kepada BPR yang saat ini berada dalam manajemen Perusda AUJ direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00. Skema rencana penambahan penyertaan modal dianggarkan untuk dua tahun APBD, yakni tahun 2023 sebesar Rp.47.500.000.000,00 dan Tahun 2024 Rp.37.500.000.000,00.

Kebijakan penyertaan modal BPR merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro dengan penyediaan fasilitas kredit murah yang akan disediakan oleh BPR Kota Bontang. Uraian Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 23 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2026

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Proyeksi Pendapatan Daerah	1.255.027.289.366,00	1.298.947.734.000,00	1.344.127.972.450,00	1.402.863.639.000,00	1.488.500.416.800,00
	Dikurangi realisasi:	-	-	-	-	-
2	Proyeksi Belanja Daerah	1.355.027.289.366,00	1.378.947.734.000,00	1.444.127.972.450,00	1.537.863.639.000,00	1.633.500.416.800,00
3	Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	47.500.000.000,00	37.500.000.000,00	-	-
A	Surplus (Defisit) Riil	-100.000.000.000,00	-127.500.000.000,00	-137.500.000.000,00	-135.000.000.000,00	-145.000.000.000,00
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	- Penggunaan SiLPA	100.000.000.000,00	127.500.000.000,00	137.500.000.000,00	135.000.000.000,00	145.000.000.000,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000,00	127.500.000.000,00	137.500.000.000,00	135.000.000.000,00	145.000.000.000,00
A+B	SILPA	-	-	-	-	-

Sumber: Proyeksi Bapelitbang 2021

Berdasarkan realisasi selama tahun 2016-2020, maka proyeksi SiLPA terjadi pada sisi pendapatan dan juga pada sisi Belanja. Pada pendapatan SiLPA diproyeksikan akan terjadi melalui adanya pelampauan PAD dan pelampauan pada pendapatan transfer, khususnya pendapatan dari penerimaan Dana Perimbangan. Adapun pada sisi Belanja, diproyeksikan

SiLPA tetap masih akan terbentuk dari adanya penghematan belanja, atau akibat lainnya.

Tabel 3. 24 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2026

Uraian	Proyeksi SiLPA				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pelampauan Penerimaan PAD	6.041.259.330,00	6.240.126.780,00	6.445.347.838,50	6.672.745.890,00	6.937.190.424,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	26278799459,15	29.711.087.700,00	30.682.076.112,50	29.460.969.400,00	31.381.518.400,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	67.679.941.210,85	91.548.785.520,00	100.372.576.049,00	98.866.284.710,00	106.681.291.176,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
Proyeksi Jumlah SiLPA	100.000.000.000	127.500.000.000,00	137.500.000.000,00	135.000.000.000	145.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					

Sumber: Proyeksi Bapelitbang 2021

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dialokasikan untuk pendanaan program-program pembangunan daerah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dan menentukan pos-pos belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja Wajib dan Mengikat yang diperhitungkan adalah proyeksi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan dan proyeksi alokasi Pengeluaran Pembiayaan yakni rencana penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara dan BPR Kota Bontang.

Dengan mengurangi proyeksi Pendapatan Daerah ditambahkan dengan Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dikurangi dengan Belanja Wajib dan Mengikat, maka diperoleh proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Adapun proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah selama periode RPJMD 2021-2026.

penerimaan Dana Perimbangan. Adapun pada sisi Belanja, diproyeksikan SiLPA tetap masih akan terbentuk dari adanya penghematan belanja, atau akibat lainnya.

Tabel 3. 25 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2026

Uraian	Proyeksi SiLPA				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pelampauan Penerimaan PAD	6.041.259.330,00	6.240.126.780,00	6.445.347.838,50	6.672.745.890,00	6.937.190.424,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	26278799459,15	29.711.087.700,00	30.682.076.112,50	29.460.969.400,00	31.381.518.400,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	67.679.941.210,85	91.548.785.520,00	100.372.576.049,00	98.866.284.710,00	106.681.291.176,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
Proyeksi Jumlah SiLPA	100.000.000.000	127.500.000.000,00	137.500.000.000,00	135.000.000.000	145.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					

Sumber: Proyeksi Bapelitbang 2021

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dialokasikan untuk pendanaan program-program pembangunan daerah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dan menentukan pos-pos belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja Wajib dan Mengikat yang diperhitungkan adalah proyeksi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan dan proyeksi alokasi Pengeluaran Pembiayaan yakni rencana penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara dan BPR Kota Bontang.

Dengan mengurangi proyeksi Pendapatan Daerah ditambahkan dengan Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dikurangi dengan Belanja Wajib dan Mengikat, maka diperoleh proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Adapun proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah selama periode RPJMD 2021-2026.

Tabel 3. 26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi					
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.248.584.747.975,00	1.355.027.289.366,00	1.413.947.734.000,00	1.469.127.972.450,00	1.537.863.639.000,00	1.633.500.416.800,00
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	65.000.000.000,00	100.000.000.000,00	115.000.000.000,00	125.000.000.000,00	135.000.000.000,00	145.000.000.000,00
Total Penerimaan	1.313.584.747.975,00	1.355.027.289.366,00	1.413.947.734.000,00	1.469.127.972.450,00	1.537.863.639.000,00	1.633.500.416.800,00
Dikurangi:						
Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	582.342.264.961,00	531.355.434.304,00	577.000.000.000,00	588.000.000.000,00	609.590.000.000,00	591.827.700.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	731.242.483.014,00	823.671.855.062,00	836.947.734.000,00	881.127.972.450,00	928.273.639.000,00	1.031.372.716.800,00

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang dan Data Proyeksi dari Bapelitbang

Tabel 3.25 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bontang meski cukup tinggi tapi jika dibandingkan dengan kapasitas jauh tidak lebih baik karena adanya dampak wabah pandemic Covid-19 ini menyebabkan adanya krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan adanya tekanan anggaran (*fiscal distress*). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya wabah pandemic Covid-19, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 wabah ini akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 3 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 kemarin, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah masih tetap terjaga positif di atas kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di tahun 2020.

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD ini. Sebagaimana adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pola nomenklatur Program-Kegiatan-Sub Kegiatan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, maka perlu adanya pendefinisian ulang terkait penyelarasan antara kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah yang telah diproyeksikan di atas dengan total kerangka pendanaan program yang ada di Bab VII RPJMD ini. Untuk itu, penyelarasan total proyeksi anggaran pada pendanaan program tidak dapat lagi dibandingkan dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, melainkan dibandingkan dengan proyeksi total penerimaan daerah.

Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran pada program-program pelayanan dasar (urusan wajib pelayanan dasar) ditambahkan dengan alokasi belanja wajib dan mengikat;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Walikota (Janji Walikota); dan terakhir
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan proyeksi perhitungan belanja tahun 2022-2026, maka proyeksi alokasi pendanaan belanja daerah berdasarkan prioritasnya sebagaimana tabel 3.26.

Tabel 3. 27 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	uraian	Proyeksi				
		2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	2025 Rp.	2026 Rp.
1	Kapasitas Kemampuan Keuangan	1.355.027.289.366,00	1.378.947.734.000,00	1.444.127.972.450,00	1.512.863.639.000,00	1.633.500.416.800,00
2	Prioritas I	664.399.994.409,00	703.209.941.968,01	733.789.797.304,00	761.811.188.751,06	794.745.260.019,98
3	Prioritas II	425.359.029.965,00	410.761.637.357,93	458.980.074.447,36	506.980.142.074,01	570.950.810.115,59
4	Prioritas III	265.268.264.992,00	264.976.154.674,06	251.358.100.698,64	244.072.308.174,93	267.804.346.665,42

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya dan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah dan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan Daerah pada masing-masing bidang urusan sebagaimana diuraikan pada Bab II, dan diselaraskan dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Bontang, maka permasalahan pembangunan di Kota Bontang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Tata Pemerintahan;
3. Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Prasarana Dasar; serta
4. Perekonomian.

4.1.1 Permasalahan Sumber Daya Manusia

Secara umum kualitas sumber daya manusia kota Bontang sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang yang selalu berada di atas rata-rata IPM Nasional dan IPM Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi jika melihat lebih dalam terhadap komponen penyusun nilai IPM tersebut terdapat indikasi **kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang belum unggul dan berdaya saing.**

Salah satu contohnya, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bontang meskipun mengalami kenaikan tetapi masih relatif rendah untuk ukuran perkotaan, yakni 10,72 pada Tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,72 tahun atau hampir menamatkan kelas XI (SMA Kelas II). Hal ini menggambarkan kondisi **tingkat pendidikan masyarakat Kota Bontang belum tuntas dan berkualitas.**

Indikasi lainnya didukung oleh Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sampai SMP terus menurun sejak tahun 2017 sampai 2019. Nilai APM Kota Bontang Tahun 2019 sebesar 91,04 untuk tingkat SD/MI/Kejar Paket A, artinya masih terdapat 8,96 persen penduduk usia sekolah setara SD yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan. Adapun nilai APM Tingkat SMP/MTs/Kejar Paket B pada Tahun 2019 sebesar 75,68 menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah setara SMP yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan masih relatif tinggi, sebesar 24,32 persen.

Permasalahan pendidikan ini disebabkan oleh beberapa akar masalah. Salah satunya adalah **kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar kelayakan.** Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah pada Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Tahun 2019, yakni sebesar 28,2 persen untuk jenjang setara SD dan sebesar 34,35 persen untuk jenjang setara SMP. Selain itu, berdasarkan data Tahun 2019 terdapat kondisi ruang kelas jenjang SD/MI yang belum baik sejumlah 18 ruang kelas dan Tahun 2020 meningkat menjadi 78 ruang kelas. Adapun pada jenjang pendidikan SMP/MTS, pada Tahun 2020 masih terdapat 38 ruang kelas dengan kondisi belum baik dari jumlah 299 ruang kelas yang ada di Kota Bontang.

Akar masalah kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar kelayakan ini disebabkan oleh *pembangunan sarana dan penyediaan prasarana pendidikan tidak sebanding dengan*

peningkatan jumlah penduduk. Jika melihat jumlah penduduk usia sekolah setara SD pada Tahun 2020 sebesar 21.280 orang maka idealnya jumlah SD yang dibutuhkan sebanyak 72 unit sekolah, sedangkan kondisi saat ini baru berjumlah 60 unit sekolah setara SD. Begitu pula dengan kondisi sekolah setara SMP, jumlah murid pada Tahun 2020 bertambah 294 orang, tapi jumlah jenjang SMP hanya ada 34 unit sekolah.

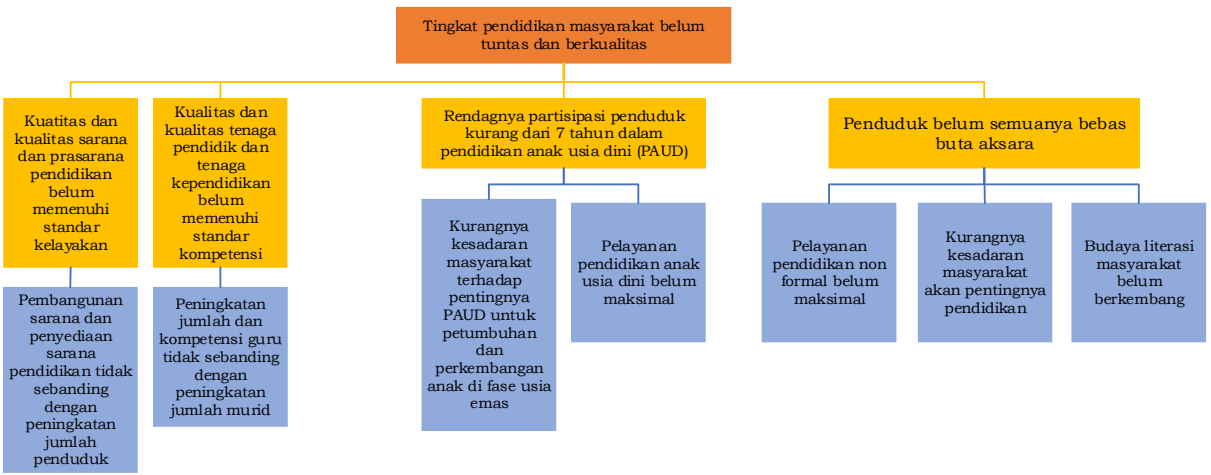
Permasalahan tingkat pendidikan masyarakat belum tuntas dan berkualitas juga disebabkan oleh **kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum memenuhi standar kompetensi.** Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio Guru Murid jenjang setara SD pada Tahun 2020 sebesar 49,2 persen, semakin turun dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini akan semakin turun pada tahun 2021 karena terdapat 20 orang guru yang akan pensiun, sedangkan jumlah murid bertambah 145 orang. Data Tahun 2020 terdapat 98 orang PNS dan 360 orang Non PNS yang belum memenuhi standar kompetensi dari jumlah seluruh guru setara SD sebanyak 971 orang. Untuk jenjang pendidikan setara SMP terdapat 62 orang PNS dan 170 orang Non PNS yang belum memenuhi standar kompetensi dari jumlah seluruh guru setara SMP sebanyak 497 orang. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akar masalah kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum memenuhi standar kompetensi disebabkan oleh *peningkatan jumlah dan kompetensi guru tidak sebanding dengan peningkatan jumlah murid.*

Selain itu, permasalahan tingkat pendidikan masyarakat belum tuntas dan berkualitas juga disebabkan oleh **rendahnya partisipasi penduduk usia kurang dari 7 tahun dalam pendidikan anak usia dini.** Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2020 sebesar 49,69 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya, maknanya sebagian besar penduduk usia kurang dari 7 tahun tidak masuk dalam sistem pendidikan anak usia dini. Akar masalah penurunan angka ini disebabkan oleh *kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di fase usia emas, dan pelayanan pendidikan anak usia dini belum maksimal.*

Permasalahan tingkat pendidikan masyarakat belum tuntas dan berkualitas juga disebabkan salah satunya oleh **penduduk Kota Bontang belum semua bebas buta aksara.** Hal ini ditandai dengan masih adanya penduduk Kota Bontang berusia di atas 15 tahun yang buta aksara, sebesar 843 orang pada Tahun 2020. Akar permasalahan ini disebabkan oleh *masih*

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, pelayanan pendidikan non formal belum maksimal, dan budaya literasi juga belum berkembang di masyarakat.

Secara diagramatis, permasalahan bidang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 1 Pohon Permasalahan Bidang Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia juga sangat tergantung pada kualitas kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2020 sebesar 102,93, meningkat dibandingkan nilai Tahun 2019. Artinya terdapat 102 kasus kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan dan persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada Tahun 2020 per 100.000 kelahiran hidup di Kota Bontang. Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2020 sebesar 13,6, juga meningkat dibandingkan angka Tahun 2019. Meskipun nilai tersebut termasuk kategori rendah secara nasional, akan tetapi masih terdapat 13 kasus bayi meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun di Kota Bontang yang masuk kategori kota kecil merupakan angka yang relatif tinggi dan perlu diperhatikan dalam pembangunan. Permasalahan **tingginya tingkat kematian ibu dan bayi** ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: *kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS), calon pengantin (catin) dan remaja putri dalam kesehatan reproduksi; kurangnya kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat dalam pemeriksaan rutin bayi; serta keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal.* Kondisi saat ini fasilitas kesehatan yang memiliki ruang perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) hanya ada di RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim.

Begitu pula dengan **tingkat prevalensi balita kekurangan gizi masih relatif tinggi** di Kota Bontang. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi balita gizi kurang sebesar 10,6 pada tahun 2020, meningkat dibandingkan tahun 2019. Permasalahan ini disebabkan oleh *pola konsumsi makanan bergizi masih rendah*, dan *pola pengasuhan anak yang kurang tepat*. Penyebab pola pengasuhan anak yang kurang tepat karena kurangnya kesadaran ibu dan masyarakat dalam pemeriksaan rutin balita, dan terbatasnya pelayanan penimbangan balita di posyandu. Kondisi ini terlihat dari capaian pelayanan kesehatan balita hanya 53,37 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari capaian tahun 2019.

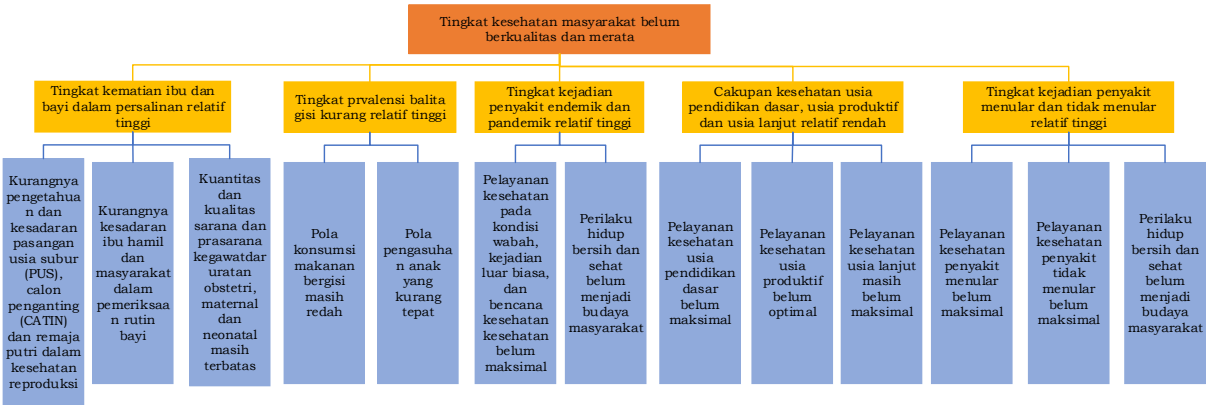
Begitupun **tingkat kejadian penyakit endemik dan pandemik masih relatif tinggi**. Sebagai contoh, *Incidence Rate* penyakit Demam Berdarah (DBD) pada Tahun 2020 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni mencapai 148,46. Artinya terdapat 148,46 kasus baru penyakit DBD yang berjangkit di Kota Bontang per 100.000 penduduk yang beresiko terkena penyakit DBD pada Tahun 2020. Begitu pula dengan *Incidence Rate* penyakit Covid-19, sampai dengan bulan Mei 2021 sudah tercatat sebanyak 6.087 kasus dengan total kematian mencapai 97 orang. Permasalahan ini disebabkan oleh *pelayanan kesehatan pada kondisi wabah, KLB dan bencana kesehatan belum maksimal*, serta *perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat*.

Selain itu, **tingkat kejadian penyakit menular dan tidak menular juga masih relatif tinggi**. Permasalahan ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain *pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular belum maksimal* dilakukan oleh pemerintah, juga *perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat*. Data tahun 2020, capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 50,05 persen, capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 53,68 persen, dan capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi hanya sebesar 28,87 persen.

Begitu pula, **cakupan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut masih relatif rendah**, disebabkan oleh *tingkat pelayanan kesehatan pada masing-masing usia tersebut belum maksimal*. Data Tahun 2020, cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar hanya sebesar 36,97 persen, cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif malah lebih rendah lagi yakni sebesar 24,02 persen, sedangkan

cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah mencapai 64,54 persen.

Berbagai akar masalah bidang kesehatan tersebut di atas mengakibatkan **tingkat kesehatan masyarakat Kota Bontang belum berkualitas dan merata**, sebagai salah satu permasalahan sumber daya manusia di Kota Bontang. Secara diagramatis, permasalahan bidang kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 2 Pohon Permasalahan Bidang Kesehatan

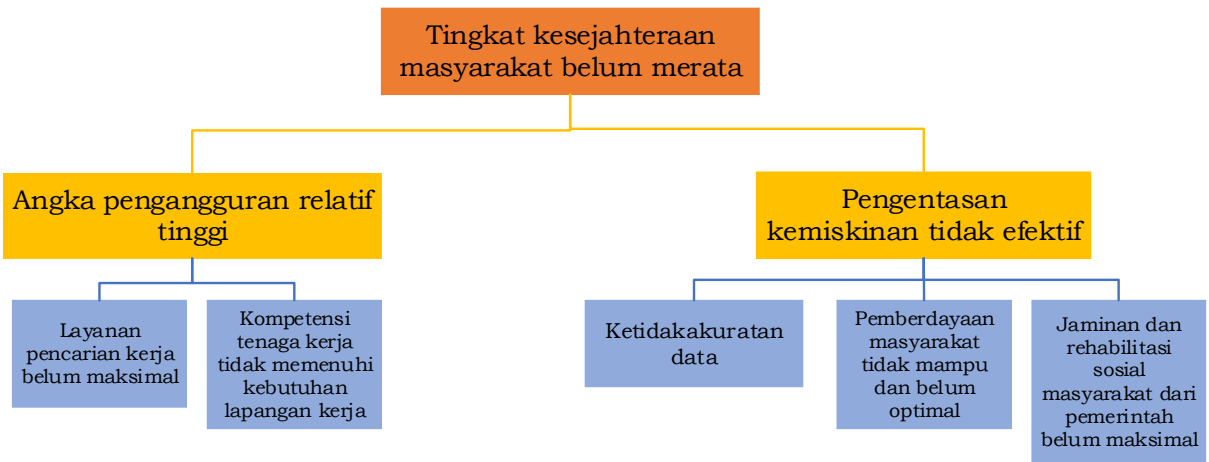
Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran per kapita, yang mencerminkan aspek kesejahteraan sumber daya manusia. Data Tahun 2020, angka kemiskinan di Kota Bontang meningkat menjadi 4,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,22 persen. Angka ini meskipun di bawah angka capaian Provinsi Kaltim dan Nasional, akan tetapi menunjukkan kondisi **tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang belum merata** jika mempertimbangkan data pengeluaran rumah tangga di Kota Bontang yang mencapai 84,72 persen menghabiskan lebih dari 4 juta rupiah per bulan, sedangkan jika dilihat data pengeluaran per kapita maka sejumlah 59,64 persen penduduk Kota Bontang memiliki pengeluaran di atas 1,5 juta rupiah per bulan.

Salah satu penyebab permasalahan kesejahteraan masyarakat belum merata yaitu **tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang** yang mencapai 9,46 persen pada Tahun 2020. Angka ini jauh di atas angka capaian Nasional dan Provinsi Kaltim, bahkan nilai tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kaltim. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: *kompetensi pencari kerja tidak memenuhi kebutuhan lapangan kerja* karena kualitasnya di bawah standar perusahaan, dan *mismatch keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan kerja*; serta *layanan pencarian kerja belum maksimal* karena tidak ada pemanfaatan

terhadap hasil pelatihan tenaga kerja yang sudah dilakukan, dan penyebarluasan informasi lapangan kerja belum merata.

Selain itu permasalahan kesejahteraan masyarakat belum merata juga disebabkan karena program **pengentasan kemiskinan di Kota Bontang tidak berjalan efektif** karena adanya *ketidakakuratan data* akibat proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mutakhir, serta hasilnya tidak menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat; *pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu belum optimal*; serta *jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat yang diberikan oleh pemerintah belum maksimal*. Kondisi tersebut ditunjukkan dari masih terdapat keluarga pra sejahtera di Kota Bontang sejumlah 1.113 keluarga pada Tahun 2020, menurun dari data Tahun 2019 sebesar 2.468 keluarga. Meskipun demikian jumlah rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah cenderung terus meningkat setiap tahun, yakni merangkak naik dari 8.202 rumah tangga pada Tahun 2019 menjadi 8.510 rumah tangga pada Tahun 2020.

Secara diagramatis, permasalahan bidang kesejahteraan rakyat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 3 Pohon Permasalahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Secara ringkas rumusan permasalahan sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 1 Rumusan Permasalahan Sumber Daya Manusia

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas SDM belum unggul dan berdaya saing	Tingkat pendidikan masyarakat belum tuntas dan berkualitas	▪ Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar kelayakan ▪ Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar kompetensi

		▪ Rendahnya partisipasi penduduk usia kurang dari 7 tahun dalam pendidikan anak usia dini ▪ Penduduk belum semua bebas dari buta aksara
	Tingkat kesehatan masyarakat belum berkualitas dan merata	▪ Tingkat kematian ibu dan bayi relatif tinggi ▪ Tingkat prevalensi balita kekurangan gizi relatif tinggi ▪ Tingkat kejadian penyakit endemik dan pandemik relatif tinggi ▪ Tingkat kejadian penyakit menular dan tidak menular relatif tinggi ▪ Cakupan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif, dan usia lanjut relatif rendah
Tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata	Angka pengangguran terbuka relatif tinggi	▪ Kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kebutuhan lapangan kerja ▪ Layanan pencarian kerja belum maksimal
	Pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif	▪ Ketidakakuratan data ▪ Pemberdayaan masyarakat tidak mampu belum optimal ▪ Jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat dari pemerintah belum maksimal

Sumber: Hasil Analisis

4.1.2 Permasalahan Tata Pemerintahan

Pokok permasalahan tata pemerintahan di Kota Bontang adalah **kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang belum harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab**. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang secara umum meningkat dari 62,27 pada Tahun 2016 menjadi 67,84 pada Tahun 2020, meskipun secara predikat masih kategori B. Begitu pula dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengalami kenaikan nilai dari 3,38 pada Tahun 2018 menjadi 3,82 pada Tahun 2019, kemudian turun lagi menjadi 3,75 pada Tahun 2020.

Penyebab pokok permasalahan tata pemerintahan tersebut di atas, diantaranya **tata kelola pemerintahan belum efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif**. Ada banyak faktor yang menyebabkan masalah tersebut, antara lain: *perencanaan dan pengendalian pembangunan yang belum berkualitas; pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal; kinerja aparatur sipil negara yang belum professional; kualitas pelayanan publik belum maksimal; serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan belum sinergi dan terintegrasi*

Kondisi akar permasalahan tersebut di atas ditunjukkan dengan data capaian kinerja sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 hanya sebesar 47,5 persen dari 40 indikator kinerja sasaran sesuai kewenangan daerah, sedangkan capaian kinerja program RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 hanya mencapai 52,08 persen dari total 240 indikator kinerja program.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil dalam kategori baik, akan tetapi capaian beberapa komponen penilaiannya masih belum maksimal terutama perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Tingkat akuntabilitas kinerja ini cenderung stagnan sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kondisi ini tidak lepas dari kualitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020, hanya terdapat 25 persen pegawai yang memahami kinerja, ukuran kinerja dan kontribusi terhadap kinerja organisasi dari 100 responden pegawai Pemerintah Kota Bontang.

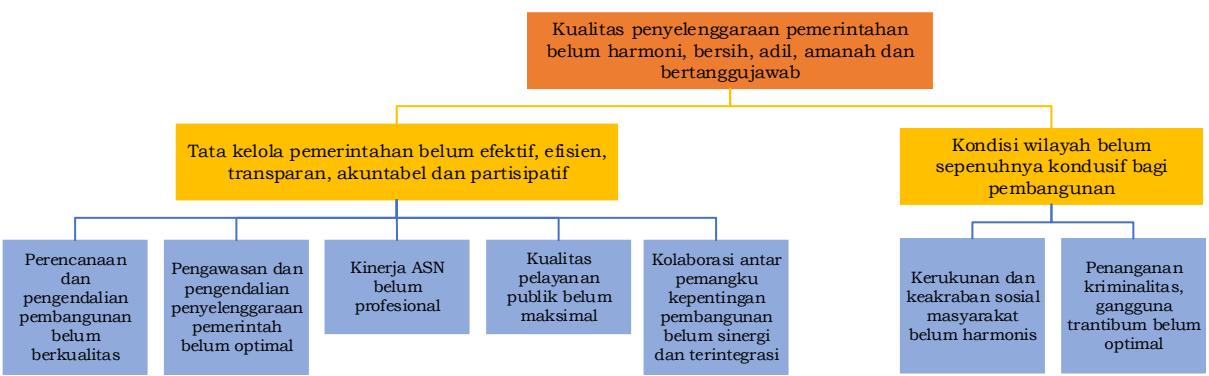
Selain itu, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 juga menyatakan bahwa belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kontak antara petugas dan pengguna layanan. Terkait kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan, baru terdapat 17 perusahaan dari potensi kurang lebih 50 perusahaan yang terlibat dalam Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR). Belum lagi melihat potensi unsur lembaga non usaha, baik lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga filantropi, belum disinergikan secara terpadu dalam pembangunan.

Penyebab lain pokok permasalahan tata pemerintahan tersebut di atas yaitu **kondisi wilayah belum sepenuhnya kondusif bagi pembangunan**. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut, yakni *kerukunan dan keakraban sosial masyarakat belum harmonis; serta penanganan kriminalitas, gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal*.

Kondisi akar permasalahan ini tercermin dari data Tahun 2020, cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum baru

mencapai 62,21 persen, cakupan penyelesaian tindak pidana mencapai 87,2 persen, serta cakupan pembinaan forum kerukunan masyarakat hanya mencapai 1,14 persen.

Secara diagramatis, permasalahan tata pemerintahan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 4 Pohon Permasalahan Tata Pemerintahan

Adapun rumusan permasalahan tata pemerintahan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2 Rumusan Permasalahan Tata Pemerintahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan belum harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab	Tata kelola pemerintahan belum efektif, efisien, transparan, akuntabel & partisipatif	▪ Perencanaan & pengendalian pembangunan belum berkualitas ▪ Pengawasan & pengendalian penyelenggaraan pemerintahan belum optimal ▪ Kinerja ASN belum profesional ▪ Kualitas pelayanan publik belum maksimal ▪ Kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan belum sinergi dan terintegrasi
	Kondisi wilayah belum sepenuhnya kondusif bagi pembangunan	▪ Kerukunan & keakraban sosial masyarakat belum harmonis ▪ Penanganan kriminalitas dan gangguan trantibum belum optimal

Sumber: Hasil Analisis

4.1.3 Permasalahan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Prasarana Dasar

Permasalahan pokok di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang di Kota Bontang adalah adanya **penurunan kualitas lingkungan hidup**. Kondisi ini tercermin dari nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) yang meningkat dari 80 pada Tahun 2019 menjadi 83,33 pada Tahun 2020, sedangkan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) menurun dari 87,62 pada Tahun 2019 menjadi 86,30 pada Tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, akan

tetapi masih terdapat beberapa **parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu**.

Permasalahan ini tidak lepas dari status Kota Bontang sebagai kota industri sehingga memiliki kecenderungan mengalami paparan dari proses produksi berupa *polusi industri yang berpengaruh pada kualitas udara ambien*. Selain itu, pesatnya *peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bontang menjadi salah satu sumber pencemaran udara* berupa kebisingan yang melebihi baku mutu dan kadar CO yang masih relatif tinggi.

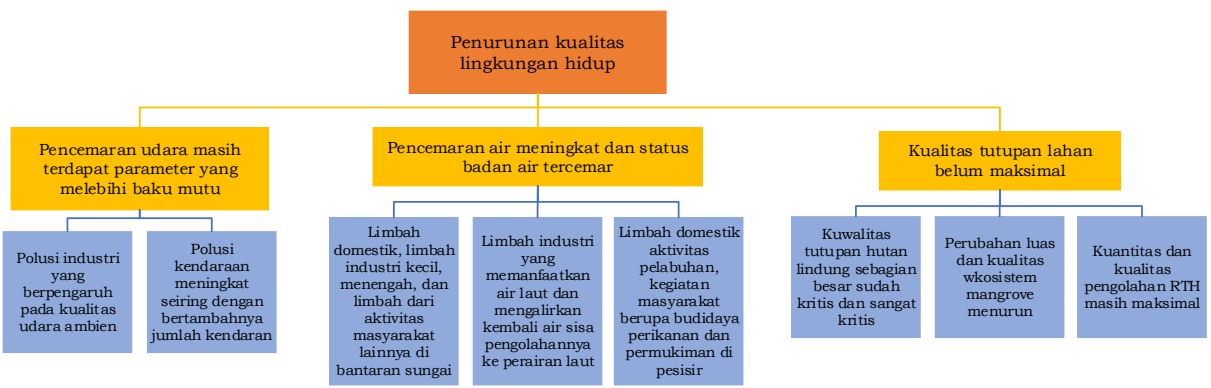
Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air pada Tahun 2019, kondisi secara umum **status badan air di Kota Bontang dibandingkan Kelas II tergolong tercemar**, dengan *sumber pencemar utama berasal dari limbah domestik; limbah industri, baik industri kecil dan menengah, maupun industri besar; serta limbah sisa aktivitas di perairan seperti pelabuhan dan perikanan*.

Selain kualitas udara dan air, kualitas lingkungan hidup suatu wilayah juga ditentukan oleh kualitas tutupan lahan yang menggambarkan secara umum perbandingan luas area hijau dalam wilayah tersebut. Berdasarkan data eksisting penutupan/penggunaan lahan di Kota Bontang pada Tahun 2019 didominasi oleh Semak sebesar 6.540,7 Ha, kemudian diikuti oleh Mangrove seluas 3.172,83 Ha, Hutan seluas 2.032,7 Ha, Permukiman seluas 1.782,11 Ha, Ladang seluas 969,54 Ha dan Industri seluas 639,62 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah daratan Kota Bontang sebesar 16.188 Ha maka terdapat 32,16% merupakan tutupan lahan berupa area hijau di Kota Bontang berupa Mangrove dan Hutan. Kondisi **kualitas tutupan lahan belum maksimal** dan harus ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2039 sebesar 56,5 persen menjadi Kawasan Peruntukan Lindung dan hanya 43,5 persen yang dimanfaatkan sebagai Kawasan Peruntukan Budidaya. Dalam Kawasan Peruntukan Lindung tersebut didominasi oleh zona Hutan Lindung seluas 4.609,08 Ha.

Meskipun Hutan Lindung menjadi rencana pemanfaatan ruang terluas di Kota Bontang, akan tetapi pada Tahun 2019 *kondisi kualitas Hutan Lindung sebagian besar sudah kritis dan sangat kritis*, masing-masing seluas 3.211,64 Ha dan 28,28 Ha. Adapun *ekosistem Mangrove mengalami dinamika perubahan dari tahun ke tahun semakin menyusut*, tidak hanya dari aspek luasan akan tetapi juga aspek kerapatan dan kelimpahan jenis. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bontang pada Tahun 2019 sebesar 3.251,49 Ha

atau jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bontang sebesar 16.188 Ha baru mencapai 20,09 persen dari target 30,69% dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2039. Selain aspek kuantitas luas RTH, kualitas pengelolaan RTH juga masih sangat minim.

Secara diagramatis, permasalahan bidang lingkungan hidup dan penataan ruang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)
Gambar 4. 5 Pohon Permasalahan Sub Lingkungan Hidup dan Penataaan Ruang

Permasalahan pokok di bidang Prasarana Dasar di Kota Bontang adalah **kualitas infrastruktur perkotaan belum maju dan tangguh**. Aspek infrastruktur yang belum maju tercermin dalam **kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur yang belum optimal**. Banyak faktor terkait Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang menyebabkan permasalahan tersebut, antara lain: *kuantitas dan kualitas hunian yang masih rendah; kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan yang belum maksimal; kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi yang menurun; kuantitas dan kualitas bangunan laik fungsi yang masih rendah; serta kualitas layanan pemadaman kebakaran yang belum maksimal*.

Pemenuhan akan hunian yang layak dan terjangkau masih belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Kota Bontang, ditandai dengan masih adanya *backlog* hunian, rumah tidak layak huni, dan kawasan permukiman kumuh di Kota Bontang. Kesenjangan permintaan dan penawaran akan menimbulkan *backlog* hunian dimana pada Tahun 2020 masih terdapat 16.169 unit di Kota Bontang sebagai akibat harga perumahan layak tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Penataan kawasan permukiman yang tidak optimal menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh yang didalamnya terdapat rumah tidak layak huni. Data Tahun 2020 di Kota Bontang terdapat 68,19 hektar permukiman kumuh, meningkat dibandingkan kondisi Tahun 2019 seluas 16,33 hektar. Adapun

jumlah rumah tidak layak huni di Kota Bontang pada Tahun 2020 berjumlah 1.726 unit, meningkat dibandingkan kondisi Tahun 2019 sejumlah 1.196 unit, sebagai akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang menghuni rumah tersebut dan lemahnya pemberdayaan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang penting dan dominan dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, belum semua penduduk Kota Bontang memiliki akses air minum yang layak dan aman yang disebabkan karena keterbatasan sumber air baku untuk air minum yang hanya mengandalkan air bawah tanah, kapasitas produksi dan distribusi air minum tidak maksimal, pelayanan air minum belum optimal, dan masih terkendalanya penyediaan air minum untuk penduduk di pesisir dan pulau-pulau. Sampai dengan Tahun 2020, persentase akses air minum layak dan aman sebesar 81,69 persen dari total jumlah penduduk.

Begitu juga dengan pengelolaan air limbah domestik, belum semua penduduk Kota Bontang mempunyai akses terhadap air limbah domestiknya. Data Tahun 2020, jumlah rumah tangga yang memiliki akses layak untuk air limbah domestiknya sebesar 97,15 persen, menurun dibandingkan kondisi Tahun 2019 sebesar 98,69 persen, sebagai akibat masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, rusaknya sebagian jaringan IPAL yang ada, masyarakat yang telah memiliki akses untuk pengelolaan air limbah domestiknya tetapi secara kualitas tidak memenuhi persyaratan teknis seperti bocornya tangki septik yang dimiliki, serta penanganan air limbah domestik di pulau-pulau yang belum tertangani dengan baik.

Cakupan pengelolaan sampah di Kota Bontang sampai dengan Tahun 2020 sebesar 95,63 persen, artinya masih ada 4,37 persen sampah yang tidak terkelola, menurun dibandingkan cakupan Tahun 2019 sebesar 96,66 persen. Dari target pengurangan sampah sebesar 22 persen baru dapat tercapai 18,24 persen, sedangkan penanganan sampah dari target 75 persen sudah tercapai 77,39 persen. Rendahnya capaian target pengurangan sampah disebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. TPS 3R yang merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan jumlahnya masih sangat sedikit. Baru terdapat 2 TPS 3R yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang saat ini masih berjalan, sedangkan bank sampah hanya ada 7 unit yang aktif sampai saat ini, terdiri dari 2 unit bank sampah induk dan 5 unit bank sampah unit.

Selain itu, penanganan sampah juga belum maksimal karena kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta adanya wilayah permukiman penduduk di pulau-pulau.

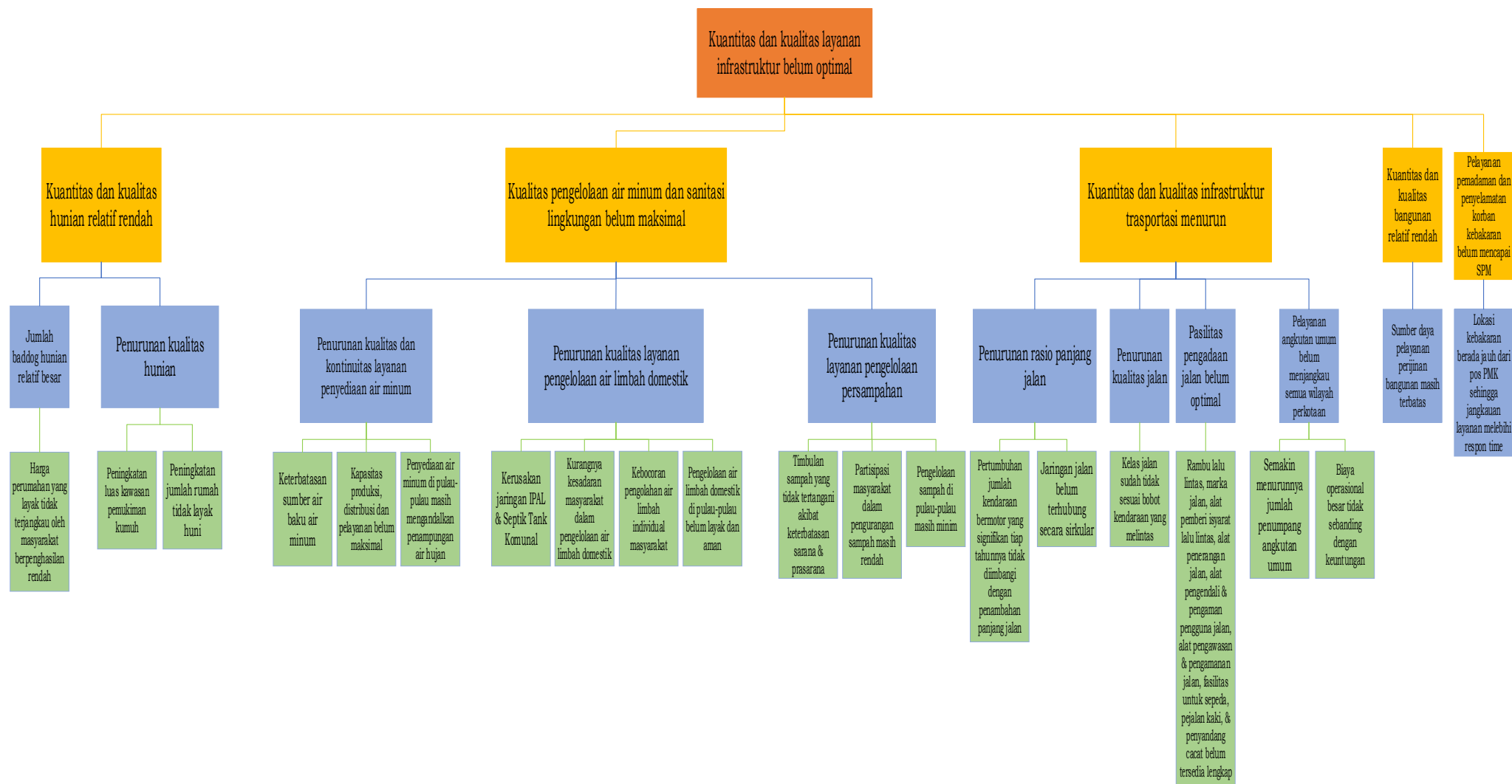
Infrastruktur transportasi meliputi prasarana dan sarana pergerakan orang dan/atau barang. Prasarana jalan merupakan tulang punggung utama guna menunjang kelancaran dan perkembangan suatu wilayah. Kondisi Kota Bontang, tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan penambahan panjang jalan menyebabkan rasio panjang jalan menurun setiap tahun sejak 2016 semula 0,0033 menjadi 0,0023 pada Tahun 2020. Begitu pula dengan kualitas jalan, kondisinya juga mengalami penurunan. Data jalan dalam kondisi baik, Tahun 2019 sebesar 91,15 persen, Tahun 2020 sebesar 89,70 persen. Pada Tahun 2020, terdapat sekitar 5,31 km atau 2,72 persen jalan dalam kondisi rusak, dan 11,97 km atau 6,13 persen dalam kondisi rusak berat dari total panjang jalan sebesar 195,33 km. Selain itu juga jalan antar kawasan di pesisir seperti Loktuan, Tanjung Limau, Bontang Kuala, dan Tanjung Laut Indah belum terhubung secara sirkular sehingga untuk menghubungkan antar kawasan tersebut harus memutar cukup jauh melalui jalan tengah kota.

Penataan ruang milik jalan dan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Bontang juga masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan, antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar jalan. Begitu pula dengan pelayanan angkutan umum belum menjangkau semua wilayah perkotaan. Berdasarkan data sampai dengan Tahun 2020, dari total angkutan umum yang berizin sejumlah 155 unit, hanya 63 unit yang beroperasi dan izin trayeknya masih hidup, sedangkan sisanya 92 unit izin trayeknya sudah mati. Dari awalnya 6 rute, sekarang hanya 3 rute trayek yang beroperasi dengan panjang rute yang ditempuh sebesar 39 km atau hanya 23,88 persen dari total panjang jalan umum sebesar 163,30 km.

Dalam aspek bangunan laik fugs, capaian pelayanan perizinan bangunan hanya mencapai 11.408 unit pada Tahun 2010 atau sebesar 22,24 persen dari total bangunan sejumlah 51.304 unit di Kota Bontang. Begitupun dengan capaian layanan pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran bangunan meskipun sudah mencapai 90,91 persen pada Tahun 2020,

meningkat dari sebelumnya hanya 69 persen pada tahun 2019, akan tetapi belum mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100%.

Secara diagramatis, permasalahan di sub-bidang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 6 Pohon Permasalahan Sub-Bidang Standar Pelayanan Perkotaan

Aspek infrastruktur yang belum tangguh tergambar pada masih **terdapat area genangan banjir yang relatif luas** di Kota Bontang. Banyak faktor terkait penanggulangan bencana yang menyebabkan permasalahan tersebut, antara lain: *koordinasi penanggulangan bencana belum optimal; penanganan drainase belum terintegrasi antara drainase kota, drainase jalan dan drainase lingkungan; penataan sungai dan bantaran sungai belum optimal; serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir belum optimal.*

Permasalahan banjir di Kota Bontang sampai sekarang belum tertangani dengan baik, terjadi karena adanya kiriman dari hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pasang air laut (rob), dan genangan akibat kurang berfungsinya sistem drainase. Data Tahun 2020 terdapat 924,15 Ha area yang mengalami banjir, menurun dibandingkan Tahun 2019 seluas 1.287,63 Ha. Rusaknya DAS Bontang dan DAS Guntung akibat alih fungsi lahan menyebabkan air kiriman mengalir deras ke wilayah Kota Bontang, diperparah dengan kondisi pasang surut air laut dan kapasitas sungai maupun drainase yang tidak mampu menampung dan mengalirkan air sehingga menyebabkan air meluap dan menggenangi sebagian wilayah Kota Bontang.

Berdasarkan data Tahun 2020, cakupan panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 98,67 Km, sedangkan panjang turap sungai yang dibangun sebesar 16,14 Km dan panjang sungai yang dinormalisasi sebesar 10.89 Km dari total panjang sungai sebesar 38,32 Km. Aliran sungai yang melewati wilayah Kota Bontang dan menjadi prioritas dalam penanggulangan banjir meliputi: (1) Sungai Bontang, panjang sungai utama 17,29 Km, panjang anak sungai 12,37 Km; (2) Sungai Guntung, panjang sungai utama 4,78 Km; dan (3) Sungai Kanibungan, panjang sungai utama 2,96 Km, panjang anak sungai 0,96 Km.

Berdasarkan pendataan Tahun 2019, terdapat 98 bangunan rumah yang berada di bantaran Sungai Bontang dan Sungai Guntung yang harus direlokasi, dengan rincian Kelurahan Api-Api sebanyak 12 rumah, Kelurahan Guntung sebanyak 57 rumah, Kelurahan Gunung Elai sebanyak 19 rumah, Kelurahan Kanaan sebanyak 6 rumah, dan Kelurahan Satimpo sebanyak 4 rumah.

Secara diagramatis, permasalahan di sub-bidang penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 7 Pohon Permasalahan Sub-Bidang Penanggulangan Bencana

Secara ringkas rumusan permasalahan lingkungan hidup, penataan ruang dan prasarana dasar dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4. 3 Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Prasarana Dasar

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas infrastruktur perkotaan belum maju dan tangguh	Kualitas lingkungan hidup menurun	▪ Pencemaran udara meningkat ▪ Pencemaran air masih terjadi ▪ Kualitas tutupan lahan menurun
	Kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur belum optimal	▪ Kuantitas dan kualitas hunian relatif rendah ▪ Kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan belum maksimal ▪ Kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi menurun ▪ Kuantitas dan kualitas bangunan laik fungsi relatif rendah ▪ Pelayanan pemadaman & penyelamatan korban kebakaran belum mencapai standar pelayanan minimal
	Area genangan banjir relatif luas	▪ Penanganan drainase belum terintegrasi antara drainase perkotaan, drainase jalan dan drainase lingkungan ▪ Penataan sungai dan bantaran sungai belum optimal ▪ Pembangunan infrastruktur pengendali banjir belum optimal ▪ Koordinasi penanggulangan bencana belum maksimal

Sumber: Hasil Analisis

4.1.4 Permasalahan Perekonomian

Permasalahan pokok perekonomian di Kota Bontang adalah **kualitas ekonomi daerah yang belum inklusif dan berimbang**. Kondisi ini dapat

dilihat dari perkembangan nilai Indeks Gini yang selalu fluktuatif sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2020, dengan nilai tertinggi sebesar 0,405 justru terjadi pada Tahun 2020. Meskipun nilai ini termasuk kategori ketimpangan sedang, namun demikian kondisinya sangat kontras dengan nilai PDRB per kapita pada tahun yang sama, yakni sebesar 312,15 juta rupiah dengan migas. Jika aktivitas ekonomi selain migas dikeluarkan dari perhitungan PDRB per kapita, maka setiap penduduk Kota Bontang secara rata-rata mampu menghasilkan produk domestik sekitar 178,18 juta rupiah per tahun atau sebesar 14,85 juta rupiah per bulan pada Tahun 2020.

Permasalahan pokok ini disebabkan oleh **ketidakseimbangan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan**. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, khususnya industri pengolahan berbasis minyak dan gas bumi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar PDRB Kota Bontang, yang pada Tahun 2020 mencapai 79,60 persen.

Ketidakseimbangan struktur ekonomi ini disebabkan karena *kontribusi sektor selain industri pengolahan minyak dan gas bumi relatif rendah*, terutama sektor-sektor yang terkait dengan potensi lokal seperti perdagangan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Berdasarkan data PDRB Tahun 2010-2019, sektor industri pengolahan non migas yang didominasi industri kecil dan menengah mengalami peningkatan dan pertumbuhan cukup signifikan, akan tetapi nilai kontribusinya dan laju pertumbuhannya masih jauh di bawah sektor industri pengolahan berbasis migas sehingga belum mampu mengangkat perekonomian daerah. Begitu pula, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kota Bontang menunjukkan adanya kenaikan kontribusi, dari 2,54 persen pada Tahun 2016 menjadi 3,31 persen pada Tahun 2020. Meskipun demikian, sektor perdagangan tersebut masih didominasi usaha mikro dan kecil yakni sebesar 99,94 persen. Hal ini menunjukkan masih minimnya peningkatan skala usaha dari usaha mikro dan kecil ke usaha menengah pada Tahun 2020.

Berdasarkan data Tahun 2020, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih terbilang kecil hanya 4,55 persen. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari 472.205 orang pada Tahun 2019 menjadi 215.029 orang pada Tahun

2020. Kondisi prasarana pendukung pariwisata juga relatif tidak berkembang, antara lain jumlah hotel dan akomodasi hanya terdapat 3 hotel berbintang, jumlah kelompok kesenian menurun dari 54 grup pada Tahun 2019 menjadi 37 grup pada Tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya juga mengalami penurunan dari 17 event pada Tahun 2019 menjadi 1 event pada Tahun 2020, serta jumlah rumah makan dari tahun 2016 sebesar 173 menjadi sebesar 292 di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 288 unit.

Permasalahan pokok ini juga disebabkan oleh **penurunan pertumbuhan ekonomi, baik dengan migas maupun tanpa migas**. Berdasarkan data Tahun 2020, perekonomian Kota Bontang dengan migas mengalami perlambatan sebesar 0,6 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu mencapai -2,76 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi non migas sebesar 2,38 persen pada Tahun 2020, turun dari tahun sebelumnya sebesar 6,64 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: adanya *penurunan ekspor netto barang dan jasa* dan *penurunan jumlah dan nilai investasi*.

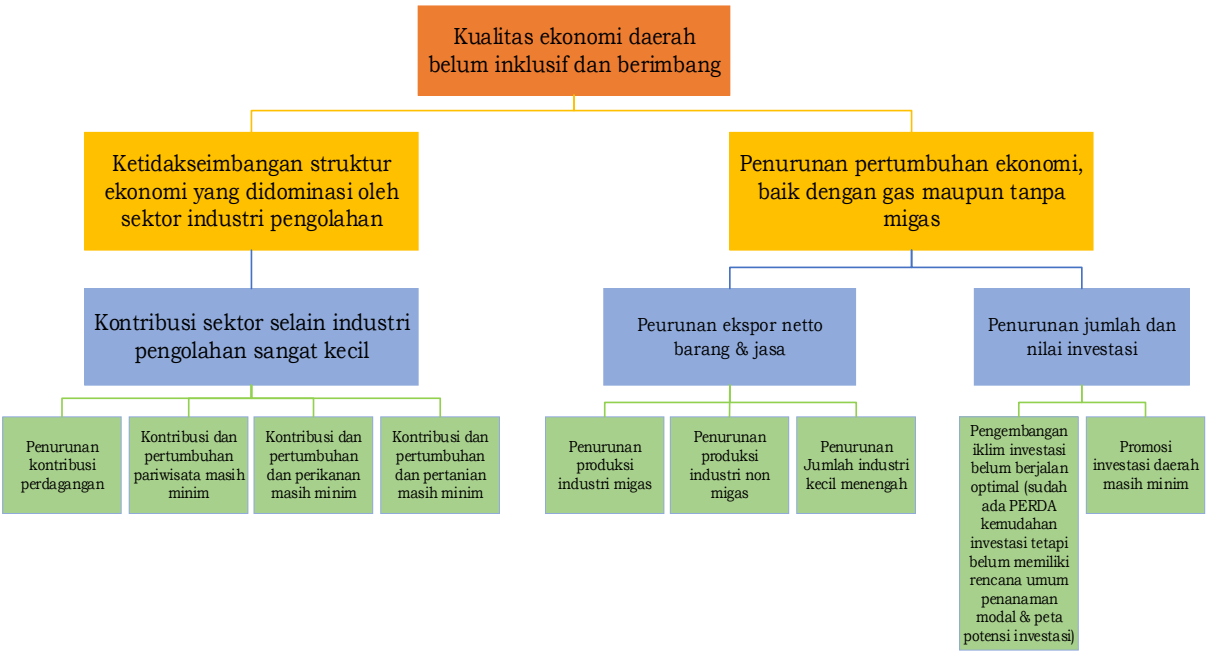
Penurunan ekspor netto ditunjukkan dari data penurunan ekspor netto barang dan jasa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebesar -12,63 persen. Akar permasalahan ini adalah disebabkan oleh adanya penurunan produksi industri migas, penurunan produksi industri non migas, dan penurunan jumlah industri kecil menengah.

Kinerja sektor industri pengolahan migas yang terus turun tersebut menjadi faktor dominan melemahnya ekonomi Kota Bontang. Jika dilihat dari tren kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Bontang Tahun 2016 – 2020, terjadi penurunan secara konsisten terutama pada Tahun 2018 yakni sebesar 5,73 persen. Berdasarkan data terjadi penurunan produksi industri migas rata-rata sebesar 5,37 persen, disebabkan menurunnya permintaan SKA terbesar yakni dari PT. Badak LNG pada tahun 2020 dibandingkn dengan tahun 2019. Penurunan ini tidak terlepas dari kontrak pembelian gas cair dari negara Jepang dan Korea banyak yang sudah berakhir. Begitu pula dengan penurunan jumlah industri yang signifikan pada Tahun 2020 terdapat pada industri makanan dan minuman yang menurun sebanyak 96 buah dimana Tahun 2019 sebesar 525 menjadi sebesar 429, sedangkan industri minuman menurun sebanyak 14 buah dari Tahun 2019 sebesar 283 menjadi 269 pada Tahun 2020. Adapun

pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) juga mengalami penurunan dari 12,8 persen pada Tahun 2018 menjadi 1,83 persepuluh pada tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2020 tidak terjadi perubahan jumlah IKM.

Adanya penurunan jumlah investor dari 180 perusahaan pada Tahun 2019 menjadi 97 perusahaan pada Tahun 2020, sedangkan nilai investasi juga mengalami penurunan dari 4,8 triliun rupiah pada Tahun 2019 menjadi 4,1 triliun rupiah di Tahun 2020. Penurunan jumlah dan nilai investasi tersebut disebabkan oleh pengembangan iklim investasi belum berjalan optimal, dan promosi investasi daerah masih minim.

Secara diagramatis, permasalahan perekonomian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



(Sumber: Hasil Analisis)

Gambar 4. 8 Pohon Permasalahan Perekonomian

Secara ringkas rumusan permasalahan perekonomian dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4. 4 Rumusan Permasalahan Perekonomian

Pokok Masalah	Masalah	Akar masalah
Kualitas ekonomi daerah belum inklusif dan berimbang	Ketidakseimbangan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan	▪ Kontribusi sektor selain industri pengolahan minyak dan gas bumi relatif rendah
	Penurunan pertumbuhan ekonomi, baik dengan migas maupun tanpa migas	▪ Penurunan ekspor netto barang dan jasa ▪ Penurunan jumlah dan nilai investasi

Sumber: Hasil Analisis

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa yang akan datang. Isu strategis daerah merupakan isu-isu yang perlu diprioritaskan antisipasi dan penanganannya agar peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun sebaliknya, jika isu-isu tersebut tidak ditangani dengan serius maka tujuan dan sasaran pembangunan menjadi sulit tercapai.

4.2.1 Isu International

Isu internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia yang menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan, rencana, program pembangunan di setiap negara. Isu internasional yang menjadi perhatian dalam pembangunan jangka menengah Kota Bontang yakni *Sustainable Development Goals*.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan transformatif bersama yang ingin dicapai pada tahun 2030, disepakati oleh 193 negara dalam *Sustainable Development Summit* pada tanggal 25 September 2015 di New York. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, diadopsi oleh semua negara anggota PBB yang memberikan kerangka bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet, masa sekarang dan masa depan, dalam kemitraan global dengan menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi, sambil bekerja mengatasi perubahan iklim dan melestarikan lautan dan hutan.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan SDGs sebagai salah satu pengarusutamaan dalam pembangunan, bahkan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjelaskan target dan sasaran SDGs yang harus dicapai. Dari total 241 indikator global, Indonesia mengembangkan beberapa indikator tambahan menjadi 319 indikator TPB yang mencakup empat pilar, terdiri dari 111 indikator pilar sosial, 91 indikator pilar ekonomi, 83 indikator pilar lingkungan, dan 34 indikator pilar hukum dan tata kelola.



(Sumber: <https://sdgs.un.org/goals>)

Gambar 4. 9 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, indikator TPB dibagi menjadi 4 (empat) kewenangan meliputi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 303 indikator, Pemerintah Provinsi sebanyak 235 indikator, Pemerintah Kabupaten sebanyak 220 indikator, dan Pemerintah Kota sebanyak 222 indikator. Dari hasil analisis capaian TPB Kota Bontang Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan pada Bab II, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 105 indikator (47%). Selanjutnya, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional sebanyak 60 indikator (27%), indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencaapai target nasional sebanyak 15 indikator (7%), dan indikator TPB yang tidak atau belum ada data sebanyak 42 indikator (19%).

4.2.2 Isu Nasional

Isu nasional memiliki potensi besar dalam mempengaruhi arah pembangunan Kota Bontang pada lima tahun mendatang, terutama apabila ada kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

4.2.2.1 Telaah RPJMN 2019 - 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJMN 2020-2024 mengusung

Visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan 9 Misi yang dikenal sebagai **Nawa Cita** kedua, yang selanjutnya diterjemahkan dalam **7 Agenda Pembangunan** sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, melalui:
 - a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, melalui:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, sedangkan koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota. Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan dijabarkan dalam 7 Wilayah Pembangunan,

yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa - Bali, dan Wilayah Sumatera.

Dalam Tahun 2020-2024, strategi pembangunan Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar, antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan; pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019 selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (c) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (d) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (e) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan budidaya dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (g) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; (i) pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan (j) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah, antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat

pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.

4. Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan, antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Selain penjabaran strategi pembangunan wilayah, untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2020-2024 akan dilaksanakan *Major Project* sebagai berikut:

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
2. Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
3. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
4. Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh-Aruk dan (b) PKSN Nunukan;
5. Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;
6. Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi, (d) Kayan, (e) Mentarang;
7. Revitalisasi: (a) Kilang Minyak Balikpapan dan (b) Pembangunan Kilang Baru Bontang;
8. Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
9. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.

Secara ringkas telaah kebijakan nasional dan keterkaitannya dalam RPJMD Kota Bontang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5 Identifikasi Kebijakan Nasional Tahun 2020-2024

Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024		Relevansi terhadap RPJMD
1.	7 Agenda Pembangunan Jangka Menengah	Diperhatikan dalam perumusan tujuan dan sasaran PJM Kota Bontang
2.	5 Strategi Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan	Diperhatikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan PJM Kota Bontang
3.	9 Major Project Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan	Diperhatikan dalam perumusan program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan PJM Kota Bontang

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 (diolah)

4.2.2.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 - 2024, yaitu:

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2. Birokrasi yang kapabel; dan
- 3. Pelayanan publik yang prima.

Adapun indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran tersebut terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	2	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Predikat SAKIP minimal B a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/Kota	a. 96,40% b. 94,12% (2018) c. 46,85% (2018)	a. 100% b. 100% c. 100%
	3	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Opini BPK minimal WTP a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/Kota	a. 94% (2018) b. 94% (2018) c. 84,5% (2018)	a. 100% b. 100% c. 100%
Birokrasi yang kapabel	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik	n.a	100%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2019	TARGET 2024
		a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/Kota		
	2	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6): a. K/L b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	a. 74% b. 50% c. 22%	a. 100% b. 80% c. 50%
	3	Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima		Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik a. K/L b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	a. 59,52% b. 76,47% c. 33,27%	a. 100% b. 100% c. 100%

Sumber: Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020

4.2.2.3 Pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi isu penting dalam pembangunan wilayah Kalimantan Timur secara khusus dan pembangunan nasional secara umum, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi pembangunan di Kota Bontang.

Berdasarkan hasil kajian Bappenas (2019), pemindahan IKN akan memberikan dampak bagi pembangunan di Indonesia, antara lain:

1. Meningkatkan riil *Gross Domestic Product* (GDP) nasional sebesar 0,1% karena adanya penggunaan sumberdaya potensial yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan ditandai dengan kenaikan *Price of Capital* sebesar 0,23% dan kenaikan *Price of Labor* sebesar 1,37% akibat adanya perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya;
3. Meningkatkan inflasi nasional sebesar 0,2% basis poin jika ada kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang lebih beragam;
4. Mendorong peningkatan perdagangan antar wilayah sebesar 50%, baik dari Pulau Jawa ke luar Jawa, maupun antar provinsi di luar Jawa; serta
5. Mendorong investasi di Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya, terutama pada sektor non-tradisional.

Tabel 4. 7 Identifikasi Dampak Pemindahan IKN

Pemindahan IKN di Kaltim		Relevansi terhadap RPJMD
1.	GDP nasional meningkat 0,1%	PDRB Kota Bontang diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan GDP nasional
2.	Kesenjangan antar kelompok pendapatan menurun	Indeks Gini Kota Bontang diperkirakan menurun
3.	Inflasi nasional nasional meningkat 0,2%	Inflasi Kota Bontang diperkirakan meningkat
4.	Perdagangan antar wilayah meningkat 50%	Sektor perdagangan di Kota Bontang diperkirakan meningkat
5.	Investasi meningkat	Investasi di Kota Bontang diperkirakan meningkat

Sumber: Bappenas, 2019 (diolah)

4.2.3 Isu Regional

Isu regional memiliki potensi besar dalam mempengaruhi arah pembangunan Kota Bontang pada lima tahun mendatang, terutama apabila ada kebijakan dari pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Selain itu, penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota sekitar.

4.2.3.1 Telaah Perubahan RPJMD KALTIM 2019 - 2023

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih proses perubahan akibat adanya beberapa kondisi dan perubahan mendasar yang mengakibatkan sebagian asumsi tidak sesuai dan target pembangunan tidak akan tercapai. Beberapa kondisi dan perubahan dimaksud antara lain: perubahan kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, pandemi Covid-19 dan penanganan dampaknya, serta penurunan kapasitas pembiayaan pembangunan.

Visi RPJMD Tahun 2019 - 2023 adalah “**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**”, dengan misi sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 juga memuat janji politik Gubernur meliputi:

- (1) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
- (2) Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun (32.500 beasiswa dalam 5 tahun);
- (3) 250.000 penyerapan tenaga kerja;
- (4) Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
- (5) Pembangunan 500 Km jalan produksi;
- (6) Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
- (7) Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit;
- (8) Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan visi dan misi serta janji tersebut diterjemahkan dalam 7 Prioritas Pembangunan, yakni:

- 1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi;
- 3) Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan;
- 4) Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi;
- 5) Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi, dan daya dukung lingkungan hidup;
- 6) Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah; serta
- 7) Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemic Covid-19.

Prioritas pembangunan tersebut dijalankan melalui strategi dan arah kebijakan dengan fokus wilayah masing-masing, diantaranya berlokasi di Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Strategi dan Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
Peningkatatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan
	Pengembangan pusat pemasaran produk hasil perikanan
Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan masyarakat	Peningkatan upaya pengendalian banjir, peningkatan dan perluasan infrastruktur air bersih, peningkatan kualitas kawasan kumuh
Peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas
Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri petrokimia berbasis gas dan kondesat

Sumber: Ranwal Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Secara ringkas telaah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dan keterkaitannya dalam RPJMD Kota Bontang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9 Identifikasi Kebijakan Provinsi Tahun 2019 - 2023

Kebijakan Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023		Relevansi terhadap RPJMD
1.	8 Janji Politik Gubernur	Diperhatikan dalam perumusan permasalahan dan isu strategis
2.	7 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah	Diperhatikan dalam perumusan tujuan dan sasaran PJM Kota Bontang
3.	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur	Diperhatikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan PJM Kota Bontang

Sumber: Ranwal Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 (diolah)

4.2.3.2 Telaah RPJMD Kutai Kartanegara 2021 - 2026

Secara administratif, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kota Bontang di bagian selatan. Meskipun ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, jauh dari Kota Bontang, akan tetapi sebagian wilayahnya yang berbatasan dengan Kota Bontang memiliki interaksi yang erat dengan Kota Bontang, baik secara ekonomi maupun non ekonomi, sehingga banyak sektor yang dapat disinergikan antar kedua kabupaten/kota tersebut.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 masih dalam proses penyusunan pasca Pilkada serentak tahun 2020. Kepala Daerah yang terpilih mengusung slogan KUKAR IDAMAN dengan Visi **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”** dan 5 Misi sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan pelestarian kebudayaan
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat
3	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pada sektor terbaru	Menurunnya pengangguran di masyarakat
		Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah
		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah
		Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif
4	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah	Meningkatnya daya saing investasi daerah
		Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih
		Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah
5	Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

4.2.3.3 Telaah RPJMD Kutai Timur 2021 - 2026

Secara administratif, wilayah Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan Kota Bontang di bagian utara dan barat. Ibu kota Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, terletak tidak jauh dari Kota Bontang, memiliki interaksi yang sangat erat dengan Kota Bontang. Wilayah Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah penyangga Kota Bontang dalam pembangunan, baik secara ekonomi maupun non ekonomi, sehingga banyak sektor yang dapat disinergikan antar kedua kabupaten/kota tersebut.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 masih dalam proses penyusunan pasca Pilkada serentak tahun 2020. Kepala Daerah yang terpilih mengusung Visi “**Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**” dan 5 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata;
4. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi;
5. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrase pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran
1	Menata dan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudaya
	Menata dan meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
2	Menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan	Meningkatnya derajat kesehatan
		Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan
	Menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya pendapatan petani
3	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata	Meningkatnya kemampuan perekonomian di daerah
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		Meningkatnya infrastruktur fasilitas perumahan/permukiman
		Meningkatnya infrastruktur teknologi dan informasi
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
4	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata	Meningkatnya sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi
	Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasisi elektronik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
5	Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah
	Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal	Meningkatnya sinergisitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
	Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

4.2.4 Isu Lokal

Isu lokal merupakan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada sebelumnya dan hasil telaah terhadap kondisi daerah kekinian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

4.2.4.1 Telaah RPJPD BONTANG 2005 - 2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Bontang tahun 2005 - 2025 adalah **Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Mensejahterakan Masyarakat.** Kota Maritim adalah Kota Bontang sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis yang didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (*city icon*) bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi kelautan yaitu: jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman,

perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (*off-shore*) dan wilayah pesisir (*on-shore*). Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang. Berwawasan lingkungan adalah upaya sistemik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam melalui mekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan. Mensejahterakan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan jangka panjang Kota Bontang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Bontang yang berkebudayaan industri, berakhlak mulia dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang; serta
4. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi dan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non-migas.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021 - 2026 merupakan tahapan akhir dari RPJPD Kota Bontang sebagai Tahap Pemantapan yang ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang. Hasil tahapan ini ditandai dengan adanya struktur perekonomian yang berbasis ekonomi maritim Kota Bontang yang semakin mapan dan semakin menunjukkan ke arah tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, pelaksanaan pemerintahan dengan penegakkan hukum yang sangat baik, serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup.

Tabel 4.12 Hasil Telaah RPJPD Periode 2020 - 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Hasil Telaah
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan	Peningkatan kualitas SDM	SDM berdaya saing tinggi di atas rata-rata nasional	- Kualitas pelayanan kesehatan sangat baik - Peran perempuan & pemuda dalam	Diacu dalam perumusan indikator sasaran PJM Kota Bontang

berkelanjutan Kota Bontang sebagai kota maritim yang berkebudayaan industri & berwawasan lingkungan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 & Pancasila			pembangunan semakin mapan - Pemanfaatan hasil litbang & iptek sudah tinggi - Kualitas tenaga kerja mampu bersaing secara internasional - Wirausaha sangat mandiri - Angka pengangguran sangat kecil	
	Peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik	Kualitas pemerintahan yang efisien, efektif, transparan & akuntabel	- Proses perizinan lebih sederhana - SDM pemerintahan jenjang S2 & S3 meningkat - Penggunaan teknologi dalam pelayanan - Kelembagaan organisasi lebih sederhana	Diacu dalam perumusan indikator sasaran PJM Kota Bontang
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang & prasarana dasar	Pembangunan yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	- Penanganan sampah semakin baik - Pemanfaatan SDA terbaharukan secara adil & bertanggung jawab - Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana & prasarana pendukung - Tidak ada permukiman kumuh - Integrasi dengan tata ruang wilayah kota	Diacu dalam perumusan indikator sasaran PJM Kota Bontang
	Pembangunan struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas yang kuat	Pertumbuhan sektor industri non migas & sektor maritim semakin mantap dan stabil	- Jaringan kerja produksi, pemasaran, pengolahan lanjutan hasil perkebunan dan pertanian makin mantap - Kualitas produk perikanan meningkat - Potensi wisata kelautan dikembangkan secara intensif - Pelayanan jasa pelabuhan, pelayaran & jasa kelautan lainnya makin mantap - Kualitas infrastruktur & jaringan informasi perdagangan makin mantap - Keterkaitan industri migas, non migas & UKM makin berkembang - Iklim investasi makin kondusif - SDM industri migas berkualitas	Diacu dalam perumusan indikator sasaran PJM Kota Bontang

4.2.4.2 Telaah RTRW BONTANG 2019 - 2039

Dengan mempertimbangkan visi dan misi RPJPD Kota Bontang Tahun 2005 - 2025 maka tujuan penataan ruang dalam RTRW Kota Bontang 2019 - 2039 adalah untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota Maritim berkebudayaan industri yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah nasional, provinsi maupun kota dan antar kawasan peruntukan lindung maupun peruntukan budi daya sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang,

Dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039 terdapat 12 (dua belas) isu strategis yang harus lebih diintensifkan dalam penataan ruang dan pemanfaatan lahan sebagai berikut:

1. *Rencana Pembangunan Kilang Minyak*

Rencana pembangunan kilang minyak merupakan kebijakan nasional yang menjadi Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan kebutuhan lahan paling sedikit 800 (delapan ratus) hektar.

2. *Reklamasi Pantai*

Seiring dengan perkembangan Kota Bontang, kebutuhan lahan di beberapa area terutama yang berbatasan dengan laut untuk kebutuhan industri semakin meningkat. Kebutuhan ini mendorong perlu dilakukannya reklamasi pada beberapa wilayah di Kota Bontang. Setidaknya terdapat 3 (tiga) lokasi rencana reklamasi, yaitu di lokasi rencana kilang minyak seluas ± 93,55 hektar, lokasi rencana kawasan peruntukan industri Bontang Lestari seluas ± 45,05 hektar, dan lokasi rencana perluasan TPI/PPI seluas ± 1,64 hektar.

3. *Perubahan Kawasan Hutan*

- a) *Hutan Lindung Bontang*

Penyesuaian batas HL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sungai Santan - Sungai Separi - Sungai Benasar Besar - Sungai Banumuda seluas 402.987,70 Hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan tersebut

terdapat Hutan Produksi Konversi seluas 62,07 hektar dan Hutan Lindung Bontang seluas 4.609,08 hektar.

b) Taman Nasional Kutai

Penyesuaian batas TNK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4194/Menhut-VII/KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Kutai seluas 192.709,55 hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Taman Nasional Kutai sekitar 648,15 hektar di dalam wilayah Kota Bontang.

4. *Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari dan Pelabuhan Kawasan Peruntukan Industri*

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan kawasan peruntukan industri baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Kawasan peruntukan industri tersebut perlu dikembangkan dan disinkronisasi dengan rencana pengembangan pelabuhan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan tersebut.

5. *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*

Pemerintah Kota Bontang sudah mendelineasi LP2B dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039 sekaligus melakukan koreksi terhadap kawasan pertanian dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya dengan menggunakan data area pertanian eksisting dan disesuaikan dengan arahan pengembangan perkotaan.

6. *Pembatasan pembangunan permukiman di atas laut*

Sepanjang pesisir Kota Bontang terdapat berbagai macam aktivitas sosial ekonomi, salah satunya berupa permukiman masyarakat yang umumnya belum terintegrasi baik dengan prasarana, sarana dan utilitas kota sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi, sehingga perlu pembatasan pembangunan permukiman di atas air sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arah pengembangan perkotaan.

7. *Penyesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan paling sedikit 20% merupakan RTH publik. Perkembangan Kota Bontang yang semakin pesat menuntut terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dari semula RTH menjadi Kawasan Budidaya atau sebaliknya sehingga dilakukan penyesuaian

terhadap lokasi dan luas RTH di Kota Bontang dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, memperhitungkan kebutuhan luas minimum RTH, serta menyesuaikan distribusi spasial dengan struktur, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau tersebut.

8. *Sinkronisasi dengan Masterplan Kawasan Industri*

Sebagai salah satu perusahaan industri dan pengelola kawasan industri yang menempati wilayah cukup luas di Kota Bontang, perkembangan guna lahan pada area milik PT Pupuk Kaltim dan PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) menentukan pola pemanfaatan ruang dan lahan dalam RTRW Kota Bontang secara umum.

9. *Jalan Lingkar (Coastal Road)*

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan jalan lingkar yang akan menghubungkan dari Kelurahan Lok Tuan di Kecamatan Bontang Utara menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah di Kecamatan Bontang Selatan, berpotensi mengubah penggunaan lahan di sepanjang ruas jalan tersebut dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039.

10. *Jalur bebas hambatan dan jalur kereta api*

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana pembangunan jalan bebas hambatan dari Kota Balikpapan menuju Kota Sangatta melalui Kota Bontang, dan rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan yang melalui Kota Bontang dilengkapi dengan fasilitas stasiun sedang.

11. *Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional*

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana pembangunan jaringan transmisi air baku air minum dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dalam kerangka SPAM Regional.

Selain itu terdapat perencanaan pembangunan Bendung Estuary di Kelurahan Bontang Lestari untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum dari air permukaan di Kota Bontang secara umum, dan untuk kawasan industri secara khusus.

12. *Penanggulangan banjir*

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana perluasan Danau Kanaan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bontang. Selain itu, berdasarkan Studi Penanggulangan Banjir Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan polder di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai dan

Kelurahan Tanjung Laut sebagai salah satu rencana penanggulangan banjir di Kota Bontang.

Selain menjadi pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 juga menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, terutama memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan, serta mengarahkan aspek spasial atau lokasi/letak/posisi dari program pembangunan sektoral dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang.

Adapun kebijakan dan strategi tata ruang yang menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan, beserta indikasi program tata ruang yang menjadi arahan lokasi/letak/posisi dari program pembangunan dalam RPJMD 2021 - 2026 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 13 Telaah Program RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039

Program Utama RTRW		Indikasi Program Pembangunan RPJMD	Perangkat Daerah	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Membagi dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah kota sesuai karakteristik dan potensi wilayah dengan tetap memperhatikan keseimbangan wilayah								
1.	Pengembangan pusat pelayanan kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR	Bontang Lestari					
2.	Pengembangan sub pusat pelayanan kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR	Kota Bontang					
3.	Pengembangan pusat lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA	DPUPR	Semua kelurahan					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR						
	Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan maupun dengan wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan								
4.	Pengembangan rute/trayek angkutan umum yang melayani antar pusat-pusat pelayanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB	Semua kelurahan					
	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara dengan mengintegrasikan pelayanan inter dan antar moda								
5.	Pengembangan sistem jaringan transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR	Semua kelurahan					
	Mengembangkan jaringan telekomunikasi yang melayani seluruh wilayah kota								
6.	Pengembangan jaringan bergerak	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO	Semua kelurahan					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR						
	Mengembangkan jaringan sumberdaya air untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku								
7.	Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN	DPUPR	Guntung, G.Telihan, Kanaan					

Program Utama RTRW		Indikasi Program Pembangunan RPJMD	Perangkat Daerah	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	lintas kabupaten/kota	SUMBER DAYA AIR (SDA)							
8.	Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR	Bontang Lestari, Kanaan, G.Elai, Tj.Laut, Bontang Kuala					
Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengolahan persampahan kota, jaringan evakuasi bencana, jaringan drainase, jaringan pejalan kaki, dan jalur sepeda									
9.	Pengembangan sistem penyediaan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR	Kanaan					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR	Semua kelurahan					
10	Pengembangan sistem pengolahan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR	Semua kelurahan					
11	Pengembangan sistem jaringan persampahan kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	Semua kelurahan					
12	Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Semua kelurahan					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB						
13	Pengembangan sistem jaringan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR	Semua kelurahan					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR						
14	Pengembangan sistem jaringan pejalan kaki	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR	Semua kelurahan					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB						
15	Pengembangan jalur sepeda	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DSIHUB	JAS, JKP, JKS					
Menetapkan kawasan peruntukan lindung di ruang darat dan ruang laut									
16	Perlindungan kawasan perlindungan setempat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR	Loktuan, G.Elai, Bontang Baru, Bontang Kuala, Guntung, Tj. Laut Indah, Bontang					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH						

Program Utama RTRW		Indikasi Program Pembangunan RPJMD	Perangkat Daerah	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Lestari, G.Telihan, Kanaan, Satimpo, Api-Api					
17	Perlindungan kawasan ekosistem mangrove	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR	Guntung, Loktuan, G.Elai, Bontang Baru, Bontang Kuala, Tj. Laut Indah, Berbas Pantai, Satimpo, Bontang Lestari					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Mengembangkan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah								
18	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Semua kelurahan					
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERKIMTAH						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
		19	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Privat		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERKIMTAH	Semua kelurahan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR								
Mengembangkan kegiatan budi daya berbasis kelautan (maritim) yang memiliki keterkaitan dengan sumber daya wilayah darat dan daerah sekitar Kota Bontang									
20	Pengembangan kawasan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DKP3	Bontang Kuala, Tj. Laut Indah					
21	Pengembangan kawasan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPOPAPAR	Semua kelurahan					

Program Utama RTRW		Indikasi Program Pembangunan RPJMD	Perangkat Daerah	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Kota Bontang					
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Nasional					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR	Kota Bontang					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KUKMDAG	Kota Bontang					
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	Mengakomodasi kebutuhan kegiatan sektoral dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Bontang secara sinergi dan berkelanjutan								
22	Perindungan kawasan pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKP3	Bontang Lestari					
23	Pengembangan kawasan perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERKIMTAH	Semua kelurahan					
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
24	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KUKMDAG	Tj. Laut Indah, Loktuan, G.Telihan					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR	Semua kelurahan					
25	Pengembangan kawasan perkantoran	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR	Semua kelurahan					
26	Pengembangan kawasan peribadatan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR	G.Elai					
27	Pengembangan kawasan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIKBUD	Semua kelurahan					
28	Pengembangan kawasan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	Semua kelurahan					
29	Pengembangan kawasan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DISPOPAPR	Loktuan, Belimbing, Kanaan, Api-Api, Satimpo, Bontang Lestari					
30	Pengembangan kawasan transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB	Bontang Lestari					

Program Utama RTRW		Indikasi Program Pembangunan RPJMD	Perangkat Daerah	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
31	Pengembangan kawasan sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR	Kota Bontang					
32	Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISDIKBUD	Guntung					
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DISPOPAPR	Bontang Baru					
33	Pengembangan kawasan persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	Bontang Lestari					
Meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru									
34	Pengembangan Kawasan Industri Bontang	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS KUKMDAG	Bontang Lestari					
Menetapkan kawasan perlindungan kerusakan air tanah									
35	Penetapan Kawasan Perlindungan Kerusakan Air Tanah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	G.Elai, G.Telihan, Kanaan, Satimpo					
Mengurangi dan memulihkan kerusakan air tanah dalam kawasan perlindungan kerusakan air tanah									
36	Pengendalian Kawasan Perlindungan Kerusakan Air Tanah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	G.Elai, G.Telihan, Kanaan, Satimpo					
Mengembangkan kegiatan budi daya yang adaptif dan meminimalkan potensi dampak akibat bencana banjir									
37	Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR	G.Elai, G.Telihan, Kanaan, Satimpo, Api-Api, Bontang Kuala					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							

Keterangan:

 dilaksanakan

Sumber: Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 (diolah)

4.2.4.3 Telaah KLHS RPJMD

KLHS RPJMD bertujuan agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah dengan berbasis pada analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari kondisi capaian TPB per pilar tersebut dapat dirumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Isu Strategis TPB Kota Bontang

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis
Sosial	1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Masih terdapat masyarakat Kota Bontang yang hidup di bawah garis kemiskinan
	2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Bahan Pangan tergantung pasokan dari luar kota Bontang
	3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Perlu peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan pekerja
	4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM belum optimal dan perlu peningkatan prasarana dan sarana kegiatan pembelajaran
	5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan gender di dalam berbagai aktivitas sosial politik
Ekonomi	7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Masih tingginya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi dengan sumber bahan energi yang tidak terbarukan
	8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami PHK, terpuruknya bidang pekerjaan sektor informal selama pandemi COVID-19
	9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Masih diperlukan peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah dan kualitas produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil
	10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Masih terdapat kesenjangan ekonomi jika dilihat dari rasio Gini Kota Bontang
	17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Masih diperlukan peningkatan kerjasama antar pihak di dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan
Lingkungan	6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua	Masih terdapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih, masih terbatasnya kapasitas prasarana dan sarana pemenuhan air baku, DDDTLH air sudah terlampaui.
	11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Masih terdapat pemukiman kumuh dan masi terjadi banjir.
	12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Masih tingginya timbulan sampah domestik warga
	13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Masih perlu peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan.
	14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	Bukan kewenangan
	15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,	Masih ada aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan DDDTLH Kota Bontang

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis
		mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	
Hukum dan Tata Kelola	16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Masih diperlukan peningkatan prasarana dan sarana untuk penegakan hukum dan peningkatan SDM staf pemerintah

Sumber: DLH Kota Bontang, 2021

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator TPB terdapat 60 indikator yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional, dan 15 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Terhadap 60 indikator tersebut, hanya ada 36 indikator yang dirasa sangat penting untuk diintervensi pencapaiannya agar setara dengan target capaian TPB Nasional pada tahun 2030. Setelah dilakukan analisis faktor pembatas lingkungan terhadap intervensi upaya tambahan tersebut, diperoleh 11 indikator TPB yang perlu penyesuaian upaya tambahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 4. 15 Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Bontang

TPB	Pilar	Indikator	DDDT-LH	Upaya Tambahan	Instansi
1	Sosial	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	-	DISNAKER
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	- Air - Ruang hidup - Iklim - Tata air & banjir	- Penanganan pengurangan luas hutan di hulu DAS - Mewajibkan semua pemilik bangunan membuat sumur resapan - Menambah RTH dan Hutan Kota	DPUPR
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	-	-	DISDIK
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	- Pangan - Air - Pencegahan bencana	- Menambah & meningkatkan kualitas personil BPBD	BPBD
2	Sosial	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	- Pangan - Air - Serat - Tanah - Siklus hara - Biomassa - Iklim - Tata air & banjir - Pencegahan bencana - Pemurnian air - Penguraian limbah - Penyerbukan alami - Pengendalian hama	- Pemanfaatan lahan pertanian lokal secara optimal - Penganekaragaman bahan pangan lokal - Penganekaragaman produk olahan ikan	DINKES

TPB	Pilar	Indikator	DDDT-LH	Upaya Tambahan	Instansi
3	Sosial	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	- Ruang hidup - Pencegahan bencana	- Program rumah sehat dan layak huni bagi penduduk miskin - Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	DINKES
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	-	-	DINKES
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	-	-	DINKES
		Total Fertility Rate (TFR).	-	-	DP2KB
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	-	-	DINKES
4	Sosial	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	-	-	DISDIK
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	-	-	DISDIK
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/MI/ sederajat; perempuan/laki- laki di (1) SD/MI/ sederajat	-	-	DISDIK
		Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	-	-	DISDIK
5	Sosial	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	-	-	DP2KB
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	-	-	DP2KB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	-	-	DP2KB
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	-	-	DP2KB
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	-	-	DP2KB
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	-	-	DP2KB
6	Lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	- Air - Ruang hidup - Iklim - Tata air & banjir - Pencegahan bencana - Pemurnian air	- Penanganan pengurangan luas hutan di hulu DAS - Meningkatkan kapasitas produksi air minum - Memperluas jaringan distribusi air minum	DPUPR
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	- Air - Ruang hidup - Iklim - Tata air & banjir - Pencegahan bencana - Pemurnian air	- Penanganan pengurangan luas hutan di hulu DAS - Meningkatkan kapasitas produksi air minum - Memperluas jaringan distribusi air minum	DPUPR
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci	- Air - Ruang hidup - Iklim	- Memperluas jaringan distribusi air minum	DINKES

TPB	Pilar	Indikator	DDDT-LH	Upaya Tambahan	Instansi
		tangan dengan sabun dan air	- Tata air & banjir - Pencegahan bencana - Pemurnian air	- Program bantuan fasilitas bagi penduduk miskin	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	- Air - Ruang hidup - Iklim - Tata air & banjir - Pencegahan bencana - Pemurnian air	- Program bantuan fasilitas bagi penduduk miskin	DPUPR
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	- Ruang hidup - Penguraian limbah	- Pengadaan armada layanan pengelolaan lumpur tinja - Pengadaan instalasi pengolah lumpur tinja terpadu bagi masyarakat miskin dan pemukiman padat	DPUPR
8	Ekonomi	PDB per kapita	-	-	BPS
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	-	-	DISPOPAPAR
		Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	-	-	BI
9	Ekonomi	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	-	-	DINAS KUKMDAG
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	-	-	DINAS KUKMDAG
10	Ekonomi	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	-	-	DSMP
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	-	DISNAKER
11	Lingkungan	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	- Pangan - Air - Serat - Energi - Tata air & banjir - Pencegahan bencana	- Menambah & meningkatkan kualitas personil BPBD	BPBD
13	Lingkungan	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	- Pangan - Air - Serat - Energi - Tata air & banjir - Pencegahan bencana	- Menambah & meningkatkan kualitas personil BPBD	BPBD
16	Hukum dan Tata Kelola	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	-	DP2KB
17	Ekonomi	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	-	-	BAPENDA

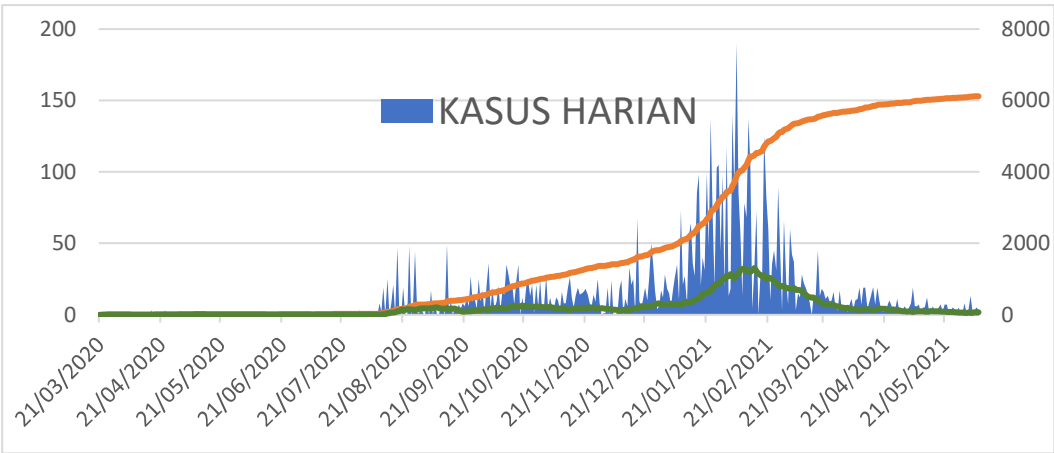
Sumber: DLH Kota Bontang, 2021 (diolah)

4.2.4.4 Pandemi COVID-19

COVID-19 merupakan virus baru yang belum diketahui penanganannya secara medis dan memiliki kecepatan penularan yang tinggi dan berakibat pada kematian yang terjadi pada hampir seluruh negara di

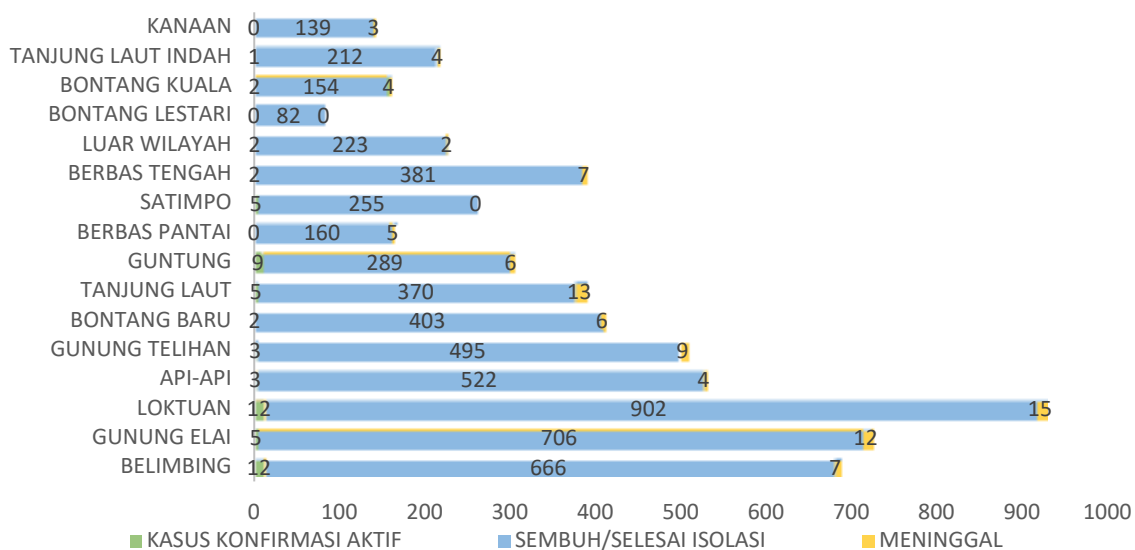
dunia. Dunia medis, pemerintah, dan masyarakat umumnya memiliki kekhawatiran yang sama, yakni ketidakmampuan dalam menangani kasus COVID-19 yang terus meningkat, sementara sarana prasarana medis terbatas. Pengaruh COVID-19 tentunya juga dialami oleh pemerintah di tingkat daerah, termasuk Kota Bontang.

Kejadian COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Bontang pada 24 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah. Sampai dengan Mei 2021, tercatat sebanyak 6.087 kasus positif COVID-19 dengan total kematian mencapai 97 kasus. Tingkat penambahan kasus tercatat rendah di bulan Maret hingga Juli 2020 dan meningkat secara signifikan dari 6 kasus menjadi 262 kasus di bulan Agustus 2020. Penambahan kasus secara signifikan juga terjadi di bulan Januari 2021 yang melonjak dari 502 menjadi 1.572 kasus. Sedangkan kasus konfirmasi positif harian terbanyak terjadi pada tanggal 5 Februari 2021 yaitu sebanyak 190 kasus. Jika dilihat dari sebaran per kelurahan, kasus konfirmasi positif dan kasus kematian terbanyak terjadi di Kelurahan Loktuan, sebanyak 12 kasus aktif, 902 kasus sembuh/selesai isolasi dan 15 kasus meninggal dunia. Jumlah konfirmasi harian tercatat menurun secara signifikan mulai bulan Maret 2021 hingga akhir Mei 2021. Hal ini dipicu oleh keberhasilan kebijakan pemerintah Kota Bontang dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, vaksinasi dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2020-2021

Gambar 4. 10Jumlah Kasus Positif COVID di Kota Bontang, Periode Maret 2020- Mei 2021

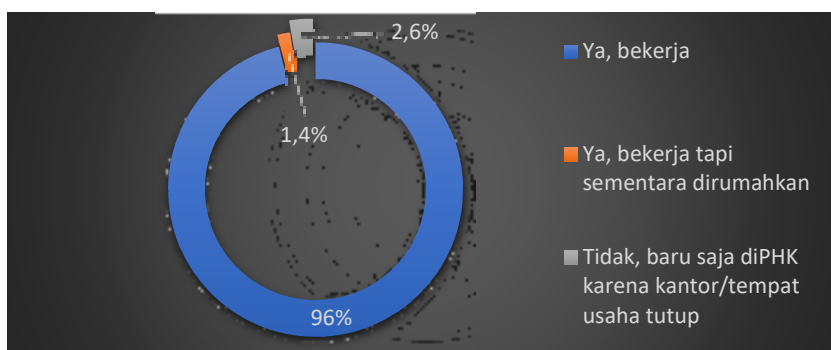


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2020-2021

Gambar 4. 11 Jumlah Kasus Positif COVID di Kota Bontang per Kelurahan

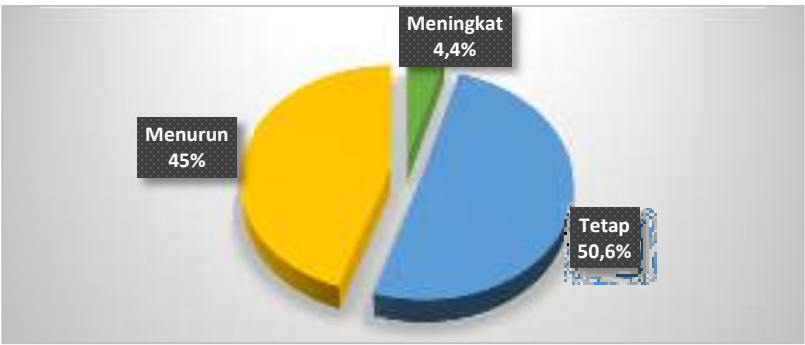
Berdasarkan hasil kajian Universitas Mulawarman (Bapelitbang Kota Bontang, 2021) dapat diidentifikasi beberapa dampak COVID-19 terhadap perekonomian Kota Bontang, antara lain:

1. Status pekerjaan penduduk Kota Bontang sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa 96% penduduk masih tetap bekerja, 1,4% penduduk sementara dirumahkan, dan mencapai 2,6% penduduk sudah tidak bekerja lagi karena di-PHK akibat usaha tutup karena dampak pandemi.



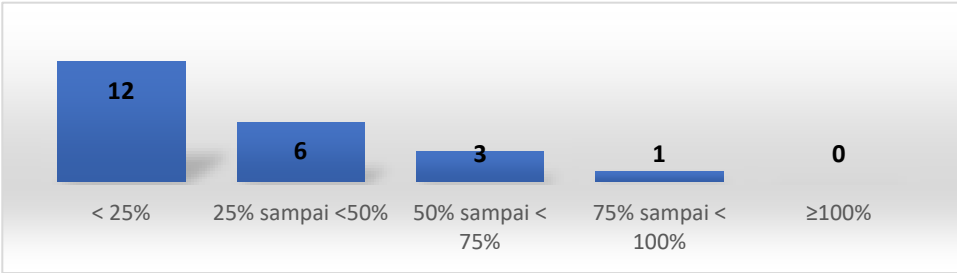
Gambar 4. 12 Status Pekerjaan Penduduk Kota Bontang

2. Dampak terhadap pendapatan penduduk Kota Bontang sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa 50,6% penduduk memiliki pendapatan tetap, 45% penduduk mengalami penurunan pendapatan, dan hanya 4,4% penduduk yang meningkat pendapatannya selama pandemi.



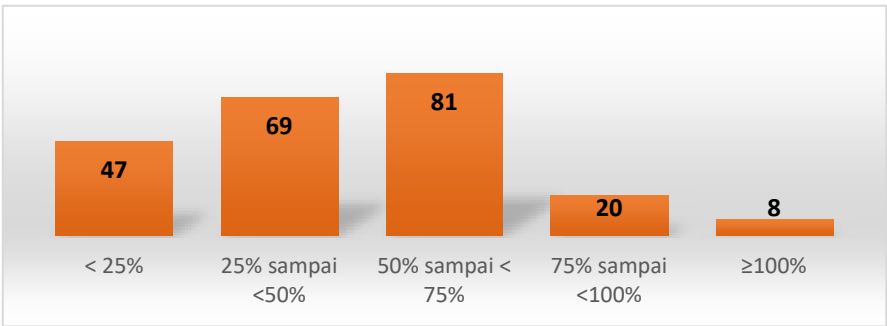
Gambar 4. 13 Dampak Pendapatan Penduduk Kota Bontang

3. Volume peningkatan pendapatan penduduk Kota Bontang sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang mengalami kenaikan pendapatan selama pandemi hanya meningkat kurang dari 25% dan tidak ada yang meningkat lebih dari 100% dibandingkan pendapatan sebelum pandemi.



Gambar 4. 14 Kenaikan Pendapatan Penduduk Kota Bontang

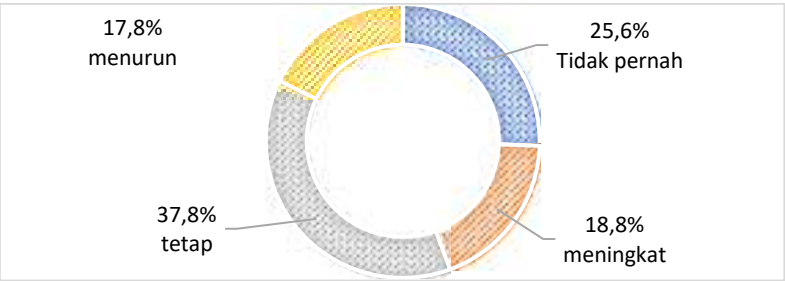
4. Volume penurunan pendapatan penduduk Kota Bontang sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi hanya berkurang di bawah 75% dan hanya sebagian kecil yang berkurang lebih dari 75% dibandingkan pendapatan sebelum pandemi.



Gambar 4. 15 Penurunan Pendapatan Penduduk Kota Bontang

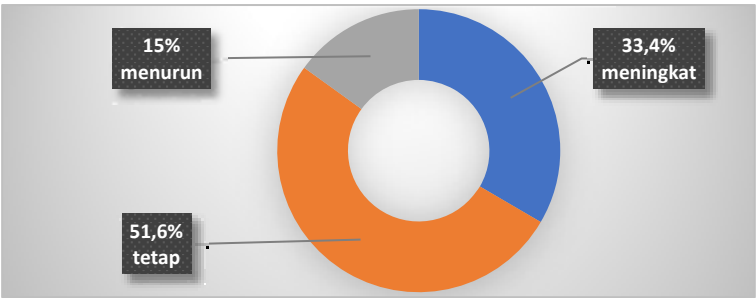
5. Aktivitas belanja online penduduk Kota Bontang sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa 37,8% penduduk beraktivitas belanja online secara normal atau tidak berubah

selama pandemi, 18,8% penduduk mengalami peningkatan aktivitas belanja online, dan 17,8% penduduk mengalami penurunan aktivitas belanja online. Akan tetapi masih terdapat cukup besar penduduk Kota Bontang yang tidak pernah beraktivitas belanja online selama pandemi, yakni sebesar 25,6%.



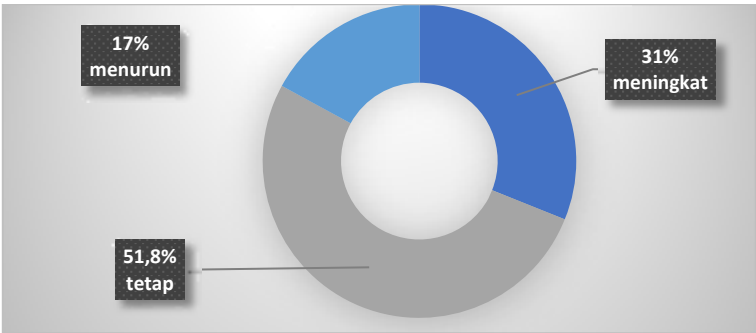
Gambar 4. 16 Aktivitas Belanja Online Penduduk Kota Bontang

6. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk bahan makanan sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebesar 51,6% tetap (normal), 15% menurun, dan mencapai 33,4% meningkat selama pandemi.



Gambar 4. 17 Perubahan Pengeluaran Bahan Makanan Penduduk Kota Bontang

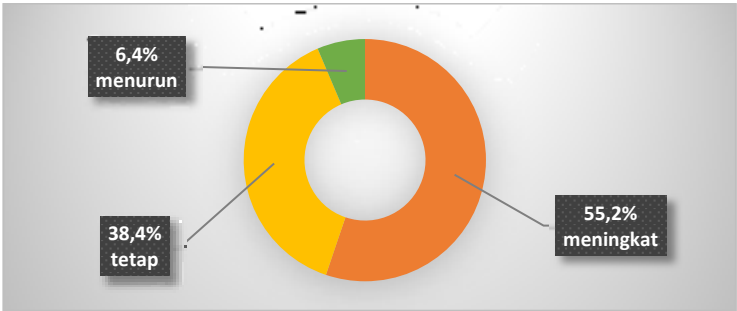
7. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk makanan dan minuman jadi sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebesar 51,8% tetap (normal), 17% menurun, dan mencapai 31% meningkat selama pandemi.



Gambar 4. 18 Perubahan Pengeluaran Makanan/Minuman Jadi Penduduk Kota Bontang

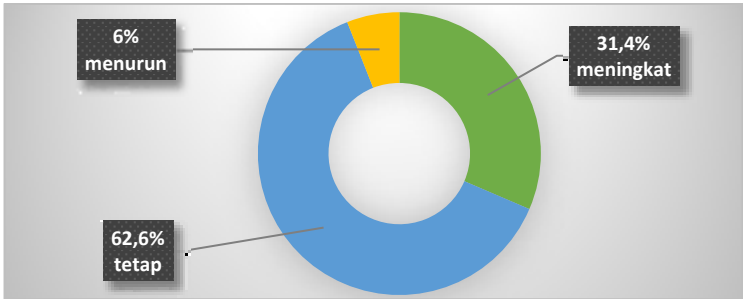
8. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk kesehatan sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa

sebesar 38,4% tetap (normal), 6,4% menurun, dan mencapai 55,2% meningkat selama pandemi.



Gambar 4. 19 Perubahan Pengeluaran Kesehatan Penduduk Kota Bontang

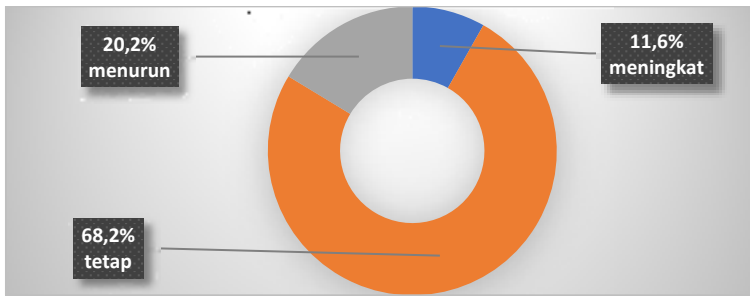
9. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk listrik sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebesar 62,6% tetap (normal), sebesar 6% menurun, dan mencapai 31,4% meningkat selama pandemi.



Gambar 4.21

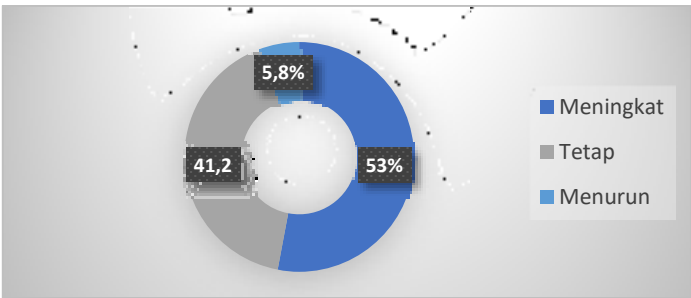
Gambar 4. 20 Perubahan Pengeluaran Listrik Penduduk Kota Bontang

10. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk bahan bakar minyak (BBM) sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebesar 68,2% tetap (normal), sebesar 20,2% menurun, dan 11,6% meningkat selama pandemi.



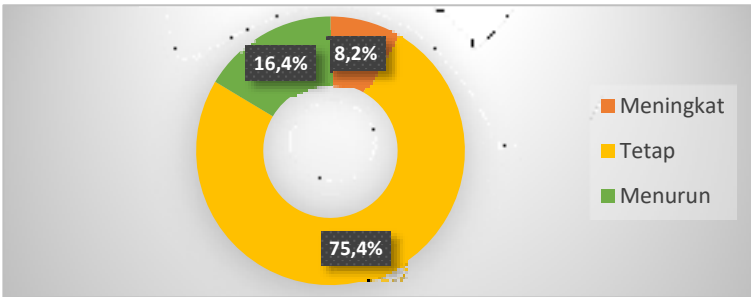
Gambar 4. 21 Perubahan Pengeluaran BBM Penduduk Kota Bontang

11. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk pulsa/paket data telekomunikasi sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebesar 68,2% tetap (normal), sebesar 20,2% menurun, dan 11,6% meningkat selama pandemi.



Gambar 4. 22 Perubahan Pengeluaran Telekomunikasi Penduduk Kota Bontang

12. Pengeluaran penduduk Kota Bontang untuk transportasi umum sejak awal COVID-19 (tahun 2020) sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar 75,4% tetap (normal), sebesar 16,4% menurun, dan hanya 8,2% meningkat selama pandemi.



Gambar 4. 23 Perubahan Pengeluaran Transportasi Umum Penduduk Kota Bontang

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kajian Universitas Mulawarman (Bapelitbang Kota Bontang, 2021) tersebut dalam mengatasi dampak ekonomi akibat COVID-19, antara lain:

1. Ditengah pandemi COVID-19, peran swasta dalam menstimulus ekonomi khususnya di Kota Bontang menjadi sangat terbatas, sehingga Pemerintah Kota Bontang perlu memaksimalkan perannya dalam menstimulus perekonomian melalui kebijakan anggaran, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
2. Skema Jaring Pengaman Sosial baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:
 - a) Bantuan langsung tunai kepada para karyawan swasta yang terkena PHK atau dirumahkan;
 - b) Bantuan langsung tunai keluarga buruh, petani dan nelayan yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c) Bantuan lansia sebesar 200juta untuk 250 jiwa lansia;
 - d) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 4.484 jiwa;
 - e) Program Keluarga Harapan (PKH) 2.356 jiwa; dan

- f) Program Keluarga Harapan (PMKS) 642 jiwa (bansos disabilitas) sebesar 41juta.
- 3. Skema kebijakan ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang, antara lain:
 - a) Bantuan modal kerja bagi pedagang;
 - b) Bantuan paket sembako dan pasar murah;
 - c) Bantuan langsung tunai bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil); dan
 - d) Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada UKM dalam menyongsong era ekonomi digital.
- 4. Pemerintah dan masyarakat sama-sama bersinergi mengendalikan pandemi COVID-19, seperti menjaga dan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dan vaksinasi massal.
- 5. Inkubator bisnis dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk pengembangan UMKM.
- 6. Melakukan survey lanjutan terhadap sektor-sektor yang terdampak.
- 7. Prioritas program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa:
 - a) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - b) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); dan
 - c) Program Pengembangan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
 - d)

4.2.5 Penetapan Isu Strategis Kota Bontang

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan Kota Bontang dan hasil telaah isu-isu, baik internasional, nasional, regional Provinsi Kalimantan Timur, maupun lokal Kota Bontang, dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Kriteria dan Bobot Identifikasi Isu Strategis

KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS		BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran 20 pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10

5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Janji politik kepala daerah	25

Sumber: Hasil analisis

Adapun hasil penentuan isu strategis berdasarkan kriteria tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Identifikasi Isu Strategis

TINGKAT	ISU PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL NILAI
		1	2	3	4	5	6	
Internasional	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030							
	1. Mengakhiri kemiskinan di dalam segala bentuk dimanapun	20	10	20	5	5	25	85
	2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik, meningkatkan pertanian berkelanjutan	20	10	20	5	5	20	80
	3. Menjamin kehidupan yg sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	20	10	20	5	5	25	85
	4. Menjamin kualitas pendidikan yg inklusif dan merata seta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	20	10	20	5	10	25	90
	5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	20	10	10	5	10	5	60
	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yg berkelanjutan untuk semua	20	10	20	5	10	25	90
	7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	20	5	20	10	10	0	65
	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yg layak untuk semua	20	10	20	10	5	25	90
	9. Membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	20	10	20	10	10	20	90
	10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	20	10	20	5	10	25	90
	11. Menjadikan Kota dan Permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	20	10	20	10	5	25	90
	12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	20	10	20	5	5	15	75
	13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	20	10	20	5	5	5	65
	14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	20	0	20	5	5	10	60
	15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan	20	5	20	5	5	20	75
	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	20	10	5	5	15	20	75
	17. Memperkuat sarana, pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	20	0	5	5	5	5	40
	Pandemi Covid 19	20	10	20	10	10	10	80
Nasional	7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 :							
	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	20	10	20	10	5	25	90
	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	20	10	20	10	5	15	80
	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	20	10	20	10	5	25	90
	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	20	5	10	5	5	20	65
	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	20	10	20	10	10	25	95
	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	20	10	20	10	5	25	90
	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	20	10	20	10	10	15	85
	5 Strategi Pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024 :							
	1. Peningkatan pelayanan dasar	20	10	20	10	10	25	95
	2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah	20	5	20	10	10	5	70
	3. Pelaksanaan otonomi daerah	20	10	20	10	10	0	70
	4. Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan	20	10	20	10	10	25	95

TINGKAT	ISU PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL NILAI
		1	2	3	4	5	6	
	5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	20	10	20	10	10	25	95
	Major Project (PSN) 2020-2024 :							
	1. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur	20	0	20	10	5	0	55
	2. Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak Bontang	20	5	20	10	5	0	60
	3. Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan	20	0	10	5	5	0	40
	Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024	20	10	10	5	15	25	85
	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel							
	2. Birokrasi yang kapabel							
	3. Pelayanan publik yang prima							
Regional	8 Janji Politik Gubernur Kaltim 2019-2023 :							
	1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan	0	10	5	5	15	25	60
	2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun (32.500 beasiswa dalam 5 tahun)	0	10	5	5	15	25	60
	3. 250.000 penyerapan tenaga kerja	0	10	20	10	5	25	70
	4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian	20	5	15	5	15	0	60
	5. Pembangunan 500 Km jalan produksi	0	0	15	5	15	0	35
	6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha	0	5	10	5	5	0	25
	7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit	20	10	15	5	5	25	80
	8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	10	10	10	10	0	40
	7 Prioritas Pembangunan Prov Kaltim 2019-2023 :							
	1.Peningkatan daya saing sumber daya manusia	20	10	20	10	10	25	95
	2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi	20	0	15	5	10	0	50
	3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan	20	10	20	10	10	25	95
	4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi	20	5	20	10	10	15	80
	5. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi, dan daya dukung lingkungan hidup	20	10	20	10	5	25	90
	6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah	20	10	10	5	15	25	85
	7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemic Covid-19	20	10	20	10	10	10	80
	17 Strategi Pembangunan Prov. Kaltim 2019-2023 :							
	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	20	10	20	10	15	25	100
	2. Peningkatan daya saing generasi muda	20	10	10	5	10	25	80
	3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	20	10	20	10	15	25	100
	4. Optimalisasi pengarusutamaan gender	20	10	15	5	10	0	60
	5. Perluasan kesempatan kerja	20	10	20	10	5	25	90
	6. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	0	10	10	10	10	0	40
	7. Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	20	5	20	10	5	5	65
	8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	20	10	15	5	10	15	75
	9. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	20	5	20	10	10	25	90
	10. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	20	10	20	10	10	25	95
	11. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	0	10	20	10	10	25	75
	12. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	20	10	20	5	10	25	90
	13. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	20	10	15	5	5	25	80
	14. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	20	10	20	10	10	0	70
	15. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	20	10	20	5	5	20	80
	16. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	20	10	20	5	5	20	80
	17. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	20	0	20	10	10	15	75
	4 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kota Bontang 2005-2025 :							
Lokal								

TINGKAT	ISU PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL NILAI
		1	2	3	4	5	6	
	1. Peningkatan kualitas SDM	20	10	20	10	10	25	95
	2. Peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik	20	10	20	5	10	25	90
	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang & prasarana dasar	20	10	20	10	10	25	95
	4. Pembangunan struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas yang kuat	20	5	20	10	10	25	90
	12 Isu Strategis Penataan Ruang 2019-2039 :							
	1. Rencana pembangunan kilang minyak	20	5	20	10	10	0	65
	2. Reklamasi pantai	0	0	10	5	10	0	25
	3. Perubahan kawasan hutan (Hutan Lindung Bontang dan Taman Nasional Kutai)	5	0	5	5	15	0	30
	4. Kawasan peruntukan industri Bontang Lestari dan Pelabuhan kawasan peruntukan industri	15	5	20	10	10	0	60
	5. Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	20	10	10	5	10	0	55
	6. Pembatasan pembangunan permukiman di atas laut	0	10	10	0	10	0	30
	7. Penyesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5	10	15	0	10	25	65
	8. Sinkronisasi Masterplan Kawasan industri	15	5	20	10	15	0	65
	9. Pembangunan jalan lingkar pesisir	5	10	20	10	5	25	75
	10. Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalur keret api	20	5	20	10	5	0	60
	11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional	20	5	20	10	5	10	70
	12. Penanggulangan banjir	10	10	20	5	5	25	75
	6 Kebijakan Tata Ruang Bontang 2019-2039 :							
	1. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah kota secara hierarkis dan proporsional	15	10	15	5	15	0	60
	2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu	15	10	20	10	5	20	80
	3. Pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung	15	10	20	5	10	10	70
	4. Peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya	15	5	20	10	10	10	70
	5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan perekonomian kota yang produktif dan kompetitif	10	5	20	10	5	0	50
	6. Pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana	10	5	20	5	5	0	45
	Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026 :							
	<u>Pilar Ekonomi</u>							
	1. Masih tingginya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi dengan sumber bahan energy yang tidak terbarukan	20	0	15	10	5	0	50
	2. Masih terdapat penduduk yg belum memiliki pekerjaan dan mengalami PHK, terpuruknya bidang pekerjaan sector informal selama pandemic COVID-19	20	10	20	10	10	10	80
	3. Masih diperlukan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah dan kualitas produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil	20	5	20	10	10	25	90
	4. Masih terdapat kesenjangan ekonomi jika dilihat dari rasio Gini Kota Bontang	20	5	20	10	5	15	75
	5. Masih diperlukan peningkatan kerjasama antar pihak di dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan	5	5	5	0	5	0	20
	<u>Pilar Hukum dan Tata Kelola</u>							
	1. Masih diperlukan peningkatan prasarana dan sarana untuk peningkatan hukum dan peningkatan SDM staf pemerintahan	20	5	20	5	10	15	75
	<u>Pilar Lingkungan</u>							
	1. Masih terdapat warga kota yg belum memperoleh layanan air bersih, terbatasnya kapasitas prasarana dan sarana pemenuhan air baku, DDDTLH air sudah terlampaui	20	10	20	5	10	25	90
	2. Masih terdapat pemukiman kumuh dan masih terjadi banjir	20	10	20	5	5	25	85
	3. Masih tingginya timbunan sampah domestik warga	20	10	20	5	10	20	85
	4. Masih perlu peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan	20	10	20	5	5	10	70
	5. Masih ada aktivitas pembangunan yg tidak mempertimbangkan DDDTLH Kota Bontang	10	5	20	5	10	0	50

TINGKAT	ISU PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL NILAI
		1	2	3	4	5	6	
	<u>Pilar Sosial</u>							
	1. Masih terdapat masyarakat Kota Bontang yg hidup di bawah garis kemiskinan	20	10	20	5	5	25	85
	2. Bahan pangan tergantung pasokan dari luar kota Bontang	20	10	10	5	5	0	50
	3. Perlu peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan pekerja	20	10	15	5	10	25	85
	4. Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM belum optimal dan perlu peningkatan prasarana dan sarana kegiatan pembelajaran	20	10	15	5	10	25	85
	5. Belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan gender di dalam berbagai aktivitas sosial politik	20	5	10	5	10	0	50
	Permasalahan RPJMD 2021-2026 :							
	<u>Aspek Tata Kelola Pemerintahan</u>							
	1. Tata kelola pemerintahan belum efektif, efisien, transparan, akuntabel & partisipatif	20	10	10	5	15	25	85
	2. Kondusivitas wilayah belum optimal	20	10	20	5	5	20	80
	<u>Aspek Infrastruktur Wilayah</u>							
	1. Layanan infrastruktur perkotaan belum berkualitas	20	10	20	10	10	25	95
	2. Terdapat area genangan banjir yg cukup besar	15	10	20	10	10	25	90
	<u>Aspek Lingkungan Hidup</u>							
	1. Pencemaran udara meningkat	20	10	20	5	10	15	80
	2. Pencemaran air masih terjadi	20	10	20	5	10	15	80
	3. Kualitas tutupan lahan menurun	20	10	20	5	10	15	80
	<u>Aspek Ekonomi</u>							
	1. Ketidakseimbangan struktur ekonomi yg didominasi oleh sektor industri pengolahan	20	5	20	10	10	10	75
	2. Penurunan pertumbuhan ekonomi, baik dengan migas maupun tanpa migas, khususnya pada sektor yang berdampak langsung pada masyarakat seperti sektor UMKM dan Pariwisata	20	5	20	10	10	10	75
	<u>Aspek Sumber Daya Manusia</u>							
	1. Kualitas pelayanan pendidikan belum maksimal	20	10	20	5	10	25	90
	2. Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal	20	10	20	5	10	25	90
	<u>Aspek Kesejahteraan Rakyat</u>							
	1. Tingginya angka pengangguran	20	10	20	10	5	25	90
	2. Persentase masyarakat pra sejahtera masih tinggi	20	10	20	10	5	25	90

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan analisis lanjutan dengan mengelompokkan isu-isu sejenis dan diurutkan berdasarkan nilai rata-rata kelompok isu tersebut.

Tabel 4. 18 Hasil Analisis Isu Strategis

NO	IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN DAERAH	TOTAL NILAI	PENENTUAN ISU STRATEGIS	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
1	1. Mengakhiri kemiskinan di dalam segala bentuk dimanapun	85	PENGENTASAN KEMISKINAN	86,00	III
	2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik, meningkatkan pertanian berkelanjutan	80			
	10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	90			
	1. Masih terdapat masyarakat Kota Bontang yg hidup di bawah garis kemiskinan	85			
	2. Persentase masyarakat pra sejahtera masih tinggi	90			
2	3. Menjamin kehidupan yg sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	85	PENGEMBANGAN AKSES DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN	91,00	II

NO	IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN DAERAH	TOTAL NILAI	PENENTUAN ISU STRATEGIS	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
	1. Peningkatan pelayanan dasar	95			
	3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	100			
	3. Perlu peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan pekerja	85			
	2. Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal	90			
3	4. Menjamin kualitas pendidikan yg inklusif dan merata seta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	90	PENGEMBANGAN AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN	92,14	I
	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90			
	1.Peningkatan daya saing sumber daya manusia	95			
	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	100			
	1. Peningkatan kualitas SDM	95			
	4. Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM belum optimal dan perlu peningkatan prasarana dan sarana kegiatan pembelajaran	85			
	1. Kualitas pelayanan pendidikan belum maksimal	90			
4	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yg berkelanjutan untuk semua	90	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN	84,41	IV
	9. Membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	90			
	11. Menjadikan Kota dan Permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	90			
	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	80			
	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	95			
	2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah	70			
	4. Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan	95			

NO	IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN DAERAH	TOTAL NILAI	PENENTUAN ISU STRATEGIS	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
	7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit	80			
	12. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	90			
	17. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	75			
	9. Pembangunan jalan lingkak pesisir	75			
	11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional	70			
	2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu	80			
	1. Masih terdapat warga kota yg belum memperoleh layanan air bersih, terbatasnya kapasitas prasarana dan sarana pemenuhan air baku, DDDTLH air sudah terlampaui	90			
	2. Masih terdapat pemukiman kumuh dan masih terjadi banjir	85			
	3. Masih tingginya timbulan sampah domestik warga	85			
	1. Layanan infrastruktur perkotaan belum berkualitas	95			
5	13. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	80	PENGEMBANGAN KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA	82,86	V
	12. Penanggulangan banjir	75			
	2. Terdapat area genangan banjir yg cukup besar	90			
	4. Masih perlu peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan	70			
	16. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	80			
	5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	95			
	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	90			
6	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yg layak untuk semua	90	PEMERATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	82,67	VI

NO	IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN DAERAH	TOTAL NILAI	PENENTUAN ISU STRATEGIS	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
	12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	75			
	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	90			
	3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan	95			
	4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi	80			
	8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	75			
	9. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	90			
	10. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	95			
	11. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	75			
	4. Pembangunan struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas yang kuat	90			
	4. Peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya	70			
	3. Masih diperlukan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah dan kualitas produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil	90			
	4. Masih terdapat kesenjangan ekonomi jika dilihat dari rasio Gini Kota Bontang	75			
	1. Ketidakseimbangan struktur ekonomi yg didominasi oleh sektor industri pengolahan	75			
	2. Penurunan pertumbuhan ekonomi, baik dengan migas maupun tanpa migas, khususnya pada sektor yang berdampak langsung pada masyarakat seperti sektor UMKM dan Pariwisata	75			

NO	IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN DAERAH	TOTAL NILAI	PENENTUAN ISU STRATEGIS	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
7	15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan	75	PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	80,00	IX
	5. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi, dan daya dukung lingkungan hidup	90			
	14. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	70			
	15. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	80			
	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang & prasarana dasar	95			
	3. Pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung	70			
	1. Pencemaran udara meningkat	80			
	2. Pencemaran air masih terjadi	80			
	3. Kualitas tutupan lahan menurun	80			
8	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	75	PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK	81,11	VIII
	7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik	85			
	3. Pelaksanaan otonomi daerah	70			
	Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024	85			
	6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah	85			
	2. Peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik	90			
	1. Masih diperlukan peningkatan prasarana dan sarana untuk peningkatan hukum dan peningkatan SDM staf pemerintahan	75			
	1. Tata kelola pemerintahan belum efektif, efisien, transparan, akuntabel & partisipatif	85			
	2. Kondusivitas wilayah belum optimal	80			
9	3. 250.000 penyerapan tenaga kerja	70	PENGEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	82,00	VII
	2. Peningkatan daya saing generasi muda	80			
	5. Perluasan kesempatan kerja	90			

NO	IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN DAERAH	TOTAL NILAI	PENENTUAN ISU STRATEGIS	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
	2. Masih terdapat penduduk yg belum memiliki pekerjaan dan mengalami PHK, terpuruknya bidang pekerjaan sector informal selama pandemic COVID-19	80			
	1. Tingginya angka pengangguran	90			
10	Pandemi Covid 19	80	PENUNTASAN PENANGANAN PANDEMI COVID DAN PEMULIHAN DAMPAK SOSIAL EKONOMINYA	80,00	X
	7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemic Covid-19	80			

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, ditetapkan isu strategis Kota Bontang dalam pembangunan jangka menengah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Pengembangan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya. Sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan bernegara salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.

Pengembangan akses dan mutu layanan pendidikan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kota Bontang dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan sumber daya manusia di Kota Bontang, diantaranya: (a) kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar kelayakan; (b) kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum memenuhi standar kompetensi; (c) rendahnya partisipasi penduduk usia kurang dari 7 tahun dalam pendidikan anak usia dini; serta (d) penduduk Kota Bontang belum semua bebas buta aksara.

2. Pengembangan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan

Salah satu parameter kualitas sumber daya manusia adalah derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersebut dilakukan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.

Pengembangan akses dan mutu layanan kesehatan merupakan isu strategis pembangunan Kota Bontang untuk menjawab berbagai

permasalahan sumber daya manusia, antara lain: (a) tingginya tingkat kematian ibu dan bayi; (b) tingkat prevalensi balita kekurangan gizi masih relatif tinggi; (c) tingkat kejadian penyakit endemik dan pandemik masih relatif tinggi; (d) tingkat kejadian penyakit menular dan tidak menular juga masih relatif tinggi; serta (e) cakupan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut masih relatif rendah.

3. **Pengentasan Kemiskinan**

Tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita mulia ini sangat kontras dengan kondisi permasalahan yang terjadi di Kota Bontang yakni adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata sebagai akibat pelayanan pengentasan kemiskinan belum berjalan efektif. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kota Bontang.

4. **Pengembangan Infrastruktur Standar Pelayanan Perkotaan**

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) Tahun 2015-2045 mengamanatkan Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat sebagai visi kota masa depan di Indonesia, dengan salah satu misinya adalah mengembangkan prasarana dan sarana dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Pengembangan infrastruktur standar pelayanan perkotaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kota Bontang untuk menyelesaikan permasalahan prasarana dasar di Kota Bontang yaitu kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur yang belum optimal, antara lain: (a) kuantitas dan kualitas hunian yang masih rendah; (b) kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan yang belum maksimal; (c) kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi yang menurun; (d) kuantitas dan kualitas bangunan laik fungsi yang masih rendah; serta (e) kualitas layanan pemadaman kebakaran yang belum maksimal.

5. **Pengembangan Kapasitas Penanggulangan Bencana**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Tanggung jawab tersebut meliputi: jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan

risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang, salah satu bencana prioritas yang perlu penanggulangan secara cepat dan tepat di Kota Bontang adalah bencana banjir. Oleh karena itu pengembangan kapasitas penanggulangan bencana perlu ditetapkan menjadi isu strategis pembangunan Kota Bontang dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan bencana tersebut di Kota Bontang, yakni: (a) koordinasi penanggulangan bencana belum optimal; (b) penanganan drainase belum terintegrasi antara drainase kota, drainase jalan dan drainase lingkungan; (c) penataan sungai dan bantaran sungai belum optimal; serta (d) pembangunan infrastruktur pengendali banjir belum optimal.

6. Pemerataan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Sebagai salah satu daerah otonom baru pasca pemekaran Kabupaten Kutai pada Tahun 1999, perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh industri pengolahan, terutama dari industri berbasis minyak dan gas bumi. Kondisi ini menjadi permasalahan di Kota Bontang karena produksi industri pengolahan minyak dan gas bumi sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya alam tidak terbarukan (*non-renewable natural resources*) yang cenderung semakin menurun dan harga komoditi yang sering fluktuatif di pasar global.

Oleh karena itu pemerataan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kota Bontang dalam upaya mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap industri pengolahan minyak dan gas bumi. Beberapa sektor ekonomi berbasis potensi lokal yang layak dikembangkan antara lain pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik di sektor perdagangan, industri pengolahan, serta jasa. Selain itu juga perlu mendorong investasi masuk ke Kota Bontang sebesar-sebesarnya yang memanfaatkan potensi lokal maupun daerah sekitar.

7. Pengembangan Angkatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena menyangkut dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi dalam hal ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan dimensi

sosial berhubungan dengan penghargaan akan kemampuan seseorang. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sudah pantas jika setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pengembangan angkatan kerja dan perluasan kesempatan kerja merupakan isu strategis pembangunan Kota Bontang untuk menjawab permasalahan tingkat pengangguran terbuka relatif tinggi di Kota Bontang. Selain melalui upaya pelatihan dan pemagangan kerja, permasalahan tersebut juga dapat diatasi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

8. **Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun sasaran reformasi birokrasi yaitu: (a) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; serta (c) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi ini sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bontang, yakni: (a) tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif; serta (b) kondisi wilayah belum sepenuhnya kondusif bagi pembangunan. Oleh karena itu pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu ditetapkan menjadi isu strategis pembangunan Kota Bontang.

9. **Pengembangan Penataan Ruang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Adapun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tujuan yakni: (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d)

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengembangan penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu menjadi isu strategis pembangunan Kota Bontang untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup dan tata ruang di Kota Bontang, antara lain: (a) beberapa parameter kualitas udara relatif tinggi dan melebihi baku mutu; (b) kualitas air termasuk kategori tercemar; dan (c) kualitas tutupan lahan belum maksimal.

10. Penuntasan Penanganan Pandemi Covid dan Pemulihan Dampak Sosial Ekonominya.

Sejak tahun 2020, dunia dilanda bencana pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona (SARS-CoV-2) dan sampai saat ini para ahli belum bisa memprediksi waktu berakhirnya wabah ini. Kejadian COVID-19 di Kota Bontang pertama kali ditemukan pada tanggal 24 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah. Sampai dengan 4 Oktober 2021 tercatat sebanyak 15.097 kasus terkonfirmasi positif, dengan tingkat kesembuhan sebesar 96,4% atau sejumlah 14.548 kasus, sedangkan tingkat kematian sebesar 2,4% atau mencapai 356 kasus. Adapun tingkat capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Bontang sampai dengan 19 Oktober 2021 adalah sebesar 68,2% untuk dosis 1 dan 46,1% untuk dosis 2 dari total sasaran vaksin sebesar 134.666 orang. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 melalui penuntasan target vaksinasi di Kota Bontang.

Wabah COVID-19 ini membawa dampak negatif dari aspek sosial ekonomi bagi masyarakat Kota Bontang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Tahun 2021, terdapat 2,6% penduduk yang sudah tidak bekerja lagi karena usaha tutup dan 1,4% penduduk dirumahkan sementara akibat pandemi. Selain itu, dampak terhadap pendapatan penduduk Kota Bontang menunjukkan bahwa 45% penduduk mengalami penurunan pendapatan, sebagian besar mengalami penurunan pendapatan di bawah 75% dan sebagian kecil lagi berkurang lebih dari 75% dibandingkan pendapatan sebelum pandemi. Oleh karena itu diperlukan penuntasan

pemulihan dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 tersebut secara cepat dan tepat, efektif dan efisien. Ekonominya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan lima tahunan tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Bontang periode tahun 2005-2025. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Visi pembangunan jangka panjang Kota Bontang adalah:

“KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT”

Sebagai penjabaran dari RPJPD Kota Bontang periode tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bontang 2021-2026 merupakan bagian tahapan ke IV (2020-2024). Periode ke-empat tersebut merupakan **Tahapan Pemantapan** terhadap capaian tahapan pembangunan pada tiga periode sebelumnya. Pada Tahap Pemantapan RPJD Kota Bontang ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang. Struktur perekonomian yang berbasis ekonomi maritim Kota Bontang diharapkan akan semakin mapan dan mengarahkan kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahapan ke IV RPJPD Kota Bontang ini adalah mencakup:

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditandai dengan semakin mantapnya kualitas sumber daya manusia dengan daya saing dan keunggulan yang tinggi;
6. Peningkatan kualitas pemerintahan yang baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat, semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang dan prasarana dasar, ditandai dengan semakin mantapnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan menuju perwujudan Kota Bontang yang semakin asri.
8. Pembangunan struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas yang kuat, diarahkan pada strategi pemantapan dan stabilisasi struktur ekonomi maritim yang ditunjukkan dengan semakin mantap dan stabilnya keseimbangan industri migas dan non migas.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJPD 2005-2025, khususnya periode lima tahunan ke IV tersebut akan menjadi arahan kebijakan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Pasal 263 bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka visi dan misi pembangunan Kota Bontang yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada hakikatnya harus merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Dalam lingkup Regional Provinsi Kalimantan Timur, perumusan visi dan misi RPJMD Kota Bontang secara paralel juga diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2018-2023.

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang akan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang, visi pembangunan jangka menengah Kota Bontang harus

secara relevan mampu menjabarkan tentang harapan dan cita-cita seluruh komponen masyarakat akan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu visi yang dibangun merupakan bentuk dari kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Disamping merupakan hasil kesepakatan, visi pembangunan jangka menengah Kota Bontang juga merupakan hasil dari proses analisis terhadap potensi, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Kota Bontang. Berdasarkan penelaahan tersebut, aspek pembangunan yang menjadi sasaran utama dalam periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah mencakup aspek pembangunan tata kelola pemerintahan, aspek pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, aspek pembangunan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pada masing-masing aspek pembangunan akan memperbesar harapan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan perspektif aspek utama pembangunan yang merupakan hasil penelaahan terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang, serta isu strategis pembangunan Kota Bontang, maka dengan tujuan untuk memajukan pembangunan Kota Bontang ke depan, melalui proses penelaahan terhadap visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka selanjutnya ditetapkan visi RPJMD periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”

Visi pembangunan tersebut pada esensinya adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan Kota Bontang lebih berkemajuan pada seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pembangunan lebih dapat dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Kota Bontang yang Lebih Hebat merupakan suatu harapan dan cita-cita bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota yang lebih meningkat kualitas tata kelola pemerintahannya, lebih meningkat kualitas penataan sarana dan prasarana kotanya, lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan

budaya kotanya, lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya, lebih unggul SDM-nya dan lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut pada esensinya merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya. **Hebat Pemerintahannya** merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keinginan ini akan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan dan pengembangan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. **Hebat Kotanya** ditujukan untuk mewujudkan Kota Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. **Hebat Masyarakatnya** dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat yang **Beradab**, yaitu ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila.

HEBAT dan BERADAB dalam visi di atas merupakan akronim dari kata **H**armoni, **bE**rkelanjutan, **B**erdaya **sA**ing, **BE**Rsih, **AD**il, **A**manah dan **B**ertanggung jawab yang merupakan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat memberi warna bagi pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya Visi dijabarkan menjadi misi Kota Bonang 2021-2026.

5.2. Misi

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Pembangunan “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan tiga Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut:

- a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
- b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

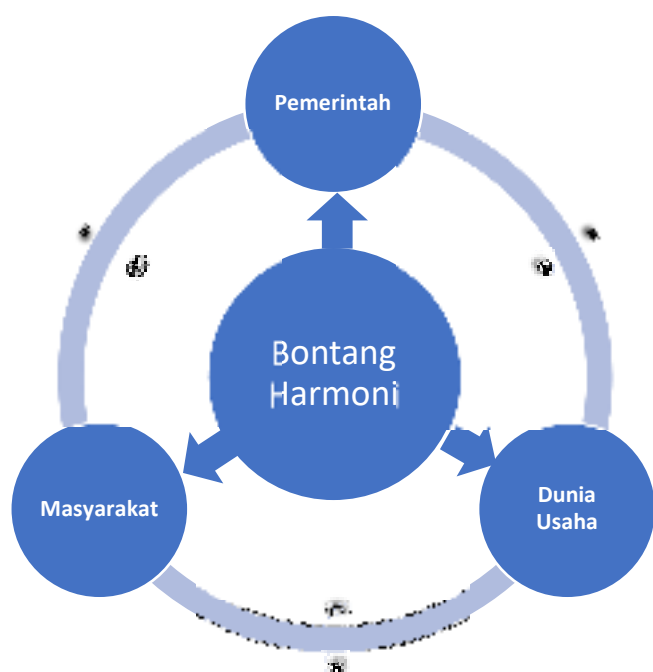
Berdasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaannya misi pembangunan sebagai arahan strategik pencapaian visi, harus dapat dipersepsikan secara tepat untuk mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami setiap butir misi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, maka penjabaran masing-masing Misi dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan.

Arahan strategik dari agenda pembangunan yang menjadi fokus utama misi pembangunan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang diharapkan menjadi “*lebih hebat dan beradab*”. Agenda pembangunan ini harus dapat memastikan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan filosofisnya yakni ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu upaya yang progresif melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang **harmoni**. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus mampu secara harmonis, selaras dan serasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat sinergi menyatukan potensi dan peran pembangunan serta mempromosikan kolaborasi atau kerjasama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam lingkup internal pemerintahan, harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting untuk

menyinerjikan dan mengharmonisasikan pontensi dan peran pemerintahan daerah selaku eksekutif, legislatif dan bersama instasi vertikal sehingga sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Semangat dan tekad untuk membangun harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang pembangunan ke depan dalam rangka melaksanakan amanah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni Pemerintahan yang Bersih, Adil, Amanah dan Bertanggung jawab sebagai bagian dari indikator terwujudnya Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya. Konstruksi elemen pencapaian fokus pembangunan Misi I Kota Bontang yang Harmoni sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 1 Konstruksi Misi I Kota Bontang yang Harmoni

Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Arahan strategik dari agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa dalam rangka pencapaian Visi, fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada upaya untuk wujudnya Kota Bontang yang *Berkelanjutan*. Dengan demikian, pembangunan Kota Bontang yang *lebih hebat* ke depan dilaksanakan dalam koridor keseimbangan dan keselarasan antara pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota dengan tetap menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih Hebat, agenda pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan ekonomi yang merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat yang produktif, pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui pemantapan bidang-bidang utama pembangunan tersebut diharapkan Kota Bontang yang berkelanjutan, layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan. Konstruksi pembangunan Misi II Kota Bontang yang Berkelanjutan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 2 Konstruksi Misi II Kota Bontang Berkelanjutan

Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arahan strategik agenda Misi pembangunan ini dalam mendukung pencapaian Visi adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan unggul. Keberhasilan membangun SDM berdaya saing dan unggul akan menjadi akselerator bagi Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mewujudkan Kota Bontang Berdaya Saing dan Sejahtera, peningkatan kualitas SDM sebagai fokus utama pembangunan akan diintervensi melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perlindungan

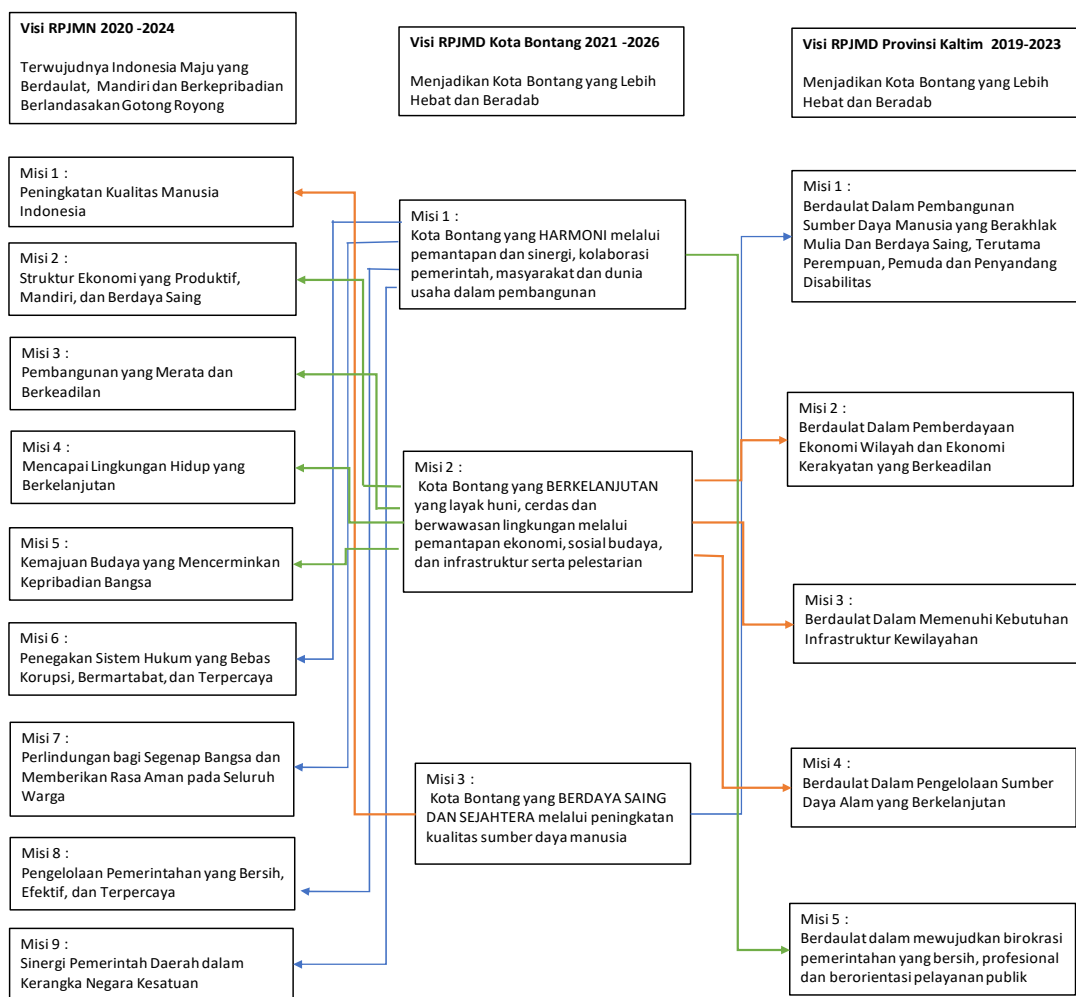
perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pariwisata, bidang ketenagakerjaan, bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. SDM yang berdaya saing dan unggul akan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, SDM tenaga kerja mendapatkan akses pembinaan dan pelatihan yang tepat sehingga kompetensi tenaga kerja meningkat, dan masyarakat yang rentan dan kurang mampu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Implementasi kebijakan dan program yang tepat pada masing-masing bidang intervensi tersebut akan menjadi sarana utama untuk mewujudkan Kota Bontang yang *Hebat Masyarakatnya*.

Konstruksi pencapaian Misi Kota Bontang Berdaya Saing dan Sejahtera, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 3 Konstruksi Misi III Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera

Penetapan Visi dan Misi Kota Bontang juga telah diselaraskan dengan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2020 -2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. 4 Keterkaitan Visi Misi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dengan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai ketiga misi pembangunan Kota Bontang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026 berdasarkan visi dan misi pembangunan dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab”

Tujuan pembangunan ini adalah rumusan strategis yang menggambarkan ketercapaian implementasi misi “Kota Bontang Yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini sangat ditentukan oleh keberhasilan Kepemimpinan Kepala Daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan mencakup potensi pemerintahan, potensi masyarakat, potensi dunia usaha, dan potensi pembangunan lainnya dalam mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana visi pembangunan yang ditetapkan.

Maksud dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan dan menyinergikan seluruh potensi pembangunan secara harmoni, baik dalam lingkup internal Pemerintahan Kota Bontang, instansi pemerintahan vertikal, potensi masyarakat dan dunia

usaha atau perusahaan yang ada di Kota Bontang. Perwujudan harmoni penyelenggaraan pemerintah, harmoni dalam masyarakat, harmoni dengan dunia usaha harus mendasari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga akan terwujud pemerintahan yang bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ditandai dengan **peningkatan nilai Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah**.

Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai dengan penetapan sasaran-sasaran pembangunan yang terukur sebagai suatu kondisi yang akan diwujudkan dan menjadi kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran-sasaran untuk mendukung pencapaian Tujuan 1 ini adalah:

- 1) meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif; dan
- 2) meningkatnya kondusifitas wilayah.

Adapun kerangka berfikir pencapaian Tujuan Misi 1 adalah sebagai berikut:



Gambar 5. 5 Kerangka Berfikir Pencapaian Tujuan Misi I

Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan pembangunan ini adalah rumusan strategis yang menggambarkan pencapaian implementasi misi “Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup”. Pencapaian tujuan pembangunan ini akan berkaitan erat dengan keberhasilan melaksanakan pembangunan kota yang semakin maju perkembangan kotanya namun pada saat yang sama tetap mampu menjaga keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penerapan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan secara konsisten akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang menjadi kota yang berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan perkotaan ditentukan oleh 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kota Berwawasan Lingkungan ditentukan oleh Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Selanjutnya, Indeks Kualitas Infrastruktur ditentukan oleh faktor: 1) tingkat akses hunian (TAH); 2) tingkat kualitas hunian (TKH); 3) tingkat pelayanan air minum (TPAM); 4) tingkat pelayanan air limbah (TPAL); 5) tingkat pelayanan sampah (TPS); 6) tingkat pelayanan sumber daya air (TPSDA); 7) tingkat pelayanan jalan umum (TPJU); 8) tingkat pelayanan transportasi umum (TPTU); 9) tingkat pelayanan bangunan gedung (TPBG); dan 10) tingkat pelayanan pemadam kebakaran (TPPK). Sedangkan kualitas lingkungan hidup (IKLH) ditentukan oleh Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Adapun target kinerja IKLH di dalam pembangunan jangka menengah Kota Bontang Tahun 2021-2026 belum mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, mengingat capaian indeks kualitas air tahun 2020 masih di angka 53,33. Realisasi indeks ini masih jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021. Oleh karena itu penetapan target capaian dalam periode 2022-2026 perlu dilakukan penyesuaian sehingga lebih realistis untuk dapat dicapai. Adapun faktor-faktor terkait, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II.

Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai dengan penetapan sasaran-sasaran pembangunan yang merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan sebagai kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh; dan
- 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari.

Tujuan 3: Mewujudkan Inklusivitas dan Keseimbangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Ekonomi Lokal dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat

Tujuan pembangunan ini masih menjadi bagian rumusan strategis yang menggambarkan pencapaian implementasi misi “Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup”. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ini, pembangunan harus mampu kembali membangkitkan dan menumbuhkan perekonomian daerah secara inklusif dan seimbang antara sektor migas dan non migas. Perekonomian daerah harus semakin dikembangkan dengan mendorong dan mengakselerasikan peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah dan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit yang luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Secara bersamaan, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tersebut, tetap menjadi prioritas menumbuhkan investasi untuk pembangunan berbagai industri baru sebagai substitusi dari penurunan peran industri pengolahan migas dalam perekonomian daerah. Sektor-sektor non migas menjadi sangat penting untuk dikembangkan guna mengimbangi pertumbuhan ekonomi migas yang cenderung mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah, maka nilai Indeks Gini akan semakin kecil, begitu juga jika pembangunan ekonomi di suatu wilayah kurang berhasil maka Nilai Indeks Gini akan semakin besar mendekati angka 1.

Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai dengan penetapan sasaran pembangunan yang merupakan suatu kondisi yang akan

diwujudkan sebagai kinerja utama pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran pembangunan tersebut adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas”.

Rumusan pencapaian Tujuan 2 dan Tujuan 3 yang merupakan rumusan strategis Misi 2 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. 6 Kerangka Berfikir Pencapaian Tujuan Misi II

Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Sejahtera

Tujuan pembangunan ini adalah rumusan strategis yang menggambarkan ketercapaian implementasi misi “Kota Bontang yang berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan manusia berkualitas, kebijakan pembangunan harus secara efektif meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang bersamaan program-program pembangunan SDM harus dibarengi dengan penguatan pendidikan karakter dan penguatan dukungan pengembangan pendidikan akhlak dengan mendorong semakin mantapnya semangat keberagaman masyarakat. Selain itu, kompetensi tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Melalui kebijakan yang terintegrasi dalam membangun kualitas SDM diharapkan Indeks pembangunan manusia Kota Bontang dapat terus meningkat.

Selain itu dianggap penting untuk meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat. Pemberdayaan dimaksudkan agar secara sosial masyarakat akan semakin sejahtera yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Target pencapaian indikator ini diharapkan dapat direalisasikan lebih rendah dibandingkan target nasional dan target provinsi Kalimantan Timur.

Pemberdayaan juga merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi rentan untuk mencukupi kehidupannya secara layak. Pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan termasuk memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan secara layak akan menjadi bagian intervensi program pembangunan yang harus dapat direalisasikan secara efektif. Permasalahan mendasar bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan sehingga tidak mampu mengakses peluang kerja dan berusaha secara mandiri. Oleh karena itu tujuan pembangunan ini akan direalisasikan dengan pencapaian sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- 2) meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- 3) meningkatnya pemberdayaan sosial.

Keberhasilan mewujudkan Bontang yang berkualitas dan sejahtera ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan asumsi bahwa semakin baik pembangunan SDM di Kota Bontang akan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, dan pada gilirannya capaian IPM akan semakin meningkat.

Kerangka berfikir pencapaian Tujuan 4 yang merupakan rumusan strategis dalam rangka pencapaian Misi III dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 7 Kerangka berfikir pencapaian Tujuan Misi III

Tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bontang tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, juga telah diselaraskan

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's). Keselarasan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bontang dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Keselarasan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjuta (SDG's)

No	Tujuan RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	 Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang tangguh	
2.	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	 Air bersih dan sanitasi layak  Kota dan komunitas yang berkelanjutan  Konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab  Penanganan Perubahan Iklim  Menjaga ekosistem laut	
3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	 Energi bersih dan terjangkau  Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi  Infrastruktur, industri dan inovasi  Berkurangnya kesenjangan  Kemitraan untuk mencapai tujuan	
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	 Menghapus kemiskinan  Menghapus kelaparan  Kesehatan yang baik dan kesejahteraan  Pendidikan berkualitas  Kesetaraan Gender	

Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur serta diselaraskan pula dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bontang tahun 2021-2026 dapat dijabarkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target				
							2020/ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan												
T.1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah				Indeks	n.a	75	79	82	85	89
			S.1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (66,20)	B (67,41)	B (68,41)	BB (70,41)	BB (72,41)	BB (74,41)
					Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (3,8607)	Tinggi (3,87)	Tinggi (3,90)	Tinggi (4,00)	Tinggi (4,10)	Tinggi (4,20)
					Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			S.2.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	Kasus	9	8	8	7	7	6
					Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Keteriban Umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 5. 3 Tujuan dan Sasaran Misi II RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target				
							2020/ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3		4	5		6	7	8	9	10
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup												
T.2.	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)				Indeks	64,63	66,34	68,02	69,69	71,78	73,45
			S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	64,47	67,35	70,16	72,98	76,61	79,41
			S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,79	65,33	65,87	66,41	66,95	67,49
T.3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini				Indeks	0,405	0,330	0,300	0,300	0,300	0,300
			S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	2,38	4,2	4,5	5,3	6	6,5

Tabel 5. 4 Tujuan dan Sasaran Misi III RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan		Baseline	Target				
										2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2		3		4		5			6	7	8	9	10
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia															
T.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Indeks			80,02	81,00*	81,00*	81,00	81,29	81,83
			S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah		Tahun		13,03	13,3	13,42,	13,54	13,66	13,78	
					Rata-rata lama sekolah		Tahun		10,79	10,91	10,98	11,64	11,1	11,17	
					Usia harapan hidup		Tahun		74,28	74,44	74,51	74,56	74,61	74,65	
			S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen		9,46	8,70*	8,70*	8,50	8,00	7,20	
			S.8	Meningkatnya pemberda-yaan sosial	Angka Kemiskinan		Persen		4,38	4,03*	4,03*	3,90	3,80	3,75	

Keterangan: *Target RPJMD lebih tinggi dari RKPD menyesuaikan dengan target provinsi untuk kota Bontang

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD agar lebih efektif dan efisien maka perlu ditetapkan sejumlah strategi dan sasaran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama lima tahun yang akan datang. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategi focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program operasional dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dipaparkan di dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan di dalam Bab V, serta analisis potensi dan hambatan internal dan lingkungan internal maka dirumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bontang berdasarkan tiga misi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

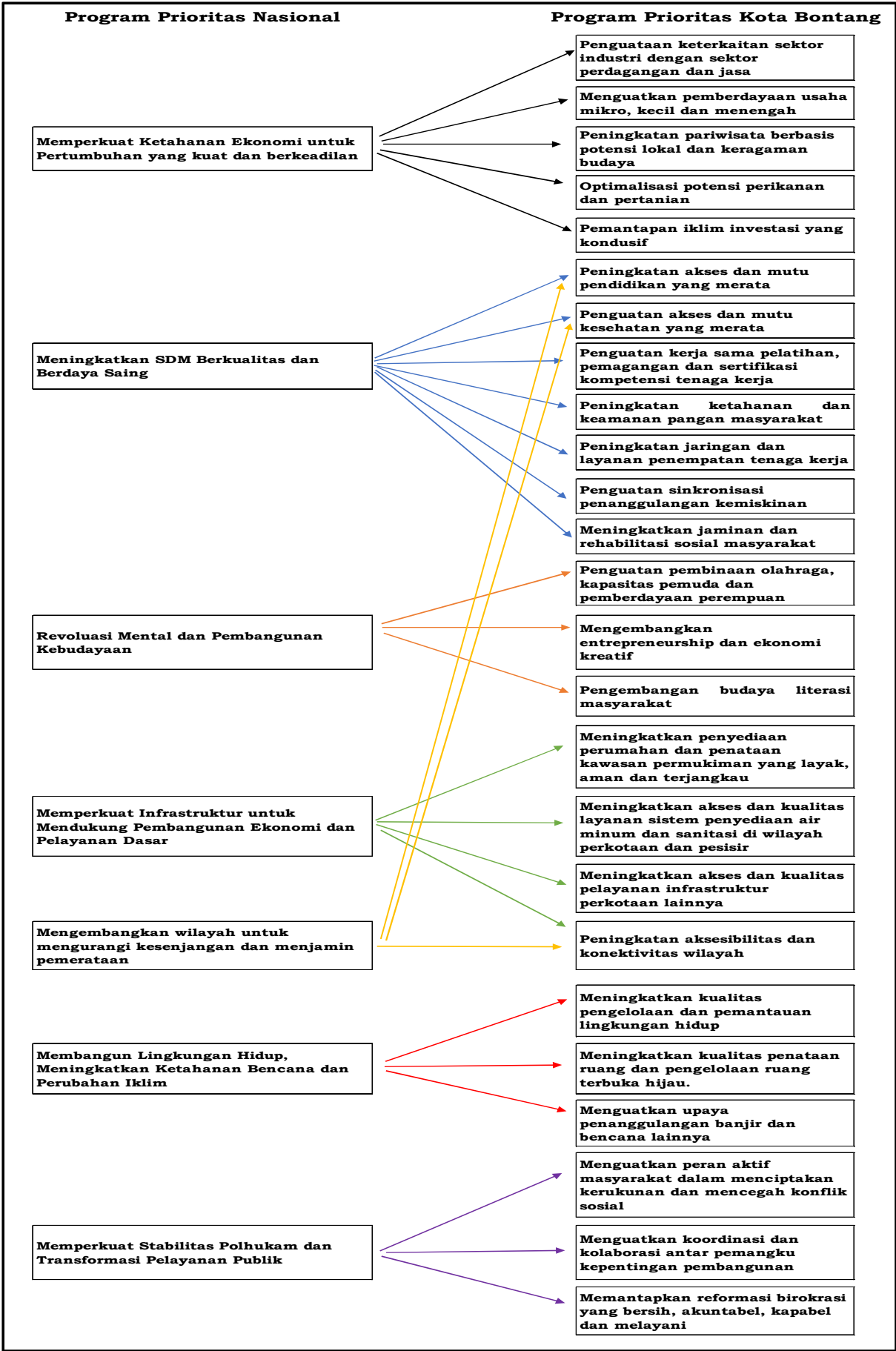
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Visi : Menjadikan Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab					
Misi 1: Kota Bontang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan					
T.1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	S.1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Str. 1a	Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani
				Str. 1b	Menguatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
		S.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Str. 2a	Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial
Misi 2: Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup					
T.2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	S.3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Str. 3a	Meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman dan terjangkau
				Str. 3b	Meningkatkan akses dan kualitas layanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan pesisir
				Str. 3c	Menguatkan upaya penanggulangan banjir dan bencana lainnya
				Str. 3d	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
				Str. 3e	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Str. 4a	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
				Str. 4b	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
T.3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Str. 5a	Menguatkan keterkaitan sektor industri dengan sektor perdagangan dan jasa
				Str. 5b	Menguatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
				Str. 5c	Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal dan keragaman budaya
				Str. 5d	Optimalisasi potensi perikanan dan pertanian
				Str. 5e	Memantapkan iklim investasi yang kondusif
				Str. 5f	Meningkatkan kerja sama daerah bidang ekonomi
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia					
T.4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Str. 6a	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata
				Str. 6b	Pengembangan budaya literasi masyarakat
				Str. 6c	Penguatan akses dan mutu kesehatan yang merata

Tujuan		Sasaran		Strategi	
				Str. 6d	Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat
				Str. 6e.	Penguatan pembinaan olahraga, kapasitas pemuda dan pemberdayaan perempuan
		S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Str. 7a	Menguatkan kerja sama pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja
				Str. 7b	Meningkatkan jaringan dan layanan penempatan tenaga kerja
				Str. 7c	Mengembangkan entrepreneurship dan ekonomi kreatif
		S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Str. 8a	Meningkatkan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat

Setiap kebijakan dan program prioritas pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji implementasinya dalam pembangunan daerah. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Bontang, telah dilakukan penyelarasan terhadap Program Prioritas Nasional yang dipetakan sebagai berikut:



Gambar 6. 1 Pemetaan Program Prioritas Nasional dalam Program Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026

6.2 Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan urutan waktu tertentu. Arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi sehingga memiliki fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan, maka disusunlah Tema pembangunan setiap tahun yang menjadi Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada masing-masing tahun menjadi tahapan yang saling berkesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Gambar 6. 2 Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2022-2026

Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahunnya, maka dirumuskanlah arah kebijakan pada setiap strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun rumusan arah kebijakan pembangunan beserta tahun pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2021-2026

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Str. 1a	Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	AK. 1a.1	Penguatan akuntabilitas kinerja (keuangan, aset, pendapatan, perencanaan, litbang, arsip, statistik)						
		AK. 1a.2	Peningkatan penataan sistem manajemen SDM						
		AK. 1a.3	Penguatan pengawasan						
		AK. 1a.4	Peningkatan kualitas layanan publik yang prima						
Str. 1b	Menguatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan	AK. 1b.1	Peningkatan kerjasama antar bidang dengan seluruh stakeholder						
Str. 2a	Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	AK. 2a.1	Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan						
		AK. 2a.2	Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berbasis pada masyarakat						
Str. 3a	Meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman dan terjangkau	AK. 3a.1	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni						
		AK. 3a.2	Penyediaan akses perumahan yang layak huni dan terjangkau						
		AK. 3a.3	Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh						
Str. 3b	Meningkatkan akses dan kualitas layanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan pesisir	AK. 3b.1	Peningkatan ketersediaan air baku untuk air minum dengan alternatif sumber air selain air tanah						
		AK. 3b.2	Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam penyediaan air minum						
		AK. 3b.3	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem komunal dan terpusat						
		AK. 3b.4	Peningkatan pengelolaan persampahan						
Str. 3c	Menguatkan upaya penanggulangan banjir dan bencana lainnya	AK. 3c.1	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana						
		AK. 3c.2	Perbaikan dan pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan dan lingkungan						
		AK. 3c.3	Penataan aliran sungai dan bantaran sungai						
		AK. 3c.4	Penyediaan infrastruktur pengendali banjir						
Str. 3d.	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	AK. 3d.1	Peningkatan kualitas jalan termasuk pemenuhan kelengkapan jalan						
		AK. 3d.2	Pengembangan sistem jaringan jalan						
		AK. 3d.3	Pengembangan layanan sistem transportasi publik terintegrasi antar moda						
Str. 3e	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	AK. 3e.1	Peningkatan pelayanan penanganan kebakaran						
		AK. 3e.2	Peningkatan ketersediaan dan keandalan bangunan gedung						
		AK. 3e.3	Peningkatan daya tampung pemakaman umum						
Str. 4a	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	AK. 4a.1	Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan						
		AK. 4a.2	Penguatan kebijakan dan strategi perlindungan dan						

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pengelolaan lingkungan hidup						
Str. 4b	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan ruang terbuka hijau.	AK. 4b.1	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang						
		AK. 4b.2	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan keanekaragaman Hayati						
Str. 5a	Menguatkan keterkaitan sektor industri dengan sektor perdagangan dan jasa	AK. 51.a	Penyediaan sarana perdagangan yang representatif dan prasarana perdagangan yang sesuai standar						
		AK. 5a.2	Pemantapan pelayanan perizinan perdagangan dan industri dengan memperhatikan keberlangsungan usaha kecil menengah lokal						
		AK. 5a.3	Pembangunan kawasan sentra industri yang terintegrasi dengan pusat-pusat perdagangan						
Str. 5b	Menguatkan pemberdayaan usaha mikro dan ekonomi kreatif	AK. 5b.1	Peningkatan pembinaan usaha kecil dan koperasi yang kompetitif dan bertumbuhkembang						
		AK. 5b.2	Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi						
Str. 5c	Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal dan keragaman budaya	AK. 5c.1	Pengembangan destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas, beragam serta memiliki kekhasan lokal						
		AK. 5c.2	Pengembangan promosi dan citra pariwisata yang inklusif						
		AK. 5c.3	Peningkatan potensi budaya dan kesenian lokal yang mendukung pengembangan pariwisata						
Str. 5d	Optimalisasi potensi perikanan dan pertanian	AK. 5d.1	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan						
		AK. 5d.2	Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan						
Str. 5e	Memantapkan iklim investasi yang kondusif	AK. 5e.1	Peningkatan promosi potensi dan koordinasi investasi						
		AK. 5e.2	Pemantapan pelayanan investasi yang cepat, mudah dan terjangkau						
		AK. 5e.3	Peningkatan ketersediaan lahan yang siap guna dalam mendukung investasi						
Str. 5f	Meningkatkan kerja sama daerah bidang ekonomi	AK. 5f.1	Optimalisasi peran BUMD dan kerjasama pembangunan ekonomi baik pemerintah dengan dunia usaha maupun antar pemerintah						
Str. 6a	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata	AK. 6a.1	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar kelayakan						
		AK. 6a.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar kompetensi						
		AK. 6a.3	Pemantapan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah						
		AK. 6a.4	Peningkatan fasilitasi pendidikan karakter dan fasilitasi pendidikan lanjut bagi masyarakat melalui pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu atau siswa berprestasi						
Str. 6b	Pengembangan budaya literasi masyarakat	AK. 6b.1	Peningkatan budaya baca masyarakat dan kualitas layanan perpustakaan						

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		AK. 6c.1	Peningkatan budaya baca masyarakat dan kualitas layanan perpustakaan						
Str. 6c	Penguatan akses dan mutu kesehatan yang merata	AK. 6c.2	Peningkatkan kualitas jaminan kesehatan (<i>universal coverage</i>) bagi seluruh penduduk di semua usia.						
		AK. 6c.3	Peningkatan layanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan						
		AK. 6c.4	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sesuai standar kompetensi						
		AK. 6c.5	Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)						
Str. 6d	Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	AK. 6d.1	Peningkatan ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang berkualitas, beragam dan terjangkau						
Str. 6e	Penguatan pembinaan olahraga, kapasitas pemuda dan pemberdayaan perempuan	AK. 6e.1	Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga yang berdaya saing						
		AK. 6e.2	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						
Str. 7a	Menguatkan kerja sama pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja	AK. 7a.1	Peningkatan kualitas data urusan ketenaga kerjaan (desain basis data, pengumpulan, update, pemetaan)						
		AK. 7a.2	Peningkatan kerjasama dalam pengembangan kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan						
		AK. 7a.3	Pembangunan sarana prasarana pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja						
Str. 7b	Meningkatkan jaringan dan layanan penempatan tenaga kerja	AK. 7b.1	Penyusunan kerja sama penyaluran tenaga kerja lokal, antar daerah, negara						
		AK. 7b.2	Peningkatan layanan penempatan kerja						
Str. 7c	Mengembangkan entrepreneurship dan ekonomi kreatif	AK. 7c.1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan						
		AK. 7c.2	Pengembangan layanan akses permodalan						
Str. 8a	Menguatkan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan	AK. 8a.1	Peningkatan kualitas data kemiskinan						
		AK. 8a.2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat tidak mampu						
		AK. 8a.3	Pemetaan program penanggulangan kemiskinan menggunakan 1 basis data						
Str. 8b	Meningkatkan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat	AK. 8b.1	Peningkatan kualitas layanan jaminan & rehabilitasi sosial masyarakat						

Keterangan :

Pelaksanaan *baseline*

Arah kebijakan penunjang

Arah Kebijakan fokus tahunan

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Selain fokus pada program pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kota Bontang juga mmperhatikan pembangunan kewilayahan dengan memperhatikan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2019-2039, sehingga pembangunan yang dilaksanakan

memiliki keterpaduan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Bontang dituangkan dalam 2 (dua) klasifikasi kawasan berdasarkan fungsi untuk mendukung tujuan penataan ruang Kota Bontang, yaitu:

(1) Kawasan Didorong

Merupakan kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya melalui pembangunan program infrastruktur guna perwujudan kawasan sesuai arahan spasial dalam RTRW Kota Bontang.

Meliputi pola ruang Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Olahraga, Kawasan Peribadatan, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Transportasi, Kawasan Persampahan, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau, dan Kawasan Peruntukan Industri.

Tersebar di 15 kelurahan yang mendukung sasaran pengembangan wilayah sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub-pusat Pelayanan Kota (SPK) dan/atau Pusat Lingkungan sesuai dengan sistem pusat kegiatan wilayah, serta Kawasan Strategis Kota (KSK) Ekonomi.

(2) Kawasan Dikendalikan

Merupakan kawasan yang dikendalikan pengembangannya melalui pembatasan pembangunan program infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai arahan spasial dalam RTRW Kota Bontang.

Meliputi pola ruang Kawasan Sumber Daya Air, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Mangrove, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perumahan, dan Ruang Terbuka Hijau.

Tersebar di 14 kelurahan yang mendukung sasaran pengembangan wilayah sebagai Pusat Lingkungan sesuai dengan sistem pusat kegiatan wilayah, dan Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup.

Ada pun arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Bontang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Bontang
Tahun 2021-2026

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
A	Arahan kewilayahan : Kawasan Didorong			
	KECAMATAN BONTANG UTARA			
1.	Kelurahan Api-Api	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2.	Kelurahan Bontang Baru	Sub-pusat Pelayanan Kota (SPK)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Ruang Terbuka Non Hijau	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
3.	Kelurahan Bontang Kuala	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Perikanan Budidaya	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
4.	Kelurahan Guntung	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Non Hijau	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
5.	Kelurahan Gunung Elai	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Peribadatan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
				kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
6.	Kelurahan Loktuan	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Peribadatan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			KECAMATAN BONTANG SELATAN	
7.	Kelurahan Berbas Pantai	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
8.	Kelurahan Berbas Tengah	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
9.	Kelurahan Bontang Lestari	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Persampahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Ekonomi	Kawasan Peruntukan Industri	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
10.	Kelurahan Satimpo	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
11.	Kelurahan Tanjung Laut	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
		Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
12.	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
		Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Kawasan Perikanan Budidaya	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
	KECAMATAN BONTANG BARAT			
13.	Kelurahan Belimbing	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
14.	Kelurahan Gunung Telihan	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Transportasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
				kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
15.	Kelurahan Kanaan	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Perkantoran	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
			Kawasan Pendidikan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Kesehatan	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
			Kawasan Olahraga	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
B	Arahan kewilayahan : Kawasan Dikendalikan			
	KECAMATAN BONTANG UTARA			
1.	Kelurahan Api-Api	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
2.	Kelurahan Bontang Baru	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Sempadan Pantai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
3.	Kelurahan Bontang Kuala	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Kawasan Sempadan Pantai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
4.	Kelurahan Guntung	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
5.	Kelurahan Gunung Elai	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Sempadan Pantai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
6.	Kelurahan Loktuan	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sempadan Pantai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
	KECAMATAN BONTANG SELATAN			
7.	Kelurahan Berbas Pantai	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
8.	Kelurahan Bontang Lestari	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Sempadan Pantai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Tanaman Pangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
9.	Kelurahan Satimpo	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
10.	Kelurahan Tanjung Laut	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
11.	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sempadan Pantai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Mangrove	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
KECAMATAN BONTANG BARAT				
12.	Kelurahan Belimbing	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
13.	Kelurahan Gunung Telihan	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari

No	Kelurahan	Sasaran Pengembangan Wilayah	Kebijakan Pengembangan Wilayah	Sasaran PJM Kota Bontang Tahun 2021-2026
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
14.	Kelurahan Kanaan	Pusat Lingkungan (PL)	Kawasan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
			Kawasan Sekitar Danau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
		Kawasan Strategis Kota (KSK) Lingkungan Hidup	Kawasan Perumahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari
			Kawasan Sempadan Sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan lainnya yang dilaksanakan oleh Pememrintah Kota Bontang adalah dengan menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, mengingat pengembangan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kota Bontang dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Melalui Peraturan Daerah Kota Bontang No.12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2021-2025, Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Bontang terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Bontang Kuala, yang terdiri dari:
 - a. Cagar Budaya Eks Kantor Camat;
 - b. Cagar Budaya Eks Puskesmas;
 - c. Cagar Budaya Eks Penjara;
 - d. Perkampungan di Atas Air Bontang Kuala;
 - e. *Event* Pesta Laut
2. Kawasan Strategis Pariwisata Karang Segajah; dan
3. Kawasan Strategis Pariwisata Beras Basah.

Kawasan Strategis Pariwisata Guntung

6.4. Program Unggulan Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang, maka Kepala Daerah menetapkan Program Unggulan yang merupakan janji politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Adapun Program Unggulan Kepala Daerah ditetapkan menjadi 4 (empat) tema yaitu :

A. Program Unggulan Bontang KITA

Bontang KITA merupakan singkatan dari “**Kolaborasikan Ide Satukan Aksi**” memiliki makna Pemerintah Kota Bontang beserta seluruh elemen masyarakat berkomitmen menyatukan visi pembangunan untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat. Program unggulan ini yang dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi yang secara keseluruhan mempromosikan kebijakan pembangunan kolaboratif untuk memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang dilandasi oleh semangat dan rasa memiliki terhadap Kota Bontang.

B. Program Unggulan Bontang Baru

Botang BARU merupakan singkatan dari “Bersih, Asri, Lestari dan Maju”. Program ini dijabarkan kedalam sejumlah rencana aksi yang secara keseluruhan dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Bontang untuk mewujudkan Wajah Baru Kota Bontang yang Lebih Hebat yakni Kota Bontang yang Lebih Bersih, Lebih Asri, Lebih Lestari dan Lebih Maju Kotanya menuju Kota Berkelanjutan yang Nyaman, Cerdas dan Layak Huni.

C. Program Unggulan Bontang Bangkit

Program ini memiliki makna “Bangkit dan Maju Ekonominya” yang bertujuan untuk lebih membangkitkan dan memajukan perekonomian Kota Bontang. Tujuan tersebut sebagai komitmen Pemerintah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi masyarakat sebagai sektor yang secara riil memiliki dampak dan daya ungkit langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, disamping tetap mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

D. Program Unggulan Bontang Unggul

Program unggulan ini pada esensinya adalah tekad untuk menciptakan Pelayanan Publik yang unggul, SDM yang unggul dan masyarakat yang sejahtera. Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah akan melaksanakan tugas pelayanan publik baik pelayanan perijinan maupun non perijinan dengan lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab. Dalam rangka meningkatkan SDM unggul, komitmen pemerintah diarahkan untuk mempersiapkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing yang siap

bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, dan global serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan Program Unggulan Bontang Kepala Daerah secara terperinci dapat diterjemahkan ke dalam beberapa program, yaitu:

Tabel 6. 4 Tabel Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2021-2026

No	Program Unggulan	Target	Kategori	Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah	Pada semua PD terjadi Peningkatan Nilai SAKIP dengan kategori minimal BB	Bontang Kita	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
		Peningkatan Nilai SPBE kategori Baik	Bontang Kita	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah/ PD Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika
		Nilai IKM semua PD minimal B	Bontang Kita	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
2.	Program Kolaborasi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat (Kompak)	Peningkatan nilai realisasi nilai CSR rata-rata 5% per tahun.	Bontang Kita	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
3.	Program ASN Unggul	Beasiswa bagi ASN	Bontang Kita	Program Kepegawaian Daerah	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian
		Setiap ASN mendapatkan kesempatan minimal 20 JP mengikuti pengembangan kompetensi	Bontang Kita	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian
4.	Program Pengendalian Banjir	Kerjasama penanganan banjir antar daerah dalam penanganan daerah hulu, antara lain: pembangunan Bendali Suka Rahmat, dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Kanaan.	Bontang Kita	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
		Revitalisasi Waduk Kanaan	Bontang Baru	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
		Normalisasi sungai-sungai di Kota Bontang sepanjang 10, 26 km	Bontang Baru	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
		Normalisasi dan optimalisasi sistem drainase perkotaan sepanjang 98.668,9 m	Bontang Baru	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
		735 m penataan bantaran sungai (98 bangunan)	Bontang Baru	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Perumahan	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman
		Pembangunan 3 polder pengendali banjir	Bontang Baru	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
5.	Program Peningkatan Investasi	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	Bontang Bangkit	Program Penataan Bangunan Gedung	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum

No	Program Unggulan	Target	Kategori	Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Program Pelayanan Penanaman Modal	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
		Pengembangan pelayanan melalui Anjungan Pelayanan Mandiri	Bontang Bangkit	Program Pelayanan Penanaman Modal	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
		Pengembangan kebijakan yang ramah investasi melalui pemberian insentif di bidang investasi	Bontang Bangkit	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
6.	Program Pengembangan Pariwisata dan Budaya	Penataan objek-objek pariwisata dengan target penambahan 60 objek wisata	Bontang Bangkit	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan target 20% per tahun	Bontang Bangkit	Program Pengembangan Kebudayaan	PD Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
				Program Pemasaran Pariwisata	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
		Merevitalisasi 4 (empat) cagar budaya	Bontang Bangkit	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	PD Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Seni dan Budaya	Bontang Bangkit	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	PD Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
			Bontang Bangkit	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
7.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan dan penguatan UMKM dengan target 11,65% dari jumlah Usaha Mikro yang ada di Bontang	Bontang Bangkit	Program Pengembangan Umkm	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
		Moratorium pemberian izin toko modern (waralaba)	Bontang Bangkit	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi, UMKM
		Peningkatan 10% pengembangan usaha perikanan, pertanian dan peternakan	Bontang Bangkit	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PD Penanggung Jawab Urusan Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Difersifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Ketahanan Pangan
		Pengembangan Satu RT Satu Usaha Kelompok Masyarakat berupa Usaha ekonomi kreatif atau Urban Farming	Bontang Bangkit	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
8.	Program Penataan Sarana dan Prasarana Kota Berkelanjutan	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang ditata sebesar 20% sampai dengan tahun 2026.	Bontang Baru	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
		100% masyarakat mendapatkan pelayanan sanitasi dan air bersih	Bontang Baru	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan perumahan layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berkurang 70% sampai dengan tahun 2026	Bontang Baru	Program Kawasan Permukiman	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

No	Program Unggulan	Target	Kategori	Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pembangunan jalan alternatif/jalan lingkar (2,8 km)	Bontang Baru	Program Penyelenggaraan Jalan	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Program Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Standarisasi sarana dan prasarana Pendidikan dengan target 100% sarana san prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Bontang Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemberian perlengkapan belajar bagi siswa SD sampai SMP	Bontang Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan 500 beasiswa stimulan/penuh bagi siswa dan mahasiswa	Bontang Unggul	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Peningkatan 2 event kompetisi/lomba olahraga prestasi & rekreasi bagi siswa	Bontang Unggul	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		100% layanan kesehatan terpenuhi	Bontang Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
		Bantuan biaya iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat peserta kelas III non PBI dengan target 100 <i>universal health coverage</i>	Bontang Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
		Pembangunan Emergency Call (Call Center 112)	Bontang Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
		Pelayanan dokter kunjung bagi pasien jompo dan miskin	Bontang Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
		Penguatan kemitraan pemerintah dengan Rumah Sakit swasta dalam pelayanan Kesehatan dengan target 100% RS swasta dan 21 FKTP swasta terakreditasi paripurna.	Bontang Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
		Peningkatan 15 % calon tenaga kerja mendapatkan pelatihan, sertifikasi pelatihan/keterampilan dan magang tenaga kerja baik secara <i>inhouse training</i> maupun dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengembangan keterampilan tenaga kerja seperti BLKI.	Bontang Unggul	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Penanggung Jawab Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	PD Penanggung Jawab Tenaga Kerja
		Peningkatan 15% keluarga miskin mendapatkan pelatihan, sertifikasi keahlian/ keterampilan dan magang tenaga kerja	Bontang Unggul	Program Pemberdayaan Sosial	PD Penanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pembangunan "Rumah Kreasi Milenial" sebagai sarana Pusat Pengembangan Kreasi bagi Pemuda	Bontang Unggul	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PD Penanggung Jawab Kesehatan
		Peningkatan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi 2023 penggiat agama	Bontang Unggul	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

No	Program Unggulan	Target	Kategori	Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pembangunan Kawasan Pusat Pengembangan Keagamaan	Bontang Unggul	Program Penataan Bangunan Gedung	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Bantuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Perluasan cakupan dan ragam bantuan pangan	Bontang Unggul	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pengembangan kelompok usaha masyarakat bagi 100 kelompok keluarga miskin	Bontang Unggul	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Bantuan makanan siap santap untuk Lansia Miskin tanpa keluarga	Bontang Unggul	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Stimulan dana kesehatan bagi masyarakat peserta bukan penerima upah/bukan pekerja yang terdaftar oleh pemerintah daerah	Bontang Unggul	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD penanggung jawab urusan Kesehatan
11	Program Stimulan RT	Program Stimulan RT untuk mendorong percepatan pembangunan dengan fokus pada upaya pemberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan yang bersifat produktif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Bontang Kita	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
12	Program Bontang Bebas Kuota	Upaya untuk memberikan akses internet bagi masyarakat di ruang publik	Bontang Kita	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	PD penanggung jawab urusan Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	

6.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan diejawantahkan ke dalam program prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas pembangunan nantinya akan diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu :

1. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib langsung dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan
3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Mengacu pada ketentuan dia atas, maka priotitas 1 yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan dasar yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur berdasarkan Pasal 3

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
4. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Sosial;

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program pembangunan terkait penerapan SPM yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 5 Program Pembangunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di dalam RPJMD Tahun 2021-2026

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM OPERASIONAL PEMBANGUNAN DI DALAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
1	Pendidikan	Pendidikan Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
2	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
3	Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Non Formal	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
4	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Angka kematian ibu	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
5	Kesehatan	Ibu bersalin		2 cakupan kepesertaan JKN	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
6	Kesehatan	Bayi baru lahir		3 Ketersediaan obat esensial (%)	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM OPERASIONAL PEMBANGUNAN DI DALAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
7	Kesehatan	Pelayanan kesehatan balita		4 Angka kematian bayi	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
8	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		5 Tingkat hunian ruamh sakit (Bed Ocupancy Rate)	RSUD
9	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif		6 Tercapainya Standard Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD	RSUD
10	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		7 Tercapainya Akreditasi Paripurna untuk RS (mempertahankan status akreditasi paripurna)	RSUD
11	Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
12	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus			PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
13	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan orang yang dengan gangguan jiwa (ODG) berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
14	Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
15	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV			PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
16	Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
17	Pekerjaan Umum	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
18	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/Kota	Program Pengembangan Perumahan	1 Persentase fasiltasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				2 Persentase ketersediaan rumah	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Trantibumlinmas	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1 Persentase gang-guan Trantibum yang dapat diselesaikan	PD Penanggung Jawab Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM OPERASIONAL PEMBANGUNAN DI DALAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
21	Trantibumlinmas	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	PD Penanggung Jawab Urusan Penanggulangan Bencana
22	Trantibumlinmas	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	PD Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
23	Trantibumlinmas	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	PD Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
24	Trantibumlinmas	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PD Penanggung Jawab Sub Urusan Pemadam Kebakaran
25	Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
26	Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
27	Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
28	Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
29	Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial

Pencapaian indikator target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bontang didukung oleh program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Adapun program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
							(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
M1				Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan			144.349.518.413		127.024.479.170		127.030.283.388		159.511.092.042		132.969.975.713		139.435.387.658		139.435.387.658		
T1				Tujuan 1.1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah, dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	n.a	144.349.518.413	75,00	127.024.479.170	79,00	127.030.283.388	82,00	159.511.092.042	85,00	132.969.975.713	89,00	139.435.387.658	89,00	139.435.387.658	
S1				Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	Tinggi (66,20)	136.084.300.711	B (67,41)	119.524.373.542	B (68,41)	121.365.305.388	BB (70,41)	123.249.774.482	BB (72,41)	127.272.051.802	BB (74,41)	133.694.585.269	BB (74,41)	133.694.585.269	
					Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (3,86)		Tinggi (3,87)		Tinggi (3,90)		Tinggi (4,00)		Tinggi (4,10)		Tinggi (4,20)				
					Opini BPK	Predikat	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				
5	01	02	Program Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persen	81,00	1.204.940.874	82,00	895.400.000	84,00	931.216.000	86,00	968.464.640	88,00	1.007.203.226	88,00	1.047.491.355	88,00	1.047.491.355	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perencanaan	
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	100,00	399.280.665	90,00	328.100.000	92,00	341.224.000	94,00	354.872.960	96,00	369.067.878	96,00	383.830.594	96,00	383.830.594		
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	Persen	73,33	996.932.874	75,00	3.017.500.000	77,78	3.077.850.000	78,57	3.139.407.000	80,80	3.202.195.140	80,80	3.266.239.043	80,80	3.266.239.043		
				Persentase keberlanjutan inovasi daerah	Persen	90,00		90,60		90,90		91,17		91,67		92,10		92,10			
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	143.346.200	100,00	198.822.558	100,00	218.704.814	100,00	218.704.814	100,00	240.575.295	100,00	240.575.295	100,00	240.575.295	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Statistik	
				Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	Persen	30,00	734.066.265	50,00	449.522.200	75,00	500.000.000	100,00	600.000.000	100,00	1.250.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	1.500.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kearsipan	
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	10,00	772.708.336	10,00	10.000.000	13,00	50.000.000	50,00	75.000.000	50,00	100.000.000	75,00	125.000.000	75,00	125.000.000		
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase daftar arsip dan SOP arsip yang disusun	Persen	-	-	-	-	20,00	50.000.000	20,00	75.000.000	20,00	100.000.000	20,00	125.000.000	20,00	125.000.000		
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	persen	37,90	24.783.333.282	100,00	6.175.153.702	100,00	6.236.905.239	100,00	6.299.274.291	100,00	6.425.259.777	100,00	6.553.764.973	100,00	6.553.764.973	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Keuangan	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik	Perangkat Daerah	7		10		15		18		25		30		30		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	Persen	4,19	1.170.676.860	100,00	2.929.151.751	100,00	2.958.443.269	100,00	2.988.027.701	100,00	3.047.788.255	100,00	3.108.744.020	100,00	3.108.744.020	
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD	Persen	4,06	3.393.014.314	100	2.686.610.844	100	2.713.476.952	100	2.740.611.722	100	2.795.423.956	100	2.851.332.436	100	2.851.332.436	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kinerja layanan kepegawaian	Persentase	n/a	2.993.327.363	100	3.240.125.000	100	3.090.125.000	100	3.151.927.500	100	4.500.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
				Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik	Persentase	n/a		95		96		97		98		99		99		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	Persentase	n/a	1.688.827.200	20	2.775.791.407	25	2.914.580.977	30	3.060.310.026	35	3.213.325.528	40	3.373.991.804	40	3.373.991.804	Perangkat Daerah Penanggung Jawab urusan Kepengawasan
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	Persen	67,00	687.205.000	70,00	725.000.000	73,00	739.500.000	75,00	754.290.000	78,00	829.719.000	80,00	995.662.800	80,00	995.662.800	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	Persen	100,00	478.826.300	100,00	535.900.000	100,00	546.618.000	100,00	557.550.360	100,00	613.305.396	100,00	735.966.475	100,00	735.966.475	
				Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	Persen	60,00		65,00		75,00		85,00		95,00		100,00		100,00		
2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	Persen	45,04	3.239.672.259	47,88	1.690.041.853	47,89	1.723.842.690	47,90	1.758.319.544	48,00	1.793.485.935	48,10	1.829.355.653	48,10	1.829.355.653	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	9,32	4.498.253.620	31,00	9.029.307.813	34,00	9.209.893.969	38,00	9.394.091.849	41,00	9.581.973.686	45,00	9.773.613.159	45,00	9.773.613.159	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	77,42		80,64		80,64		80,64		83,87		83,87		83,87		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat	36,12	288.961.799	46,51	196.967.098	62,02	216.663.808	77,52	216.663.808	85,27	238.330.189	85,27	238.330.189	85,27	238.330.189	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Persandian
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	Persen	B (85,00)	75.213.551.593	B (85,50)	67.893.823.316	B (86,20)	68.572.761.549	B (87,00)	69.258.489.165	A (88,31)	69.951.074.056	A (88,40)	74.148.138.500	A (88,40)	74.148.138.500	Sekretariat Daerah
				Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat daerah penanggung jawab		
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	94,00	5.304.130.640	95,00	6.836.480.000	96,00	6.973.209.600	97,00	7.112.673.792	98,00	7.254.927.268	99,00	7.400.025.813	99,00	7.400.025.813	Kecamatan Bontang Selatan
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	Persen	100,00	9.519.001	100,00	170.000.000	100,00	173.400.000	100,00	176.868.000	100,00	180.405.360	100,00	184.013.467	100,00	184.013.467	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	94,00	4.633.652.025	95,00	5.635.580.000	96,00	5.748.291.600	97,00	5.863.257.432	98,00	5.980.522.581	99,00	6.100.133.032	99,00	6.100.133.032	Kecamatan Bontang Utara
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	Persen	100,00	77.866.204	100,00	114.000.000	100,00	116.280.000	100,00	118.605.600	100,00	120.977.712	100,00	123.397.266	100,00	123.397.266	
7	01	07	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	94,00	2.264.071.372	95,00	3.802.946.000	96,00	3.879.004.920	97,00	3.956.585.018	98,00	4.035.716.719	99,00	4.116.431.053	99,00	4.116.431.053	Kecamatan Bontang Barat
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	Persen	100,00	152.771.199	100,00	83.150.000	100,00	84.813.000	100,00	86.509.260	100,00	88.239.445	100,00	90.004.234	100,00	90.004.234	
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	Persen	0,99	955.365.466	0,99	50.000.000	0,99	51.000.000	0,99	52.020.000	0,99	53.060.400	0,99	54.121.608	0,99	54.121.608	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	-	-	0,96	55.000.000	0,96	247.500.000	0,96	272.250.000	0,96	299.475.000	0,96	329.422.500	0,96	329.422.500	
				Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	-		0,71		0,72		0,73		0,74		0,75		0,75		
				Cakupan kepemilikan akta perceraian	Persen	-		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Sekretariat Daerah
				Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
				Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
S2				Jumlah Konflik	Kasus	9	8.265.217.702	8	7.500.105.628	8	5.664.978.000	7	36.261.317.560	7	5.697.923.911	6	5.740.802.389	6	5.740.802.389	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat daerah penanggung jawab		
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
			Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Keteriban Umum	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keteriban Umum	Persentase gangguan Tranribum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	725.114.901	100,00	2.496.000.000	100,00	1.393.000.000	100,00	7.421.000.000	100,00	1.449.000.000	100,00	1.478.000.000	100,00	1.478.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	75,00		75,00		80,00		80,00		90,00		90,00		90,00		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Tingkat penanganan gangguan Tranribum	Persen	100,00	1.278.905.060	100,00	181.100.000	100,00	184.722.000	100,00	188.416.440	100,00	192.184.769	100,00	196.028.464	100,00	196.028.464	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Tingkat penanganan gangguan Tranribum	Persen	100,00	1.539.852.497	100,00	367.200.000	100,00	374.544.000	100,00	382.034.880	100,00	389.675.578	100,00	397.469.089	100,00	397.469.089	Kecamatan Bontang Utara
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Tingkat penanganan gangguan Tranribum	Persen	100,00	846.606.766	100,00	105.600.000	100,00	107.712.000	100,00	109.866.240	100,00	112.063.565	100,00	114.304.836	100,00	114.304.836	Kecamatan Bontang Barat
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	36,00	625.815.466	36,10	542.000.000	50,00	545.000.000	62,50	545.000.000	87,50	545.000.000	100,00	545.000.000	100,00	545.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Umum
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	Persen	56,00	773.428.636	61,00	1.443.200.000	67,00	945.000.000	72,00	25.500.000.000	72,00	945.000.000	72,00	945.000.000	72,00	945.000.000	
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Persen	43,00	155.289.181	50,00	184.000.000	57,00	185.000.000	86,00	185.000.000	93,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	67,00	930.771.527	73,00	773.000.000	80,00	495.000.000	93,00	495.000.000	93,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik	Persen	100,00	765.237.790	100,00	783.350.249	100,00	785.000.000	100,00	785.000.000	100,00	785.000.000	100,00	785.000.000	100,00	785.000.000	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pengaduan Sengketa tanah yang ditangani	Persen	100,00	624.195.878	100,00	624.655.379	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanahan
M2			Misi 2: Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup				306.959.313.517		248.022.370.878		229.102.056.387		241.566.367.106		324.349.375.413		362.687.392.501		362.687.392.501	
T2			Tujuan 2.1 : Terwujudnya pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)	Indeks	64,63	258.647.541.450	66,34	213.551.915.251	68,02	198.687.144.017	69,69	206.804.185.437	71,78	287.652.448.259	73,45	329.370.930.251	73,45	329.370.930.251	

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat daerah penanggung jawab		
							(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
S3				Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	64,47	258.647.541.450	67,35	213.551.915.251	70,16	198.687.144.017	72,98	206.804.185.437	76,61	287.652.448.259	79,41	329.370.930.251	79,41	329.370.930.251	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	Persen	13,50	12.525.801.450	26,99	10.944.529.141	40,49	3.500.000.000	72,06	5.110.000.000	97,30	3.250.000.000	100,00	1.071.875.000	100,00	1.071.875.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	1,00	4.501.065.311	6,00	6.989.613.485	16,00	1.000.000.000	25,00	1.000.000.000	34,00	1.000.000.000	43,00	1.000.000.000	43,00	1.000.000.000		
				Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	1,00		8,50		20,50	3.403.000.000	33,50	2.603.000.000	45,50	2.403.000.000	57,50	2.403.000.000	57,50	2.403.000.000		
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persen	2,71	1.824.256.841	2,67	1.515.000.000	2,63	1.000.000.000	2,59	1.000.000.000	2,55	1.000.000.000	2,53	1.000.000.000	2,53	1.000.000.000		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	Persen	76,00	36.945.429.618	87,00	19.457.000.000	87,00	28.300.000.000	87,00	17.000.000.000	87,00	35.850.000.000	90,00	34.812.696.532	90,00	34.812.696.532	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase kapasitas aliran sungai	Persen	91,52		91,52		91,52		93,02		93,02		93,02					
				Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	Persen	80,67		82,90		85,13		87,36		89,59		91,82					
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	81,18	12.793.184.716	82,19	8.848.502.536	83,12	15.700.000.000	83,99	10.000.000.000	84,80	11.000.000.000	85,54	11.000.000.000	85,54	11.000.000.000		
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	94,96	8.077.215.149	95,50	4.066.707.392	96,00	4.007.051.969	96,50	4.300.000.000	97,00	4.350.000.000	97,50	4.500.000.000	97,50	4.500.000.000		
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Persen	98,00	17.795.634.844	99,00	13.962.000.000	99,00	15.919.000.000	99,00	17.494.000.000	100,00	17.039.000.000	100,00	17.879.000.000	100,00	17.879.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Persen	46,00	890.721.264	51,00	795.000.000	56,00	400.000.000	62,00	500.000.000	69,00	600.000.000	76,00	600.000.000	76,00	600.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	91,52	13.868.476.435	92,02	4.840.000.000	92,52	21.611.603.909	93,02	26.578.251.685	93,52	37.352.474.638	94,00	44.045.000.000	94,00	44.045.000.000		
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	89,99	37.329.161.876	90,00	42.398.752.536	90,01	45.386.002.536	90,02	47.386.002.536	90,03	67.386.002.536	90,04	90.386.002.536	90,04	90.386.002.536		
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	Persen	92,79		92,80		92,21		92,82		92,83		92,84					
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase sempadan sungai yang tertata	Persen	-	-	-	-	12,46	1.000.000.000	15,46	3.000.000.000	18,46	3.000.000.000	21,46	3.000.000.000	21,46	3.000.000.000		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	persen	91,96	36.651.531.641	92,38	17.865.600.000	92,80	10.866.485.491	93,22	11.953.134.040	93,64	13.148.447.444	94,06	14.054.149.444	94,06	14.054.149.444	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	91,84		92,14		92,86	2.992.719.775	93,58	3.281.991.753	94,30	3.600.190.928	95,02	3.950.210.021	95,02	3.950.210.021	
				Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	persen	48,00		54,00		60,00	300.000.000	66,00	300.000.000	72,00	300.000.000	78,00	300.000.000	78,00	300.000.000	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	Persen	100,00	1.289.398.638	100,00	891.597.841	100,00	2.368.000.000	100,00	2.415.360.000	100,00	2.463.667.000	100,00	2.512.940.000	100,00	2.512.940.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	Persen	100,00	145.304.692	100,00	330.000.000	100,00	442.400.000	100,00	496.815.000	100,00	536.560.200	100,00	579.485.000	100,00	579.485.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Sosial
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi	persen	60,00	15.719.100.139	63,00	5.755.594.150	66,00	7.229.610.237	69,00	8.229.610.237	72,00	8.729.610.237	75,00	9.229.610.237	75,00	9.229.610.237	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan pemenuhan standar fasilitas pelayaran	persen	50,00	110.091.259	-	-	54,00	121.602.000	56,00	121.602.000	58,00	121.602.000	60,00	121.602.000	60,00	121.602.000	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	80,00	1.782.302.857	100,00	3.193.363.634	100,00	4.998.168.100	100,00	4.934.418.186	100,00	4.921.893.277	100,00	4.917.610.834	100,00	4.917.610.834	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Pemadam Kebakaran
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	Persen	52,46	56.398.864.720	59,02	71.698.654.536	63,93	28.141.500.000	70,49	39.100.000.000	77,05	69.600.000.000	81,97	82.007.748.648	81,97	82.007.748.648	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	S4		Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,79	19.500.811.798	65,33	15.306.498.000	65,87	15.383.055.232	66,41	16.024.226.336	66,95	16.130.516.863	67,49	16.297.607.013	67,49	16.297.607.013	
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	Persen	4,00	2.410.908	4,00	15.500.000	4,00	60.000.000	4,00	135.000.000	4,00	60.000.000	4,00	60.000.000	4,00	60.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	67,00	825.181.171	83,00	531.569.871	87,00	1.195.000.000	91,00	1.495.000.000	96,00	1.225.000.000	100,00	1.275.000.000	100,00	1.275.000.000	
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	Persen	100,00	215.367.196	100,00	120.000.000	100,00	68.000.000	100,00	68.000.000	100,00	68.000.000	100,00	68.000.000	100,00	68.000.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persen	100,00	6.229.545	100,00	1.200.000	100,00	1.500.000	100,00	1.700.000	100,00	2.000.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan kasus	Persen	100,00	40.955.000	100,00	65.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	Persen	20,00	100.709.519	20,00	153.000.000	40,00	385.000.000	60,00	385.000.000	80,00	385.000.000	100,00	385.000.000	100,00	385.000.000	
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	25,00	142.556.364	75,00	300.375.000	100,00	0	100,00	-	100,00	180.000.000	100,00	-	100,00	0	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Kehati	Persen	28,00	59.281.835	32,00	12.302.505.129	64,00	12.548.555.232	76,00	12.799.526.336	85,00	13.055.516.863	100,00	13.332.407.013	100,00	13.332.407.013	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan pengelola taman kota	persen	90,00	17.412.460.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	88,30	695.660.000	88,60	1.817.348.000	88,90	1.000.000.000	89,20	1.000.000.000	89,60	1.000.000.000	90,00	1.000.000.000	90,00	1.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	-	-	-	-	10,00	50.000.000	30,00	65.000.000	40,00	80.000.000	50,00	100.000.000	50,00	100.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanahan
T3			Tujuan 2.2 : Terwujudnya inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini	Persen	0,405	48.311.772.067	0,33	34.470.455.627	0,3	30.414.912.370	0,3	34.762.181.669	0,3	36.696.927.153	0,3	33.316.462.250	0,3	33.316.462.250	
S5			Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	2,38	48.311.772.067	4,2	34.470.455.627	4,5	30.414.912.370	5,3	34.762.181.669	6,0	36.696.927.153	6,5	33.316.462.250	6,5	33.316.462.250	
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	Persen	100,00	8.930.307.147	100,00	7.688.157.334	100,00	5.000.000.000	100,00	7.500.000.000	100,00	8.000.000.000	100,00	8.600.000.000	100,00	8.600.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	Persen	37,00	448.634.000	41,00	156.962.500	51,00	172.658.750	64,00	189.924.625	80,00	208.917.088	100,00	229.808.796	100,00	229.808.796	
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perizinan	Persen	-	-	26,79	215.320.000	32,14	225.320.000	37,50	320.320.000	42,86	415.320.000	48,21	510.320.000	48,21	510.320.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/(outcome))	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	Persen	-	-	-	-	100,00	910.000.000	100,00	920.000.000	100,00	930.000.000	100,00	940.000.000	100,00	940.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Industri
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	Persen	-	-	-	-	0,50	428.500.000	0,50	428.500.000	0,50	428.500.000	0,50	428.500.000	0,50	428.500.000	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SINAS	persen	0,90	144.689.603	-	-	2,28	100.000.000	2,97	100.000.000	3,67	100.000.000	4,36	100.000.000	4,36	100.000.000	
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	Persen	-	-	-	-	1,00	150.000.000	2,00	175.000.000	3,00	200.000.000	4,00	250.000.000	4,00	250.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	Persen	1,4	624.007.356	-	-	1,00	250.000.000	1,00	262.500.000	1,00	275.625.000	1,00	289.406.250	1,00	289.406.250	
				Pesentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk	Persen	-	-	-	-	1,18		1,52		1,87		2,21		2,21		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	0,83	55.266.000	2,21	350.000.000	3,58	275.000.000	4,96	302.500.000	6,34	332.750.000	7,71	366.025.000	7,71	366.025.000	
2	17	08	Program Pengembangan Umkm	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	66,88	600.000.000	0,50	1.200.000.000	0,50	920.000.000	0,50	1.031.000.000	0,50	1.046.410.000	0,50	1.046.410.000	0,50	1.046.410.000	
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	Persen	1,43	15.012.162	-	-	41,43	16.513.478	61,43	19.981.188	81,43	21.979.306	100,00	24.177.237	100,00	24.177.237	
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	Persen	55,13	51.047.415	64,10	21.092.208	73,08	21.906.588	82,05	26.506.971	91,03	29.157.669	100,00	32.073.435	100,00	32.073.435	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Persen	38,71	10.405.000	40,00	10.000.000	47,14	11.445.500	54,29	13.849.055	61,43	15.233.961	70,00	16.757.357	70,00	16.757.357	
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase kapasitas SDM koperasi	Persen	38,46	540.355.450	-	-	62,82	148.583.600	75,00	179.786.156	87,18	197.764.772	100,00	217.541.249	100,00	217.541.249	
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Tingkat pertumbuhan penyaluran dan koperasi	Persen	-	-	-	-	7,50	20.000.000	7,50	24.200.000	7,50	26.620.000	7,50	29.282.000	7,50	29.282.000	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	Persen	50,00	825.066.897	60,00	2.333.715.200	75,00	9.000.000.000	80,00	5.000.000.000	85,00	1.800.000.000	90,00	1.890.000.000	90,00	1.890.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	Persen	-	-	0,30	150.000.000	0,40	700.000.000	0,50	900.000.000	0,60	900.000.000	0,70	1.000.000.000	0,70	1.000.000.000	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	213.027	206.670.000	236.349	300.000.000	353.514	600.000.000	388.660	2.100.000.000	427.320	2.100.000.000	469.826	2.100.000.000	469.826	2.100.000.000	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian budaya	Persen	100,00	1.532.110.000	100,00	5.665.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	4.000.000.000	100,00	5.000.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00	3.000.000.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/(outcome))	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	Persen	100,00	974.600.223	100,00	300.000.000	100,00	500.000.000	100,00	700.000.000	100,00	850.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	Persen	-	-	-	-	100,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum	unit	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	1	3.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	20.336	11.989.303.394	19.743,7	6.798.600.000	20.315,7	1.000.000.000	20.904,8	1.100.000.000	21.511	1.250.000.000	22.134,8	1.415.000.000	22.134,8	1.415.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.848	9.371.088.780	3.000	1.779.772.370	3.150	1.550.000.000	3.300	1.500.000.000	3.450	1.550.000.000	3.600	1.400.000.000	3.600	1.400.000.000	
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	Persen	25,00	1.725.505.218	22,00	619.380.000	26,00	150.000.000	29,00	200.000.000	33,00	250.000.000	37,00	300.000.000	37,00	300.000.000	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	Persen	100,00	908.274.093	100,00	361.541.984	100,00	350.000.000	100,00	385.000.000	100,00	423.500.000	100,00	465.850.000	100,00	465.850.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	Persen	40,00	2.303.665.049	40,00	1.508.874.000	60,00	1.384.317.700	80,00	1.463.533.585	100,00	1.546.710.264	100,00	1.400.000.000	100,00	1.400.000.000	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	Persen	100,00	2.236.638.931	100,00	1.035.000.000	100,00	200.000.000	100,00	700.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	Persen	100,00	820.103.650	100,00	504.736.698	100,00	600.000.000	100,00	650.000.000	100,00	700.000.000	100,00	770.000.000	100,00	770.000.000	
				Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	Persen	40,00		53,33		67,00		80,00		93,00		100,00				
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	Persen	100,00	92.178.894	100,00	99.678.894	100,00	150.000.000	100,00	165.000.000	100,00	181.500.000	100,00	199.650.000	100,00	199.650.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	4.100	331.482.623	4.150	330.000.000	4.250	350.000.000	4.375	360.500.000	4.525	371.315.000	4.680	382.454.450	4.680	382.454.450	
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	1	410.454.287	2	356.850.650	2	500.000.000	2	515.000.000	2	530.450.000	2	546.363.500	2	546.363.500	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	Nilai	86	136.915.159	88	327.566.401	88	400.000.000	89	412.000.000	90	424.360.000	91	437.090.800	91	437.090.800	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	Persentase	35,34	516.037.347	37,50	190.121.000	44,44	200.000.000	50,00	206.000.000	55,00	212.180.000	57,00	218.545.400	57,00	218.545.400	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanahan
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas APL yang diberikan izin penguasaan	Persen	-	-	50,00	106.593.881	60,00	110.000.000	75,00	110.000.000	90,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	0,00	699.342.251	0,00	570.642.748	50,00	600.000.000	75,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	Persen	10,00	106.593.881	-	-	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	Persen	100,00	1.706.017.257	100,00	1.490.849.759	100,00	1.520.666.754	100,00	1.551.080.089	100,00	1.628.634.094	100,00	1.661.206.776	100,00	1.661.206.776	Sekretariat Daerah
				Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
M3			Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia				264.804.328.226		202.971.233.357		235.205.531.889		247.870.855.901		270.944.106.202		283.819.125.209		283.819.125.209	
T4			Tujuan 3.1.1 :Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,02	264.804.328.226	81,00	202.971.233.357	81,00	235.205.531.889	81,05	247.870.855.901	81,29	270.944.106.202	81,83	283.819.125.209	81,83	283.819.125.209	
S6			Sasaran 3.1.1.1 : Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Angka	13,03	215.126.151.695	13,30	159.812.530.835	13,42,	189.247.016.889	13,54	200.237.722.901	13,66	222.322.561.402	13,78	234.233.570.009	13,78	234.233.570.009	
				Rata-rata lama sekolah	Angka	10,79		10,91		10,98		11,64		11,10		11,17		11,17		
				Usia harapan hidup	Angka	74,28		74,44		74,51		74,56		74,61		74,65		74,65		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD (Paket setara SD)	Persen	103,41	73.198.181.705	103,45	32.813.775.217	103,85	41.205.923.888	104,25	47.558.901.207	104,65	59.576.846.267	105,05	58.401.132.748	105,05	58.401.132.748	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
				APK SMP (Paket setara SMP)	Persen	102,26		102,66		103,06		103,46		103,86		104,26		104,26		
				APK PAUD	Persen	49.69		78.65		83.49		85.91		88.33		104.26		104.26		
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid	Rasio	522	-	522	300.000.000	517.6	1.200.000.000	513.2	2.400.000.000	508.8	1.980.000.000	504.4	1.800.000.000	504.4	1.800.000.000	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	-	-	-	-	20	41.000.000	20	51.000.000	20	61.000.000	20	71.000.000	20	71.000.000	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin	Persen	100	-	100,00	205.000.000	100,00	19.000.000	100,00	19.000.000	100,00	19.000.000	100,00	19.000.000	100,00	19.000.000	
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	Persen	100,00	48.474.327.717	100,00	39.818.326.925	100,00	40.614.693.464	100,00	41.426.987.333	100,00	42.255.527.079	100,00	43.100.637.621	100,00	43.100.637.621	Sekretariat Daerah
				Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka perpustakaan	orang	32.000	1.722.957.349	35.000	989.442.344	38.500	2.570.085.000	42.350	2.118.785.000	46.585	2.598.855.000	51.243	3.070.000.000	51.243	3.070.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	270	70.487.908.467	250	73.445.000.000	200	85.314.000.000	183	87.060.280.000	172	93.185.102.400	161	102.803.612.640	161	102.803.612.640	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
				Cakupan kepesertaan JKN	Persen	98,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/(outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat daerah penanggung jawab
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
				Ketersediaan obat esensial (%)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Angka kematian bayi	Rasio	12,00		11,00		11,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	Persen	30,00	629.536.008	100,00	350.000.000	100,00	490.000.000	100,00	539.000.000	100,00	592.900.000	100,00	652.190.000	100,00	652.190.000	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	Persen	100,00	2.284.302.974	100,00	650.000.000	100,00	313.500.000	100,00	344.300.000	100,00	378.730.000	100,00	416.603.000	100,00	416.603.000	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	Persen	100,00	328.965.609	35,00	400.100.000	40,00	760.000.000	45,00	825.000.000	50,00	907.500.000	55,00	998.250.000	55,00	998.250.000	
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	2,00	171.291.400	2,00	165.900.000	2,00	165.900.000	1,90	182.490.000	1,90	200.739.000	1,90	220.812.900	1,90	220.812.900	
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rasio Akseptor KB	Persen	70,00	3.127.200.882	70,00	60.725.000	70,50	66.797.500	71,00	73.477.250	71,50	80.824.975	72,00	88.907.473	72,00	88.907.473	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	Persen	51,00	195.892.055	70,00	223.000.000	75,00	1.000.000.000	77,00	1.020.000.000	79,00	1.040.400.000	80,00	1.061.208.000	80,00	1.061.208.000	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Nilai	86,4 (2019)		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00		90,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pangan	
				Ketersediaan Energi dan Protein	AKE=kkal/ AKP=gram	AKE= 2.400 kkal/kapita/h ari AKP = 63 gram/kapita/ hari	1.514.656.979	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapit a/hari	1.525.864.110	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapit a/hari	1.556.381.392	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapit a/hari	1.587.509.020	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapit a/hari	1.619.259.200	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapit a/hari	1.651.285.384	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapit a/hari		1.651.285.384
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	persen	100,00	20.590.565	100,00	74.934.449	100,00	150.000.000	100,00	165.000.000	100,00	181.500.000	100,00	199.650.000	100,00		199.650.000
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	persen	100,00	187.990.490	100,00	87.990.490	100,00	208.791.000	100,00	229.670.100	100,00	252.637.110	100,00	277.900.821	100,00		277.900.821
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	Persen	-	-	-	-	100,00	485.000.000	100,00	490.000.000	100,00	495.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	Persen	100,00	3.571.983.692	100,00	3.070.000.000	100,00	3.131.400.000	100,00	3.500.000.000	100,00	4.000.000.000	100,00	4.500.000.000	100,00	4.500.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlit yang berprestasi	Persen	24,00	7.788.312.002	29,06	4.435.000.000	51,82	8.503.700.000	46,67	9.000.000.000	70,87	11.000.000.000	29,06	12.215.000.000	29,06	12.215.000.000	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persen	100,00	26.656.820	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	121.000.000	100,00	133.100.000	100,00	146.410.000	100,00	146.410.000	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	100,00	486.062.399	100,00	277.030.000	100,00	304.733.000	100,00	335.206.300	100,00	368.726.930	100,00	405.599.623	100,00	405.599.623	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	Persen	15,00	132.099.074	20,00	202.940.000	40,00	223.234.000	60,00	245.557.400	80,00	270.113.140	100,00	297.124.454	100,00	297.124.454	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Predikat Kota Layak Anak (Pha)	Predikat	Nindya	112.403.306	Nindya	95.302.300	Nindya	109.597.645	Nindya	126.037.292	Utama	150.000.000	Utama	172.500.000	Utama	172.500.000	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persen	100,00	100.026.846	100,00	115.000.000	100,00	185.000.000	100,00	225.000.000	100,00	295.000.000	100,00	386.000.000	100,00	386.000.000	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan data gender dan anak terpadu	Persen	-	-	-	-	100,00	50.000.000	100,00	55.000.000	100,00	60.500.000	100,00	66.550.000	100,00	66.550.000	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	47,78	380.181.719	47,78	407.200.000	47,78	468.280.000	47,80	538.522.000	47,85	619.300.300	47,95	712.195.345	47,95	712.195.345	
				Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persen	0,02		0,37		0,41		0,45		0,50		0,55				
S7			Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,46	2.383.284.480	8,70	3.649.470.000	8,70	5.991.270.000	8,50	6.431.270.000	8,00	6.418.130.000	7,50	6.377.867.200	7,50	6.377.867.200	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Persen	70,00	38.122.980	77,00	621.270.000	79,50	671.270.000	81,50	721.270.000	83,00	771.270.000	85,00	821.270.000	85,00	821.270.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase implementasi kebijakan bidang ketenagakerjaan	persen	-	-	-	-	70,00	100.000.000	-	-	-	-	100,00	125.000.000	100,00	125.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase produktifitas tenaga kerja	Persen	-	-	0,37	710.000.000	0,55	2.150.000.000	0,70	2.493.000.000	0,90	2.386.860.000	1,10	2.581.597.200	1,10	2.581.597.200	
				Persentase pencari kerja yang dilatih	Persen	3,00	1.254.993.806	1,61		4,58		4,82		5,09		5,37				
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	18,58	158.947.516	19,40	47.000.000	20,00	350.000.000	20,50	400.000.000	21,00	400.000.000	22,00	450.000.000	22,00	450.000.000	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja setahun	Persen	10,53	286.118.642	7,09	221.200.000	6,21	260.000.000	5,32	317.000.000	4,43	360.000.000	3,55	400.000.000	3,55	400.000.000	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat daerah penanggung jawab	
						(Tahun 2021)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	Persen	10,00	645.101.536	20,00	2.050.000.000	40,00	2.460.000.000	60,00	2.500.000.000	80,00	2.500.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
				Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	Persen	5,00		22,00		44,00		66,00		88,00		100,00		100,00		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	Persen	0,83	-	2,21	-	3,58	-	4,96	-	6,34	-	7,71	-	7,71	-	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	Indeks	4,38	47.294.892.051	4,03	39.509.232.522	4,03	39.967.245.000	3,90	41.201.863.000	3,80	42.203.414.800	3,75	43.207.688.000	3,75	43.207.688.000	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persen	100,00	252.467.732	100,00	210.000.000	100,00	210.000.000	100,00	220.500.000	100,00	231.525.000	100,00	243.101.000	100,00	243.101.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen	100,00	156.157.931	100,00	2.659.462.000	100,00	2.712.651.240	100,00	2.766.904.265	100,00	2.822.242.350	100,00	2.878.687.197	100,00	2.878.687.197	
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00	316.273.665	100,00	534.000.000	100,00	589.120.000	100,00	661.581.500	100,00	714.508.000	100,00	771.668.500	100,00	771.668.500	
				Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK dan LAK yang aktif	Persen	100,00	508.893.105	100,00	755.000.000	100,00	478.125.000	100,00	540.281.500	100,00	588.906.800	100,00	636.019.500	100,00	636.019.500	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	Persen	100,00	17.504.006.167	100,00	15.708.630.822	100,00	15.900.000.000	100,00	16.300.000.000	100,00	16.700.000.000	100,00	17.100.000.000	100,00	17.100.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	Persen	100,00	18.521.805.881	100,00	15.025.092.500	100,00	15.500.000.000	100,00	16.100.000.000	100,00	16.400.000.000	100,00	16.800.000.000	100,00	16.800.000.000	Kecamatan Bontang Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	Persen	100,00	10.443.913.233	100,00	7.486.509.200	100,00	7.500.000.000	100,00	7.600.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.900.000.000	100,00	7.900.000.000	Kecamatan Bontang Barat

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Program mengacu pada pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mencerminkan sub-urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu program yang mencerminkan hasil (outcome). Pagu Indikatif merupakan kebutuhan rencana pendanaan yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Program-program yang telah dilengkapi dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kerangka pendanaan makro pembangunan daerah Tahun 2022 - 2026 tersaji dalam Tabel 7.1, sedangkan indikasi pendanaan seluruh program Perangkat Daerah dalam pembangunan jangka menengah Tahun 2022 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Uraian	Proyeksi						Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA DAERAH							
Belanja Operasi	1.246.201.978.224,00	1.098.090.952.000,00	1.118.500.000.000,00	1.177.127.972.450,00	1.181.903.639.000,00	1.228.977.916.800,00	2,87
Belanja Pegawai	554.347.074.388,00	531.355.434.304,00	542.000.000.000,00	563.000.000.000,00	584.590.000.000,00	602.127.700.000,00	3,18
Belanja Barang dan Jasa	628.334.060.757,00	551.485.517.696,00	560.000.000.000,00	573.127.972.450,00	577.813.639.000,00	606.850.216.800,00	2,43
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	63.520.843.079,00	15.000.000.000,00	16.000.000.000,00	40.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.500.000.000,00	26,11
Belanja Bantuan Sosial	-	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	62,50
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-				
Belanja Modal	282.619.332.806,00	250.936.337.366,00	254.447.734.000,00	262.000.000.000,00	325.960.000.000,00	398.522.500.000,00	19,59
Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	82.225.642.365,00	-	-	-	-	-	
Belanja Gedung dan Bangunan	54.440.033.479,00	-	-	-		-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.943.809.263,00	-	-	-	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.841.067.699,00	-	-	-	-	-	
Belanja Aset Lainnya	7.168.780.000,00	-	-	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	20.644.022.108,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,83
Belanja Tidak Terduga	20.644.022.108,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,83
Transfer	0	-	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	0	-	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	-	-	-	-	-	
JUMLAH	1.549.465.333.138,00	1.355.027.289.366,00	1.378.947.734.000,00	1.444.127.972.450,00	1.512.863.639.000,00	1.633.500.416.800,00	4,81

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
1			URUSAN WAJIB				845.282.752.970		745.115.732.158		753.819.416.126		778.542.276.912		881.742.167.297		950.085.103.868		950.085.103.868	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				232.526.388.391		197.298.442.934		211.931.468.282		221.507.664.636		241.689.547.868		251.146.996.444		251.146.996.444	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	159.143.583.049	100%	163.979.667.717	100%	169.465.544.394	100%	171.478.763.429	100%	180.052.701.601	100%	190.855.863.697	100%	190.855.863.697	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (Paket setara SD)	persen	103,41	73.198.181.705	103,45	32.813.775.217	103,85	41.205.923.888	104,25	47.558.901.207	104,65	59.576.846.267	105,05	58.401.132.748	105,05	58.401.132.748	
				APK SMP (Paket setara SMP)	persen	102,26		102,66		103,06		103,46		103,86		104,26		104,26		
				APK PAUD	persen	49.69		78.65		81.07		83.49		85.91		88.33		88.33		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	persen	-	-	-	-	20	41.000.000	20	51.000.000	20	61.000.000	20	71.000.000	20	71.000.000	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid	Rasio	522	-	522	300.000.000	517.6	1.200.000.000	513.2	2.400.000.000	508.8	1.980.000.000	504.4	1.800.000.000	504.4	1.800.000.000	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	persen	-	-	100%	205.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				307.470.491.517		268.659.531.232		281.225.550.544		283.824.714.790		290.836.824.352		304.320.748.185		304.320.748.185	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DINKES)	persen	100%	60.000.791.472	100%	57.314.531.232	100%	57.887.676.544	100%	58.466.553.310	100%	59.051.218.843	100%	62.594.291.973	100%	62.594.291.973	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (RSUD)	persen	100%	82.409.530.334	100%	130.165.200.000	100%	130.000.000.000	100%	130.000.000.000	100%	130.000.000.000	100%	130.000.000.000	100%	130.000.000.000	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	270	70.487.908.467	250	73.445.000.000	200	85.314.000.000	183	87.060.280.000	172	93.185.102.400	161	102.803.612.640	161	102.803.612.640	
				Cakupan kepesertaan JKN	persen	98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Ketersediaan obat esensial	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Angka kematian bayi	Rasio	12		11		11		10		10		10		10		
				Capaian SPM RSUD	persen	105 (69,07%)	85.959.837.439	114 (75%)	6.333.700.000	122 (80,2%)	6.460.374.000	129 (84,8)	6.589.581.480	136 (89,4%)	6.721.373.110	144 (94,7%)	6.855.800.572	144 (94,7%)	6.855.800.572	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
				Status akreditasi RSUD	Status	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
				Kinerja keuangan	Skor	18		19		20		21		22		23		23		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	persen	100%	2.284.302.974	100%	650.000.000	100%	313.500.000	100%	344.300.000	100%	378.730.000	100%	416.603.000	100%	416.603.000	
				Persentase tenaga Kesehatan berizin (RSUD)	persen	100%	5.369.619.214		1.000.000											
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	persen	30%	629.536.008	100%	350.000.000	100%	490.000.000	100%	539.000.000	100%	592.900.000	100%	652.190.000	100%	652.190.000	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	persen	100%	328.965.609	35%	400.100.000	40,00%	760.000.000	45%	825.000.000	50%	907.500.000	55%	998.250.000	55%	998.250.000	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				186.321.633.022		176.327.250.000		168.087.983.564		171.674.784.923		253.219.900.482		295.821.480.223		295.821.480.223	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	17.488.076.268	100%	21.784.015.000	100%	21.870.555.150	100%	22.089.260.702	100%	22.310.153.309	100%	23.648.762.507	100%	23.648.762.507	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	persen	76%	36.945.429.618	87%	19.457.000.000	87%	28.300.000.000	87%	17.000.000.000	87%	35.850.000.000	90%	34.812.696.532	90%	34.812.696.532	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase kapasitas aliran sungai	persen	66%	67%		68%		69%		70%		71%		71%				
			Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	persen	80,67%	82,90%		85,13%		87,36%		89,59%		91,82%		91,82%				
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	persen	81,18%	12.793.184.716	82,19%	8.848.502.536	83,12%	15.700.000.000	83,99%	10.000.000.000	84,80%	11.000.000.000	85,54%	11.000.000.000	85,54%	11.000.000.000	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	persen	54%	890.721.264	49%	795.000.000	44%	400.000.000	38%	500.000.000	31%	600.000.000	24%	600.000.000	24%	600.000.000	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	94,96%	8.077.215.149	95,50%	4.066.707.392	96,00%	4.007.051.969	96,50%	4.300.000.000	97,00%	4.350.000.000	97,50%	4.500.000.000	97,50%	4.500.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	persen	91,52%	13.868.476.435	92,02%	4.840.000.000	92,52%	21.611.603.909	93,02%	26.578.251.685	93,52%	37.352.474.638	94,00%	44.045.000.000	94,00%	44.045.000.000	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pemenuhan infrastruktur permukiman	persen	100%	1.796.719.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	persen	52,46%	56.398.864.720	59,02%	71.698.654.536	63,93%	28.141.500.000	70,49%	39.100.000.000	77,05%	69.600.000.000	81,97%	82.007.748.648	81,97%	82.007.748.648	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	persen	-	-	-	-	12,46	1.000.000.000	15,46	3.000.000.000	18,46	3.000.000.000	21,46	3.000.000.000	21,46	3.000.000.000	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	persen	89,99%	37.329.161.876	90%	42.398.752.536	90,01%	45.386.002.536	90,02%	47.386.002.536	90,03%	67.386.002.536	90,04%	90.386.002.536	90,04%	90.386.002.536	
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	persen	92,79%		92,80%		92,81%		92,82%		92,83%		92,84%		92,84%		
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	persen	70%	38.122.980	77%	621.270.000	79,50%	671.270.000	81,50%	721.270.000	83%	771.270.000	85%	821.270.000	85%	821.270.000	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	persen	88,30%	695.660.000	88,60%	1.817.348.000	88,90%	1.000.000.000	89,20%	1.000.000.000	89,60%	1.000.000.000	90,00%	1.000.000.000	90,00%	1.000.000.000	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				68.092.215.895		49.855.507.992		35.728.378.286		38.040.960.542		37.622.401.469		37.475.243.348		37.475.243.348	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	12.589.560.652	100%	12.540.765.366	100%	12.666.173.020	100%	12.792.834.750	100%	12.920.763.097	100%	13.696.008.883	100%	13.696.008.883	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	1%	4.501.065.311	6%	6.989.613.485	16%	1.000.000.000	25%	1.000.000.000	34%	1.000.000.000	43%	1.000.000.000	43%	1.000.000.000	
				Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	persen	1%		8,5%		20,5%	3.403.000.000	33,5%	2.603.000.000	45,5%	2.403.000.000	57,5%	2.403.000.000	57,5%	2.403.000.000	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	persen	13,5%	12.525.801.450	26,99%	10.944.529.141	40,49%	3.500.000.000	72,06%	5.110.000.000	97,30%	3.250.000.000	100%	1.071.875.000	100%	1.071.875.000	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	persen	2,71%	1.824.256.841	2,67%	1.515.000.000	2,63%	1.000.000.000	2,59%	1.000.000.000	2,55%	1.000.000.000	2,53%	1.000.000.000	2,53%	1.000.000.000	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	persen	91,96%	36.651.531.641	92,38%	17.865.600.000	92,80%	10.866.485.491	93,22%	11.953.134.040	93,64%	13.148.447.444	94,06%	14.054.149.444	94,06%	14.054.149.444	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	91,84%		92,14%		92,86%	2.992.719.775	93,58%	3.281.991.753	94,30%	3.600.190.928	95,02%	3.950.210.021	95,02%	3.950.210.021	
				Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	persen	48%		54%		60%	300.000.000	66%	300.000.000	72%	300.000.000	78%	300.000.000	78%	300.000.000	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			39.456.033.572		37.730.000.000		41.120.210.830		47.455.431.343		42.058.308.463		44.125.723.911		44.125.723.911	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	persen	100%	13.301.542.090	100%	11.234.000.000	100%	11.346.340.000	100%	11.459.803.400	100%	11.574.401.434	100%	12.268.865.520	100%	12.268.865.520	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	persen	100%	5.642.820.469	100%	5.108.402.159	100%	6.060.000.000	100%	6.120.600.000	100%	6.243.012.000	100%	6.617.592.720	100%	6.617.592.720	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (DPKP)	persen	100%	16.714.854.617	100%	14.806.636.366	100%	14.954.702.730	100%	15.104.249.757	100%	15.406.334.752	100%	16.330.714.837	100%	16.330.714.837	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Pemadaman Kebakaran
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100%	725.114.901	100%	2.496.000.000	100%	1.393.000.000	100%	7.421.000.000	100%	1.449.000.000	100%	1.478.000.000	100%	1.478.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	75%		75%		80%		80%		90%		90%				
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	persen	100%	1.289.398.638	100%	891.597.841	100%	2.368.000.000	100%	2.415.360.000	100%	2.463.667.000	100%	2.512.940.000	100%	2.512.940.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	80%	1.782.302.857	100%	3.193.363.634	100%	4.998.168.100	100%	4.934.418.186	100%	4.921.893.277	100%	4.917.610.834	100%	4.917.610.834	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Pemadaman Kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			11.415.990.573		15.245.000.000		15.725.824.620		16.038.720.679		16.315.184.663		17.194.911.757		17.194.911.757	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Sosial	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	10.545.786.553	100%	11.511.538.000	100%	11.626.653.380	100%	11.742.919.914	100%	11.860.349.113	100%	12.571.970.060	100%	12.571.970.060	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	persen	100%	252.467.732	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	220.500.000	100%	231.525.000	100%	243.101.000	100%	243.101.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	persen	100%	156.157.931	100%	2.659.462.000	100%	2.712.651.240	100%	2.766.904.265	100%	2.822.242.350	100%	2.878.687.197	100%	2.878.687.197	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100%	316.273.665	100%	534.000.000	100%	589.120.000	100%	661.581.500	100%	714.508.000	100%	771.668.500	100%	771.668.500	
				Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	persen	100%	145.304.692	100%	330.000.000	100%	442.400.000	100%	496.815.000	100%	536.560.200	100%	579.485.000	100%	579.485.000	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	persen	-	-	-	-	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.992.927.928		191.776.292.228		202.742.495.911		211.847.178.174		221.297.246.417		229.623.259.125		229.623.259.125	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				10.163.804.671		8.850.000.000		10.810.518.000		11.240.023.180		11.257.183.412		12.153.540.017		12.153.540.017	
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	8.463.744.707	100%	7.871.800.000	100%	7.950.518.000	100%	8.030.023.180	100%	8.110.323.412	100%	8.596.942.817	100%	8.596.942.817	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase implementasi kebijakan bidang ketenagakerjaan	persen	-	-	-	-	70%	100.000.000	-	-	-	-	100%	125.000.000	100%	125.000.000	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja	persen	-	-	0,37%	710.000.000	0,55%	2.150.000.000	0,7%	2.493.000.000	0,9%	2.386.860.000	1,1%	2.581.597.200	1,1%	2.581.597.200	
				Persentase pencari kerja yang dilatih	persen	3,00%	1.254.993.806	1,61%		4,58%		4,82%		5,09%		5,37%		5,37%		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	18,58%	158.947.516	19,40%	47.000.000	20%	350.000.000	21%	400.000.000	21%	400.000.000	22%	450.000.000	22%	450.000.000	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja setahun	persen	10,53%	286.118.642	7,09%	221.200.000	6,21%	260.000.000	5,32%	317.000.000	4,43%	360.000.000	3,55%	400.000.000	3,55%	400.000.000	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.184.744.058		8.550.375.000		8.868.276.372		9.128.029.036		9.442.373.475		10.179.426.513		10.179.426.513	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	7.973.970.714	100%	7.452.902.700	100%	7.527.431.727	100%	7.602.706.044	100%	7.678.733.105	100%	8.139.457.091	100%	8.139.457.091	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
			DAERAH KABUPATEN/KOTA																	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	47,78	380.181.719	47,78	407.200.000	47,78%	468.280.000	47,80%	538.522.000	4785%	619.300.300	47,95%	712.195.345	47,95%	712.195.345		
				Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	persen	0,0163		0,375		0,412		0,453		0,499		0,549					
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	persen	100%	486.062.399	100%	277.030.000	100%	304.733.000	100%	335.206.300	100%	368.726.930	100%	405.599.623	100%	405.599.623		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	persen	15%	132.099.074	20%	202.940.000	40%	223.234.000	60%	245.557.400	80%	270.113.140	100%	297.124.454	100%	297.124.454		
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak terpadu	persen	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	66.550.000		
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	112.403.306	Nindya	95.302.300	Nindya	109.597.645	Nindya	126.037.292	Utama	150.000.000	Utama	172.500.000	Utama	172.500.000		
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	100%	100.026.846	100%	115.000.000	100%	185.000.000	100%	225.000.000	100%	295.000.000	100%	386.000.000	100%	386.000.000		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				16.187.619.187		13.489.195.054		13.215.822.392		13.343.829.120		13.642.279.310		14.413.052.185		14.413.052.185	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pangan	
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	14.464.381.153	100%	11.800.406.005	100%	11.300.650.000	100%	11.361.650.000	100%	11.588.883.000	100%	12.284.215.980	100%	12.284.215.980	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pangan	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Nilai	86,4 (2019)	1.514.656.979	87	1.525.864.110	88	1.556.381.392	89	1.587.509.020	90	1.619.259.200	90	1.651.285.384	90	1.651.285.384		
				Ketersediaan Energi dan Protein	AKE=kkal/ AKP=gram	AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ a/hari		AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ a/hari		AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ a/hari		AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ a/hari		AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ a/hari		AKE= 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ a/hari					
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	persen	100%	20.590.565	100%	74.934.449	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	199.650.000		
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	persen	100%	187.990.490	100%	87.990.490	100%	208.791.000	100%	229.670.100	100%	252.637.110	100%	277.900.821	100%	277.900.821		
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.430.132.010		1.301.892.008		1.460.000.000		1.475.000.000		1.430.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan	persen	100%	624.195.878	100%	624.655.379	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah	persen	0%	699.342.251	25%	570.642.748	50%	600.000.000	75%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	persen	-	-	-	-	10%	50.000.000	30%	65.000.000	40%	80.000.000	50%	100.000.000	50%	100.000.000	
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	persen	-	-	50%	106.593.881	60%	110.000.000	75%	110.000.000	90%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase kesesuaian tataguna tanah	persen	10%	106.593.881	-	-	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			49.538.573.948		41.605.150.000		44.547.595.232		46.891.721.736		46.672.397.217		48.534.460.188		48.534.460.188	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	12.937.787.306	100%	14.154.000.000	100%	14.295.540.000	100%	14.438.495.400	100%	14.582.880.354	100%	15.457.853.175	100%	15.457.853.175	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	25%	142.556.364	75%	300.375.000	100%	-	100%	-	100%	180.000.000	100%	-	100%	-	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persen	67%	825.181.171	83%	531.569.871	87%	1.195.000.000	91%	1.495.000.000	96%	1.225.000.000	100%	1.275.000.000	100%	1.275.000.000	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	persen	28%	59.281.835	32%	12.302.505.129	64%	12.548.555.232	76%	12.799.526.336	85%	13.055.516.863	100%	13.332.407.013	100%	13.332.407.013	
2	11	04		Cakupan pengelola taman kota	persen	90%	17.412.460.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	persen	100%	6.229.545	100%	1.200.000	100%	1.500.000	100%	1.700.000	100%	2.000.000	100%	2.200.000	100%	2.200.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	persen	4%	2.410.908	4%	15.500.000	4%	60.000.000	4%	135.000.000	4%	60.000.000	4%	60.000.000	4%	60.000.000	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	persen	20%	100.709.519	20%	153.000.000	40%	385.000.000	60%	385.000.000	80%	385.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	persen	100%	215.367.196	100%	120.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan kasus	persen	100%	40.955.000	100%	65.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	100%	17.795.634.844	100%	13.962.000.000	100%	15.919.000.000	100%	17.494.000.000	100%	17.039.000.000	100%	17.879.000.000	100%	17.879.000.000	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.540.834.496		9.000.000.000		9.400.015.571		9.531.926.629		9.668.907.086		10.267.032.470		10.267.032.470	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100%	8.492.026.409	100%	8.845.000.000	100%	8.933.450.000	100%	9.022.784.500	100%	9.113.012.345	100%	9.659.793.086	100%	9.659.793.086	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	Rasio	0,99	955.365.466	0,99	50.000.000	0,99	51.000.000	0,99	52.020.000	0,99	53.060.400	0,99	54.121.608	0,99	54.121.608	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	-	-	0,96	55.000.000	0,96	247.500.000	0,96	272.250.000	0,96	299.475.000	0,96	329.422.500	0,96	329.422.500	
				Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	-		0,71		0,72		0,73		0,74		0,75				
				Cakupan kepemilikan akta perceraian	persen	-		96%		96%		96%		96%		96%				
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan inforamsi Adminduk	persen	100%	93.442.621	100%	40.000.000	100%	113.065.571	100%	124.372.129	100%	136.809.341	100%	150.490.276	100%	150.490.276	
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyampaian data profil kependudukan	persen	-	-	100%	10.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	73.205.000	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				508.893.105		755.000.000		478.125.000		540.281.500		588.906.800		636.019.500		636.019.500	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	persen	100%	508.893.105	100%	755.000.000	100%	478.125.000	100%	540.281.500	100%	588.906.800	100%	636.019.500	100%	636.019.500	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.494.384.337		449.625.000		1.232.697.500		1.275.967.250		1.321.963.975		1.370.928.373		1.370.928.373	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	2	171.291.400	2	165.900.000	2	165.900.000	1,9	182.490.000	1,9	200.739.000	1,9	220.812.900	1,9	220.812.900	Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	persen	70%	3.127.200.882	70%	60.725.000	70,5%	66.797.500	71,0%	73.477.250	71,5%	80.824.975	72%	88.907.473	72%	88.907.473	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	persen	51%	195.892.055	70%	223.000.000	75%	1.000.000.000	77%	1.020.000.000	79%	1.040.400.000	80%	1.061.208.000	80%	1.061.208.000	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				32.119.602.080		18.030.000.000		19.748.362.146		20.872.333.645		21.497.544.859		22.756.324.816		22.756.324.816	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	16.290.410.682	100%	12.274.405.850	100%	12.397.149.909	100%	12.521.121.408	100%	12.646.332.622	100%	13.405.112.579	100%	13.405.112.579	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi	persen	60%	15.719.100.139	63%	5.755.594.150	66%	7.229.610.237	69%	8.229.610.237	72%	8.729.610.237	75%	9.229.610.237	75%	9.229.610.237	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan pemenuhan standar fasilitas pelayaran	persen	50%	110.091.259	52%	-	54%	121.602.000	56%	121.602.000	58%	121.602.000	60%	121.602.000	60%	121.602.000	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.750.887.444		21.569.210.344		21.892.095.944		22.220.354.270		22.554.081.927		23.452.308.458		23.452.308.458	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	9.012.961.565	100%	10.849.860.678	100%	10.958.359.285	100%	11.067.942.878	100%	11.178.622.306	100%	11.849.339.645	100%	11.849.339.645	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	persen	45,04%	3.239.672.259	47,88%	1.690.041.853	47,89%	1.723.842.690	47,90%	1.758.319.544	48,00%	1.793.485.935	48,10%	1.829.355.653	48,10%	1.829.355.653	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	9,32%	4.498.253.620	31,00%	9.029.307.813	34,00%	9.209.893.969	38,00%	9.394.091.849	41,00%	9.581.973.686	45,00%	9.773.613.159	45,00%	9.773.613.159	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	77,42%		80,64%		80,64%		83,87%		83,87%						
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		19,00		22.220.820.537		21.151.555.166		21.106.136.754		21.462.437.833		21.708.176.316		22.322.822.523		22.322.822.523	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKUKMP)	persen	100%	20.948.734.510	100%	19.570.462.958	100%	19.692.687.588	100%	19.864.614.463	100%	20.038.260.608	100%	20.590.556.245	100%	20.590.556.245	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Koperasi,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	persen	1,43%	15.012.162	-	-	41,43%	16.513.478	61,43%	19.981.188	81,43%	21.979.306	100,00%	24.177.237	100,00%	24.177.237	Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	persen	55,13%	51.047.415	64,10%	21.092.208	73,08%	21.906.588	82,05%	26.506.971	91,03%	29.157.669	100,00%	32.073.435	100,00%	32.073.435	
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	persen	38,71%	10.405.000	40,00%	10.000.000	47,14%	11.445.500	54,29%	13.849.055	61,43%	15.233.961	70,00%	16.757.357	70,00%	16.757.357	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	persen	38,46%	540.355.450	-	-	62,82%	148.583.600	75,00%	179.786.156	87,18%	197.764.772	100,00%	217.541.249	100,00%	217.541.249	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tingkat pertumbuhan penyaluran dan koperasi	persen	-	-	-	-	7,50%	20.000.000	7,50%	24.200.000	7,50%	26.620.000	7,50%	29.282.000	7,50%	29.282.000	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	persen	0,83%	55.266.000	2,21%	350.000.000	3,58%	275.000.000	4,96%	302.500.000	6,34%	332.750.000	7,71%	366.025.000	7,71%	366.025.000	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	persen	66,88%	600.000.000	0,50%	1.200.000.000	0,50%	920.000.000	0,50%	1.031.000.000	0,50%	1.046.410.000	0,50%	1.046.410.000	0,50%	1.046.410.000	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				12.431.759.466		11.400.000.000		11.870.666.568		12.024.373.234		12.180.666.967		12.855.809.735		12.855.809.735	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	10.774.542.301	100%	10.020.461.949	100%	10.120.666.568	100%	10.221.873.234	100%	10.324.091.967	100%	10.943.537.485	100%	10.943.537.485	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp	4.100.000	331.482.623	4.150.000	330.000.000	4.250.000	350.000.000	4.375.000	360.500.000	4.525.000	371.315.000	4.680.000	382.454.450	4.680.000	382.454.450	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	1	410.454.287	2	356.850.650	2	500.000.000	2	515.000.000	2	530.450.000	2	546.363.500	2	546.363.500	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	Nilai	86,30	136.915.159	87,50	327.566.401	88,31	400.000.000	89,30	412.000.000	90,30	424.360.000	91,30	437.090.800	91,30	437.090.800	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	Persen	35,34	516.037.347	37,50	190.121.000	44,44	200.000.000	50,00	206.000.000	55,00	212.180.000	57,00	218.545.400	57,00	218.545.400	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	Persen	100%	262.327.749	100%	175.000.000	100%	300.000.000	100%	309.000.000	100%	318.270.000	100%	327.818.100	100%	327.818.100	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				23.636.295.822		19.563.500.000		23.823.185.000		24.819.865.850		27.453.954.509		29.921.515.779		29.921.515.779	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	persen	100%	12.249.343.308	100%	11.958.500.000	100%	12.078.085.000	100%	12.198.865.850	100%	12.320.854.509	100%	13.060.105.779	100%	13.060.105.779	Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
			DAERAH KABUPATEN/KOTA																	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	persen	100%	3.571.983.692	100%	3.070.000.000	100%	3.131.400.000	100%	3.500.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.500.000.000	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlit yang berprestasi	persen	24%	7.788.312.002	29,06	4.435.000.000	51,82	8.503.700.000	46,67	9.000.000.000	70,87	11.000.000.000	29,06	12.215.000.000	29,06	12.215.000.000	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	persen	100%	26.656.820	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	146.410.000	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				143.346.200		198.822.558		218.704.814		218.704.814		240.575.295		240.575.295		240.575.295	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Statistik
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100%	143.346.200	100%	198.822.558	100%	218.704.814	100%	218.704.814	100%	240.575.295	100%	240.575.295	100%	240.575.295	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Statistik
				Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				288.961.799		196.967.098		216.663.808		216.663.808		238.330.189		238.330.189		238.330.189	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Persandian
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat	36,12	288.961.799	46,51	196.967.098	62,02	216.663.808	77,52	216.663.808	85,27	238.330.189	85,27	238.330.189	85,27	238.330.189	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Persandian
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.506.710.223		5.965.000.000		2.350.000.000		5.300.000.000		8.850.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	persen	100%	1.532.110.000	100%	5.665.000.000	100%	1.450.000.000	100%	4.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	persen	100%	974.600.223	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	850.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	persen	-	-	-	-	100%	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dibangun	unit	-	-	-	-	-	-	0	600.000.000	1	3.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				12.338.783.944		9.240.477.800		10.903.630.811		10.535.666.269		11.099.905.081		12.081.113.086		12.081.113.086	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	10.607.811.595	100%	8.251.035.456	100%	8.333.545.811	100%	8.416.881.269	100%	8.501.050.081	100%	9.011.113.086	100%	9.011.113.086	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpustakaan	Orang	32.000 org	1.722.957.349	35.000 Org	989.442.344	38.500 Org	2.570.085.000	42.350 Org	2.118.785.000	46.585 Org	2.598.855.000	51.243 Org	3.070.000.000	51.243 Org	3.070.000.000	
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penambahan koleksi budaya etnis nusantara	koleksi	1	8.015.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1.506.774.601		459.522.200		600.000.000		750.000.000		1.450.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kearsipan	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	persen	30%	734.066.265	50%	449.522.200	75%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	persen	10%	772.708.336	10%	10.000.000	13%	50.000.000	50%	75.000.000	50%	100.000.000	75%	125.000.000	75%	125.000.000	
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase daftar arsip dan SOP arsip yang disusun	persen	-	-	-	-	20%	50.000.000	20%	75.000.000	20%	100.000.000	20%	125.000.000	20%	125.000.000	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			41.471.164.548		25.601.738.980		25.865.796.450		27.049.778.210		25.255.072.352		25.088.535.046		25.088.535.046		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			23.285.827.392		9.197.752.370		2.700.000.000		2.800.000.000		3.050.000.000		3.115.000.000		3.115.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	20.336	11.989.303.394	19.743,7	6.798.600.000	20.315,7	1.000.000.000	20.904,8	1.100.000.000	21.511	1.250.000.000	22.134,8	1.415.000.000	22.134,8	1.415.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.848	9.371.088.780	3.000	1.779.772.370	3.150	1.550.000.000	3.300	1.500.000.000	3.450	1.550.000.000	3.600	1.400.000.000	3.600	1.400.000.000	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan	persen	33%	199.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	persen	25%	1.725.505.218	22%	619.380.000	26%	150.000.000	29%	200.000.000	33%	250.000.000	37%	300.000.000	37%	300.000.000	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.676.838.433		4.833.715.200		12.760.000.000		10.500.000.000		7.300.000.000		6.990.000.000		6.990.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pariwisata	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	persen	50%	825.066.897	60%	2.333.715.200	75%	9.000.000.000	80%	5.000.000.000	85%	1.800.000.000	90%	1.890.000.000	90%	1.890.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	Orang	213.027	206.670.000	236.349	300.000.000	353.514	600.000.000	388.660	2.100.000.000	427.320	2.100.000.000	469.826	2.100.000.000	469.826	2.100.000.000	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	persen	-	-	0,3	150.000.000	0,4	700.000.000	0,5	900.000.000	0,6	900.000.000	0,7	1.000.000.000	0,7	1.000.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
			MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	persen	10%	645.101.536	20%	2.050.000.000	40%	2.460.000.000	60%	2.500.000.000	80%	2.500.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	
				Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	persen	5%		22%		44%		66%		88%		100%		100%		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.360.860.617		3.509.831.576		2.684.317.700		3.363.533.585		3.851.710.264		3.135.500.000		3.135.500.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	persen	40%	2.303.665.049	40%	1.508.874.000	60%	1.384.317.700	80%	1.463.533.585	100%	1.546.710.264	100%	1.400.000.000	100%	1.400.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	persen	100%	2.236.638.931	100%	1.035.000.000	100%	200.000.000	100%	700.000.000	100%	1.000.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	persen	100%	820.103.650	100%	504.736.698	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	770.000.000	100%	770.000.000	
				Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	persen	40%		53,33%		67%		80%		93%		100%		100%		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	persen	100%	92.178.894	100%	99.678.894	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	199.650.000	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	persen	100%	908.274.093	100%	361.541.984	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	423.500.000	100%	465.850.000	100%	465.850.000	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.378.941.147		8.060.439.834		7.221.478.750		9.848.744.625		10.477.737.088		11.208.628.796		11.208.628.796	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	persen	-	-	26,79%	215.320.000	32,14%	225.320.000	37,50%	320.320.000	42,86%	415.320.000	48,21%	510.320.000	48,21%	510.320.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	persen	100%	8.930.307.147	100%	7.688.157.334	100%	5.000.000.000	100%	7.500.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	persen	-	-	-	-	100%	485.000.000	100%	490.000.000	100%	495.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	persen	-	-	-	-	0,50%	428.500.000	0,50%	428.500.000	0,50%	428.500.000	0,50%	428.500.000	0,50%	428.500.000	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	persen	37%	448.634.000	41%	156.962.500	51%	172.658.750	64%	189.924.625	80%	208.917.088	100%	229.808.796	100%	229.808.796	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	persen	-	-	-	-	100%	910.000.000	100%	920.000.000	100%	930.000.000	100%	940.000.000	100%	940.000.000	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				768.696.959		-		500.000.000		537.500.000		575.625.000		639.406.250		639.406.250	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perindustrian
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	persen	1,4%	624.007.356	-	-	1%	250.000.000	1%	262.500.000	1%	275.625.000	1%	289.406.250	1%	289.406.250	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perindustrian
				Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	persen	0,48%		-	-	1,18%		1,52%		1,87%		2,21%		2,21%		
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	persen	-	-	-	-	1%	150.000.000	2%	175.000.000	3%	200.000.000	4%	250.000.000	4%	250.000.000	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	persen	0,9	144.689.603	-	-	2,28	100.000.000	2,97	100.000.000	3,67	100.000.000	4,36	100.000.000	4,36	100.000.000	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				199.022.095.675		177.883.171.000		180.075.094.477		182.297.199.024		184.834.833.707		193.197.090.847		193.197.090.847	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				125.393.896.567		109.203.000.000		110.708.121.767		112.236.556.587		113.835.235.229		118.909.982.896		118.909.982.896	Sekretariat Daerah
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	persen	B (85,00)	75.213.551.593	B (85,50)	67.893.823.316	B (86,20)	68.572.761.549	B (87,00)	69.258.489.165	A (88,31)	69.951.074.056	A (88,40)	74.148.138.500	A (88,40)	74.148.138.500	Sekretariat Daerah
				Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	persen	100%	48.474.327.717	100%	39.818.326.925	100%	40.614.693.464	100%	41.426.987.333	100%	42.255.527.079	100%	43.100.637.621	100%	43.100.637.621	
				Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	persen	100%	1.706.017.257	100%	1.490.849.759	100%	1.520.666.754	100%	1.551.080.089	100%	1.628.634.094	100%	1.661.206.776	100%	1.661.206.776	
				Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
4	02		SEKRETARIAT DPRD				73.628.199.108		68.680.171.000		69.366.972.710		70.060.642.437		70.999.598.478		74.287.107.951		74.287.107.951	Sekretariat DPRD
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	50.119.622.508	100%	45.314.852.250	100%	45.768.000.773	100%	46.225.680.780	100%	46.687.937.588	100%	49.489.213.843	100%	49.489.213.843	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran	persen	100%	23.508.576.600	100%	23.365.318.750	100%	23.598.971.938	100%	23.834.961.657	100%	24.311.660.890	100%	24.797.894.108	100%	24.797.894.108	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
				Cakupan layanan tugas fungsi legislasi	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan	persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				89.922.884.192		72.200.000.000		73.107.077.273		73.968.126.879		76.485.208.043		80.625.835.163		80.625.835.163	
5	01		PERENCANAAN				11.855.796.334		11.982.500.000		12.139.030.000		12.298.593.500		12.461.279.563		13.181.430.915		13.181.430.915	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Perencanaan
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	10.251.574.795	100%	10.759.000.000	100%	10.866.590.000	100%	10.975.255.900	100%	11.085.008.459	100%	11.750.108.967	100%	11.750.108.967	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Perencanaan
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	81%	1.204.940.874	82%	895.400.000	84%	931.216.000	86%	968.464.640	88%	1.007.203.226	88%	1.047.491.355	88%	1.047.491.355	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	persen	100%	399.280.665	90%	328.100.000	92%	341.224.000	94%	354.872.960	96%	369.067.878	96%	383.830.594	96%	383.830.594	
5	02		KEUANGAN				60.917.727.371		40.500.000.000		41.094.566.867		41.419.055.179		42.100.585.803		44.135.882.071		44.135.882.071	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Keuangan
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (BPKAD)	persen	100%	16.881.190.407	100%	14.395.694.547	100%	14.539.651.492	100%	14.685.048.007	100%	14.831.898.487	100%	15.721.812.397	100%	15.721.812.397	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Keuangan
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Bapenda)	persen	100%	14.689.512.508	100%	14.135.037.925	100%	14.417.738.684	100%	14.706.093.457	100%	15.000.215.326	100%	15.900.228.246	100%	15.900.228.246	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	persen	100%	24.783.333.282	100%	6.175.153.702	100%	6.236.905.239	100%	6.299.274.291	100%	6.425.259.777	100%	6.553.764.973	100%	6.553.764.973	
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik	Perangkat Daerah	7		10		15		18		25		30		30,00		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	persen	100%	1.170.676.860	100%	2.929.151.751	100%	2.958.443.269	100%	2.988.027.701	100%	3.047.788.255	100%	3.108.744.020	100%	3.108.744.020	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD	persen	100%	3.393.014.314	100	2.864.962.075	100	2.941.828.183	100	2.740.611.722	100	2.795.423.956	100	2.851.332.436	100	2.851.332.436	
5	03		KEPEGAWAIAN				14.463.600.413		13.924.208.593		13.881.049.429		14.050.761.173		15.507.822.010		16.668.291.331		16.668.291.331	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Kepegawaian
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	11.470.273.050	100%	10.684.083.593	100%	10.790.924.429	100%	10.898.833.673	100%	11.007.822.010	100%	11.668.291.331	100%	11.668.291.331	Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
			DAERAH KABUPATEN/KOTA																	Program Kepegawaian
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kinerja Layanan Kepegawaian	Persentase	n/a	2.993.327.363	100	3.240.125.000	100	3.090.125.000	100	3.151.927.500	100	4.500.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik	Persentase	n/a		95		96		97		98		99		99		
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.688.827.200		2.775.791.407		2.914.580.977		3.060.310.026		3.213.325.528		3.373.991.804		3.373.991.804		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan kompetensi mimal 20 JP per tahun	Persentase	n/a	1.688.827.200	20	2.775.791.407	25	2.914.580.977	30	3.060.310.026	35	3.213.325.528	40	3.373.991.804	40	3.373.991.804	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pendidikan dan Pelatihan
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			996.932.874		3.017.500.000		3.077.850.000		3.139.407.000		3.202.195.140		3.266.239.043		3.266.239.043	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Penelitian dan Pengembangan	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	persen	73,33	996.932.874	75%	3.017.500.000	77,78%	3.077.850.000	78,57%	3.139.407.000	80,80%	3.202.195.140	80,80%	3.266.239.043	80,8	3.266.239.043	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Penelitian dan Pengembangan
				Persentase keberlanjutan inovasi daerah	persen	90%		90,60%		90,90%		91,17%		91,67%		92,10%		92,10%		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.172.465.399		10.000.000.000		10.586.118.000		11.011.840.360		11.313.024.396		12.193.829.275		12.193.829.275		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			10.172.465.399		10.000.000.000		10.586.118.000		11.011.840.360		11.313.024.396		12.193.829.275		12.193.829.275	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pengawasan	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	9.006.434.099	100%	8.739.100.000	100%	9.300.000.000	100%	9.700.000.000	100%	9.870.000.000	100%	10.462.200.000	100%	10.462.200.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pengawasan
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	persen	67%	687.205.000	70	725.000.000	73	739.500.000	75	754.290.000	78	829.719.000	80	995.662.800	80	995.662.800	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	persen	100%	478.826.300	100%	535.900.000	100%	546.618.000	100%	557.550.360	100%	613.305.396	100%	735.966.475	100%	735.966.475	
				Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	persen	60%		65		75		85		95		100%		100%		
7			UNSUR KEWILAYAHAN			128.384.481.238		120.670.355.000		121.741.735.763		123.846.572.892		125.764.986.787		131.022.697.475		131.022.697.475		
7	01		KECAMATAN			128.384.481.238		120.670.355.000		121.741.735.763		123.846.572.892		125.764.986.787		131.022.697.475		131.022.697.475	KECAMATAN	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	23.658.680.461	100%	22.708.774.178	100%	22.935.861.920	100%	23.165.220.539	100%	23.396.872.744	100%	24.800.685.109	100%	24.800.685.109	KECAMATAN BONTANG SELATAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	94%	5.304.130.640	95%	6.836.480.000	96%	6.973.209.600	97%	7.112.673.792	98%	7.254.927.268	99%	7.400.025.813	99%	7.400.025.813	
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	persen	94%		95%		96%		97%		98%		99%		99%		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	persen	100%	17.504.006.167	100%	15.708.630.822	100%	15.900.000.000	100%	16.300.000.000	100%	16.700.000.000	100%	17.100.000.000	100%	17.100.000.000	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	persen	100%	1.278.905.060	100%	181.100.000	100%	184.722.000	100%	188.416.440	100%	192.184.769	100%	196.028.464	100%	196.028.464	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	persen	100%	9.519.001	100%	170.000.000	100%	173.400.000	100%	176.868.000	100%	180.405.360	100%	184.013.467	100%	184.013.467	KECAMATAN BONTANG UTARA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	25.404.037.274	100%	24.391.507.500	100%	24.029.574.075	100%	24.269.869.816	100%	24.512.568.514	100%	25.983.322.625	100%	25.983.322.625	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	94%	4.633.652.025	95%	5.635.580.000	96%	5.748.291.600	97%	5.863.257.432	98%	5.980.522.581	99%	6.100.133.032	99%	6.100.133.032	
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	persen	94%		95%		96%		97%		98%		99%		99%		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	persen	100%	18.521.805.881	100%	15.025.092.500	100%	15.500.000.000	100%	16.100.000.000	100%	16.400.000.000	100%	16.800.000.000	100%	16.800.000.000	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	persen	100%	1.539.852.497	100%	367.200.000	100%	374.544.000	100%	382.034.880	100%	389.675.578	100%	397.469.089	100%	397.469.089	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	persen	100%	77.866.204	100%	114.000.000	100%	116.280.000	100%	118.605.600	100%	120.977.712	100%	123.397.266	100%	123.397.266	KECAMATAN BONTANG BARAT
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	16.744.663.458	100%	18.053.784.800	100%	18.234.322.648	100%	18.416.665.874	100%	18.600.832.533	100%	19.716.882.485	100%	19.716.882.485	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	94%	2.264.071.372	95%	3.802.946.000	96%	3.879.004.920	97%	3.956.585.018	98%	4.035.716.719	99%	4.116.431.053	99%	4.116.431.053	
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	persen	94%		95%		96%		97%		98%		99%		99%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Baseline		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	persen	100%	10.443.913.233	100%	7.486.509.200	100%	7.500.000.000	100%	7.600.000.000	100%	7.800.000.000	100%	7.900.000.000	100%	7.900.000.000	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Tranitibum	persen	100%	846.606.766	100%	105.600.000	100%	107.712.000	100%	109.866.240	100%	112.063.565	100%	114.304.836	100%	114.304.836	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	persen	100%	152.771.199	100%	83.150.000	100%	84.813.000	100%	86.509.260	100%	88.239.445	100%	90.004.234	100%	90.004.234	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				11.216.561.188		11.780.000.000		11.010.000.000		35.565.000.000		11.171.100.000		11.664.066.000		11.664.066.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Umum
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				11.216.561.188		11.780.000.000		11.010.000.000		35.565.000.000		11.171.100.000		11.664.066.000		11.664.066.000	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	7.966.018.588	100%	8.054.449.751	100%	8.055.000.000	100%	8.055.000.000	100%	8.216.100.000	100%	8.709.066.000	100%	8.709.066.000	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	persen	36%	625.815.466	36%	542.000.000	50%	545.000.000	63%	545.000.000	88%	545.000.000	100%	545.000.000	100%	545.000.000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Umum
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	persen	56%	773.428.636	61%	1.443.200.000	67%	945.000.000	72%	25.500.000.000	72%	945.000.000	72%	945.000.000	72	945.000.000	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	persen	43%	155.289.181	50%	184.000.000	57%	185.000.000	86%	185.000.000	93%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen	67%	930.771.527	73%	773.000.000	80%	495.000.000	93%	495.000.000	93%	495.000.000	100%	495.000.000	100%	495.000.000	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik	persen	100%	765.237.790	100%	783.350.249	100%	785.000.000	100%	785.000.000	100%	785.000.000	100%	785.000.000	100%	785.000.000	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan diukur dengan spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8.1.1 Indikator Makro pembangunan

Indikator makro pembangunan Kota Bontang menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bontang yang bersifat makro. Indikator kinerja makro menggambarkan keberhasilan pemerintahan secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pemba. Target indikator Makro Pembangunan Kota Bontang tahun 2022-2026 dicantumkan pada tabel 8.1 berikut:

Tabel 8. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bontang Tahun 2022- 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,02	81,00	81,00	81,00	81,29	81,83
2	Angka Kemiskinan	Angka	4,38	4,03	4,03	3,90	3,80	3,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,46	8,70	8,70	8,50	8,00	7,20
4	Pertumbuhan Ekonomi Migas	Persen	-2,76	-1,44	-0,75	1,20	1,50	2,00
5	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	312,15	321,50	329,54	338,60	348,76	360,09
6	Indeks Gini	Indeks	0,405	0,330	0,300	0,300	0,300	0,300

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator tujuan daerah (*impact*) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator sasaran. Target IKU Kota Bontang tahun 2021-2026 ditunjukkan pada tabeli 8.2 berikut ini.

Tabel 8. 2 Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bontang
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	N/A	75	79	82	85	89
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (66,20)	B (67,41)	BB (68,41)	BB (70,41)	BB (72,41)	BB (74,41)
3	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (3,8607)	Tinggi (3,87)	Tinggi (3,90)	Tinggi (4,00)	Tinggi (4,10)	Tinggi (4,20)
4	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Jumlah konflik	Kasus	9	8	8	7	7	6
6	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)	Indeks	64,63	66,34	68,02	69,69	71,78	73,4
8	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	64,47	67,35	70,16	72,98	76,61	79,41
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,79	65,33	65,87	66,41	66,95	67,49
10	Indeks Gini	Indeks	0,405	0,330	0,300	0,300	0,300	0,300
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	2,38	4,20	4,50	5,30	6,00	6,5
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,02	81,00	81,00	81,00	81,29	81,83
13	Angka harapan lama sekolah	Angka	13,03	13,30	13,42	13,54	13,66	13,78
14	Rata-rata lama sekolah	Angka	10,79	10,91	10,98	11,64	11,10	11,17
15	Usia harapan hidup	Angka	74,28	74,44	74,51	74,56	74,61	74,65
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,46	8,70	8,70	8,50	8,00	7,2
17	Angka Kemiskinan	Persen	4,38	4,03	4,03	3,90	3,80	3,75

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKK) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bontang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kenerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2022-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan PDRB dengan MIGAS	persen	-2,76	-1,44	-0,75	1,20	1,50	2,00	2,00
2	Laju Inflasi	persen	0,86	3,03	2,70	2,58	2,49	2,41	2,41
3	Nilai PDRB perkapita dengan MIGAS	juta rp.	312,15	321,50	329,54	338,60	348,76	360,09	360,09

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Nilai PDRB perkapita non MIGAS	juta rp.	178,19	181,75	187,66	194,23	200,05	206,56	206,56
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,02	81,00	81,00	81,00	81,29	81,83	81,83
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,46	8,70	8,70	8,50	8,00	7,20	7,20
7	Angka Kemiskinan	Angka	4,38	4,03	4,03	3,90	3,80	3,75	3,75
8	Indeks Gini	Indeks	0,405	0,330	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
9	Prosentase kriminalitas yang tertangani	persen	99,33	99,40	99,45	99,55	99,65	99,75	99,75
10	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	persen	15,62	16,04	16,01	15,98	15,85	15,53	15,53
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	86,40	87,00	88,00	88,00	89,00	90,00	90,00
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pendidikan								
1.1	Angka melek huruf	persen	99,36	99,44	99,52	99,60	99,68	99,76	99,76
1.2	Angka partisipasi kasar								
	SD/MI/Paket A (%)	persen	103,41	103,45	103,85	104,25	104,65	105,05	105,05
	SMP/MTs/Paket B (%)	persen	102,26	102,66	103,06	103,46	103,86	104,26	104,26
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan								
	SD/MI/Paket A	persen	1,72	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82	1,82
	SMP/MTs/Paket B	persen	1,67	1,73	1,80	1,86	1,93	2,00	2,00
1.4	Angka Partisipasi Murni								
	SD/MI/Paket A	persen	93,02	93,42	93,81	94,21	94,60	95,00	95,00
	SMP/MTs/Paket B	persen	80,27	81,22	82,16	83,11	84,05	85,00	85,00
2	Kesehatan								
2.1	Persentase balita gizi buruk	persen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ketenagakerjaan								
3.1	Rasio penduduk yang bekerja	rasio	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
3.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	69,24	69,88	70,48	71,36	71,96	72,24	72,24
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah grup kesenian/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	2,00	2,06	20,11	2,16	2,22	2,38	2,38
1.2	Jumlah gedung/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	0,27	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah gedung olahraga/10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	0,27	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan dasar:								
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	rasio	28,20	28,20	29,66	31,12	32,58	34,04	35,50
	Rasio guru/murid	rasio	522,00	522,00	517,60	513,20	508,80	504,40	500,00
	Rasio guru/murid per kelas rata- rata	rasio	49,2	52,20	51,76	51,32	50,88	50,44	50,00
1.2	Fasilitas Pendidikan:								
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	91,80	91,80	92,94	94,08	95,22	96,36	97,50
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	persen	84,85	84,85	87,38	89,91	92,44	94,97	97,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	kondisi bangunan baik								
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	persen	49,69	78,65	81,07	83,49	85,91	88,33	90,75
1.4	Angka Putus Sekolah:								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0	0	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan:								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	persen	99,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	82,18	93,88	94,50	95,13	95,76	96,38	97,00
1.7	APK SD (Paket setara SD)	persen	103,41	103,45	103,85	104,25	104,65	105,05	105,05
	APK SMP (Paket setara SMP)	persen	102,26	102,66	103,06	103,46	103,86	104,26	104,26
1.8	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	persen	-	100	100	100	100	100	100
2	Kesehatan								
2.1	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per- satuan penduduk	Rasio	1:7.549	1:30.464	1:16.000	1:16.000	1:16.000	1:16.000	1:16.000
2.2	Cakupan Kepesertaan BPJS	Persen	98,00	99,00	100	100	100	100	100
2.3	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.4	terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	Persen	90	95	100	100	100	100	100
2.5	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	FKTP	6	6	6	6	6	6	6
2.6	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	orang	30	75	100,00	125	150	150	150
2.7	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	orang	15	20	25	30	35	40	40
2.8	Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	RS	5	5	5	6	6	6	6
2.9	Prevalensi balita gizi kurang	persen	5,37	7,36	7	7	6	6	6
2.10	Prevalensi Baduta Stunting	persen	20,37	19,73	18	18	17	17	17
2.11	Prevalensi balita Gizi kurus	persen	10,56	12,27	13	12	11	10	10
2.12	Angka Kematian ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	270	250	200	183	172	161	161

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.13	Angka Kematian Bayi	Rasio / 1.000 Kelahiran Hidup	12/15,94	11	11	10	10	10	10
2.14	Cakupan kepesertaan JKN	persen	98	100	100	100	100	100	100
2.15	Ketersediaan obat esensial (%)	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.16	SPM RSUD	Persen	105 (69,07%)	114 (75%)	122 (80,2%)	129 (84,8%)	136 (89,4%)	144 (94,7%)	144 (94,7%)
2.17	Status Akreditasi RSUD	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2.18	Kinerja Keuangan RSUD	Skor	18	19	20	21	22	23	23
2.19	Persentase tenaga Kesehatan berizin	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.20	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	Persen	30	100	100	100	100	100	100
2.22	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS	Persen	100	35	40	45	50	55	55
2.23	Angka kesembuhan TB	Rasio	0,90/68	92	93	94	95	95	92
2.24	Prevalensi HIV	persen	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
2.25	IR DBD	Rasio/100 ribu Pdd.	148,46/2 45,6	250	230	210	200	200	200
2.26	Prevalensi Hipertensi	persen	25,00	25	25	25	25	25	25
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase Penduduk Berakses Bersanitasi	%	94,96	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	97,50
3.2	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	0,11	101,80	98,84	97,12	95,80	92,45	92,45
3.3	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	Km	195,34	195,34	195,34	195,34	195,34	195,34	195,34
3.4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Meter)	Meter	12.765	13.765	14.765	15.765	16.765	17.765	17.765
3.5	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Km	2,75	2,71	2,68	2,63	2,59	2,56	2,56
3.6	Persentase Panjang drainase dalam kondisi baik	persen	91,42	92,02	92,52	93,02	93,52	94,00	94,00
3.7	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	rasio	0,12	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,37
3.8	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	Persen	76	87	87	87	87	90	90
	Persentase kapasitas aliran sungai	persen	66	67	68	69	70	71	71
	Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	persen	80,67	82,90	85,13	87,36	89,59	91,82	91,82
3.9	Persentase penduduk berakses air minum layak	persen	81,18	82,19	83,12	83,99	84,80	85,54	85,54
3.10	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS- 3R/TPS	persen	54	49	44	38	31	24	24
3.11	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	persen	91,52	92,02	92,52	93,02	93,52	94,00	94,00
3.12	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	persen	52,46	59,02	63,93	70,49	77,05	81,97	81,97
3.13	Persentase Penataan Sempadan sungai	persen	0	0	12,46	15,46	18,46	21,46	21,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.14	Persentase jalan dalam kondisi mantap	persen	89,99	90	90,01	90,02	90,03	90,04	90,04
	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	persen	92,79	92,80	92,81	92,82	92,83	92,84	92,84
3.15	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	persen	70	77	79,50	81,50	83	85	85
3.16	Persentase kesesuaian tata ruang	persen	88,30	88,60	88,90	89,20	89,60	90,00	90,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman								
4.1	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	rumah tangga	24.146	24.646	25.246	25.996	26.496	27.246	27.246
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	persen	87,48	88,98	90,48	91,99	93,49	95,00	95,00
4.3	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	%	2,71	2,67	2,63	2,59	2,55	2,53	2,53
4.4	Persentase Rumah layak Huni	persen	96,64	96,94	97,24	97,54	97,84	98,14	98,14
4.5	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	1	6	16	25	34	43	43
	Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	persen	1	8,5	20,5	33,5	45,5	57,5	57,5
4.6	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	persen	13,5	26,99	40,49	72,06	97,30	100	100
4.7	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	persen	2,71	2,67	2,63	2,59	2,55	2,53	2,53
4.8	Luas kawasan permukiman kumuh (Hektar)	hektar	68,19	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	20,00
4.9	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	persen	91,96	92,38	92,80	93,22	93,64	94,06	94,06
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	91,84	92,14	92,86	93,58	94,30	95,02	95,02
	Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	persen	48	54	60	66	72	78	78
5	Perhubungan								
5.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	49.411	60.457	88.853	100.624	138.625	163.987	163.987
5.2	Rasio Ijin Trayek	rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	angkutan	45	67	98	150	200	300	300
5.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	8	8	8	8	8	9	9
5.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	23,73	24,73	25,73	26,73	27,73	28,73	28,73
5.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	menit	30	30	30	30	25	25	25
5.7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.8	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.9	Persentase meningkatnya keselamatan pelayaran kapal	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	angkutan penyebrangan								
6	Komunikasi dan Informatika								
6.1	Web site milik pemerintah daerah	website	60	65	70	75	80	85	85
6.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	92,91	93,91	95,41	96,91	98,41	99,91	99,91
6.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	77,00	81,60	86,20	90,80	95,40	100,00	100,00
6.4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	persen	45,04	47,88	47,89	47,90	48,00	48,10	48,10
6.5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	9,32	31,00	34,00	38,00	41,00	45,00	45,00
6.6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	77,42	80,64	80,64	80,64	83,87	83,87	83,87
7	Lingkungan Hidup								
7.1	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara)	titik	121	128	130	132	134	136	136
7.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3	Penegakan hukum lingkungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	25	75	100	100	100	100	100
7.5	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persen	67	83	87	91	96	100	100
7.6	Cakupan pengelolaan Kehati	persen	28	32	64	76	85	100	100
7.7	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	persen	100	100	100	100	100	100	100
7.8	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	persen	4	4	4	4	4	4	4
7.9	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	persen	20	20	40	60	80	100	100
7.10	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	persen	100	100	100	100	100	100	100
7.11	Cakupan penanganan kasus	persen	100	100	100	100	100	100	100
7.12	Persentase pengelolaan sampah	persen	98	99	99	99	100	100	100
8	Kependudukan dan Catatan Sipil								
8.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
8.2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	-	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	-	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75
	Cakupan kepemilikan akta perceraian	persen	-	96	96	96	96	96	96

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.3	Kepemilikan KTP (%)	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
8.4	Cakupan pengelolaan inforamsi Admindak	persen	100	100	100	100	100	100	100
8.5	Persentase penyampaian data profil kependudukan	persen	100	100	100	100	100	100	100
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	47,78	47,78	47,78	47,80	47,85	48,00	48,00
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	persen	0,0163	0,375	0,412	0,453	0,499	0,549	0,549
9.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	5,36	5,41	5,44	5,49	5,57	5,67	5,67
9.3	Rasio KDRT	rasio	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
9.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	33,10	33,70	34,30	34,90	35,50	36,10	36,10
9.5	perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.6	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	persen	N/a	20	40	60	80	100	100
9.7	Cakupan data gender dan anak terpadu	persen	100	100	100	100	100	100	100
9.8	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
9.9	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
10.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90
10.2	Rasio akseptor KB	persen	70,00	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,00
10.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	71,75	73,20	74,65	76,10	77,55	79,00	79,00
10.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,74	1,87	1,90	2,50	2,10	2,00	2,00
10.5	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,30	2,10	2,00	2,00	1,99	1,99	1,99
10.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	15,61	14,98	14,34	13,71	13,07	12,44	12,44
10.7	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	persen	51	70	75	77	79	80	80
11	Sosial								
11.1	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	sarana	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00
11.2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	persen	102,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	126,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
11.5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100
11.6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	(PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial								
	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	persen	100	100	100	100	100	100	100
11.7	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	persen	100	100	100	100	100	100	100
11.8	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	persen	-	-	100	100	100	100	100
12	Tenaga Kerja								
12.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	angka	10,53	7,09	6,21	5,32	4,43	3,55	3,55
12.2	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	18,58	19,40	20,00	20,50	21,00	22,00	22,00
12.3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	kasus	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	3,00	1,61	4,58	4,82	5,09	5,37	5,37
	Persentase produktifitas tenaga kerja	persen	N/a	100	100	100	100	100	100
12.5	Persetase implementasi kebijakan bidang ketenagakerjaan	persen	N/a	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
13	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
13.1	Persentase koperasi aktif	Persen	94,87	94,87	96,15	96,15	97,44	97,44	97,44
13.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	unit	8.710	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
13.3	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	persen	1,43	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74
13.4	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	persen	55,13	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
13.5	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	persen	32,86	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
13.5	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	unit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13.6	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	66,88	10,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	persen	1,65	2	2	2	2	2	2
13.7	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persen	0	0,34	0,34	0,34	0,34	52,01	52,01
13.8	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	persen	0,83	1,38	1,38	1,38	1,38	1,72	1,72
13.9	Persentase kapasitas kelembagaan koperasi	persen	38,46	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
13.10	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persen	14,51	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
14	Penanaman Modal								
14.1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	investor	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00	115,00	115,00
14.2	Jumlah investor berskala nasional PMA	investor	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	17,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	juta Rp	1.740.462	1.724.004	1.810.205	1.900.715	1.995.751	2.095.538	2.095.538
14.4	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	4.100,00	4.150,00	4.250,00	4.375,00	4.525,00	4.680,00	4.680,00
14.5	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	1	2	2	2	2	2	2
14.6	Nilai IKM	Nilai	86,30	87,50	88,31	89,30	90,30	91,30	91,30
14.7	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	Persen	35,34	37,50	44,44	50,00	55,00	57,00	57,00
14.8	Persentase ketersediaan data perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14.4	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	000 \$	104.816	250.351	275.386	302.295	333.217	366.539	366.539
15	Kebudayaan								
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	7,00	10,00	18,00	20,00	25,00	40,00	40,00
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
15.4	Persentase pelestarian budaya	persen	100	100	100	100	100	100	100
15.5	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	persen	N/a	100	100	100	100	100	100
15.6	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	persen	N/a	100	100	100	100	100	100
15.7	Jumlah museum	unit	-	-	-	1	1	1	1
16	Kepemudaan dan Olahraga								
16.1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	56,00	60,00	65,00	69,00	74,00	79,00	79,00
16.2	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	Klub	222	222	222	225	228	231	231
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	12	16	20	28	36	44	44
16.4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	10	15	24	33	42	51	51
16.5	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	persen	100	100	100	100	100	100	100
16.6	Persentase atlet yang berprestasi	persen	24	29,06	51,82	46,67	70,87	29,06	29,06
16.7	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	persen	100	100	100	100	100	100	100
17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
17.1	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	persen	43	50	57	86	93	100	100
17.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	kegiatan	355,00	59,00	242,00	355,00	355,00	355,00	355,00
18	Ketahanan Pangan								
18.1	Regulasi ketahanan pangan	regulasi	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18.2	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Nilai	86,4 (2019)	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	90,00
	Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	Persen	% AKE = 123,87% , % AKP = 193,17%	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18.3	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	persen	100		100	100	100	100	100
19	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
19.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
19.2	Persentase LKK dan LAK yang aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
19.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
19.4	Jumlah LPM	kelompok	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
19.5	LPM Berprestasi (%)	Persen	-	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
19.6	PKK aktif (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
19.7	Posyandu aktif (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
19.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	2,2	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50
20	Kearsipan								
20.1	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	Persen	30.00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	47	47	48	48	49	50	50
20.3	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	persen	10	10	13	50	50	75	75
20.4	Daftar arsip dan SOP arsip	persen	-	20	20	20	20	20	20
21	Perpustakaan								
21.1	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	unit	239	239	239	239	239	239	239
21.2	Jumlah pemustaka perpustakaan	pemustaka a	32.000 org dan 25 perpustakaan	35.000 Org dan 27 perpustakaan	38.500 Org dan 32 perpustakaan	42.350 Org dan 37 perpustakaan	46.585 Org dan 42 perpustakaan	51.243 Org dan 47 perpustakaan	51.243 Org dan 47 perpustakaan
21.3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	28.940	29.940	31.940	34.940	42.440	52.440	52.440
21.4	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	149.653	149.653	149.853	150.353	151.053	152.053	152.053
22	Pariwisata								
22.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	213027	236.349	353.514	388.660	427.320	469.826	469.826
22.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	Juta Rp.	326.879	357.366	379.932	402.498	425.064	447.630	447.630
22.3	Persentase PAD sektor Pariwisata	persen	2,39	2,51	2,63	2,77	2,90	3,05	3,05
22.4	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	persen	N/a	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
22.5	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	persen	10%	20	40	60	80	100	100
22.6	Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	persen	5	22	44	66	88	100	100
23	Kelautan dan Perikanan								
23.1	Produksi perikanan								
23.1.1	Produksi perikanan tangkap	Ton	20.336	19.743,70	20.315,70	20.904,80	21.511,00	22.134,80	22.134,80
23.1.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.848	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3450	3.600,00	3.600,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
23.4	Konsumsi ikan	kg	54,49	57,49	60,49	63,49	66,49	69,49	69,49
	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	persen	25	22	26	29	33	37	37
24	Perdagangan								
24.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	persen	3,31	3,41	3,50	3,60	3,70	3,80	3,80
24.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa MIGAS	persen	5,67	6,04	6,40	6,77	7,13	7,50	7,50
24.3	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	juta \$	2,10	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
24.4	Persentase perusahaan yang terdaftar	persen	21,43	26,79	32,14	37,50	42,86	48,21	48,21
24.5	Persentase eksportir yang aktif menggunakan SKA	persen	100	100	100	100	100	100	100
24.6	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	persen	100	100	100	100	100	100	100
24.7	Persentase pembinaan terhadap pengelola pasar	persen	16		17	18	20	21	21
25	Perindustrian								
25.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	persen	79,60	69,59	69,57	69,40	68,25	68,17	68,17
25.2	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	persen	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25.3	Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	persen	0,48	0,83	1,18	1,52	1,87	2,21	2,21
25.4	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	persen	0,35	0,80	1	2	3	4	4
25.5	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	persen			0,28	0,55	0,83	1,11	1,11
26	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
26.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	100	100	100	100	100	100	100
26.2	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	100	100	100	100	100
26.3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100
26.4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	75	75	80	80	90	90	90
26.5	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	persen		100	100	100	100	100	100
26.6	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	80	100	100	100	100	100	100
27	Pertanahan								
27.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	persen	50,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
27.2	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan	persen	100	100	100	100	100	100	100
27.3	Persentase penyelesaian masalah	persen	0,00	25	50	75	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	ganti rugi dan santunan tanah								
27.4	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	persen	0,00	0,00	10	30	40	50	50
27.5	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	persen	0,00	50	60	75	90	100	100
27.6	Persentase kesesuaian Pentagunaan tanah	persen	60	63	67	69	70	72	72
28	Statistik								
28.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
29	Persandian								
29.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	19,35	25,81	32,26	48,39	83,87	100,00	100,00
29.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
29.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	899.901	949.901	985.401	1.035.401	1.065.401	1.085.401	1.085.401
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	1.564.991	1.634.991	1.664.991	1.694.991	1.724.991	1.754.991	1.754.991
3	Produktivitas total daerah		63,49	63,81	64,45	65,54	66,66	67,79	67,79
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,0023	0,0023	0,0022	0,0022	0,0022	0,0020	0,00
2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang	27.026	28.026	29.026	30.026	31.026	32.026	32.026
3	Kesesuaian Tata Ruang	persen	88,30	88,60	88,90	89,20	89,60	90,00	90,00
4	Luas wilayah industri	ha	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
5	Luas wilayah banjir	ha	924,15	790,46	656,76	523,07	389,37	255,68	255,68
6	Jenis dan jumlah bank dan cabang	unit	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
7	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	30	30	30	33	35	40	40
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	50,00	53,43	53,53	53,63	53,73	53,80	53,80
5.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	86,91	86,24	86,34	86,44	86,54	86,64	86,64
5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	indeks	46,09	47,10	49,21	51,32	53,43	55,54	55,54
6	Komunikasi dan Informatika								
6.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	92,91	93,27	93,63	93,99	94,35	94,70	94,70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.2	Proporsi individu yang mengakses internet	%	77,00	79,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Angka kriminalitas	angka	152,60	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Jumlah demo	kali	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
3	Lama proses perijinan	hari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
2	Rasio ketergantungan	rasio	43,24	42,04	40,74	39,54	38,44	37,14	37,14

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota. Penyusunannya dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Bontang, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bontang untuk periode 5 (lima) tahun. penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2029, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJM Nasional. Selain itu, RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 memuat arah Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam program-program pembangunan, serta gambaran kerangka pendanaannya. Secara keseluruhan seluruh tahapan penyusunan RPJMD mengacu pada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya

- tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
- 3) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Bontang yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang);
- 4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- 5) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan

keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- 6) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 7) Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan, indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bapelitbang Kota Bontang serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- 8) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Bontang yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang);
- 9) Penyusunan RKPD Kota Bontang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
- 10) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Bontang merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 11) Terhadap Perangkat Daerah baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program baru yang ditindaklanjuti dengan penambahan kegiatan dan sub kegiatan di Renstra perangkat daerah terkait, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 12) Peraturan daerah tentang RPJMD ini dipublikasikan oleh kepala daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama secara HARMONI di antara pemerintah, dunia usaha,

akademisi, dan masyarakat dengan semangat untuk membangun Kota Bontang Menjadi

Kota yang “Lebih Hebat” dan “Beradab”. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh melalui budaya kerja kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan seluruh potensi pembangunan untuk Bontang yang berkelanjutan, berkualitas dan Sejahtera.

WALI KOTA BONTANG



BASRI RASE